

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

---



**PENGAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL GUNA TERWUJUDNYA  
KETAHANAN NASIONAL**

**OLEH :**

**KOMBES POL. HARRIES BUDIHARTO, SIK, MSI**

**KOMBES POL. NRP. 68100293**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN ( PPRA ) LXI  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI  
TAHUN 2020**

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

## **KATA PENGANTAR**

Assalammualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Angkatan LXI telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (TASKAP) dengan judul : **“Pengamanan Objek Vital Nasional guna terwujudnya Ketahanan Nasional”**.

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA LXI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXI di Lemhannas RI tahun 2020. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Marsda TNI BEBAS IRIANTO, S.H. dan Tim Pengujii Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan kami agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

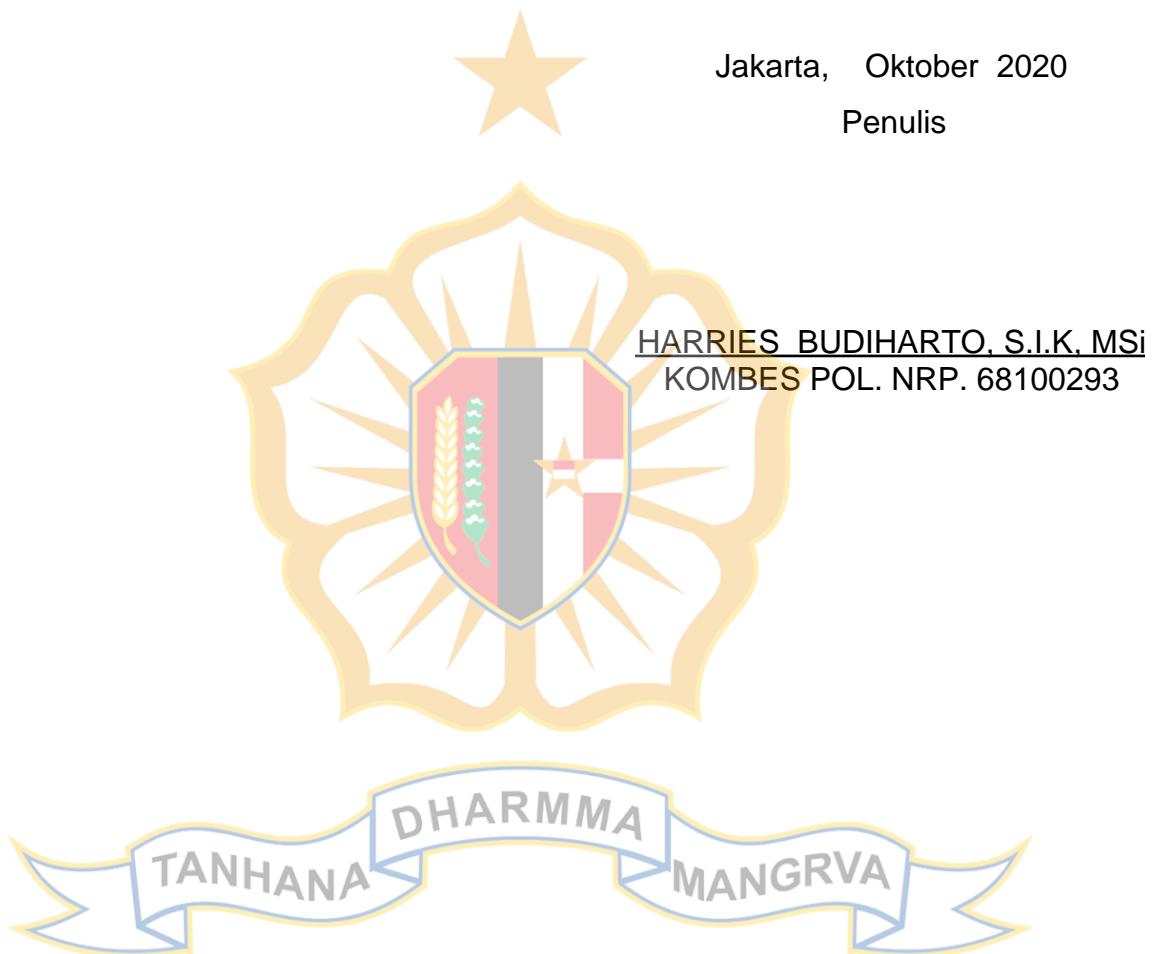
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, Oktober 2020

Penulis

HARRIES BUDIHARTO, S.I.K, MSI  
KOMBES POL. NRP. 68100293



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harries Budiharto, S.I.K, M.Si  
Pangkat : Komisaris Besar Polisi  
Jabatan : Analis Kebijakan Madya Bidang Pengamanan Objek Vital  
Nasional Korps Sabahara Baharkam Polri  
Instansi : POLRI  
Alamat : Perumahan Griya Pendowo Indah Kav 22 kel Grogol Kec Limo  
kota Depok ( jawa barat )

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXI tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
  - b. Apabila ternyata Sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus Pendidikan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



HARRIES BUDIHARTO, S.I.K, M.Si  
KOMBES POL. NRP. 68100293

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	6
3. Maksud dan Tujuan.....	7
4. Ruang lingkup dan Sistematika.....	7
5. Metode dan Pendekatan.....	8
6. Pengertian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum.....	12
8. Peraturan Perundang-undangan.....	12
9. Kerangka Teoritis.....	15
10. Data dan Fakta.....	19
11. Perkembangan Lingkungan Strategis.....	23
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum.....	33

13.	Apa yang dimaksud dengan Objek Vital Nasional.....	33
14.	Bagaimana pelaksanaan Sistem manajemen Pengamanan pada Objek Vital Nasional.....	37
15.	Bagaimana pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Pengamanan pada Objek Vital Nasional.....	48
16.	Upaya pengamanan objek vital nasional.....	54

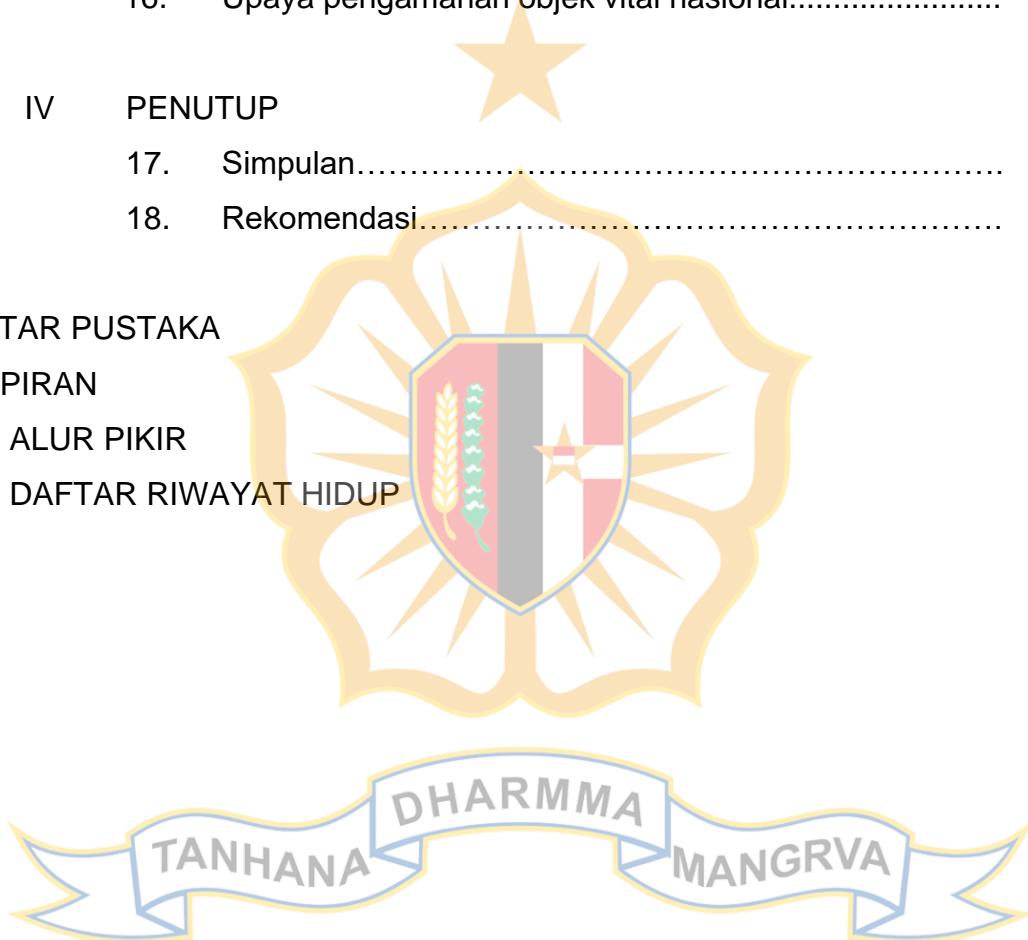
#### BAB IV PENUTUP

17.	Simpulan.....	58
18.	Rekomendasi.....	59

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP





**PENGAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL**  
**GUNA TERWUJUDNYA KETAHANAN NASIONAL**  
**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang.**

Tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut tertera dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan tujuan Nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial<sup>1</sup>. Jika mencermati tujuan nasional tersebut sesungguhnya dijewai sila-sila Pancasila sebagai dasar negara, yaitu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dan "kemanusiaan yang adil dan beradab".

Negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum menetapkan objek vital nasional ( Obvitnas) agar mampu mendukung pencapaian tujuan Nasional tersebut. Negara Indonesia memiliki banyak objek vital nasional yang bergerak diberbagai bidang usaha yang dikelola oleh lembaga dan kementerian. Objek vital nasional ini merupakan hasil dari pembangunan bangsa Indonesia serta sebagai sumber pendapatan negara yang bersifat Strategis. Hingga saat ini jumlah objek vital nasional berjumlah 2444<sup>2</sup> dan setiap tahunnya akan selalu bertambah seiring dengan ditetapkannya proyek strategis nasional oleh Presiden.

Dalam Keppres No 63 Tahun 2004 tentang pengamanan objek vital nasional disebutkan bahwa objek vital vasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi

<sup>1</sup> Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Data Obvitnas thn 2019 Ditpamobvit Korsabhabara Baharkam Polri

dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis<sup>3</sup>. Keppres 63 Tahun 2004 sebagai salah satu amanat reformasi menetapkan bahwa pengamanan objek vital nasional dilakukan oleh pengamanan Internal dan mendapatkan bantuan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengamanan internal adalah pengelolaan pengamanan yang dilaksanakan petugas keamanan internal perusahaan atau objek vital nasional berupa satuan pengamanan (Satpam) organik yang statusnya sebagai karyawan tetap perusahaan atau objek vital nasional atau satuan pengamanan (Satpam) outsourcing yang bersumber pada badan usaha jasa pengamanan ( BUJP ) yang statusnya kontrak sesuai kontrak perusahaan pengguna dengan BUJP dimana Satpam itu bernaung. Satpam sebagai satuan pengamanan pada objek vital nasional merupakan salah satu bentuk pengamanan swakarsa, yang mana pengamanan swakarsa dibentuk atas kemauan , kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberian bantuan pengamanan objek vital nasional oleh Kepolisian meliputi berupa jasa pengamanan fisik berupa personel Kepolisian dan peralatan serta sistem manajemen pengamanan, serta melaksanakan audit secara periodik yang ditetapkan bersama sama dengan pengamanan internal.

Dalam peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 43 tahun 2012, disebutkan bahwa Polri bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Polisus, PPNS, dan pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan Kepolisian secara terbatas, bertujuan untuk meningkatkan kerjasama, menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, serta untuk menjamin agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>4</sup> .

Pengamanan yang dilakukan pada sebagian besar pengelola Obvitnas belum dilaksanakan secara optimal Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya. **Pertama**, belum adanya kebijakan dari manajemen tentang

<sup>3</sup> Keppres No 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obvitnas

<sup>4</sup> Pp NOMER 43 Tahun 2012 ttg tata cara pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan thp polsus,ppns dan bentuk pam swakarsa

pentingnya keamanan yang mana manajemen dan pengelola menganggap keamanan menjadi tugas dan tanggung jawab Satpam dan Kepolisian saja. **Kedua** pengamanan objek vital nasional hanya dilakukan dengan pengamanan secara fisik personel Satpam atau Polisi saja dengan jumlah personel satuan pengamanan yang kurang, baik dari segi jumlahnya dan dari segi kemampuannya dan kompetensinya. **Ketiga** pelaksanaan pengamanan hanya menggunakan peralatan pengamanan yang seadanya saja tidak disesuaikan dengan kebutuhan peralatan yang memadai sesuai kebutuhan. **Keempat** kurangnya anggaran pengamanan sehingga pemenuhan untuk kebutuhan gaji dan pembelian peralatan dan pelatihan tidak tercapai. **Kelima** kurangnya regulasi yang mengatur tentang pengamanan objek vital nasional. **Keenam** tidak adanya sistem manajemen pengamanan ( SMP ) dalam pelaksanaan pengamanan pada Obvitnas. **Ketujuh** tidak adanya audit oleh pihak yang berkompeten yang ditentukan oleh undang-undang.

Pengamanan yang dilaksanakan oleh objek vital nasional tidak hanya sekedar pelaksanaan pengamanan secara fisik semata tetapi yang lebih penting bagaimana mereka melaksanakan sistem manajemen pengamanan dan audit SMP. Pelaksanaan sistem manajemen pengamanan belum sepenuhnya dilakukan oleh objek vital nasional, Hal ini dikarenakan belum adanya kesadaran dalam masalah pengamanan Obvitnas oleh para pengelola Obvitnas serta masih barunya regulasi tentang sistem manajemen pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian. Ada beberapa objek vital nasional yang telah merapkan sistem manajemen pengamanan ini akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak 100 % diantaranya meninggalkan aspek sistem audit objek vital nasional serta asistensi yang tidak dilaksanakan . Sehingga penerapan sistem manajemen pengamanan tersebut belum bisa diukur dan belum bisa menjamin dari pada keamanan objek vital nasional,karena keberadaan keamanan bersifat dinamis dan hal tersebut perlu disesuaikan dengan dinamika yang terjadi dilapangan.Berikut contoh Obvitnas yang belum menerapkan sistem manajemen pengamanan dan audit tidak sampai 100 % diantaranya :

No	Obvitnas	Pam fisik	SMP	Bintek	audit	sertifikasi	Peralatan pam
1	Premier Oil Natuna Sea BV	belum	Belum	ada	belum	belum	Belum
2	EMCL Bojonegoro	ada	Belum	belum	belum	belum	Ada
3	Medco E&P Natuna bandara	ada	Belum	belum	belum	belum	Ada
4	PT Pertamina EP kaltim	ada	Belum	belum	belum	belum	Ada
5	PT Taman Impian Jaya Ancol	ada	Belum	ada	belum	belum	Ada
6	Jalan tol Prof. Dr. Ir Soedijatmo	ada	Belum	belum	belum	belum	Ada

Dengan belum dilaksanakannya sistem manajemen pengamanan Obvitnas dan audit pada Obvitnas maka dikawatirkan akan membawa dampak yang kurang baik terhadap keberadaan Obvitnas tersebut, termasuk bagi ketahanan nasional bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan Obvitnas merupakan strategis bagi sumber dari pendapatan keuangan negara maka manakala Obvitnas ini terganggu keamanannya dan mengakibatkan kerugian secara finansial maka pendapatan negara akan berkurang dan dengan berkurangnya pendapatan negara tersebut maka perkembangan pembangunan akan terhambat dan hal itu akan mempengaruhi ketahanan nasional.

Adapun contoh kejadian pada objek vital di luar negeri yang lalai menerapkan SOP dan tidak adanya alat pengamanan yang canggih diantaranya adalah kejadian meledaknya gudang barang di pelabuhan Beirut di Libanon yang menyimpan zat kimia ammonium nitrat sebagai bahan untuk pupuk dan bahan peledak sebanyak 2.750 ton ditimbun di gudang pelabuhan selama 6 tahun. Objek vital milik negara Arab Saudi yaitu Pt Aramco tanggal 14 September 2019 yang mana 2 kilang minyaknya diserang

oleh terorisme yang dilakukan oleh kelompok houthi Yaman-Iran dengan menggunakan 10 drone. Hal ini belum bisa diantisipasi oleh Pt Aramco dikarenakan objek vital tersebut belum melengkapi peralatan pengamanan yang namanya anti drone. Akibat penyerangan pada kilang minyak tersebut Pt Aramco mengalami kerugian besar disamping untuk perbaikan alat produksi dan tidak tersalurkannya minyak kepada pihak pembeli.

Sedangkan kejadian pada Obvitnas yang lalai dan belum menerapkan sistem manajemen pengamanan diantaranya adalah kejadian tumpahan minyak di Teluk Balikpapan pada tanggal 31 Maret 2018. Insiden itu mengakibatkan kebocoran pipa minyak yang juga memicu kebakaran di sebuah kapal kargo pengangkut batu bara, MV Ever Judger, dan dua kapal nelayan. Walaupun Pt Pertamina telah melaksanakan SMP dan telah mendapatkan sertifikasi Oleh Kapolri akan tetapi dalam pelaksanaan pengamanan tersebut terjadi pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh petugas dari Pt Pertamina. Pelaksanaan SMP tidak dilaksanakan dengan prosedur yang benar. Kasus penyerangan terminal BBM (TBBM) Teluk Kabung di Padang, Sumatera Barat, pada Selasa tanggal 7 Juni tahun 2016 oleh kelompok premanisme, Mereka bisa leluasa keluar masuk TBBM walaupun pihak pengamanan Obvitnas mengetahui hal tersebut . TBBM yang termasuk Obvitnas ternyata belum menerapkan sistem manajemen pengamanan yang benar. Kejadian kerusuhan di Obvitnas pengeboran minyak PT EMCL di Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 1 Agustus 2015. Kerusuhan tersebut dilakukan oleh pekerja di dalam area fasilitas produksi saat pelaksanaan proyek rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (*Engineering, Procurement and Constructions/EPC*). Kerusuhan tersebut mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas perkantoran dan membakar mobil milik perusahaan. Obvitnas tersebut belum melaksanakan standar pengamanan dengan belum menerapkan sistem manajemen pengamanan yang benar

Pelaksanaan pengamanan Obvitnas dengan mempergunakan SMP Obvitnas dan audit diharapkan akan meminimalisir gangguan keamanan yang ada di Obvitnas. Dengan SMP obvitnas dan audit yang diterapkan pada objek vital nasional diharapkan akan meningkatkan produktivitas bagi obvitnas tersebut dan mendapatkan keuntungan

yang ditargetkan untuk dapatnya dipergunakan untuk pembangunan nasional. Sehingga dengan adanya pembangunan nasional yang stabil dan bahkan meningkat maka hal ini dengan sendirinya akan memperkuat ketahanan nasional bangsa Indonesia. Oleh karenanya seluruh Obvitnas yang ada diharapkan sudah bisa menerapkan dan melaksanakan SMP Obvitnas dan audit supaya mendapatkan pengamanan yang optimal dan ideal.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diketahui bahwa objek vital nasional memiliki peran yang strategis dalam rangka mendukung negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengacu pada peran strategis tersebut maka perlu dilakukan pengamanan agar produktivitasnya tidak terganggu dari berbagai gangguan keamanan. Gangguan keamanan yang terjadi pada Obvitnas akan membawa dampak yang luas dan dapat mengganggu perekonomian secara nasional. Dengan sangat strategisnya Obvitnas bagi negara sebagai sumber keuangan negara maka negara harus hadir didalamnya.

Wujud dari kehadiran negara tersebut adalah hadirnya Polri dalam membantu pelaksanaan pengamanan baik pengamanan secara fisik dengan jalan melaksanakan jasa pengamanan dengan membantu perkuatan personel Polri serta penggerahan peralatan yg ada dan membantu secara manajerialnya yaitu dengan menerapkan jasa sistem manajemen pengamanan termasuk pelaksanaan audit sistem pengamanannya. Hal ini sesuai dengan amanat Keputusan Presiden nomor 63 tahun 2004.

Mendasari hal tersebut diatas maka perumusan masalah yang diambil adalah **Bagaimana pengamanan objek vital nasional guna terwujudnya ketahanan nasional** ? Adapun dari rumusan masalah tersebut di atas agar penulisan Taskap ini lebih fokus dan komprehensif maka beberapa pertanyaan kajian sebagai berikut:

- a. Apa yang dimaksud dengan objek vital nasional ?
- b. Bagaimana pelaksanaan sistem manajemen pengamanan pada objek vital nasional ?

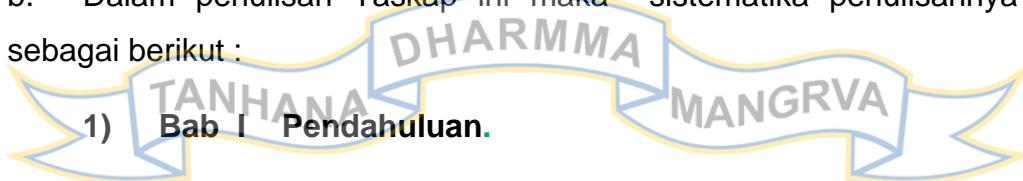
- c. Bagaimana pelaksanaan audit sistem manajemen pengamanan pada objek vital nasional ?
- d. Bagaiman upaya pengamanan objek vital nasional ?

### 3. **Maksud dan tujuan**

- a. Maksud dari penulisan Taskap ini untuk memberikan suatu gambaran, analisis serta rekomendasi tentang pengamanan objek vital nasional guna terwujudnya ketahanan nasional, dimana dalam penulisan ini berusaha melihat pengamanan Obvitnas secara utuh dengan melakukan analisa tentang sistem manajemen pengamanan dan audit yang diterapkan dalam pengamanan.
- b. Tujuan penulisan taskap ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada berbagai pihak terkait , khususnya pada pengelola objek vital nasional dan Polri serta kementerian pembina dan stakeholder yang terlibat dalam pengamanan Obvitnas guna terwujudnya ketahanan nasional.

### 4. **Ruang lingkup dan Sistematika**

- a. Ruang lingkup penyusunan Taskap ini dibatasi pada pelaksanaan sistem manajemen pengamanan ( SMP ) serta audit sistem manajemen pengamanan (SMP ) objek vital nasional.
- b. Dalam penulisan Taskap ini maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut :



Pada bab pendahuluan ini membahas tentang latar belakang pengamanan pada rumusan permasalahannya serta maksud dan tujuan penulisan naskah dengan metode diskriptif analisis serta pendekatan tugas, yaitu menggambarkan situasi dan keadaan yang berkaitan dengan permasalahan serta data dan fakta yang ada, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan pengalaman

empirik penulis dan orang lain guna mendapatkan solusi yang terbaik yang bisa dipergunakan untuk perbaikan selanjutnya

## **2) Bab II Tinjauan Pustaka.**

Pada bab tinjauan pustaka ini menguraikan tentang landasan pemikiran yang meliputi semua faktor yang berpengaruh terhadap pertanyaan kajian dalam persoalan dan pencapaian simpulan yang digunakan dalam analisis baik dari segi peraturan perundang undangan dan kerangka teori, data/fakta, lingkungan strategis

## **3) Bab III Pembahasan.**

Pada bab pembahasan ini membahas tentang setiap pertanyaan – pertanyaan kajian mendasari teori dan aspek yang terlihat didalamnya sehingga mendapatkan hasil pembahasan untuk mengetahui penyebab masalah dan solusi penyelesaiannya.

## **4) Bab IV Penutup.**

Pada bab penutup ini akan disampaikan tentang simpulan yang didapat dan diuraikan secara ringkas tentang temuan dan jawaban atas pertanyaan pertanyaan kajian serta rekomendasi untuk memberikan masukan kepada Polri dan Obvitnas dalam pelaksanaan pengamanan Obvitnas guna terwujudnya ketahanan nasional

## **5. Metode dan Pendekatan**

### **a. Metode**

Penulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis, peneliti mengumpulkan serta mendeskripsikan dan menganalisa data dan fakta yang ditemukan di lapangan dengan mengemukakan gejala-gejala yang ada berdasarkan metode penelitian literatur ( studi kepustakaan ) dari data sekunder.

## b. Pendekatan

Penulisan Taskap ini menggunakan pendekatan dengan perspektif kepentingan nasional dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoretis yang digunakan.

## 6. Pengertian

- a. Objek vital nasional, yang selanjutnya disingkat Obvitnas adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/ atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak , kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis <sup>5</sup>. Obvitnas ini ditetapkan dengan keputusan Menteri dan /atau kepala lembaga pemerintah non departemen terkait.
- b. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat<sup>6</sup>
- c. Audit adalah proses kegiatan pemeriksaan untuk meyakinkan tingkat kesesuaian antara satu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu identitas dengan kriterianya yang dilakukan oleh auditor yang berkompeten dengan mendekatkan serta mengevaluasi bukti-bukti pendukungnya secara sistematis, analisis, kritis dan selektif guna memberikan pendapat dan/atau kesimpulan serta rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Keputusan Presiden RI no 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Objek Vital Nasional

<sup>6</sup> Undang undang RI no 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>7</sup> Peraturan kapolri nomer 13 Tahun 2017 tentang pemberian bantuan pengamanan pada Objek Vital Nasional.

d. Audit sistem manajemen pengamanan adalah suatu proses kegiatan pemeriksaan sistem manajemen pengamanan pada objek vital nasional atau objek tertentu guna meyakinkan tingkat kesesuaian antara satu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu identitas dengan kriterianya yang dilakukan oleh auditor yang berkompeten dengan mendekatkan serta mengevaluasi bukti-bukti pendukungnya secara sistematis, analisis, kritis dan selektif guna memberikan pendapat dan/atau kesimpulan serta rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan

e. Pengamanan adalah segala usaha , pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan.<sup>8</sup>

f. Jasa Pengamanan Obvitnas dan objek tertentu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Polri dalam rangka mengerahkan kekuatan pengamanan untuk mengantisipasi ancaman terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan kawasan/ tempat kerjanya<sup>9</sup>

g. Pengamanan swakarsa adalah suatu sistem keamanan yang mengupayakan hidupnya peranan dan tanggung jawab masyarakat dalam pembinaan keamanan, menyeimbangkan dan menyesuaikan hubungan satu sama lain , yang tumbuh dan berkembang atas kehendak dan kemampuan masyarakat sendiri , untuk mewujudkan daya tangkal, daya cegah dan daya penanggulangan masyarakat terhadap segala kemungkinan gangguan keamanan serta daya tanggap dan penyesuaian masyarakat terhadap setiap perubahan dan dinamika sosial yang membudaya dalam bentuk pola sikap kebiasaan dan perilaku masyarakat, sehingga gangguan kamtibmas dapat

<sup>8</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia no 7 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan kapolri nomer 13 Tahun 2017 tentang pemberian bantuan pengamanan pada Objek Vital Nasional

<sup>9</sup> Peraturan Kabaharkam Polri nomor 1 Tahun 2019 tentang Prosedur pemberian jasa pengamanan dan sistem manajemen pengamanan pada Objek Vital Nasional dan objek tertentu

dicegah sedini mungkin, sejak dari sumber dasarnya dan kekuatan fisik aparatur keamanan digunakan seminimal mungkin dan secara selektif.<sup>10</sup>

h. Sistem manajemen pengamanan Obvitnas dan objek tertentu adalah bagian dari manajemen yang saling terkait dalam bentuk pembinaan teknis dan audit terhadap seperangkat elemen pengamanan yang terdiri dari komitmen dan kebijakan, pola pengamanan, konfigurasi standar pengamanan, standar kemampuan pelaksanaan pengamanan dan monitoring evaluasi<sup>11</sup>

i. Ketahanan nasional (tannas) adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.<sup>12</sup>



<sup>10</sup> Awaloedin Djamin dalam buku " Sispamswakarsa dan Industrial Securiti " 2002

<sup>11</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2019 ttg perubahan atas peraturan Kapolri no 13 tahun 2017 tentang pemberian bantuan pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu

<sup>12</sup> Bahan ajar bidang studi Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional untuk PPRA angkatan 61 Tahun 2020.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 7. Umum

Dalam tinjauan pustaka ini penulis akan membahas tentang perundangan undangan dan turunannya yang mendasari dari keberadaan tentang pengamanan objek vital nasional, teori dan konsep -konsep tentang pengamanan yang menurut penulis dapat dan tepat serta relevan dengan rumusan permasalahan, untuk dijadikan pisau analisis dalam pembahasan pada Bab III, sehingga terlihat benang merahnya bagaimana pengamanan objek vital nasional guna terwujudnya ketahanan nasional. Pada tinjauan pustaka ini juga akan menyajikan data dan fakta serta perkembangan lingkungan strategis saat ini untuk mendukung dalam pembahasan selanjutnya.

#### 8. Peraturan Perundangan-Undangan

Beberapa peraturan perundangan yang terkait dalam pengamanan objek vital nasional antara lain sebagai berikut :

a. **Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, pasal 28 g ayat (1) menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Serta pasal 28 i bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.<sup>13</sup>

b. **Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002** tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bab I tentang Ketentuan Umum pada pasal 2 menjelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pada pasal 3

---

<sup>13</sup> Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28G ayat (1) dan pasal 28G ayat (1 )

menyatakan pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Pada pasal 4 menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>14</sup>

**c. Keputusan Presiden nomor 63 Tahun 2004** tentang pengamanan Obvitnas. Pada pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa pengelola Obvitnas bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan Obvitnas masing-masing berdasarkan prinsip pengamanan internal. Pada pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap Obvitnas<sup>15</sup>.

**d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 Tahun 2016** tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada pasal 1 ayat 1 huruf z dan aa menyatakan bahwa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi penerimaan dari jasa pengamanan pada Obvitnas dan objek tertentu serta jasa SMP pada Obvitnas dan objek tertentu<sup>16</sup>.

**e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2012** tentang tata cara pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian Khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa<sup>17</sup>

<sup>14</sup>Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>15</sup>Keputusan Presiden nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Objek Vital Nasional

<sup>16</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis-jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara republik indonesia

<sup>17</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata cara pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian Khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa

f. **Keputusan Menteri Keuangan nomor 347/KMK.05/2017** tanggal 17 April 2017 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

g. **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2017** tentang pemberian bantuan pengamanan pada Obvitnas dan objek tertentu. Pasal 5 ayat (1), (2) menyatakan bantuan pengamanan pada Obvitnas dan objek tertentu, diberikan dalam bentuk : 1) Jasa pengamanan Obvitnas dan objek tertentu dan/atau 2) Jasa SMP Obvitnas dan objek tertentu. Pemberian bantuan pengamanan berupa jasa pengamanan dan jasa SiMP dilakukan atas dasar permintaan pengelola Obvitnas atau objek tertentu<sup>18</sup>.

h. **Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017** tentang pemberian bantuan pengamanan pada Obvitnas dan objek tertentu. Pada pasal 6 dinyatakan bahwa pengamanan Obvitnas dan objek tertentu dilaksanakan secara terpadu bersama pengelola Obvitnas dan objek tertentu melalui standar dan penerapan sistem manajemen pengamanan Obvitnas dan objek tertentu.<sup>19</sup>

i. **Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2019** tentang perubahan kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 13 tahun 2017 tentang pemberian bantuan pengamanan pada Obvitnas dan objek tertentu.<sup>20</sup> Pada aturan ini hanya mengatur tentang materi standar dan penerapan SMP dan matrik penilaian audit dengan menggunakan 5 elemen dan 118 Kriteria.

**Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2019** tentang prosedur pemberian jasa

<sup>18</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek tertentu

<sup>19</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu

<sup>20</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu

pengamanan dan SMP pada Obvitnas dan objek tertentu.<sup>21</sup> Pada aturan ini mengatur tentang bagaimana prosedur pelaksanaan jasa pengamanan dan jasa SMP dilaksanakan mulai dari permintaan sampai pada pelaksanaan pengamanan personel Polri serta permintaan permohonan audit serta teknis pelaksanaan audit termasuk personel audit dan persyaratan audit

## 9. Kerangka teoretis

### a. Konsep manajemen

Menurut George R. Terry dalam bukunya “*Guide to management*” / Prinsip prinsip manajemen diterjemahkan oleh J. Smith D.F.M mengatakan “ Manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan tindakan perencanaan , pengorganisasian, menggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber sumber lain<sup>22</sup>. fungsi manajemen adalah sebagai berikut :

#### 1) Perencanaan ( *Planning* )

Perencanaan ini meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi – asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi aktivitas – aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.

#### 2) Pengorganisasian ( *Organizing* )

Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan – hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang , hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran organisasi.

<sup>21</sup> Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2019 Tentang Prosedur Pemberian Jasa Pengamanan dan Sistem Manajemen Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu

<sup>22</sup> Terry, George R, Prinsip Prinsip Manajemen “*Guide to Management*”, PT Bumi Aksara Jakarta 2000

### 3) Menggerakan ( *Actuating* )

Menggerakan adalah merupakan usaha untuk menggerakan anggota-anggota kelompok demikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan yang bersangkutan dan sasaran anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu ingin mencapai sasaran tersebut.

### 4) Pengawasan ( *Controlling* )

Pengawasan adalah mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan , maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu , menerapkan tindakan -tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana- rencana.<sup>23</sup>

#### b.. Konsep keamanan

Keamanan merupakan salah satu kebutuhan utama manusia untuk menjalankan peran sosialnya didalam masyarakat, Oleh karenanya untuk mewujudkan suatu kondisi keamanan yang kondusif bagi kemajuan produktifitas dan demi memajukan kesejahteraannya maka masyarakat wajib untuk terlibat secara langsung didalam proses penyelenggaraan keamanan. Sedangkan Prof Dr Hadiman mengemukakan bahwa keamanan adalah : “ *suatu keadaan yang memberikan perlindungan dari segala ancaman didalamnya terdapat rasa aman, bebas dari ketakutan, kekhawatiran, keraguan serta perasaan kepastian dan keselamatan. Gangguan keamanan dapat berupa fisik maupun non fisik seperti kebebasan, kemerdekaan, kehormatan, nama baik, perasaan, waktu dan kesempatan. Keamanan diri secara fisik dan non fisik serta kondisi yang bebas dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang bertujuan untuk tidak terjadi kerugian* ”<sup>24</sup>

#### c. Manajemen sekuriti

##### 1) Manajemen sekuriti menurut Prof. Dr.Hadiman (2005).

<sup>23</sup> ibid

<sup>24</sup> Prof Dr Hadiman *Management Securiti* 2005

Manajemen Sekuriti adalah segala upaya dan langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya kerugian dari sebab apapun. Dengan ilmu manajemen diharapkan dapat berbuat “*to do the right thing*” atau efektif atau mangkis dan “*to do the thing right*” atau efisien atau sangkil, dengan kompetensinya adalah mampu mencegah terjadinya kerugian. Maka manajemen sekuriti lebih dikenal dengan loss prevention manajemen<sup>25</sup>.

**2) Manajemen sekuriti atau lebih dikenal industrial security menurut Prof. Awaloedin Djamin (2011).**

Manajemen sekuriti mencakup “*crime prevention*” dan “*loss prevention*” sekaligus, yang mana ruang lingkupnya mencakupi:

**a) *Physical security***

*Physical security* mencakup langkah-langkah pengamanan pencegahan ancaman dari luar dan dari dalam perusahaan/instansi, seperti pintu gerbang, pagar, tempat parkir, pengaturan penerangan, jendela, pintu-pintu, kunci-kunci, atap dan dinding, alarm, serta jumlah dan klasifikasi satpam yang diperlukan. Termasuk didalamnya pencegahan kebakaran, termasuk alarm kebakaran, keselamatan, manajemen pengamanan penyelamatan dan sebagainya serta peralatan-peralatan yang diperlukan dalam pengamanan.

**b) *Information security***

*Information security* adalah pengamanan semua informasi perusahaan/instansi yang tidak boleh diketahui pihak luar, baik informasi lisan (rapat-rapat, pembicaraan telepon), tulisan (dokumen-dokumen) ataupun yang simbolistik (kode-kode).

**c) *Personnel security***

*Personal security* dapat berarti melindungi pegawai, terutama pimpinan perusahaan/instansi dari gangguan keamanan dan keselamatan seperti executive protection, body guards, dan

<sup>25</sup> ibid

sebagainya. Disamping itu dapat diartikan pengamanan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pegawai yang tidak jujur (internal theft).

**d) *Industrial relations***

Industrial relations dimasukkan dalam pembahasan ini karena masalah-masalah unjuk rasa, pemogokan dan lain-lain tindakan buruh yang negatif juga menimbulkan kerugian. Industrial relations menempatkan buruh dan pengusaha merupakan mitra (partner) yang rukun, tidak hanya mencegah kerugian (*loss prevention*), bahkan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.

**e) *Community development***

*Community development* merupakan proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial bagi warga masyarakat. Dengan program ini harapan masyarakat sekitar memperoleh manfaat dari keberadaan perusahaan.

**f) *Corporate Social Responsibility*.**

*Community development* dan *corporate social responsibility* bukan merupakan ‘charity’ atau ‘zakat’ kepada masyarakat, terutama masyarakat dimana perusahaan berada, tetapi dianggap sebagai tugas dan tanggung jawab. Dampaknya, masyarakat merasa ikut “memiliki” dan ikut bertanggung jawab atas perkembangan dan keberhasilan perusahaan. Jadi terdapat dampak pencegahan bila perusahaan diganggu oleh anasir yang akan merusak<sup>26</sup>.

**d. Konsep sistem manajemen pengamanan.**

Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2017 tentang pemberian bantuan pengamanan pada Obvitnas dan objek tertentu, bahwa manajemen sistem

---

<sup>26</sup> Awaludin Djamin, Manajemen Sekuriti di Indonesia , Yayasan Tenaga Kerja Indonesia Pusat pembinaan Sumber Daya Manusia 2015

pengamanan Obvitnas dan objek tertentu yang selanjutnya disebut sistem manajemen pengamanan Obvitnas dan objek tertentu adalah bagian dari manajemen yang saling terkait dalam bentuk pembinaan teknis dan audit terhadap seperangkat elemen pengamanan yang terdiri dari komitmen dan kebijakan, pola keamanan, konfigurasi standar pengamanan, standar kemampuan pelaksanaan pengamanan dan monitor dan evaluasi<sup>27</sup>.

## 10. Data dan fakta

Obvitnas sebagai salah satu dari hasil pembangunan nasional yang menumbuhkan kondisi kehidupan bangsa Indonesia semakin baik, maka Obvitnas perlu dikelola dengan profesional baik dari segi produktivitasnya dan dari segi keamanannya. Sehingga makin meningkatnya intensitas dari hasil pembangunan nasional maka dengan sendirinya akan meningkatkan Ketahanan Nasional, atau dengan kata lain dengan kukuhnya ketahanan nasional maka akan mendorong laju berkembangnya pembangunan nasional.<sup>28</sup>

Obvitnas yang berjumlah 2444 tersebut berada dibawah pembinaan Kementerian ESDM Republik Indonesia sebanyak 481 yang ditetapkan dengan keputusan menteri ESDM nomer 77K/90/MEN/2019 tentang Obvitnas bidang energi dan sumber daya mineral. Pada Kementerian Perindustrian terdapat 91 Obvitnas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perindustrian nomer 805/M-IND/Kep/12/2017 tentang perubahan ke tiga atas keputusan Menteri Perindustrian nomer 620/M-IND/Kep/12/2012 tentang Obvitnas Sektor Industri. Pada Kementerian Perhubungan terdapat 1.598 Obvitnas yang ditetapkan dengan keputusan Menteri perhubungan Republik Indonesia nomer 72 tahun 2004 tentang Objek Vital Transportasi, pos dan telekomunikasi. Pada Kementerian Pariwisata terdapat 73 Obvitnas yang ditetapkan dengan Keputusan Kementerian pariwisata Republik Indonesia Nomer KM.70/UM.001/ MP/2016 tentang penetapan Obvitnas Sektor Pariwisata. Pada Kementerian PU Pera terdapat 201 Obvitnas yang ditetapkan dengan keputusan Kementerian PU Pera Republik Indonesia

<sup>27</sup> Peraturan Kepolisian nomer 3 Tahun 2019 ttg perubahan atas peraturan Kapolri nomer 13 tahun 2017 tentang pemberian bantuan pengamanan Objek Vital dan Objek Tertentu

<sup>28</sup> Bahan ajar Bidang studi Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional lemhannas 2020

nomer 331/KPTS/M/2020 tentang penetapan Obvitnas bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Pada sektor kantor perwakilan asing terdapat 234 Obvitnas. Sedangkan objek vital tertentu berjumlah 4.418 yang ditetapkan oleh Dirpam Obvit Korsabhara Baharkam Polri<sup>29</sup>. Data lengkap Obvitnas dan objek tertentu pada masing masing kementerian dapat dilihat pada **lampiran 1**. Obvitnas bersifat strategis untuk sumber pendapatan negara sehingga Obvitnas ini perlu diamankan baik terhadap ancaman dalam negeri /luar negeri dan dari pihak yang akan merusak atau merugikannya,termasuk dari kelompok radikal dan terorisme Internasional

Dari sejumlah Obvitnas tersebut masih banyak Obvitnas yang belum melaksanakan atau belum menerapkan sistem manajemen pengamanan sesuai dengan ketetapan atau standar yang ditetapkan oleh Kepolisian. Masih banyak Obvitnas yang menerapkan dengan standar pengamanan yang lama dan belum menerapkan standar pengamanan yang baru. Hal ini dikarenakan adanya kendala baik secara internal ataupun secara external yang dialami oleh Obvitnas tersebut. Kendala itu diantaranya masih barunya regulasi yang diterapkan oleh Kepolisian dan belum meratanya sosialisasi kepada pengelola Obvitnas. Objek Vital Nasional yang telah menerapkan standar sistem manajemen pengamanan masih minim, hal ini juga terkendala dengan adanya pandemi covid 19 yang mengakibat pelaksanaan audit sistem manajemen pengamanan tidak bisa dilaksanakan secara maximal. Data Obvitnas dan objek tertentu yang telah melaksanakan program sistem manajemen pengamanan dan audit adalah sebagai berikut:

NO	Perusahaan	Status	Perolehan	Ket
1	PT.Pupuk Sriwijaya Palembang	Obvitnas	Gold	-
2	PT Donggi Senoro LNG Luwuk	Obvitnas	Gold	-
3	PT Petrokimia Gresik	Obvitnas	-	Proses audit
4	PT Pura Nusa Persada Kudus	Obter	Gold	-
5	PT Pomi ( PLTU) Probolinggo	Obvitnas	Gold	-
6	PT Pupuk Iskandar Muda Aceh	Obvitnas	-	Proses audit
7	PT Hutama Karya	Obvitnas	-	Proses audit
8	PT BSI ( tambang emas) Banyuwangi)	Obvitnas	Gold	-

<sup>29</sup> Data Ditpam Obvit Kor Sabhara Baharkam Polri Tahun 2020

9	PT PLN NTB	Obvitnas	-	Proses audit
10	PT. Semen Padang	Obvitnas	-	Proses audit
11	PT. Bukit Asam Palembang	Obvitnas	-	Proses SMP
12	PT. PLN Ambon	Obvitnas	-	Proses SMP
13	PT. Pupuk Kujang Purwakarta	Obvitnas	-	Proses SMP
14	PT Waskita Karya	Obvitnas	-	Proses SMP
15	PT Pupuk Kaltim	Obvitnas	-	Proses SMP
16	PT Peruri Purwakarta	Obvitnas	-	Proses SMP
17	PT Smelting Gresik	Obvitnas	-	Proses SMP
18	PT Petro china (minyak) Jambi	Obvitnas	-	Proses SMP
19	PT. Chandra asri Banten	Obvitnas	-	Proses SMP
20	PT. BP Batam	Obvitnas	-	Proses SMP

Banyak kejadian yang terjadi di Obvitnas dikarenakan pihak pengelola lalai dan tidak atau belum menerapkan sistem manajemen pengamanan yang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan serta turunan dari pada peraturan perundang undangan tersebut. Kejadian kerusuhan di Obvitnas pengeboran minyak PT EMCL di Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 1 Agustus 2015. Kerusuhan tersebut dilakukan oleh pekerja di dalam area fasilitas produksi saat pelaksanaan proyek rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (*Engineering, Procurement and Constructions/EPC*). Kerusuhan tersebut mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas perkantoran dan membakar mobil milik perusahaan. Obvitnas tersebut belum melaksanakan standar pengamanan dengan belum menerapkan sistem manajemen pengamanan. Walaupun Obvitnas tersebut sdh diamanahkan oleh satuan pengamanan dan Polri akan tetapi pihak pengelola pengamanan membuat SOP yang tidak tersosialisasi oleh pihak pengamanan sendiri sehingga pengamanan yang dilakukan tidak efektif.

Kasus penyerangan terminal BBM (TBBM) Teluk Kabung di Padang, Sumatera Barat, pada Selasa tanggal 7 Juni tahun 2016 oleh kelompok premanisme,preman-preman ini tak segan-segan menganiaya para pekerja pertamina untuk mendapatkan 'jatah' atau melakukan pemerasan. Mereka bisa leluasa keluar masuk TBBM walaupun pihak pengamanan Obvitnas mengetahui hal tersebut . TBBM yang termasuk Obvitnas

ternyata belum menerapkan sistem manajemen pengamanan yang benar dan menjadi kewajiban bagi Obvitnas.

Kejadian tumpahan minyak di Teluk Balikpapan pada tanggal 31 Maret 2018. Insiden itu mengakibatkan kebocoran pipa minyak yang juga memicu kebakaran di sebuah kapal kargo pengangkut batu bara, MV Ever Judger, dan dua kapal nelayan. Walaupun Pt Pertamina telah melaksanakan SMP dan telah mendapatkan sertifikasi Oleh Kapolri akan tetapi dalam pelaksanaan pengamanan tersebut terjadi pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh petugas dari Pt Pertamina. Pelaksanaan SMP tidak dilaksanakan dengan prosedur yang benar. Pada akhirnya kejadian ini mengakibatkan diproses hukumnya nakoda kapal sebagai tersangka dan beberapa pegawai Pt Pertamina balik papan menjadi tersangka dalam kasus ini.

Pada objek vital dikawasan dunia pun pengamanan merupakan hal yang sangat penting sehingga peralatan keamanan yang canggih pun harus bisa disiapkan oleh objek vital tersebut. Contohnya pada tanggal 14 September 2019 kejadian pada objek vital milik negara Arab Saudi yaitu Pt Aramco, yang mana 2 kilang minyaknya diserang oleh terorisme yang dilakukan oleh kelompok houthi Yaman-Iran dengan menggunakan 10 drone yang mengakibatkan kebakaran dan kerusakan fasilitas produksi minyaknya. Akibat penyerangan drone pada kilang minyak tersebut Pt Aramco mengalami kerugian yang besar disamping untuk perbaikan alat produksi dan tidak tersalurkannya minyak kepada pihak pembeli. Walaupun Pt Aramco telah melaksanakan pengamanan secara ketat pada kilang minyaknya akan tetapi ada kelalaian terhadap penggunaan peralatan pengamanan yaitu belum dilengkapinya peralatan anti drone oleh Pt Aramco .

Satu kejadian yang baru baru saja pada tanggal 4 Agustus tahun 2020 di pelabuhan laut di Beirut Lebanon . Kejadian meledaknya gudang barang di pelabuhan Beirut tersebut dengan kuat ledakan diperkirakan seperlima kekuatan ledakan bom di Hiroshima dan mengakibatkan korban meninggal sebanyak 220 dan luka luka sebanyak 5000 orang lebih dan 300.000 warga kehilangan tempat tinggalnya. Hal tersebut dikarenakan adanya kelalaian penempatan zat kimia amonium nitrat sebagai bahan

untuk pupuk dan bahan peledak sebanyak 2.750 ton ditimbun di gudang pelabuhan selama 6 tahun. Kejadian ini mengakibatkan kemarahan warga masyarakat Lebanon yang menyalahkan pemerintah karena mengizinkan bahan peledak dalam jumlah besar disimpan di gudang pelabuhan Beirut. Pada akhirnya terjadi pembubaran kabinet dikarenakan tuntutan dari masyarakat dan banyaknya menteri yang melakukan pengunduran diri disebabkan dengan kejadian tersebut.

## 11. Perkembangan Lingkungan Strategis

Pada saat ini terjadi perkembangan lingkungan strategis yang perubahannya cukup dinamis telah menghadirkan tantangan-tantangan baru yang perlu dipahami dan diantisipasi oleh para pengelola Obvitnas beserta stakeholder yang terlibat didalam pengamanan Obvitnas agar tidak terjadi lost atau kerugian pada Obvitnas dan upaya untuk meningkatkan produktivitas Obvitnas. Tantangan yang dinamis baik dikarenakan perkembangan globalisasi dan perkembangan teknologi mengharuskan para pengelola Obvitnas dan stakeholder untuk berpikir bagaimana mengembangkan sistem manajemen pengamanan pada Obvitnas dapat semakin ideal. Tantangan-tantangan tersebut telah hadir pada lingkungan global, regional dan nasional.

### a. Global

Pada lingkungan global sekarang ini dengan era globalisasi dan perkembangan teknologi menuju revolusi industri 4.0 kondisi lingkungan strategis global masih menunjukkan kehidupan dunia mengalami kondisi yang semakin rapuh dan tidak pasti. Hal ini sesuai dengan ungkapan oleh Albert Einstein bahwa “*uncertainty is part of reality*” yang maknanya adalah “ketidakpastian adalah bagian dari kenyataan”. Maka apa yang terjadi saat ini adalah suatu keniscayaan yang meskipun belum tentu kita inginkan.

Kondisi dunia yang semakin rapuh dan mudah menjadi tidak pasti ini telah diteliti lebih dalam oleh kolonel Stephen J Gerras, Phd. Seorang Profesor di bidang behavioral science. Kolonel Stephen J Gerras, Phd. seorang profesor di bidang *behavioral Science*, bahwa kondisi dunia saat ini mengalami VUCA, singkatan dari “*Volatile*” yang bermakna sementara dan berubah-ubah,

“*Uncertainty*” yang berarti tidak pasti, “*Complex*” yang diterjemahkan sebagai rumit, dan “*Ambiguous*” yang ditafsirkan dengan ambigu alias multi tafsir.<sup>30</sup> Kondisi VUCA ini sebelumnya sebagai kondisi yang tidak biasa (*abnormal*), tetapi dengan adanya naluri dan daya kemampuan *survive* manusia, akhirnya kondisi *abnormal* yang tidak bisa kembali seperti kondisi normal sebelumnya, akhirnya VUCA tersebut menjadi kondisi “normal baru” saat ini. Tetapi inilah dunia tempat kita berteduh, bahwa sejatinya perubahan adalah abadi, dan benar setiap perubahan tentu membawa ketidakpastian, dan nyatanya ketidakpastian itu sendiri adalah sesuatu yang pasti terjadi.<sup>31</sup>

Perang dagang Amerika Serikat dan China yang semakin menghebat dan terus berlanjut menjadi saling tuduh terkait dengan sumber dari penyebab mewabahnya pandemi Covid-19 dianggap oleh banyak pengamat sebagai perang dingin baru. Adu kekuatan tak lagi terbatas pada sektor ekonomi dan perdagangan, namun menjalar menjadi adu pengaruh ke sektor keamanan ke berbagai kawasan regional, termasuk Asia Tenggara.<sup>32</sup> Peneliti *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) Andrew Mantong berpendapat langkah kebanyakan negara untuk bermain aman dilatarbelakangi oleh ketidakpastian kebijakan yang diperlihatkan oleh Amerika Serikat dan China. Namun secara struktural, potensi memihak itu tetap ada. Andrew memaparkan bahwa selama ini banyak negara yang menilai polarisasi adalah dampak dari kebangkitan China secara ekonomi politik. Namun di sisi lain, hal ini dipengaruhi pula oleh orientasi Amerika Serikat yang lebih mengisolasi diri dan mengedepankan kepentingan nasional. “komitmen AS terhadap keamanan dan perdamaian dunia semakin dipertanyakan, dimulai pada masa Bush yang menggelorakan kebijakan melawan terorisme dan mengalihkan fokus geopolitiknya ke Timur Tengah. Sempat ada

<sup>30</sup> Jazak; 13 Juli 2015; ”Jurus Sakti Menghadapi yang Tak Pasti”; Kompas.com; <https://ekonomi.kompas.com/read/2015/07/13/060700726/Jurus.Sakti.Menghadapi.yang.Tak.Pasti>.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Iim Fathimah Timorria dan Rahayuningsih; 15 Januari 2019; “Adu Pengaruh AS dan China, Bagaimana Sikap Indonesia ?”; kabar24.bisnis.com; <https://kabar24.bisnis.com/read/20190115/19/878935/adu-pengaruh-as-dan-china-bagaimana-sikap-indonesia>

harapan pada saat Obama memimpin dengan kebijakan '*Pivot to Asia*', namun saat Trump terpilih kebijakannya membingungkan bagi sejumlah negara Asia Tenggara," papar Andrew. Andrew mengungkapkan fenomena ini sejalan dengan survei terbaru yang memperlihatkan bahwa China dan AS sebagai dua kekuatan yang paling tidak bisa diprediksi.<sup>33</sup>

Hal yang berikutnya adanya pandemi Covid-19 dari wuhan China yang hanya dalam lima bulan sudah menyebar ke 196 negara di dunia, yang telah menginfeksi lebih dari lima jutaan dan merenggut lebih dari tiga ratusan ribu jiwa penduduk dunia. Sebelum pandemi Covid-19 menyerang, hubungan Cina dan Amerika memang sudah buruk. Keduanya kerap berseteru dan saling tuduh. Misalnya, tahun lalu, Presiden Amerika Donald Trump menuduh perusahaan teknologi Cina, Huawei, mencoba memata-matai pemerintah dengan infrastruktur 5g yang mereka siapkan. Trump melarang perusahaan teknologi di Amerika untuk mensuplai perangkat teknologi apapun ke Cina. Perseteruan terbaru di antara keduanya adalah soal asal usul virus Covid-19. Trump menyebut virus corona berasal dari Cina, kemungkinan diciptakan di sana. Sementara Cina menyebut virus corona diciptakan Amerika kemudian dibawa ke Cina.<sup>34</sup>

Dengan melihat situasi global yang terjadi saat ini yang banyak negara hanya mementingkan keselamatan negaranya sendiri maka keberadaan obvitnas secara langsung diperlukan sistem pengamanan yang handal guna mencegah ancaman yang terjadi. Apalagi dengan keberadaan wilayah Indonesia yang strategis dan kekayaan sumber daya alamnya. Keberadaan Obvitnas yang sangat strategis untuk keuangan negara menjadi sangat penting untuk kelangsungan bangsa dan negara untuk menuju cita cita nasional yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Polri sebagai representasi negara harus hadir dalam melakukan perbantuan pengamanan yang diamanatkan oleh Kepres 63 tahun 2004.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Istman Musaharun Pramadiba; 6 Mei 2020; "Pakar: Virus Corona Picu Perang Dingin Antara Cina dan Amerika"; <https://dunia.tempo.co/read/1339121/pakar-virus-corona-picu-perang-dingin-antara-cina-dan-amerika/full&view=ok>

## b. Regional

Pada perkembangan lingkungan regional terdapat beberapa isu yang mengemuka dan dampaknya dapat mengancam kepentingan nasional Indonesia, antara lain: isu pandemi covid-19 dan isu sengketa perbatasan dan wilayah di Laut China Selatan. Virus covid 19 yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, Provinsi Hubei, China sudah menyebar luas hingga 196 Negara didunia. Dari dari *worldometers.info*, update pandemi virus corona dunia per Minggu (11/7/2020) pukul 12.00 GMT, sudah sebanyak 12.848.617 orang positif covid-19 di dunia dan 567.766 orang yang meninggal dunia dan 7.483.605 yang sembuh. Dari 215 negara yang telah terjangkit, Amerika menjadi negara dengan kasus positif covid-19 terbesar, disusul Brasil, India, Rusia Peru. Sementara Indonesia berada di urutan 27. kasus 74.018 meninggal 3.535 dan 43.719 yang sembuh<sup>35</sup>.

Pertemuan tingkat tinggi (KTT) khusus ASEAN penanganan covid-19 yang digelar pada Selasa, 14 April 2020. Presiden Joko Widodo mengajukan empat usulan yang dapat dilakukan ASEAN dalam upaya penanganan pandemi covid-19. Dalam pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo menyampaikan empat usulan yang bisa dilaksanakan antara sesama anggota ASEAN. Keempat usulan Presiden Joko Widodo adalah : pertama untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di negara-negara anggota ASEAN, kedua untuk mencegah hambatan lalu lintas barang di tengah pandemi covid-19, Ketiga pentingnya kerja sama perlindungan warga negara dari negara-negara anggota ASEAN, terutama buruh migran yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian negara-negara ASEAN, Keempat menyampaikan pentingnya kesatuan, sinergi dan kolaborasi dalam penanganan covid 19 dikawasan Asia Tenggara.<sup>36</sup>

Kaitannya dengan isu sengketa perbatasan dan wilayah penetapan batas maritim serta akses ke sumber daya laut telah menjadi masalah serius di Laut

<sup>35</sup> M. Naufal Hafizh; 27 Mei 2020; "Update Corona Indonesia dan Dunia Hari Ini Rabu 27 Mei 2020"; <https://www.ayobandung.com/read/2020/05/27/90707/update-corona-indonesia-dan-dunia-hari-ini-rabu-27-mei-2020>

<sup>36</sup> <https://news.okezone.com/read/2020/04/14/18/2198893/indonesia-ajukan-empat-usulan-bantu-asean-tangani-covid-19>

China Selatan yang tidak kunjung selesai. Sengketa tersebut lebih kurang melibatkan 13 negara melawan China. Salah satunya adalah Filipina yang telah memenangkan Arbitrase di Belanda tetapi China dengan sikap yang jelas melalui catatan diplomatik menolak hal tersebut karena ketidak hadiran China dalam sidang tersebut. Jika China memperkuat klaim sembilan garis putus-putusnya dan terus menegaskan kekuatan militernya di wilayah Laut Natuna , ada kemungkinan China dan Indonesia akan terlibat dalam sengketa tentang penetapan batas maritim di sekitar Kepulauan Natuna.<sup>37</sup> Seperti halnya pada awal Januari 2020, telah terjadi pelanggaran oleh kapal nelayan China yang dikawal dengan dua kapal penjaga pantai (*coast guard*) dan satu kapal pengawas perikanan yang melakukan pencurian ikan di wilayah ZEE perairan Natuna.<sup>38</sup>

Sementara itu dikutip dari CNN, Amerika juga konsisten mengirimkan armada Angkatan Laut dan Angkatan Udarnya ke Laut Cina Selatan. Salah satu yang dikirim ke sana adalah Pesawat B-1 Lancer, salah satu bomber andalan Amerika selain B-2 Spirit dan B-52 Stratofortress. Tujuannya tak lain untuk menunjukkan bahwa Amerika (masih) hadir di Laut Cina Selatan di kala pandemi virus Corona.<sup>39</sup> Presiden AS Donald Trump mengirimkan 7 buah kapal selam ke Laut China Selatan. Ada pun sejumlah kapal selam yang dikirim tersebut empat kapal selam penyerang (*attack submarines*) yang bermarkas di Guam, USS Alexandria, serta beberapa kapal yang berbasis di Hawaii.<sup>40</sup> Mengutip Global Times, terakhir tanggal 15 juni 2020 hari senin kembali Presiden Trump mengirimkan kembali tiga kapal induk AS yakni USS Theodore Roosevelt, USS Nimitz dan USS Ronald Reagan, bersama dengan kapal perang dan pesawat

<sup>37</sup> Dhiana Puspitawati; 18 September 2018; “Sengketa Laut China Selatan dan Efeknya Bagi Indonesia”; <https://www.matamatapolitik.com/in-depth-sengketa-laut-china-selatan-dan-efeknya-bagi-indonesia/>

<sup>38</sup> Detik News; 5 Januari 2020; “Nelayan China Tangkap Ikan Gunakan Pukat Harimau di Laut Natuna”; <https://news.detik.com/berita/d-4847415/nelayan-china-tangkap-ikan-gunakan-pukat-harimau-di-laut-natuna>

<sup>39</sup> Istman Musaharun Pramadiba; 15 Mei 2020; “Tekan Cina, Amerika Perkuat Militernya di Laut Cina Selatan”; <https://dunia.tempo.co/read/1342557/tekan-cina-amerika-perkuat-militernya-di-laut-cina-selatan/full&view=ok>

<sup>40</sup> Nikolaus Tolen; 24 Mei 2020; “As-China Makin Panas, Trump Kirim 7 Kapal Selam ke Laut China Selatan”; <https://www.law-justice.co/artikel/87009/as-china-makin-panas-trump-kirim-7-kapal-selam-ke-laut-china-selatan/>

tempur lainnya, tengah berpatroli di perairan Indo-Pasifik, seperti dilaporkan Associated Press pada hari Jumat.<sup>41</sup>

Guna mengantisipasi tantangan-tantangan baru yang muncul dari kondisi lingkungan regional yaitu masalah pandemi covid 19 dan memanasnya situasi laut China Selatan maka pemerintah Indonesia juga harus mewaspadainya khususnya pengamanan Obvitnas yang berada dekat dengan Laut China Selatan misalnya pengeboran minyak lepas pantai dan wilayah Indonesia yang dekat dengan Laut China Selatan yang cukup banyak Ovbitnasnya. Dengan kesiapan pemerintah dan pengelola Obvitnas dalam menyikapi situasi regional ini diharapkan mampu menjawab tantangan-tantangan baru di tingkat regional., yang pada akhirnya kepentingan nasional, misi nasional, pencapaian tujuan dan cita-cita nasional akan tetap terselamatkan.

### c. Nasional

Pada perkembangan lingkungan nasional masih banyak persoalan bangsa Indonesia yang harus diselesaikan diantaranya meningkatnya pengangguran (dampak dari pandemi covid-19), penanggulangan terorisme dan radikalisme, penanggulangan sparatisme di Papua, penanggulangan bencana alam, penanggulangan kejahatan transnasional, mengatasi penyebaran pandemi covid-19. Adanya dampak covid 19 ini mengakibatkan turunnya perkembangan pertumbuhan ekonomi serta banyaknya phk karyawan pada Obvitnas atau objek tertentu. Hal ini mengkhawatirkan terjadinya kasus pencurian dll pada Obvitnas.

Pengaruh nasional tersebut dapat dicermati berdasarkan gatra-gatra yang berpengaruh kuat, terkait dalam pengamanan Obvitnas. Beberapa gatra tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

#### 1) Geografi

Indonesia sebagai negara kepulauan yang berlokasi diantara dua benua dan dua Lautan, yang membentang secara horisontal dari Sabang (Barat) sampai Merauke (Timur) sepanjang +5.140 km dan secara vertikal

<sup>41</sup> ibid

dari pulau Miangas (Utara) sampai Pulau Dana (Selatan) sepanjang +1.949 km, dengan  $\frac{3}{4}$  wilayah adalah laut seluas kurang lebih 5,8 juta km<sup>2</sup> terdiri dari 17.504 pulau. Dengan banyaknya pulau tersebut dan tersebar objek vital nasional baik yang ada didarat maupun yang ada dilautan, semuanya memerlukan pengamanan. Sehingga keamanan seharusnya menjadi aset dari Obvitnas yang harus diutamakan dikarenakan letaknya yang jauh dari personel Polri dan TNI. Sehingga pengamanan internal dan sistem manajemen pengamanan yang ideal diperlukan untuk pengamanan objek vital nasional atau objek tertentu.

## 2) Demografi

Jumlah penduduk Indonesia hingga saat ini mencapai 264,1 juta berada pada urutan terbanyak ke 4 didunia. Sedangkan keperluan personel pengamanan internal berupa satuan pengamanan diperlukan cukup banyak untuk Obvitnas dan objek tertentu. Data terakhir di Ditbinmas Baharkam Polri Satpam yg mempunyai keanggotaan resmi berkisar 800 ribu orang dan yang belum terdaftar cukup banyak. Sehingga satuan pengamanan juga merupakan lapangan kerja bagi mereka yang ingin mengabdi untuk bidang keamanan. Apalagi saat ini Indonesia sudah mulai mendapat bonus demografi yang pada puncaknya nanti sampai tahun 2040, Sehingga penduduk Indonesia harus mempunyai pekerjaan agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan keamanan pada Obvitnas dan Objek tertentu. Satuan pengamanan sebagai inti dari pengamanan internal Obvitnas dan Objek tertentu harus mempunyai kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam keamanan agar keberadaan Obvitnas dan Objek tertentu aman keberadaannya dengan menerapkan sistem manajemen pengamanan yang telah distandarisasi oleh Kepolisian.

## 3) Sumber kekayaan alam

Sumber kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah menjadikan bangsa Indonesia dari jaman ke jaman menjadi incaran bangsa lain untuk menguasainya. Sebagian besar sumber kekayaan alam kita dikelola oleh objek vital nasional sebagai modal untuk pembangunan nasional. Supaya

sumber kekayaan alam kita tidak dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab maka diperlukannya pengamanan pada objek vital nasional yang mengelola sumber kekayaan alam bangsa Indonesia. Sehingga dengan diperlukannya pengamanan pada Obvitnas dan objek tertentu maka sistem manajemen pengamanan dan personel pengamanan internal berupa Satpam yang profesional dan berkompeten sangat diperlukan.

#### 4) **Idiologi**

Pancasila sebagai ideologi nasional, dasar negara dan falsafah pandangan hidup bangsa memuat nilai-nilai yang harus dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya era globalisasi dan terbukanya sosial media membuat setiap orang bisa mengakses kejadian yang ada diseluruh penjuru dunia. Keberadaan radikalisme dan terorisme sudah masuk ke Indonesia dimulai dari kejadian Bom bali. Sehingga pengamanan Obvitnas dan Objek tertentu sangat diperlukan sebelum banyak kejadian menimpa Obvitnas dan objek tertentu. Apalagi sudah tertangkap beberapa personel jaringan teroris yang menjadi karyawan dari beberapa Obvitnas dan Objek tertentu. Diperlukannya sistem manajemen pengamanan untuk membentengi obvitnas agar tidak dimasuki oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang akhirnya bisa merugikan keberadaan Obvitnas dan objek tertentu.

#### 5) **Ekonomi**

Dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pertumbungan ekonomi menjadi minus 5,32 dan banyak pengangguran akibat kehilangan pekerjaan, termasuk pengamanan internal yaitu Satpam yang tidak diperpanjang lagi kontraknya atau dikurangi jumlah personel Satpamnya. Bahkan sudah banyak perusahaan baik Obvitnas atau objek tertentu yang sudah tidak bisa membayar karyawan dan banyak Obvitnas dan objek tertentu yang merugi. Hal ini juga perlu diantisipasi oleh pengamanan internal yang dilakukan pada Obvitnas dan objek tertentu dikarenakan banyak masyarakat sudah tidak mendapatkan penghasilan dan terbukti meningkatnya kriminal salah satu contohnya adalah banyaknya pecurian

baik dengan pemberatan ataupun tidak. Sehingga obvitnas dan objek tertentu perlu menerapkan sistem manajemen pengamanan yang telah distandarisasi oleh Polri agar terjadi peningkatan keamanan pada Obvitnas dan objek tertentu.

#### 6) Pertahanan dan keamanan

Dalam konteks pertahanan dan keamanan negara, perspektif ancaman yang kini dihadapi oleh bangsa Indonesia menjadi semakin dinamis diantaranya perselisihan Indonesia dengan negara China di laut China Selatan. Keteradaan objek vital nasional di kepulauan Natuna dan diperairan Laut China Selatan berupa sumber kekayaan laut berupa ikan dan kilang minyak di laut China Selatan. Dengan jauhnya objek vital nasional di pulau Natuna tersebut menjadikan suatu kerawanan tersendiri bagi keberlangsungan Obvitnas bidang perminyakan. Sehingga pengamanan internal Obvitnas sangat diperlukan dengan dibantu oleh Bakamla, TNI angkatan laut. Belum lagi banyaknya pengangguran akibat PHK mengakibatkan orang tidak mempunyai penghasilan yang pada akhirnya karena tuntutan kehidupan untuk makan maka mereka melakukan tindak pidana. Tentunya Obvitnas dan objek tertentu menjadi tempat sasaran untuk melakukan kejahatan dengan mengambil sesuatu yang bernilai untuk kelangsungan hidupnya. Maka obvitnas dan objek tertentu harus meningkatkan pengamanannya dengan menerapkan sistem manajemen pengamanan yang telah distandarisasi oleh Polri.

Guna mengantisipasi tantangan-tantangan baru yang muncul dari kondisi lingkungan nasional tersebut, maka pengamanan Obvitnas dan objek tertentu menjadi perhatian bagi pengelola obvitnas dan objek tertentu. Sehingga pengamanan tidak hanya dilaksanakan pada pengamanan secara fisik dengan menghadirkan personel satuan pengamanan dan personel Kepolisian semata tetapi lebih dari itu dengan menerapkan sistem manajemen pengamanan serta perkuatan dengan penggunaan peralatan pengamanan yang mendasari pada kemampuan teknologi pengamanan. Diperlukannya kerja sama antara pengelola

Obvitnas dan kementerian guna pencapaian pengamanan yang ideal. Sehingga diharapkan pada kedepannya, semua kepentingan nasional, misi nasional, pencapaian tujuan dan cita-cita nasional akan tetap terselamatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkelanjutan.

Pada akhirnya pada lingkungan strategis ini akan membawa dampak dan peluang bagi pengamanan Obvitnas. Adapun peluang dan kendalanya adalah sebagai berikut :

1) Peluang

Terjadinya serangan kepada objek vital di beberapa negara yang dilakukan oleh terorisme, kebakaran serta tindak pidana di lingkungan Obvitnas membuat Polri dan stakeholder pengamanan serta pengelola keamanan dengan serta merta meningkatkan pengamanan pada Obvitnas. Kesempatan ini dipergunakan Polri untuk mensosialisasikan serta menerapkan SMP Obvitnas kepada pengelola Obvitnas. Sekaligus Polri melakukan pengecekan terhadap Obvitnas tentang sistem manajemen pengamanan yang diberlakukan oleh masing masing Obvitnas dan merekomendasikan untuk Obvitnas segera menerapkan sistem manajemen pengamanan obvitnas dan audit untuk pengamanan Obvitnas.

2) Kendala.

Dengan adanya pandemi covid 19 yang terjadi hampir di 196 negara membawa dampak penurunan ekonomi termasuk di Indonesia pada kwartal ke 2 Thn 2020 mengalami penurunan sebesar minus 5,32 %. Dan hal ini menimbulkan banyaknya pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja baik dari pekerja Obvitnas atau pekerja objek tertentu. Hal ini dikawatirkan banyaknya pengangguran mengakibatkan banyak pelaku kejahatan. Hal ini dibuktikan dengan dilepaskannya narapidana yang bebas bersyarat melakukan kejahatan kembali. Sehingga pengamanan Obvitnas pada situasi pandemi covid 19 menjadi lebih rawan dibandingkan sebelum pandemi covid 19.

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### 12. Umum

Berdasarkan analisa terhadap pengamanan Obvitnas guna terwujudnya ketahanan nasional saat ini dihadapkan dengan perkembangan situasi lingkungan strategis baik global, regional dan nasional diharapkan pengamanan yang dilakukan oleh Obvitnas dengan penerapan sistem manajemen pengamanan dan audit dapat mengoptimalkan pelaksanaan pengamanan. Dengan menggunakan teori serta konsep dalam tinjauan pustaka maka dilakukan pembahasan sesuai dengan pertanyaan kajian dimulai dari apa yang dimaksud dengan objek vital nasional, bagaimana pelaksanaan sistem manajemen pengamanan pada Obvitnas, bagaimana pelaksanaan audit sistem manajemen pengamanan pada objek vital nasional serta bagaimana upaya pengamanan Obvitnas. Berikut diuraikan satu persatu .

#### 13. Apa yang dimaksud dengan objek vital nasional

##### a. Pengertian

Berdasarkan Keputusan Presiden No 63 tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang pengamanan Obvitnas ,yang dimaksud dengan Objek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Suatu objek/ kawasan bisa dikategorikan sebagai suatu Obvitnas jika dapat memenuhi salah satu, sebagian atau keseluruhan dari ciri ciri sebagai berikut : 1) menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari; 2) ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan;3) ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan/atau 4) ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

Obvitnas merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang hasilnya dipergunakan untuk modal dalam pembangunan nasional, guna mewujudkan cita cita nasional yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan

Pancasila. Pelaksana pengamanan yang dilakukan pada Obvitnas pada dasarnya dilakukan oleh pengamanan internal baik oleh Satpam organik perusahaan ataupun Satpam Outsourcing. Selain pengamanan yang dilakukan oleh Satpam maka Obvitnas dapat meminta pertolongan pengamanan pada Polri. Hal ini sesuai dengan Keppres nomor 63 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Polri berkewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap Obvitnas.

Pada perkembangan lingkungan strategis baik lingkungan global, regional dan nasional sekarang ini, dengan perkembangan teknologi menuju revolusi industri 4.0 yang mana kondisi lingkungan strategis global masih menunjukkan kehidupan dunia mengalami kondisi yang semakin rapuh dan tidak pasti. Hal ini salah satunya dikarenakan adanya Pandemi covid 19 yang melanda hampir 196 negara di seluruh dunia. Walaupun dengan perkembangan lingkungan strategis yang semakin rapuh dan tidak pasti tetapi di satu sisi telah menghadirkan tantangan-tantangan baru didalam pengamanan Obvitnas yang perlu dipahami dan diantisipasi. Obvitnas sangat potensial menjadi target ancaman dan gangguan kamtibmas termasuk kemungkinan terjadinya pidana, sabotage, ancaman / penyerangan teroris, kecelakaan kerja dan bencana alam. Untuk mencegah dan mengantisipasi ancaman dan gangguan pada Obvitnas yang memiliki karakteristik serta spesifikasi pengamanan yang berbeda maka diperlukan pedoman pengamanan yang standar bagi SMP.

Sebelum dikeluarkannya Keppres no 63 tahun 2004, pelaksanaan pengamanan Obvitnas terjadi tumpang tindih. TNI masih melaksanakan peran dan fungsi sebagai koordinator serta penanggung jawab pengamanan pada Obvitnas. Setelah dikeluarkannya UU no 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Keppres no 63 tahun 2004 ini peran dan fungsi Polri sebagai koordinator dan memberikan bantuan dalam mengamankan Obvitnas kecuali pada Obvitnas organik dilingkungan TNI. Penanggung jawab keamanan pada Obvitnas menjadi tanggung jawab pengelola, Polri wajib memberikan bantuan pengamanan serta pelibatan TNI diperlukan manakala perkuatan Polri tidak mampu menghadapi ancaman yang terjadi.

Obvitnas dalam pelaksanaan pengamanannya menerapkan SMP yang distandarisasikan oleh Polri. Standarisasi pengamanan yang ditetapkan oleh Polri menjadi pedoman Obvitnas untuk mengamankan areal wilayah kerjanya. Berkaitan hal pengamanan SMP Obvitnas ini mencakup keamanan fisik atau aset Obvitnas yang perlu diamankan yang menjadi ancaman bagi Obvitnas baik dari dalam atau luar Obvitnas ini disesuaikan dengan konfigurasi standar pengamanan untuk mencegah "*crime prevention*" dan "*loss prevention*". Pengamanan fisik harus disiapkan diantaranya peralatan pengamanan baik secara personal maupun secara tetap pada Obvitnas diantaranya adanya pintu gerbang keluar masuk personel/barang, alat pemadam kebakaran, CCTV , dan peralatan pendukung lainnya disesuaikan dengan situasi ancaman Obvitnas.

Dalam sistem manajemen pengaman objek vital nasional mencakup "*personnel security*" yaitu perlindungan keamanan pada semua personel Obvitnas sesuai dengan konsep keamanan menurut Prof Dr Hadiman yaitu suatu keadaan yang memberikan perlindungan dari segala ancaman didalamnya terdapat rasa aman, bebas dari ketakutan, kekhawatiran, keraguan serta perasaan kepastian dan keselamatan . Gangguan keamanan dapat berupa fisik maupun non fisik seperti kebebasan, kemerdekaan, kehormatan, nama baik, perasaan, waktu dan kesempatan. Keamanan diri bisa mencakup secara fisik dan non fisik serta kondisi yang bebas dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang bertujuan untuk tidak terjadi kerugian.<sup>42</sup> Pengamanan personel ini disamping mencakup semua personel Obvitnas terutama terhadap pimpinan Obvitnas disetiap level termasuk pengamanan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh personel internal objek vital nasional yang tidak jujur melakukan pekerjaannya.

Sistem manajemen pengamanan juga menerapkan pengamanan terhadap lingkungan Obvitnas, dengan melibatkan lingkungan Obvitnas akan meningkatkan social comunitas yang berada di sekitar Obvitnas dengan program community development dan *corporate sosial responsibiliti* Objek Vital Nasional.

<sup>42</sup> Prof Dr Hadiman Management Securiti 2005

**b. Penetapan Objek Vital Nasional**

Penetapan suatu Obvitnas merupakan kewenangan dari pada Kementerian yang terkait disesuaikan dengan bidangnya masing masing. Kementerian didalam menetapkan status objek vital nasional pada suatu perusahaan menetapkan persyaratan secara administrasi dan pengecekan pelaksanaan di lapangan. Pada pelaksanaan pengecekan di lapangan dibentuk tim yang dipimpin sebagai ketua oleh salah satu Direktur Jendral dari Kementerian dengan wakil ketua oleh Dirpam Obvit Kor sabhara Baharkam Polri dengan anggota dari unsur kemenkopolhukam, BAIS, BIN. Rekomendasi hasil dari lapangan dijadikan masukan oleh kementerian layak tidaknya suatu perusahaan itu menjadi Objek Vital Nasional dilihat dari segi Pengamanannya. Termasuk dengan kelengkapan persyaratan administrasi yang disyaratkan oleh Kementerian.

**c. Jenis dan pengelola Objek Vital Nasional**

Bidang usaha yang digeluti oleh Obvitnas hampir dibilang merata yang ada dilingkup usaha masyarakat . Mereka saling bersinergis dengan koperasi dan pihak swasta dalam melakukan usaha untuk mewujudkan pembangunan nasional menuju cita cita bangsa. Dalam pelaksanaannya pihak swasta secara murni melakukan usahanya untuk mencari keuntungan sesuai dengan prinsip perekonomian . Akan tetapi objek vital nasional yang dikelola oleh badan usaha milik negara tidak hanya semata mata untuk mencari keuntungan bagi penerimaan negara tetapi lebih dari itu diantaranya memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional, bertanggung jawab atas penyediaan jasa dan barang yang berkualitas untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, berpartisipasi secara aktif membimbing dan membantu pengusaha ekonomi lemah dalam wujud koperasi dan masyarakat, serta menjadi pionir berbagai kegiatan usaha yang belum dilakukan oleh koperasi ataupun swasta.

Jenis Obvitnas menurut pasal 3 dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 tahun 2019 meliputi industri, instalasi, perhubungan, pertambangan dan energi, gedung perkantoran pemerintah / swasta / asing, kawasan wisata, lembaga negara serta

perhotelan dll<sup>43</sup>. Penetapan objek vital nasional ditetapkan oleh Menteri atau kepala badan lembaga setingkat Menteri , yang disesuaikan dengan pembinaan masing masing kementerian. Pengelola Obvitnas bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan Obvitnas masing masing berdasarkan prinsip pengamanan internal.Pengamanan Internal merupakan bentuk pengamanan yang dilakukan oleh pengelola yang dilakukan dengan menetapkan personel pengamanan dari internal perusahaan atau pengamanan oleh outsourcing yang dilakukan oleh BUJP dengan satuan pengamanan (Satpam). Sedangkan Polri hanya berkewajiban memberikan bantuan pada obvitnas.

Pengelolaan keamanan Obvitnas yang menjadi tanggung jawab pengelola Obvitnas dalam menyelenggarakan pengamanan internal harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri serta mempertimbangkan masukan dari Departemen/Instansi terkait dan ketentuan internasional yang berlaku<sup>44</sup>. Selanjutnya pengelola Obvitnas bersama sama dengan Polri menentukan konfigurasi standar pengamanan masing-masing Obvitnas yang meliputi kekuatan personil beserta sarana prasarana pengamanannya. Pada tahapan akhir pengelola Obvitnas bersama sama dengan Kepolisian melaksanakan kegiatan audit SMP secara periodik.

Obvitnas sesuai dengan konsep SMP yang ditetapkan oleh Polri harus menerapkannya agar Obvitnas dapat melaksanakan produktivitasnya dengan aman tidak ada gangguan ataupun ancaman tindak pidana yang terjadi di Obvitnas.Sehingga Obvitnas dalam melaksanakan pengamanan harus menstandarisasikan dengan standar pengamanan yang ditetapkan oleh Polri.

14. **Bagaiman pelaksanaan sistem manajemen pengamanan pada Obvitnas**
  - a. **Pengertian**

Menurut Perpol 3/2019 yang dimaksud dengan manajemen sistem pengamanan Obvitnas dan objek tertentu yang selanjutnya disebut sistem

---

<sup>43</sup> Peraturan Kepolisian nomer 3 Tahun 2019 ttg perubahan atas peraturan Kapolri nomer 13 tahun 2017 tentang pemberian bantuan pengamanan Objek Vital dan Objek Tertentu

<sup>44</sup> ibid

manajemen pengamanan Obvitnas dan objek tertentu adalah bagian dari manajemen yang saling terkait dalam bentuk pembinaan teknis dan audit terhadap seperangkat elemen pengamanan yang terdiri dari komitmen dan kebijakan, pola pengamanan, konfigurasi standar pengamanan, standar kemampuan pelaksanaan pengamanan dan monitoring evaluasi.<sup>45</sup> Sistem manajemen pengamanan dan pengamanan Obvitnas merupakan tugas pertolongan yang dilaksanakan oleh Polri kepada Obvitnas disesuaikan dengan kebutuhannya. Kedua kegiatan tersebut dilaksanakan secara terpadu oleh Polri dan pengelola Obvitnas melalui standar dan penerapan SMP yang ditetapkan oleh Kapolri. Pengamanan merupakan bagian dari SMP yang pelaksanaannya dijalankan dengan pemenuhan kehadiran personel Polri beserta peralatan pengamanan yang diperlukan. Sedangkan SMP merupakan bentuk pertolongan Polri kepada Obvitnas yang diberikan dalam bentuk manajemen pengamanan.

### **b. Pembiayaan sistem manajemen mengamanan**

Pelaksanaan SMP dilaksanakan oleh personel Kepolisian serta tenaga ahli atau profesional yang mempunyai keahlian dibidang pengamanan serta memiliki kompetensi dengan dibuktikan adanya ijazah dan sertifikasi oleh badan yang berkewajiban diantara adalah lembaga sertifikasi profesi ( LSP ) Polri. Dalam pelaksanaan SMP pada Obvitnas menggunakan anggaran dari daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) Polri yang bersumber kepada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ketentuan tersebut mendasari Peraturan Pemerintah nomer 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 huruf z dan aa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi penerimaan dari “ Jasa pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek tertentu” dan aa “ Jasa Manajemen sistem Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> ibid

<sup>46</sup> PP nomer 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Satker pengguna PNBP lingkup Polri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 347/KMK.05/2017 tanggal 17 April 2017 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP pada Kepolisian Negara Republik Indonesia .Adapun penggunaan penerimaan negara bukan pajak oleh Polri ditetapkan sebesar 80 % dan 20 % untuk kontribusi kepada negara, sedangkan dana 80 % untuk Polri dipergunakan untuk penyediaan dan peningkatan layanan yang berkualitas dan terukur pada Polri serta untuk mendorong peningkatan penerimaan negara bukan pajak. Semenjak ditetapkan pp no 60 thn 2016 ini Polri sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan capaian sebagai berikut;

TAHUN	2017	2018	2019	24- 8 - 2020
TARGET	235.422.185.000	373.244.939.000	387.576.520.000	416.776.906.000
REALISASI	169.917.407.000	335.649.469.000	397.455.241	256.171.191.000
PROSENTASE	72.18%	89,93%	102.55%	61.46 % <sup>47</sup>

Dengan pembiayaan menggunakan DIPA Polri yang bersumber kepada PNBP, disinilah menimbulkan permasalahan yang terjadi pada pengelola Obvitnas, kalau pembayarannya menggunakan DIPA Polri tetapi bersumber kepada Rupiah murni maka hal ini tidak menjadi masalah bagi Objek Vital Nasional. Karena didalam ketentuan pelaksanaan PNBP ini yang wajib melakukan penyetoran anggarannya adalah pihak yang mendapatkan jasa atau pelayanan dari Polri dalam hal ini yaitu Obvitnas. Seharusnya Obvitnas harus menganggarkannya pada perusahaan dikarenakan bahwa pengamanan itu sendiri merupakan aset dari perusahaan, yang perlu diamankan dengan melakukan SMP, melakukan audit dan membeli peralatan pengamanan. Dengan sistem pembiayaan dengan PNBP Polri ini dikarenakan negara belum mampu membiayai kegiatan tersebut sehingga pihak pengguna yang dibebankan oleh negara karena Obvitnas yang mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut.

<sup>47</sup> Data Ditpamobvit Kor Sabhara Baharkam Polri 2020

### c. Standar dan penerapan sistem manajemen pengamanan

Standar yang ditetapkan oleh pihak Kepolisian dalam rangka penerapan sistem manajemen pengamanan ini menjadikan hal yang mutlak harus diterapkan pada Obvitnas untuk tercapainya standar pengamanan pada objek vital nasional. Standar SMP Obvitnas ini dimaksudkan untuk membantu Obvitnas dalam mengelola secara efektif elemen-sistem manajemen pengamanan yang dapat disatukan dengan persyaratan standar manajemen lainnya.

Adapun standar sistem manajemen pengamanan ini meliputi, komitmen dan kebijakan, pola pengamanan, konfigurasi pengamanan, standar kemampuan pelaksana pengamanan, monitoring dan evaluasi.

#### 1). Komitmen dan kebijakan

Merupakan bentuk dukungan pimpinan puncak dengan jajarannya untuk menerapkan seluruh elemen SMP, yang dibuktikan dengan pernyataan kebijakan yang diikuti seluruh jajarannya mengenai strategi implementasi penerapan sistem manajemen pengamanan terkait dengan alokasi, sumber daya, mekanisme evaluasi, dan perbaikan berkesinambungan untuk mencapai tujuan objek vital nasional.<sup>48</sup>

SMP yang dilaksanakan pada Obvitnas ini merupakan satu kesatuan dari sistem pengamanan yang harus dilaksanakan pada semua personel yang berada di Obvitnas tersebut, baik dari level pimpinan sampai kepada level pekerja dan bahkan pada tamu yang memasuki objek vital nasional. Keamanan yang berada di obvitnas juga merupakan aset dari Obvitnas tersebut, aset Obvitnas harus diamankan dari ancaman, gangguan dan hambatan baik dari dalam ataupun dari luar Obvitnas, supaya hal tersebut menghindari dari kerugian dan *lost prevention*. Pengelolaan keamanan harus bertanggung jawab semua pihak baik pemilik maupun manajemen, karyawan dan masyarakat sekitarnya. Hal ini sesuai dengan

---

<sup>48</sup> Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2019 Tentang Prosedur Pemberian Jasa Pengamanan dan Sistem Manajemen Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu

konsep keamanan menurut DR Hadiman bahwa keamanan harus bisa dirasakan oleh personel yang ada di obvitnas baik keamanan secara fisik atau secara non fisik serta bebas dari ancaman dan tidak mengalami kerugian yang diakibatkan oleh dampak dari pengamanan tersebut.

Kebijakan Pengamanan menetapkan arahan dan kerangka prinsip-prinsip kegiatan yang lengkap untuk suatu Obvitnas. Kebijakan juga menjadi pedoman untuk menetapkan sasaran pengamanan sebagai wujud tanggung jawab dan kinerja yang harus dicapai Obvitnas. Kebijakan menunjukkan komitmen formal dari Obvitnas dan dokumen pernyataan kebijakan pengamanan sebaiknya dibuat bertanggal dan ditetapkan oleh pimpinan puncak serta disosialisasikan dan diketahui oleh personel Obvitnas. Kebijakan pengamanan sebaiknya konsisten dengan proses bisnis obvitnas dan sistem manajemen lainnya.

Semua tanggung jawab manajemen harus ditunjukkan dalam komitmen untuk meningkatkan kinerja SMP. Obvitnas harus menjamin semua pekerja yang bekerja untuk Obvitnas memiliki tanggung jawab terhadap aspek pengamanan di bawah kendali Obvitnas, termasuk ketiaatan terhadap peraturan dan persyaratan pengamanan Obvitnas.

Permasalahan yang timbul di elemen komitmen ini adalah ketidak konsistennya pimpinan manajemen puncak untuk memenuhi apa yang menjadi persyaratan ,misalnya komitmen tentang personel pengamanan , peralatan pengamanan, penganggarannya dan tindak lanjut dari keberlangsungan SMP selanjutnya.Dalam fungsi manajemen yang pertama yaitu tahap perencanaan merupakan tahapan yang sangat menentukan untuk tercapainya sistem manajemen pengamanan yang akan diterapkan oleh Obvitnas tersebut . Hal ini dikarenakan pada tahapan perencanaan inilah komitmen dan kebijakan pimpinan menjadi dasar untuk pelaksanaan SMP Obvitnas. Manakala prencanaan ini tidak disesuaikan dengan ketentuan dari stdandar SMP maka secara jelas pelaksanaan pengamanan ini akan timbul banyak permasalahan pada

akhirnya. Karena pada tahapan perencanaan inilah yang membuat SMP ini bisa berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

## 2). Pola pengamanan

Pola pengamanan merupakan bentuk, sifat, sasaran dari segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan, serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan di kawasan Obvitnas dan objek tertentu<sup>49</sup>.

Pola pengamanan terdiri dari berbagai elemen yang secara garis besarnya adalah bentuk pengamanan, sifat pengamanan, sasaran pengamanan, area pengamanan, komando dan pengendalian.

**a) Bentuk pengamanan.** Bentuk pengamanan ini terdiri dari pengamanan langsung dan pengamanan tidak langsung. Pengamanan secara langsung diantaranya merupakan kegiatan berupa pengerahan dan penggelaran kekuatan beserta sarana dan prasarana pengamanan sesuai kebutuhan dan perkiraan ancaman. Sedangkan pengamanan tidak langsung diantaranya merupakan kegiatan pemantauan, pengawasan dan penerimaan laporan dari pengelola Obvitnas.

**b) Sifat pengamanan.** Sifat pengamanan ini terdiri dari pengamanan terbuka dan pengamanan tertutup. Pengamanan terbuka ini diantaranya dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan terhadap badan, barang dan kendaraan yang masuk/keluar pada Obvitnas. Sedangkan pengamanan tertutup diantaranya kegiatan pengawasan terhadap tamu, karyawan, barang dan dokumen.

**c) Sasaran pengamanan.** Sasaran pengamanan terdiri dari manusia (pejabat perusahaan, tamu, karyawan, masyarakat sekitar), barang (mesin produksi, instalasi, hasil produksi, alat perkantoran) serta tempat

---

<sup>49</sup> Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2019 Tentang Prosedur Pemberian Jasa Pengamanan dan Sistem Manajemen Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu

(gedung perkantoran,komplek perumahan,tempat produksi) dan dokumen serta kegiatan (kegiatan produksi/non produksi, kinjungan)

**d) Area pengamanan.** Area pengaman terdiri dari area dalam Obvitnas/Objek tertentu (lokasi produksi,perkantoran,pergudangan dan perparkiran), diluar area Obvitnas /objek tertentu ( batas bangunan dengan pagar terluar,pagar terluar batas bangunan dengan pemukiman penduduk), lingkungan sekitar diluar kawasan Obvitnas dan objek tertentu meliputi permukiman penduduk dan objek lain disekitar Obvitnas dan objek tertentu.

**e) Komando dan pengendalian.** Komando dan pengendalian Obvitnas berada pada pengelola Obvitnas manakala pada situasi normal/aman, Sedangkan manakala terjadi ancaman dan gangguan yang melibatkan masyarakat atau karyawan dan terjadi kotingensi maka komando dan kendali oleh Polri.

Dalam penentuan pola pengamanan ini didasarkan pada potensi kerawanan yang ada pada Obvitnas tersebut.Potensi kerawanan diantaranya adalah adanya rawan pencurian, rawan penculikan,rawan penyerangan, rawan pembunuhan dll. Hal ini sesuai dengan manajemen security yang disampaikan oleh Prof DR Hadiman yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian dari sebab apapun. Sehingga Pola pengamanan ini harus bisa menjelaskan bentuk pengamanannya, sifat pengamanannya, sasaran pengamanannya, area pengamannya serta komando dan pengendali pengaman tersebut.

Pola pengamanan ini dalam fungsi manajemen termasuk dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan karena didalam pola pengamanan ini direncanakan dan ditentukannya bentuk pengamanan, sifat pengamanan, sasaran pengamanan dan area pengamanan serta ditetapkannya pengorganisasian personel yang akan terlibat didalam pola pengamanan tersebut. Pola pengamanan ini sangat penting untuk menentukan keberhasilan sistem manajemen pengamanan karena dari

pola pengamanan inilah akan tergelar bagaimana pola yang akan dilakukan didalam pengamanan tersebut

### 3). Konfigurasi standar pengamanan

Konfigurasi standar pengamanan merupakan gambaran atau sketsa yang menjelaskan tentang komponen standar pengamanan, penetapan dan pembinaan area pengamanan, konsep umum pengamanan dan personel pengamanan dalam sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu<sup>50</sup>

Konfigurasi standar pengamanan dilingkungan Obvitnas masing - masing ditentukan oleh pengelola Obvitnas bersama dengan Kepolisian. Adapun konfigurasi standar pengamanan ini mencakup tentang komponen standar pengamanan , penetapan dan pembinaan area pengamanan , konsep umum pengamanan, personel pengamanan. Sedangkan infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan desain infrastruktur yang dibuat oleh pengelola Obvitnas dengan berkoordinasi dengan Kepolisian.

Konfigurasi standar pengamanan ini merupakan penjabaran fungsi manajemen tahap ketiga yaitu pelaksanaan. Dalam pentahapan ini pelaksanaan kegiatan menjadi hal yang sangat penting terhadap pelaksanaan pengamanan itu sendiri. Sehingga pada tahapan ini yang juga disebut gerakan aksi telah direncanakan pada tahan perencanaan. Gerakan ini merupakan operasional dari sistem manajemen pengamanan yang telah ditentukan dan ditetapkan pada tahap perencanaan.

### 4). Standar kemampuan pelaksana pengamanan

Standar kemampuan pelaksana pengamanan, merupakan ukuran tertentu/kriteria maupun patokan yang digunakan oleh pelaksana pengamanan.<sup>51</sup>

Standar kemampuan pelaksana pengamanan Obvjek Vital Nasional terdiri atas:

<sup>50</sup> ibid

<sup>51</sup>ibid

a) Standar kemampuan pelaksana pengamanan personel diperoleh melalui : Pembinaan teknis dan pembinaan kemampuan pengamanan; dan/atau Pendidikan dan/atau pelatihan. Dalam membuat standar kemampuan pengamanan harus memperhatikan : data personel pengamanan dan kompetensinya; peraturan perundang-undangan terkait pengamanan; persyaratan pengguna jasa tenaga pengamanan; dan analisa risiko ancaman dan gangguan keamanan.<sup>52</sup>

b) Standar kemampuan pelaksana pengamanan:

(1) Anggota Polri

( a). Memiliki masa dinas paling singkat 2 (dua) tahun;  
 ( b). Memiliki kompetensi di bidang : Pembuatan laporan polisi; Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli Turjawali; Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP); Penanganan tindak pidana ringan; Kemampuan intel dasar; Komunikasi sosial; Beladiri; Menembak paling rendah kelas 3; Search and Rescue (SAR) terbatas; Membuat Laporan Informasi; Pemahaman karakteristik Objek Vital Nasional.

(2). Satuan Pengamanan

Obvitnas harus memastikan bahwa setiap personel yang mempengaruhi kinerja pengamanan harus memiliki kemampuan serta kompetensi berdasarkan pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang sesuai, dan harus memelihara rekaman terkait. Obvitnas harus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan risiko pengamanan dan SMP. Pelatihan harus dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut serta pelaksanaan evaluasi efektivitas pelaksanaan pelatihan atau tindakan

<sup>52</sup> peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia no 13 Tahun2017 ttg pemberian bantuan pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu

terkait yang dilakukan, catatan pelatihan harus dipelihara. Prosedur pelatihan harus ditetapkan untuk setiap tingkatan berbeda sesuai dengan tanggung jawab, kemampuan dan ketrampilan dan resiko.

Kemampuan yang harus dimiliki oleh satuan pengamanan meliputi : kemampuan kepolisian terbatas, kemampuan keselamatan dan keamanan lingkungan kerja serta pelatihan / kursus spesialisasi dibidang industrial Security. Satpam sebagai pengembang fungsi Kepolisian terbatas diperoleh melalui pelatihan Satpam pada Lembaga Kepolisian ataupun Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang telah mendapatkan izin dari Kapolri. Kemampuan yang dimiliki Satuan Pengamanan terdiri atas 3 jenjang pelatihan yaitu ; Pelatihan Gada Pratama, Pelatihan Gada Madya dan Pelatihan Gada Utama.

Pada elemen Standar kemampuan pelaksana pengamanan ini merupakan bagian dari fungsi manajemen pelaksanaan. Pada tahapan ini pelaksanaan pengamanan dilakukan oleh pengamanan internal yaitu Satpam dan Kepolisian serta TNI manakala diperlukan. Sehingga 3 unsur pengamanan itulah yang menjadi tulang punggung pengamanan pada Obvitnas disamping seluruh karyawan Obvitnas yang juga mengembangkan fungsi keamanan masing masing diwilayah kerjanya.

## 5). Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi didalam kegiatan SMP merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pelaksanaan pengamanan ,hal ini dikarenakan pada tahapan ini semua kegiatan pengamanan harus dilakukan monitoring didalam pelaksanaannya dan dilakukan evaluasi secara berkala dan

berkesinambungan agar terjaga kualitas dari pengamanan dan untuk perbaikan sistem manajemen pengamanan pada tahun berikutnya.

Adapun prosedur monitoring dan evaluasi yang harus dilakukan mencakup hal hal sebagai berikut : dilakukan secara berkala atas pencapaian sasaran kinerja pengamanan dan efektivitas pengendalian pengamanan; pengukuran proaktif kinerja Obvitnas atas pemenuhan terhadap program manajemen, kriteria operasi dan persyaratan peraturan perundangan; kinerja pemantauan yang dilakukan atas kejadian-kejadian ancaman pengamanan yang telah terjadi atau yang berpotensi; pelaporan dan penyimpanan data dan hasil-hasil pemantauan dan pengukuran harus dapat digunakan untuk analisa terhadap tindakan koreksi dan pencegahan. Obvitnas harus melakukan identifikasi dalam memonitor dan mengevaluasi kinerja dari SMP secara menyeluruh agar semua kegiatan pengamanan didalam Obvitnas bisa diukur dan di nilai kinerjanya dan untuk evaluasi perbaikan di tahun berikutnya.

Dalam fungsi manajemen yang keempat yaitu tahap pengawasan (*controlling*) merupakan tahapan yang ikut menentukan untuk perbaikan SMP kedepannya. Dalam tahapan pengawasan untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan SMP Obvitnas dan Juga termasuk dalam mengukur tercapainya target sistem pengamanan yang akan diterapkan oleh Obvitnas tersebut .Sehingga fungsi manajemen mulai dari pentahapan yang pertama sampai yang keempat menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan dan dilaksanakan agar pengamanan Obvitnas tersebut menjadi ideal dan berkurangnya *lost prevention* dan tindak pidana serta ancaman yang terjadi baik dari dalam ataupun dari luar Obvitnas. Sehingga keproduktivitasan Obvitnas tersebut akan meningkat dan menghasilkan keuntungan.

Sesuai data yang didapat dari Ditpam Obvit Kor Sabhra Baharkam Polri bahwa Obvitnas yang telah menerapkan sistem manajemen pengamanan tidak lebih dari 20 objek vital nasional dan yang telah melakukan audit dan mendapatkan kualifikasi gold baru 4 objek vital nasional. Permasalahan objek vital nasional belum melaksanakan sistem

manajemen pengaman dikarenakan beberapa faktor diantaranya ; Belum adanya kesadaran bagi pemimpin puncak tentang pentingnya suatu pengamanan harus menggunakan sistem manajemen pengamanan yang telah distandarisasi oleh pembina pengamanan yaitu Kepolisian; Pengelola pengamanan Obvitnas banyak yang belum mengetahui tentang bagaimana menerapkan sistem manajemen pengamanan yang benar; Belum adanya anggaran yang dianggarkan untuk pembiayaan penerapan sistem manajemen pengamanan yang distandarisasikan oleh Polri.

Dengan melihat kenyataan dilapangan tersebut maka diperlukannya sosialisasi mengenai pentingnya sistem manajemen pengamanan kepada pengelola objek vital nasional dan kementerian terkait oleh Polri agar mereka mengerti akan kegunaan sistem manajemen pengamanan, sehingga mereka bisa segera menerapkan sistem manajemen pengamanan tersebut. Dengan mereka menerapkan sistem manajemen pengamanan ini, maka Obvitnas akan menyelenggarakan pengamanan dengan prosedur yang benar yang pada akhirnya akan membuat situasi pengamanan menjadi kondusif. Dengan pengamanan yang kondusif maka produktifitas objek vital nasional itu akan meningkat dengan sendiri sehingga keuntunganpun akan dihasilkan secara maximal.

## 15. Bagaimana pelaksanaan audit sistem manajemen pengamanan Obvitnas

### a. Pengertian

Audit adalah proses kegiatan pemeriksaan untuk meyakinkan tingkat kesesuaian antara satu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu identitas dengan kriterianya yang dilakukan oleh auditor yang berkompeten dengan mendekatkan serta mengevaluasi bukti-bukti pendukungnya secara sistematis, analisis, kritis dan selektif guna memberikan pendapat dan/atau kesimpulan serta rekomendasi pihak yang berkepentingan .Pelaksanaan audit sistem manajemen pengamanan dilaksanakan dengan dua kegiatan yaitu :

#### 1). Pembinaan teknis

Dalam Pasal 8 ayat 2 Perkabaharkam No. 1 Tahun 2019 disebutkan bahwa pembinaan teknis , yang merupakan kegiatan dan tindakan sebelum

dilakukan audit untuk memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk dengan tujuan untuk mengetahui, membangun, mengembangkan dan memastikan bahwa SMP telah diterapkan oleh Obvitnas dan objek tertentu.<sup>53</sup> penyelenggaraan jasa sistem manajemen pengamanan dilakukan dalam sistem pembinaan teknis audit sistem manajemen pengamanan menggunakan 3 tiga kegiatan diantaranya adalah :kegiatan supervisi,asistensi,dan verifikasi.

## 2) Audit

Audit sistem manajemen pengamanan harus dilakukan secara periodik/berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan sistem manajemen pengamanan .Hal ini sesuai dengan amanat Keppres Nomer 63 Tahun 2004 tentang pengamanan Obvitnas pasal 5 ayat 3 menyatakan pengelola objek vital nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan secara periodik audit sistem manajemen pengamanan yang ada sesuai Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia . Audit harus dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personel yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang sudah ditetapkan. Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber ancaman dan gangguan yang didapatkan di tempat kerja. Hasil audit harus digunakan oleh pengurus/ pananggung jawab atau pengusaha dalam proses tinjauan ulang manajemen

### b. Pelaksana

Audit dilaksanakan terhadap Obvitnas dan objek tertentu dan pelaksanaannya dilakukan oleh beberapa auditor, adapun sumber auditor terdiri dari : auditor internal objek vital nasional , pegawai negeri pada Polri , anggota TNI , PNS TNI serta tenaga profesional yang telah memiliki kompetensi

<sup>53</sup> Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2019 Tentang Prosedur Pemberian Jasa Pengamanan dan Sistem Manajemen Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu

yang dikeluarkan Lembaga Sertifikasi Profesi Polri. Pelaksanaan uji kompetensi auditor dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi POLRI, dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh asesor pengamanan objek vital nasional. Hingga saat ini asesor pengamanan objek vital nasional yang memiliki kualifikasi asesor dari (Badan Nasional Standarisasi Profesi) BNSP baru berjumlah 14 orang. Nama-nama asesor pengamanan objek vital nasional terdapat dalam **lampiran 2**

Permasalahan yang dihadapi kaitannya dengan audit ini adalah jumlah auditor yang kurang dari unsur Polri dan auditor internal dari Obvitnas yang masih sedikit sekali. Apabila dilihat dari jumlah auditor dan banyaknya Obvitnas sejumlah 2444 dan Objek tertentu cukup banyak dan setiap tahunnya akan bertambah seiring dengan perkembangan pembangunan, maka sangat tidak mungkin pekerjaan audit ini bisa berjalan dengan optimal. Sehingga kebijakan Polri untuk semua Obvitnas agar mempunyai internal auditor dengan cara melaksanakan pelatihan dan uji kompetensi terhadap personel Obvitnas untuk menjadi auditor internal SMP. Hingga saat ini Obvitnas yang telah dilakukan Audit masih sangat sedikit sekali dikarenakan adanya perubahan regulasi untuk audit dan belum banyaknya Obvitnas yang telah menerapkan SMP. Apalagi awal tahun 2020 ini terjadi pandemi covid 19 yang melanda bangsa Indonesia serta 196 negara dunia.

#### c. Sasaran audit dan penilaian

Sasaran didalam pelaksanaan audit yang nantinya merupakan hasil dari pada kesesuaian dan ketidak sesuaian sistem manajemen pengamanan yang dimiliki oleh objek vital nasional. Sistem manajemen pengamanan merupakan inti dari sasaran audit untuk bisa dinilai oleh auditor yang bertugas melaksanakan audit. Adapun sasaran audit objek vital nasional meliputi :

1. **Komitmen dan kebijakan**, merupakan bentuk dukungan pimpinan puncak dengan jajarannya untuk menerapkan seluruh elemen sistem manajemen pengamanan, yang dibuktikan dengan pernyataan kebijakan yang diikuti seluruh jajarannya mengenai strategi implementasi penerapan

sistem manajemen pengamanan terkait dengan alokasi, sumber daya, mekanisme evaluasi, dan perbaikan berkesinambungan untuk mencapai tujuan objek vital nasional.

2. **Pola pengamanan**, merupakan bentuk, sifat, sasaran dari segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan, serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan di kawasan objek vital nasional dan objek tertentu;
3. **Konfigurasi standar pengamanan**, merupakan gambaran atau sketsa yang menjelaskan tentang komponen standar pengamanan, penetapan dan pembinaan area pengamanan, konsep umum pengamanan dan personel pengamanan dalam SMP Obvitnas dan objek tertentu;
4. **Standar kemampuan pelaksana pengamanan**, merupakan ukuran tertentu/kriteria maupun patokan yang digunakan oleh pelaksana pengamanan; dan
5. **Monitoring dan evaluasi**, merupakan bentuk kegiatan untuk memantau, mengevaluasi, memperbaiki, mengalokasikan anggaran dan sumber daya lainnya untuk pencapaian tujuan penerapan SMP<sup>54</sup>.

Dari kelima sasaran tersebut merupakan 5 elemen dari SMP yang harus dipenuhi oleh objek vital nasional tersebut. Temuan dari sasaran audit tersebut akan menghasilkan penilaian dari sistem manajemen pengamanan yang diterapkan oleh objek vital nasional tersebut. Sasaran audit yang merupakan elemen SMP tersebut terdiri dari 118 Kriteria yang harus tergelar didalam SMP. Kriteria 118 tersebut terdiri dari elemen komitmen dan kebijakan dengan bobot 15 % dengan 18 kriteria, elemen pola pengamanan dengan bobot 25 % dengan 49 kriteria, elemen konfigurasi pengamanan dengan bobot 30 % dengan 31 kriteria, elemen standar kemampuan pelaksana pengamanan dengan bobot 20 % dengan 10 kriteria, elemen monitoring dan evaluasi dengan bobot 10 % dengan

---

<sup>54</sup> ibid

10 kriteria. Adapun tabel 118 kriteria yang merupakan daftar periksa audit /penilaian SMP terdapat dalam lampiran **nomer 3**.

Sistem penilaian yang dipergunakan didalam audit ini dengan parameter penilaian masing masing kriteria yang ada pada daftar periksa audit dinilai dengan skor angka 0,1,2. Penilaian didapat dengan skor 0 manakala dalam penerapan kriteria yang ada pada daftar periksa Audit SMP tidak dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian didapat dengan skor 1 manakala dalam penerapan kriteria yang ada pada daftar periksa audit SMP tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Penilaian didapat dengan skor 2 manakala dalam penerapan kriteria yang ada pada daftar periksa audit SMP dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan<sup>55</sup>.

Dalam pelaksanaan penilaian audit oleh auditor sistem manajemen pengamanan dilakukan oleh tim auditor sistem manajemen pengamanan yang ditunjuk oleh Kabaharkam Polri. Pada akhirnya pelaksanaan audit ini diberikan suatu penghargaan atau tindakan pembinaan disesuaikan dengan tingkatan pencapaian dalam penerapan sistem manajemen pengamanan tersebut. Adapun skala penilaian sebagai berikut : baik sekali, nilai 86%-100%, sertifikat kategori emas; baik, nilai 71%-85%, sertifikat kategori perak; cukup, nilai 56%-70%, sertifikat kategori perunggu; kurang, nilai kurang dari 55%, mendapatkan tindakan pembinaan dalam rangka perbaikan. Penghargaan berupa piagam sertifikasi sistem manajemen pengamanan yang ditanda tangani oleh Kapolri.

Permasalahan yang dihadapi dalam sasaran audit ini yaitu belum adanya auditor internal di setiap objek vital nasional yang mempunyai kompetensi auditor internal yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi sehingga Obvitnas belum dapat menerapkan sistem manajemen pengamanan. Hal ini dikarenakan objek vital nasional belum melaksanakan sasaran audit dalam SMP.

#### d. Anggaran

Tarif Anggaran jasa pengamanan dan Jasa SMP / audit terhadap Obvitnas berdasarkan kontrak kerja sama dengan prinsip kesepakatan bersama dan

---

<sup>55</sup> Ibid.

ditetapkan oleh pemerintah dengan PP No 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat 1 huruf z dan aa yang berbunyi bahwa jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi penerimaan dari jasa pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu serta jasa manajemen SMP pada Obvitnas dan objek tertentu<sup>56</sup>.

Ketentuan penggunaan dana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ini ditentukan oleh Menteri Keuangan, semua hasil kontrak dengan Obvitnas dan objek tertentu 100 % disetorkan ke kas negara, 20 % kontribusi untuk negara dan 80 % dikembalikan untuk Polri yang dipergunakan untuk operasional kegiatan Kepolisian. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347 Tahun 2017 tentang penggunaan sebagian dana PNBP untuk jenis PNBP pada fungsi Pamobvit paling tinggi sebesar 80 %. Selanjutnya Kapolri menjabarkan keputusan tersebut dengan menetapkan Norma index atas kegiatan pengamanan objek vital nasional yaitu kegiatan jasa pengamanan dan jasa SMP.

Secara menyeluruh pelaksanaan audit merupakan implikasi dari fungsi manajemen yaitu wujud dari pengawasan, sesuai dengan teori manajemen salah satunya adalah pengawasan yang mendeterminasi apa saja yang telah dilakukan oleh objek vital nasional serta melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai selama ini dan pelaksanaan koreksi terhadap pelaksanaan tugas pengamanan yang telah dilaksanakan. Sehingga dengan hasil audit ini nantinya menjadi dasar bagi Obvitnas untuk pelaksanaan perbaikan sistem keamanan ditahun kedepan, hal ini dikarenakan dinamikan kemanan harus menjadi perhatian obvitnas dan harus disesuaikan.

Permasalahan secara menyeluruh terhadap audit adalah sistem pembayaran yang menggunakan daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) POLRI dengan sistem penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mana mekanisme

---

<sup>56</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Reoublik Indonesia

pembayarannya dibebankan kepada objek vital nasional sebagai pengguna jasa pelayanan Kepolisian. Hal ini dikarenakan disamping negara kekurangan anggaran yang mencukupi, dan aturan PNBP adalah pengguna jasa pelayanan yang dibebankan pembayarannya.

Pelaksanaan audit sistem manajemen pengamanan objek vital nasional ini merupakan tahapan yang sangat penting untuk mengetahui atau melihat hasil kegiatan pengamanan selama setahun kebelakang dan untuk meningkatkan sistem manajemen pengamanan tahun yang akan datang. Pelaksanaan audit ini harus dilakukan secara kontinyu dan berkala guna mengetahui keefektifan dari penerapan sistem manajemen pengamanan. Audit sistem manajemen pengamanan ini harus dilaksanakan secara sistematis dengan memperhatikan matrik penilaian SMP Obvitnas dan independen oleh personel yang mempunyai kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Polri . Hasil audit sistem manajemen pengamanan objek vital nasional harus dipergunakan oleh pengelola pengamanan objek vital nasional dalam proses tinjauan ulang dalam manajemen. Dalam fungsi manajemen yang keempat yaitu tahap pengawasan ( *controlling* ) untuk memastikan langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan rencana audit yang telah ditentukan sehingga tujuan audit dapat tercapai. Jika ditemukan kekurangan atau tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan maka dirumuskan tindakan koreksi sehingga tujuan audit dapat tercapai. Hal tersebut juga untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan Juga termasuk dalam mengukur tercapainya sistem pengamanan yang akan diterapkan oleh objek vital nasional tersebut .Sehingga pelaksanaan audit ini menjadi penilaian terhadap pelaksanaan pengamanan secara menyeluruh terhadap objek vital nasional.

## **16. Upaya pengamanan objek vital nasional**

### **a. Sistem manajemen pengamanan**

Dengan belum banyaknya Obvitnas yang menerapkan SMP dan audit, maka peran Polri dituntut untuk lebih proaktif dalam permasalahan pengamanan pada Obvitnas. Hal ini dikarenakan Polri sebagai leading sektor pengamanan dan

berkewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap objek vital nasional. Adapun upaya yang dilakukan oleh Polri diantaranya adalah sebagai berikut :

### **1) Biaya**

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas PNBP Polri, bahwa pembiayaan jasa sistem manajemen pengamanan dan audit dilaksanakan dengan sistem DIPA Polri. Hal ini diartikan bahwa pembiayaan atas jasa pengamanan, jasa sistem manajemen pengamanan dan audit dibayarkan oleh pengguna jasa Kepolisian dalam hal ini adalah pengelola objek vital nasional.

PNBP merupakan mekanisme yang ditetapkan oleh kementerian keuangan dan harus dilaksanakan oleh pengguna jasa Kepolisian. Sehingga mau tidak mau Obvitnas tetap harus membayar kepada negara,karena sudah aturan pemerintah. Maka upaya yang dilakukan Oleh Kepolisian supaya pembiayaan SMP tidak terlalu berat bagi Obvitnas maka Polri melaksanakan pelatihan terhadap personelnya diseluruh jajaran Polda agar mempunyai kemampuan untuk melaksanakan SMP dan audit sehingga akan mengurangi pengeluaran pengeluaran Obvitnas.

### **2) Standar /penerapan sistem manajemen pengamanan**

Sistem manajemen pengamanan merupakan sistem manajemen yang dipergunakan untuk mengatur jalannya manajemen pengamanan di objek vital nasional. Hingga saat ini pelaksanaannya sesuai data yang ada pada Dit Pam Obvit baru 20 objek vital nasional yang sudah dan sedang proses pelaksanaan sistem manajemen pengamanan dan audit. Objek vital nasional masih belum melaksanakan kegiatan ini keseluruhan dikarenakan diantaranya; belum adanya kebijakan dari pengelola atau manajemen puncak untuk menerapkan, Menunggu permasalahan covid 19 selesai, Pengelola belum menganggarkan biaya SMP dan audit,masih menunggu pelatihan SMP dan audit. Adapun Upaya yang dilakukan oleh Polri adalah :

- a)** Menyiapkan regulasi dan aturannya serta perbaikan terhadap aturan yang belum sesuai dengan situasi yang ada di lapangan.
- b)** Melaksanakan sosialisasi regulasi tentang Pengamanan Obvitnas dan objek tertentu. Kepolisian telah melaksanakan sosialisasi secara internal di Jajaran Kepolisian dan secara external pada objek vital nasional dan objek tertentu serta pada stakeholder satuan pengamanan dan pada badan usaha jasa pengamanan. Pada tingkatan Kepolisian telah dilakukan sosialisasi pada beberapa Kepolisian Daerah dan sosialisasi pada Direktur Pengamanan Obvit. . Adapun pada pelaksanaan sosialisasi di external dilakukan dibeberapa tempat Objek Vital Nasional baik secara pertemuan langsung ataupun dengan cara Virtual. Sosialisasi pada satuan pengamanan dan badan usaha jasa pengamanan dilakukan melalui lembaga pelatihan baik pada BUJP ataupun pada LSP Polri. Sampai saat ini Kepolisian masih melaksanakan sosialisasi peraturan atau regulasi tentang pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu.
- c)** Melaksanakan pelatihan asesor pengamanan Obvitnas. Pelatihan asesor dilaksanakan dengan bekerja sama dengan LSP Polri, asesor ini dididik untuk melaksanakan uji kompetensi terhadap auditor sistem manajemen pengamanan Obvitnas. Hingga saat ini jumlah asesor pengamanan objek Vital sejumlah 14 orang yang terdiri dari anggota Polri dan Purnawirawan Polri.
- d)** Melaksanakan pelatihan SMP
- Pelaksanaan pelatihan SMP dilaksanakan secara internal dan secara external. Pelatihan secara internal dilakukan oleh Kepolisian terhadap personel Kepolisian khususnya yang berada pada fungsi Ditpam Obvit polda dan Polres Jajaran. Pelatihan SMP external diperuntukan kepada personel yang bertugas sebagai manajer security pada Obvitnas dan objek tertentu serta pada badan usaha jasa pengamanan. Pelaksanaan pelatihan SMP internal di Kepolisian sudah dilaksanakan lebih kurang 251 anggota baik perwira pertama,

menengah dan Perwira Tinggi. Data nama nama personel yang memiliki kualifikasi auditor ada dalam **Lampiran 4**. Sedangkan pelatihan SMP external baru dilaksanakan 1 kali dengan peserta sebanyak 56 orang yang diikuti oleh manager security pada Obvitnas dan objek tertentu dan BUJP dan dilanjutkan dengan uji kompetensi dan yang berhasil kompeten sebanyak 53 orang . Daftar Nama nama yang mengikuti pelatihan auditor external terdapat dalam **lampiran 5**

**b. Audit**

Pelaksanaan audit untuk objek vital nasional hingga saat ini baru 20 objek vital nasional dan yang sudah mendapatkan sertifikat gold sebanyak 5 perusahaan dan yang sisanya masih tahap proses audit dan proses SMP. Pelaksanaan audit ini belum banyak dilaksanakan oleh objek vital nasional dikarenakan :

- a) Adanya persepsi dari objek vital nasional bahwa pelaksanaan audit ini bukan kewajiban tetapi sukarela, hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan audit tidak ada penegasan tentang adanya sangsi bagi objek vital nasional yang tidak menerapkan audit sistem manajemen pengamanan.
- b) Belum tersosialisasinya semua objek vital nasional yang ada di wilayah kerja seluruh Polda atau Polres jajaran. sehingga Kepolisian hingga kini masih tetap melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya audit SMP.
- c) Kepolisian bekerja sama dengan Lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan Kompetensi auditor baik untuk auditor Polri dan auditor internal objek vital nasional.
- d) Hingga saat ini Kepolisian tetap melaksanakan audit pada objek vital nasional yang telah mendaftarkan diri dan sudah siap sistem manajemen pengamanannya.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 17. Simpulan

Setelah dilakukan pengkajian terhadap permasalahan pengamanan objek vital nasional di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa :

- a. objek vital nasional adalah sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau kepentingan negara dan sebagai sumber pendapatan negara yang bersifat strategis, yang perlu diamankan oleh pengelola objek vital nasional dengan pertolongan oleh Kepolisian dan TNI sesuai dengan kebutuhan.
- b. Dengan adanya objek vital nasional belum menerapkan sistem manajemen pengamanan ini secara langsung menghambat objek vital nasional sendiri didalam mengelola pengamanannya, yang pada akhirnya pengamanan yang berada di objek vital nasional dilaksanakan tidak sesuai dengan standarisasi sistem manajemen pengamanan objek vital nasional. Sehingga dikawatirkan banyak permasalahan pengamanan yang terjadi dan akhirnya akan membuat *loss Prevention* objek vital nasional tersebut dan pada akhirnya akan mengganggu Ketahanan Nasional bangsa Indonesia, pemerintah harus mewajibkan objek vital nasional untuk menerapkan SMP. Seharusnya sebelum dijadikan objek vital nasional oleh Kementerian terkait maka perusahaan tersebut harus sudah menerapkan sistem manajemen pengamanan yang telah distandarisasi oleh Polri. Selanjutnya pemerintah juga harus membuat regulasi perundangan yang tegas dengan mencantumkan sangsi bagi objek vital nasional yang tidak menerapkannya. Dengan demikian semua objek vital nasional dipastikan menerapkan sistem manajemen pengamanan yang telah distandarisasi Polri, dengan objek vital nasional sudah menerapkan sistem manajemen pengamanan yang telah distandarisasi maka pelaksanaan pengamanan akan optimal sesuai yang diharapkan yang akhirnya bisa meningkatkan produktifitas dari pada objek vital nasional tersebut. Sehingga objek vital nasional tersebut akan menghasilkan hasil produksi yang maximal dan mendapatkan keuntungan yang bisa

dipergunakan oleh negara untuk melakukan pembangunan guna mencapai cita cita bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

c. Audit sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dibiayai dengan daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) Polri dengan sistem penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Hal ini sebagai pengguna jasa Kepolisian adalah objek vital nasional yang harus melakukan pembayaran kepada negara karena hal ini merupakan ketentuan dan aturan sistem pembiayaan PNBP . Untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh objek vital nasional maka Polri melaksanakan pelatihan auditor dan komptensi auditor bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi (LSP ) Polri kepada personel Kepolisian di jajaran Polda dan Polres manakala terpenuhinya personel, agar mereka bisa melaksanakan audit di wilayah kerjanya , dengan demikian hal tersebut bisa mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh objek vital nasional.

## 18. Rekomendasi

objek vital nasional dalam mengelola pengamanannya diperlukan sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan audit yang telah distandarisasi oleh Polri. Hal tersebut untuk Menghindari adanya kerugian/ lost prevention dari obvitnas akibat adanya tindak pidana yang terjadi atau ancaman dari pihak lain maka penulis merekomendasikan kepada Kementerian terkait, Polri serta pengelola objek vital nasional dan badan usaha jasa pengamanan untuk:

a. Kementerian terkait sebagai pembina teknis dalam pembinaan objek vital nasional dan sebagai lembaga yang berwenang menetapkan suatu objek vital Nasional maka disarankan sebelum objek vital nasional tersebut ditetapkan oleh Kementerian hendaknya sistem manajemen pengamanan ini menjadikan syarat untuk suatu perusahaan dapat diajukan objek vital nasional . Sehingga dengan demikian setelah mereka ditetapkan menjadi objek vital nasional secara otomatis mereka sudah menerapkan sistem manajemen pengamanan dan telah melaksanakan audit yang telah distandarisasi oleh Polri.

- b. Perusahaan yang telah ditetapkan sebagai objek vital nasional hendaknya segera menerapkan sistem manajemen pengamanan yang benar sesuai dengan standarisasi yang dilakukan oleh Polri.
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai leading sektor didalam pengamanan objek vital nasional agar lebih profesional dengan menyiapkan personel yang mengusai bidang pengamanan dan audit, Sehingga pihak objek vital nasional yakin akan sistem manajemen pengamanan yang di standarisasi oleh Polri, yang pada akhirnya semua objek vital nasional dengan sendiri butuh dan tertarik dengan sistem manajemen pengamanan dan audit tersebut.
- d. Badan usaha jasa pengamanan hendaknya mengikuti standarisasi yang ditetapkan oleh Polri menyangkut aturan aturan bagi personil pengamananya. Agar personelnya dalam melaksanakan pengamanan pada objek vital nasional menjadi mahir dan profesional dibidangnya.
- e. Kementerian terkait dan Kepolisian serta objek vital nasional dan BUJP agar lebih koordinatif dalam menangani permasalahan pengamanan pada objek vital nasional sehingga bisa menghasilkan sistem manajemen pengamanan yang ideal. Dengan sistem manajemen pengamanan yang ideal akan meningkatkan produktifitas objek vital nasional yang pada akhirnya keuntungan objek vital nasional bisa dipergunakan didalam pembangunan untuk mensejahterakan seluruh bangsa Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi buku-buku,

Djamin, Awaloedin dalam buku “ Sispamswakarsa dan Industrial Securiti “ 2002  
“ , Manajemen Sekuriti di Indonesia , Yayasan Tenaga  
Kerja Indonesia Pusat pembinaan Sumber Daya  
Manusia” 2015  
“ Satpam dan Manager security, jakarta” 1997

Friedmen ,Robert , *Community Policing- comparative perspectives and prospects*, cipta manunggal, saduran Kunarto jakarta 1999

Hadiman “manajemen Securiti” 2005

budiharto, Harries. Hadi ,Miftah. Pemberian jasa pengamanan dan jasa SMP Obvitnas atau Objek Tertentu, Rafikatama jakarta, 2019

Handoyo, Manajemen Security, dasar dasar pengamanan dan usaha jasa keamanan, Pt Elex media komputindo Jakarta

Lemhannas. *Empat Konsensus Dasar Bangsa SBS Pancasila*, Jakarta. , 2020

Lemhannas. *Empat Konsensus Dasar Bangsa SBS UUD NRI 1945*, Jakarta , 2020

Lemhannas, *Empat Konsensus Dasar Bangsa SBS NKRI*, Jakarta. , 2020

Lemhannas, *Empat Konsensus Dasar Bangsa SBS Bhineka Tunggal Ika*, Jakarta. , 2020

Lemhannas, *Geopolitik Indonesia dan Wawasan Nusantara*, Jakarta. , 2020

Lemhannas, *Geopolitik Indonesia dan Wawasan Nusantara*, Jakarta. , 2020

Lemhannas, *Geosrtiaegi Indonesia dan Ketahanan Nasional*, Jakarta. , 2020

Lemhannas, *Kewaspadaan Nasional*, Jakarta. , 2020

Lemhannas, *Sistem Menejeman Nasional*, Lemhannas; Jakarta. , 2020

Parsudi Suparlan,Bunga rampai Ilmu Kepolisian, yayasan pengembangan kajian ilmu kepolisian,jakarta 2004

Terry,George R, Prinsip Prinsip Manajemen " *Guide to Management* ", PT Bumi Aksara Jakarta 2000

### **Undang-undang & Peraturan,**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Republik Indonesia nomer 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

Keppres nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional

Peraturan Pemerintah no 43 Tahun 2012 Tentang Tata cara pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pembinaan terhadap Polsus,PPNS dan bentuk Pam Swakarsa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara republik indonesia

Keputusan Menteri Keuangan nomor 347/KMK.05/2017 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan kapolri nomer 13 Tahun 2017 tentang pemberian bantuan pengamanan pada Objek Vital Nasional

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2019 ttg perubahan atas peraturan Kapolri no 13 tahun 2017 tentang pemberian bantuan pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia no 7 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan kapolri nomer 13 Tahun 2017 tentang pemberian bantuan pengamanan pada Objek Vital Nasional

Peraturan Kabaharkam Polri nomor 1 Tahun 2019 tentang Prosedur pemberian jasa pengamanan dan sistem manajemen pengamanan pada Objek Vital Nasional dan objek tertentu

### **Internet,**

Dhiana Puspitawati; 18 September 2018; "Sengketa Laut China Selatan dan Efeknya Bagi Indonesia"; <https://www.matamatapolitik.com/in-depth-sengketa-laut-china-selatan-dan-efeknya-bagi-indonesia/>

Detik News; 5 Januari 2020; "Nelayan China Tangkap Ikan Gunakan Pukat Harimau di Laut Natuna"; <https://news.detik.com/berita/d-4847415/nelayan-china-tangkap-ikan-gunakan-pukat-harimau-di-laut-natuna>

Ilim Fathimah Timorria dan Rahayuningsih; 15 Januari 2019; "Adu Pengaruh AS dan China, Bagaimana Sikap Indonesia ?"; kabar24.bisnis.com; <https://kabar24.bisnis.com/read/20190115/19/878935/adu-pengaruh-as-dan-china-bagaimana-sikap-indonesia>

Istman Musaharun Pramadiba; 6 Mei 2020; "Pakar: Virus Corona Picu Perang Dingin Antara Cina dan Amerika"; <https://dunia.tempo.co/read/1339121/pakar-virus-corona-picu-perang-dingin-antara-cina-dan-amerika/full&view=ok>

Istman Musaharun Pramadiba; 15 Mei 2020; "Tekan Cina, Amerika Perkuat Militernya di Laut Cina Selatan"; <https://dunia.tempo.co/read/1342557/tekan-cina-amerika-perkuat-militernya-di-laut-cina-selatan/full&view=ok>

Jazak; 13 Juli 2015; " Jurus Sakti Menghadapi yang Tak Pasti"; Kompas.com; <https://ekonomi.kompas.com/read/2015/07/13/060700726/Jurus.Sakti.Menghadapi.yang.Tak.Pasti>

<https://money.kompas.com/read/2020/06/22/163400126/dampak-corona-jumlah-pengangguran-bisa-tembus-12-7-juta-di-2021?page=all>

M. Naufal Hafizh; 27 Mei 2020; "Update Corona Indonesia dan Dunia Hari Ini Rabu 27 Mei 2020"; <https://www.ayobandung.com/read/2020/05/27/90707/update-corona-indonesia-dan-dunia-hari-ini-rabu-27-mei-2020>

Nikolaus Tolen; 24 Mei 2020; "AS-China Makin Panas, Trump Kirim 7 Kapal Selam ke Laut China Selatan"; <https://www.law-justice.co/artikel/87009/as-china-makin-panas-trump-kirim-7-kapal-selam-ke-laut-china-selatan/>

<https://news.okezone.com/read/2020/04/14/18/2198893/indonesia-ajukan-empat-usulan-bantu-asean-tangani-covid-1>

## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1** : Daftar Objek Vital Nasional kementeria PUPERA, Perindustrian, Pariwisat, ESDM, Perhubungan

**Lampiran 2** : Daftar Nama Nama Asessor Pengamanan Objek Vital Nasional.

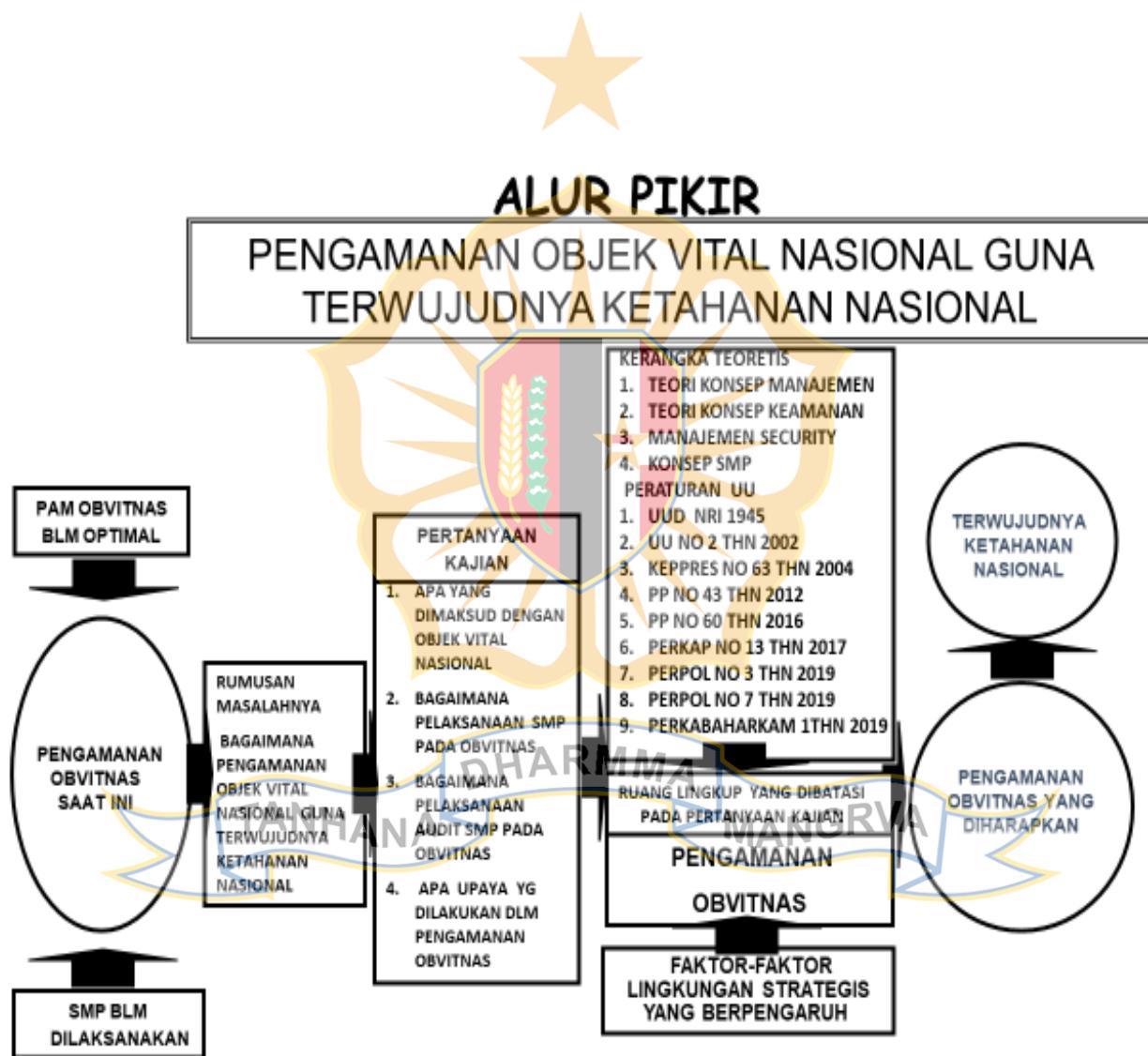
**Lampiran 3** : Matrix penilaian SMP Obvitnas dan Objek Tertentu

**Lampiran 4** : Daftar Nama nama Auditor SMP Obvitnas dan Objek Tertentu

**Lampiran 5** : Daftar nama nama Auditor internal dari Obvitnas dan BUJP



## 1. ALUR PIKIR



## 2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### BIODATA

**Nama lengkap:** HARRIES BUDIHARTO, S.I.K., M.Si  
**Tempat, tanggal lahir:** TUBAN, 28 OKTOBER 1968  
**Jenis kelamin:** LAKI-LAKI  
**Status :** KAWIN  
**Alamat rumah:** PERUMAHAN GPI KAV 22  
**LIMO,DEPOK**  
**Pekerjaan:** POLRI  
**Pangkat/Gol :** KOMBES POL / IV C



### PASANGAN

**Nama:** YANTY RAHMAWATY, MAP

### PENDIDIKAN

No.Institusi	Jenjang	Jurusan	Tahun	Tempat
1 SESPI POLRI	Profesi	ILMU KEPOLISIAN	2007 - 2007	LEMBANG BANDUNG
2 PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN	S1	ILMU KEPOLISIAN	2000-2002	JAKARTA
3 AKADEMI KEPOLISIAN	Profesi	ILMU KEPOLISIAN	1987 - 1990	SEMARANG
4 UNIVERSITAS INDONESIA	UMUM	KIK ANGK 7	2004	JAKARTA

### PENGALAMAN KERJA

No.Institusi	Posisi	Tahun	Tempat
1 POLRI	PLT KARO OPS	2007	POLDA BENGKULU
2 POLRI	KABAG REGIEDENTDITLANTAS	2008	POLDA BENGKULU
POLRI	KAPOLRES LEBONG	2009	POLDA BENGKULU
3 POLRI	KAPOLRES BENGKULU UTARA	2010	POLDA BENGKULU
4 POLRI	WADIR AM OBVIT	2012	POLDA BENGKULU
5 POLRI	DIRLANTAS	2013	MALUKU UTARA
6 POLRI	DIR SABHARA NTB	2016	NTB
7 POLRI	KASUBDIT AUDIT PAM OBVIT BAHARKAM	2018	JAKARTA
8 POLRI	ANJAK PAM OBVIT	2020--	JAKARTA
		SEKARANG	

**ANAK**

No.	Nama	Jenis kelamin	Tempat, tanggal lahir	Pendidikan
1	dr PRADNYA AYU GALUH LUPIYA	PEREMPUAN	TUBAN 7 MEI 1994	S1
2	PRAPTIKA NURUL TSANY SALSABILA, SH	PEREMPUAN	MANADO, 21 JANUARI 1998	S1



**LAMPIRAN 1****DAFTAR OBYEK VITAL NASIONAL  
SEKTOR PUPR SESUAI KEPMEN PUPR NO. 331/KPTS/M/2020**

NO.	OBVITNAS	LOKASI	KETERANGAN (Kabupaten/Kota - Provinsi)
1	Jalan Tol Sigli - Banda Aceh (75 KM) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Propinsi DI Aceh	Subbidang Bina Marga
2	Jalan Tol Langsa - Lhokseumawe (135 KM) - bagian dari Trans Sumatera	Propinsi DI Aceh	Subbidang Bina Marga
3	Jalan Tol Lhokseumawe - Sigli (135 KM) - bagian dari Trans Sumatera	Propinsi DI Aceh	Subbidang Bina Marga
4	Jalan Tol Binjai - Langsa (110 KM) - bagian dari Trans Sumatera	Propinsi DI Aceh - Propinsi Sumut	Subbidang Bina Marga
5	Jalan Tol Medan - Binjai (16 KM) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Propinsi Sumut	Subbidang Bina Marga
6	Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi (68,9 KM) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Propinsi Sumut	Subbidang Bina Marga
7	Jalan Tol Medan - Kualanamu - Lubuk Pakam - Tebing Tinggi (62 KM)	Propinsi Sumut	Subbidang Bina Marga
8	Jalan Tol Rantau Prapat - Kisaran (100 KM) - bagian dari Trans Sumatera	Propinsi Sumut	Subbidang Bina Marga
9	Jalan Tol Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Prapat-Tarutung-Sibolga (200 KM) - bagian dari Trans Sumatera	Propinsi Sumut	Subbidang Bina Marga
10	Belawan - Medan - Tanjung Morawa (42,70 KM)	Propinsi Sumut	Subbidang Bina Marga
11	Jembatan Kelok Sembilan	Propinsi Sumbar	Subbidang Bina Marga
12	Jalan Tol Bukit Tinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang (80 KM) bagian dari Trans Sumatera	Propinsi Sumbar	Subbidang Bina Marga
13	Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukit Tinggi - (185 KM) - bagian dari Trans Sumatera	Propinsi Riau - Propinsi Sumbar	Subbidang Bina Marga
14	Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai (131,5 KM) - bagian dari Trans Sumatera	Propinsi Riau	Subbidang Bina Marga

15	Jalan Tol Rengat - Pekanbaru (175 KM) - bagian dari Trans Sumatera	Propinsi Riau	Subbidang Bina Marga
16	Jalan Tol Dumai - Sp. Sigambal - Rantau Prapat (175 KM) - bagian dari Trans Sumatera	Propinsi Riau - Propinsi Sumbar	Subbidang Bina Marga
17	Jembatan Barelang	Propinsi Kepulauan Riau	Subbidang Bina Marga
18	Jalan Tol Batu Ampar - Muka Kuning - Bandara Hang Nadim (25 KM)	Propinsi Kepulauan Riau	Subbidang Bina Marga
19	Jalan Tol Jambi - Rengat (190 KM) - bagian dari Trans Sumatera	Propinsi Jambi - Propinsi Riau	Subbidang Bina Marga
20	Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jambi (191 KM) - bagian dari Trans Sumatera	Propinsi Sumsel - Propinsi Jambi	Subbidang Bina Marga
21	Jalan Tol Pematang Panggang - Kayu Agung (85 KM) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Propinsi Sumsel	Subbidang Bina Marga
22	Jalan Tol Palembang - Tanjung Api-api (70 KM) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Propinsi Sumsel	Subbidang Bina Marga
23	Jalan Tol Palembang - Simpang Indralaya (22 KM) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Propinsi Sumsel	Subbidang Bina Marga
24	Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung (112 KM)	Propinsi Sumsel	Subbidang Bina Marga
25	Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim (110 KM) - bagian dari Trans Sumatera	Propinsi Sumsel	Subbidang Bina Marga
26	Jalan Tol Muara Enim - Lubuk Linggau - Lahat (125 KM) - bagian dari Trans Sumatera	Propinsi Sumsel	Subbidang Bina Marga
27	Jembatan Musi IV	Propinsi Sumsel	Subbidang Bina Marga
28	Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu (95 KM) - bagian dari Trans Sumatera	Propinsi Sumsel - Propinsi Bengkulu	Subbidang Bina Marga
29	Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang (100 KM) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Propinsi Sumsel - Propinsi Sumsel	Subbidang Bina Marga
30	Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar (140,9 KM) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Propinsi Lampung	Subbidang Bina Marga
31	Prof. Dr. Ir Soedijatmo	Propinsi Banten	Subbidang Bina Marga
32	Jalan Tol Serang - Panimbang (83,6 KM)	Propinsi Banten	Subbidang Bina Marga
33	Jalan Tol Kunciran - Serpong (11,2 KM)	Propinsi Banten	Subbidang Bina Marga
34	Jalan Tol Serpong - Balaraja (30 KM)	Propinsi Banten	Subbidang Bina Marga
35	Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami (5,55 KM)	Propinsi Banten	Subbidang Bina Marga

36	Pondok Aren - Serpong (7,24 KM)	Propinsi Banten	Subbidang Bina Marga
37	Tangerang - Merak (73 KM)	Propinsi Banten	Subbidang Bina Marga
38	Jalan Tol Serpong - Cinere (10,1KM)	Propinsi DKI Jakarta	Subbidang Bina Marga
39	Jalan Akses Tanjung Priok (16,7 KM)	Propinsi DKI Jakarta	Subbidang Bina Marga
40	Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran (14,2 KM)	Propinsi DKI Jakarta	Subbidang Bina Marga
41	Jalan Tol Sunter - Rawa Buaya - Batu Ceper (20 KM)	Propinsi DKI Jakarta	Subbidang Bina Marga
42	Jalan Tol Semanan - Sunter (20,2 KM) - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Propinsi DKI Jakarta	Subbidang Bina Marga
43	Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang (9,4 KM) - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Propinsi DKI Jakarta	Subbidang Bina Marga
44	Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu (9,6 KM) - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Propinsi DKI Jakarta	Subbidang Bina Marga
45	Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu (9,6 KM) - bagian dari 6 ruas Tol DKI Jakarta	Propinsi DKI Jakarta	Subbidang Bina Marga
46	Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang (8,7 KM) - bagian dari 6 ruas Tol DKI Jakarta	Propinsi DKI Jakarta	Subbidang Bina Marga
47	Jalan Tol Pasara Minggu - Casablanca (9,2 KM) - bagian dari 6 ruas Tol DKI Jakarta	Propinsi DKI Jakarta	Subbidang Bina Marga
48	Jalan Tol Ancol Timur - Pluit Elevated (Penambahan lingkup Cawang - Tanjung Priok - Ancol Timur - Pluit (9,0 KM)	Propinsi DKI Jakarta	Subbidang Bina Marga
49	Cawang - Tomang - Pluit (23,5KM)	Propinsi DKI Jakarta	Subbidang Bina Marga
50	Cawang - Tanjung Priok - Ancol Timur - Jembatan Tiga/Pluit (27,05 KM)	Propinsi DKI Jakarta	Subbidang Bina Marga
51	JORR S (14,25 KM)	Propinsi DKI Jakarta	Subbidang Bina Marga
52	JORR W1 (9,85 KM)	Propinsi DKI Jakarta	Subbidang Bina Marga
53	JORR W2 (7,87 KM)	Propinsi DKI Jakarta	Subbidang Bina Marga
54	JORR Non S (31,18 KM)	Propinsi DKI Jakarta - Propinsi Jabar	Subbidang Bina Marga
55	Jakarta - Bogor - Ciawi (59 KM)	Propinsi DKI Jakarta - Propinsi Jabar	Subbidang Bina Marga
56	Jakarta - Tanggerang (33 KM)	Propinsi DKI Jakarta - Propinsi Jabar	Subbidang Bina Marga

57	Jakarta - Cikampek (83 KM)	Propinsi DKI Jakarta - Propinsi Jabar	Subbidang Bina Marga
58	Jalan Tol Jakarta Cikampek II Sisi Selatan (36,4 KM)	Propinsi DKI Jakarta - Propinsi Jabar	Subbidang Bina Marga
59	Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Elevated (64 KM)	Propinsi DKI Jakarta - Propinsi Jabar	Subbidang Bina Marga
60	Jalan Tol Cibitung - Cilincing (34 KM)	Propinsi DKI Jakarta - Propinsi Jabar	Subbidang Bina Marga
61	Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (21,04 KM)	Propinsi DKI Jakarta - Propinsi Jabar	Subbidang Bina Marga
62	Jalan Tol Soreang - Pasir koja (11 KM)	Propinsi Jabar	Subbidang Bina Marga
63	Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuh (59 KM)	Propinsi Jabar	Subbidang Bina Marga
64	Jalan Tol Ciawi - Sukabumi (54 KM)	Propinsi Jabar	Subbidang Bina Marga
65	Jalan Tol Cinere - Jagorawi (14,6 KM)	Propinsi Jabar	Subbidang Bina Marga
66	Jalan Tol Cimanggis - Cibitung (25,4 KM)	Propinsi Jabar	Subbidang Bina Marga
67	Jalan Tol Depok - Antasari (21,5 KM)	Propinsi Jabar	Subbidang Bina Marga
68	Jalan Tol Bogor Ring Road (11 KM)	Propinsi Jabar	Subbidang Bina Marga
69	Jalan Tol Sukabumi - Ciranjang - Padalarang ( 61 KM)	Propinsi Jabar	Subbidang Bina Marga
70	Jembatan Pasupati	Propinsi Jabar	Subbidang Bina Marga
71	Cikampek - Palimanan (116,5 KM)	Propinsi Jabar	Subbidang Bina Marga
72	Padalarang - Cileunyi (64,60 KM)	Propinsi Jabar	Subbidang Bina Marga
73	Cikampek - Padalarang (58,80 KM)	Propinsi Jabar	Subbidang Bina Marga
74	Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap Seksi 1-2 (Gedebage - Tasikmalaya) (95,20 KM)	Propinsi Jabar	Subbidang Bina Marga
75	Palimanan - Kanci (26,30 KM)	Propinsi Jabar - Propinsi Jateng	Subbidang Bina Marga
76	Kanci - Pejagan (35 KM)	Propinsi Jateng	Subbidang Bina Marga
77	Semarang Seksi ABC (24,75 KM)	Propinsi Jateng	Subbidang Bina Marga
78	Jalan Tol Pejagan - Pemalang (57,55 KM)	Propinsi Jateng	Subbidang Bina Marga
79	Jalan Tol Pemalang - Batang (39,2 KM)	Propinsi Jateng	Subbidang Bina Marga
80	Jalan Tol Batang - Semarang (75 KM)	Propinsi Jateng	Subbidang Bina Marga

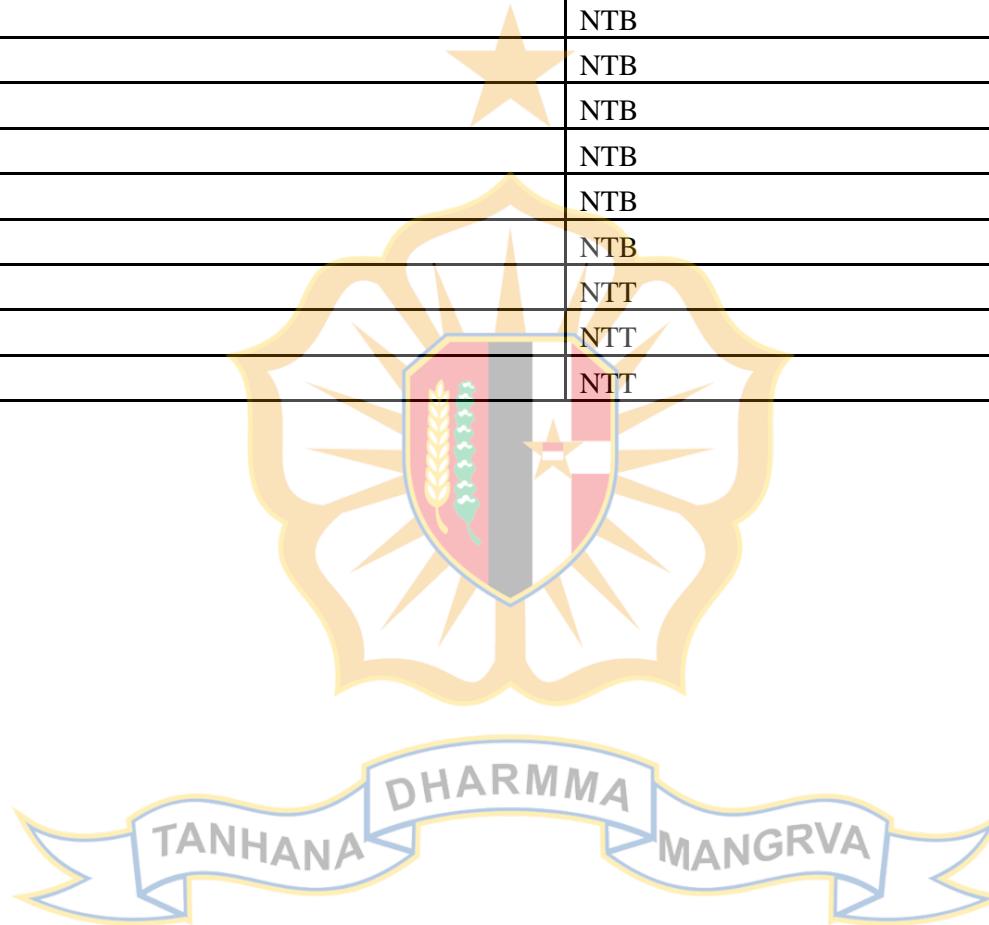
81	Jalan Tol Semarang - Solo (72,6 KM)	Propinsi Jateng	Subbidang Bina Marga
82	Jalan Tol Solo - Ngawi (90,1 KM)	Propinsi Jateng	Subbidang Bina Marga
83	Jalan Tol Yogyakarta - Solo (40,5 KM)	Propinsi Jateng	Subbidang Bina Marga
84	Jalan Tol Semarang - Demak (24,0 KM)	Propinsi Jateng	Subbidang Bina Marga
85	Jalan Tol Yogyakarta - Bawen (71 KM)	Propinsi DIY - Propinsi Jateng	Subbidang Bina Marga
86	Jalan Tol Ngawi - Kertosono (87 KM)	Propinsi Jatim	Subbidang Bina Marga
87	Jalan Tol Kertosono - Mojokerto (40,5 KM)	Propinsi Jatim	Subbidang Bina Marga
88	Jalan Tol Mojokerto - Surabaya (36,6 KM)	Propinsi Jatim	Subbidang Bina Marga
89	Jalan Tol Gempol - Pandaan (14 KM)	Propinsi Jatim	Subbidang Bina Marga
90	Jalan Tol Gempol - Pasuruan (34,2 KM)	Propinsi Jatim	Subbidang Bina Marga
91	Surabaya - Gempol (49 KM)	Propinsi Jatim	Subbidang Bina Marga
92	Surabaya - Gresik (20,70 KM)	Propinsi Jatim	Subbidang Bina Marga
93	Simpang Susun Waru - Bandara Juanda (12,80 KM)	Propinsi Jatim	Subbidang Bina Marga
94	Jalan Tol Waru (Aloha) - Wonokromo - Tanjung Perak (18,2 KM)	Propinsi Jatim	Subbidang Bina Marga
95	Jalan Tol Pandaan - Malang (37,62 KM)	Propinsi Jatim	Subbidang Bina Marga
96	Jembatan Suramadu	Propinsi Jatim	Subbidang Bina Marga
97	Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo (31,3 KM)	Propinsi Jatim	Subbidang Bina Marga
98	Jalna Tol Probolinggo - Banyuwangi (170,4 KM)	Propinsi Jatim	Subbidang Bina Marga
99	Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar (38,3 KM)	Propinsi Jatim	Subbidang Bina Marga
100	Jalan Tol Kertosono - Kediri (Penambahan lingkup Ngawi - Kertosono - Kediri) (27,90 KM)	Propinsi Jatim	Subbidang Bina Marga
101	Bali Mandara (10,07 KM)	Propinsi Bali	Subbidang Bina Marga
102	Jembatan Tayan	Propinsi Kalbar	Subbidang Bina Marga
103	Jembatan Kapuas	Propinsi Kalbar	Subbidang Bina Marga
104	Jembatan Kahayan	Propinsi Kalteng	Subbidang Bina Marga
105	Jembatan Tumbang Samba	Propinsi Kalteng	Subbidang Bina Marga
106	Jembatan Barito	Propinsi Kalsel	Subbidang Bina Marga
107	Jalan Tol Balikpapan - Penajam (Tol Teluk Balikpapapn) (7,6 KM)	Propinsi Kaltim	Subbidang Bina Marga

108	Jalan Tol Balikapapan - Samarinda (99 KM)	Propinsi Kaltim	Subbidang Bina Marga
109	Jembatan Layang Maros - Bone	Propinsi Sulsel	Subbidang Bina Marga
110	Ujung Pandang Seksi I dan II (6,05 KM)	Propinsi Sulsel	Subbidang Bina Marga
111	Makassar Seksi IV (11,60 KM)	Propinsi Sulsel	Subbidang Bina Marga
112	Jalan Tola Layang AP Pettarani (Ujung Pandang III) (4,3 KM)	Propinsi Sulsel	Subbidang Bina Marga
113	Jembatan Teluk Kendari	Propinsi Sulawesi Tenggara	Subbidang Bina Marga
114	Jalan Tol Manado - Bitung (39 KM)	Propinsi Sulut	Subbidang Bina Marga
115	Jembatan Soekarno	Propinsi Sulut	Subbidang Bina Marga
116	Jembatan Merah Putih	Propinsi Maluku	Subbidang Bina Marga
117	Jembatan Holtekamp	Propinsi Papua	Subbidang Bina Marga
118	Bendungan keuliling	Aeh	Subbidang Sumber Daya Air
119	Bendungan payaseunara	Aceh	Subbidang Sumber Daya Air
120	Bendungan Rajui	Aceh	Subbidang Sumber Daya Air
121	Bendung Gerak Sungai Ular	Sumut	Subbidang Sumber Daya Air
122	Bendung Gerak Sei Wampu	Sumut	Subbidang Sumber Daya Air
123	Bendungan Sei Gong	Kepulauan Riau	Subbidang Sumber Daya Air
124	Bendung Gerak Pice Besar	Babel	Subbidang Sumber Daya Air
125	Bendung Gerak Perjaya	Sumsel	Subbidang Sumber Daya Air
126	Bendungan Batu Tegi	Lampung	Subbidang Sumber Daya Air
127	Bendungan Way Jepara	Lampung	Subbidang Sumber Daya Air
128	Bendungan Way Rarem	Lampung	Subbidang Sumber Daya Air
129	Bendungan Gerak Jabung	Lampung	Subbidang Sumber Daya Air
130	Bendungan Sindang Heula	Banten	Subbidang Sumber Daya Air
131	Bendung Gerak Pamarayan	Banten	Subbidang Sumber Daya Air
132	Bendung Gerak Pasar Baru	Banten	Subbidang Sumber Daya Air
133	Bendungan Jatiluhur	Jabar	Subbidang Sumber Daya Air
134	Bendungan Darma	Jabar	Subbidang Sumber Daya Air

135	Bendungan Malahayu	Jabar	Subbidang Sumber Daya Air
136	Bendung Gerak Curug	Jabar	Subbidang Sumber Daya Air
137	Bendung Gerak Rentang	Jabar	Subbidang Sumber Daya Air
138	Bendung Gerak Leuwigoong	Jabar	Subbidang Sumber Daya Air
139	Bendungan Jatigede	Jabar	Subbidang Sumber Daya Air
140	Bendungan Cacaban	Jateng	Subbidang Sumber Daya Air
141	Bendungan Gembong	Jateng	Subbidang Sumber Daya Air
142	Bendungan Jati Barang	Jateng	Subbidang Sumber Daya Air
143	Bendungan Kedung Ombo	Jateng	Subbidang Sumber Daya Air
144	Bendungan Lodan	Jateng	Subbidang Sumber Daya Air
145	Bendungan Penjalin	Jateng	Subbidang Sumber Daya Air
146	Bendungan Logung	Jateng	Subbidang Sumber Daya Air
147	Bendungan Sempor	Jateng	Subbidang Sumber Daya Air
148	Bendungan Wadas Lintang	Jateng	Subbidang Sumber Daya Air
149	Bendungan Wonogiri	Jateng	Subbidang Sumber Daya Air
150	Bendung Gerak Manganti	Jateng	Subbidang Sumber Daya Air
151	Bendung Gerak Serayu	Jateng	Subbidang Sumber Daya Air
152	Bendung Gerak Klambu	Jateng	Subbidang Sumber Daya Air
153	Bendungan Sermo	DI Yogyakarta	Subbidang Sumber Daya Air
154	Bendungan Gondang	Jatim	Subbidang Sumber Daya Air
155	Bendungan Gonggang	Jatim	Subbidang Sumber Daya Air
156	Bendungan Pacai	Jatim	Subbidang Sumber Daya Air
157	Bendungan Tlogo Ngebel	Jatim	Subbidang Sumber Daya Air
158	Bendungan Wonorejo	Jatim	Subbidang Sumber Daya Air
159	Bendungan Karang Kates / Sutami	Jatim	Subbidang Sumber Daya Air
160	Bendungan Lahor	Jatim	Subbidang Sumber Daya Air
161	Bendungan Selorejo	Jatim	Subbidang Sumber Daya Air

162	Bendungan Wlingi	Jatim	Subbidang Sumber Daya Air
163	Bendungan Bening / Widas	Jatim	Subbidang Sumber Daya Air
164	Bendungan Sengguruh	Jatim	Subbidang Sumber Daya Air
165	Bendungan Nipah	Jatim	Subbidang Sumber Daya Air
166	Bendungan Bajulmati	Jatim	Subbidang Sumber Daya Air
167	Bendung Gerak Babat	Jatim	Subbidang Sumber Daya Air
168	Bendung Gerak Sembayat	Jatim	Subbidang Sumber Daya Air
169	Bendung Gerak Bojonegoro	Jatim	Subbidang Sumber Daya Air
170	Bendung Gerak Mrican	Jatim	Subbidang Sumber Daya Air
171	Bendung Gerak Pekalen	Jatim	Subbidang Sumber Daya Air
172	Bendung Gerak Umbul	Jatim	Subbidang Sumber Daya Air
173	Bendung Gerak Jatirotok	Jatim	Subbidang Sumber Daya Air
174	Bendung Gerak Bedadung	Jatim	Subbidang Sumber Daya Air
175	Bendung Gerak Talang	Jatim	Subbidang Sumber Daya Air
176	Bendung Gerak Sampean Lama	Jatim	Subbidang Sumber Daya Air
177	Bendung Gerak Sampean Baru	Jatim	Subbidang Sumber Daya Air
178	Bendungan Tritip	Kaltim	Subbidang Sumber Daya Air
179	Bendungan Manggar	Kaltim	Subbidang Sumber Daya Air
180	Bendungan Samboja	Kaltim	Subbidang Sumber Daya Air
181	Bendungan Bili-Bili	Sulsel	Subbidang Sumber Daya Air
182	Bendungan Kalola	Sulsel	Subbidang Sumber Daya Air
183	Bendungan Ponre-Ponre	Sulsel	Subbidang Sumber Daya Air
184	Bendungan Salomekko	Sulsel	Subbidang Sumber Daya Air
185	Bendungan Paselloeng	Sulsel	Subbidang Sumber Daya Air
186	Bendung Gerak Tempe	Sulsel	Subbidang Sumber Daya Air
187	Bendungan Titab	Bali	Subbidang Sumber Daya Air
188	Bendungan Tanju	NTB	Subbidang Sumber Daya Air

189	Bendungan Mila	NTB	Subbidang Sumber Daya Air
190	Bendungan Batu Bulan	NTB	Subbidang Sumber Daya Air
191	Bendungan Gapit	NTB	Subbidang Sumber Daya Air
192	Bendungan Mamak	NTB	Subbidang Sumber Daya Air
193	Bendungan Pelaperado	NTB	Subbidang Sumber Daya Air
194	Bendungan Pengga	NTB	Subbidang Sumber Daya Air
195	Bendungan Sumi	NTB	Subbidang Sumber Daya Air
196	Bendungan Tiu Kulit	NTB	Subbidang Sumber Daya Air
197	Bendungan Batujai	NTB	Subbidang Sumber Daya Air
198	Bendung Gerak Baturiti	NTB	Subbidang Sumber Daya Air
199	Bendungan Raknamo	NTT	Subbidang Sumber Daya Air
200	Bendungan Rotiklot	NTT	Subbidang Sumber Daya Air
201	Bendungan Tilong	NTT	Subbidang Sumber Daya Air





## **Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 805/M-IND/Kep/12/2017**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN**

**NOMOR 620/M-IND/Kep/12/2012**

### **TENTANG OBYEK VITAL NASIONAL SEKTOR INDUSTRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Obyek Vital Nasional Sektor Industri telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 620/M-IND/Kep/12/2012 tentang Obyek Vital Nasional Sektor Industri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 541/M-IND/Kep/12/2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 620/M-IND/Kep/12/2012 tentang Obyek Vital Nasional Sektor Industri;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan menjadi Obyek Vital Nasional Sektor Industri, perlu menetapkan kembali Obyek Vital Nasional Sektor Industri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 620/M-IND/Kep/12/2012 tentang Obyek Vital Nasional Sektor Industri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 79);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
6. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 620/M-IND/Kep/12/2012 tentang Obyek Vital Nasional Sektor Industri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 541/M-IND/Kep/12/2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 620/M-IND/Kep/12/2012 tentang Obyek Vital Nasional Sektor Industri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Daftar Obyek Vital Nasional Sektor Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 620/M-IND/Kep/12/2012 tentang Obyek Vital Nasional Sektor Industri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 541/M-IND/Kep/12/2015 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

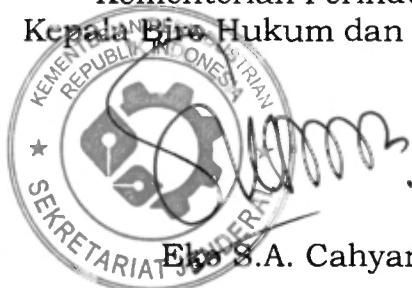
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 2017

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

- SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  3. Para Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
  4. Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
  5. Para Pengelola Obyek Vital Nasional Sektor Industri.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 805/M-IND/Kep/12/2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI

PERINDUSTRIAN NOMOR 620/M-IND/Kep/12/2012 TENTANG

OBYEK VITAL NASIONAL SEKTOR INDUSTRI

DAFTAR OBYEK VITAL NASIONAL SEKTOR INDUSTRI

No.	Perusahaan	Jenis Industri	Lokasi (Kabupaten / Kota – Provinsi)
1.	PT Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk	Industri Bubur Kertas (Pulp)	Jl. Raya Minas Perawang KM.26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak – Riau
2.	PT Kertas Leces	Industri Bubur Kertas (Pulp)	Jl. Raya Lumajang, Leces Kabupaten Probolinggo – Jawa Timur
3.	PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry	Industri Bubur Kertas (Pulp)	Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Jambi
4.	PT Riau Andalan Pulp and Paper	Industri Bubur Kertas (Pulp)	Jl. Lintas Timur, Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan – Riau
5.	PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper	Industri Bubur Kertas (Pulp)	Desa Niru-Tebet Agung, Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim – Sumatera Selatan
6.	PT Toba Pulp Lestari, Tbk	Industri Bubur Kertas (Pulp)	Desa Sosor Ladang, Pangombusan, Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir – Sumatera Utara

No.	Perusahaan	Jenis Industri	Lokasi (Kabupaten/Kota – Provinsi)
7.	PT Laju Perdana Indah	Industri Gula Pasir	Jl. Raya Tayu - Pati KM.3, Pati Kabupaten Pati – Jawa Tengah
8.	PT Laju Perdana Indah	Industri Gula Pasir	Jl. Lintas Timur Palembang-Lampung KM.110, Desa Meluai Indah, Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur – Sumatera Selatan
9.	Perum Percetakan Uang RI (Persero)	Industri Kertas Budaya	Desa Parung Mulya, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang – Jawa Barat
10.	PT Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk	Industri Kertas Budaya	Jl. Raya Serpong KM.8 Tangerang Kota Tangerang Selatan – Banten
11.	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk	Industri Kertas Budaya	Jl. Raya Surabaya- Mojokerto KM.44, Desa Kramat Temenggung, Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo – Jawa Timur
12.	PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills	Industri Kertas Budaya	Pabrik1 Jl. Prof. H. Soetami No.88, Karawang Kabupaten Karawang – Jawa Barat
13.	PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills	Industri Kertas Budaya	Pabrik 2 Desa Kuta Mekar BTB 6-9, Karawang Kabupaten Karawang – Jawa Barat

No.	Perusahaan	Jenis Industri	Lokasi (Kabupaten/Kota – Provinsi)
14.	PT Ekamas Fortuna	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	Desa Gampingan, Kecamatan Pagak Kota Malang – Jawa Timur
15.	PT Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	Jl. Raya Jakarta KM.76 Desa Kragilan, Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang - Banten
16.	PT Energi Sejahtera Mas	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	Jl. Raya Lubuk Gaung, Desa Lubuk Gaung, Nerbit Besar, Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai – Riau
17.	PT Permata Hijau Palm Oleo	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	Jl. Pelabuhan Baru Lr. Sawita No.124 Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan Kabupaten Belawan – Sumatera Utara
18.	PT Indofood Sukses Makmur, Tbk	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya	Jl. Nilam Timur No. 16 Kota Surabaya – Jawa Timur
19.	PT Indofood Sukses Makmur, Tbk	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya	Jl. Raya Cilincing No. 1, Tanjung Priok Kota Jakarta Utara – DKI Jakarta
20.	PT Multimas Nabati Asahan	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	Jl. Access Road Inalum Kuala Tanjung Kabupaten Batubara – Sumatera Utara
21.	PT Multimas Nabati Asahan	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	Kawasan Industri Pulo Gadung, Cakung, Jakarta Timur Kota Jakarta Timur – DKI Jakarta

No.	Perusahaan	Jenis Industri	Lokasi (Kabupaten/Kota – Provinsi)
22.	PT Nagamas Palmoil Lestari	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	Jl. Datuk Laksamana (Areal Pelindo), Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai – Riau
23.	PT Sari Dumau Sejati	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	Jl. Raya Lubuk Gaung, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai – Riau
24.	PT Multi Nabati Sulawesi	Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati	Jl. Raya Madidir Bitung, Kelurahan Madidir, Bitung Tengah Kota Bitung – Sulawesi Utara
25.	PT Inti Indo Sawit Subur	Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Pabrik Minyak Kelapa Sawit Ukui 1 dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit Ukui 2 Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan – Riau
26.	PT Inti Indo Sawit Subur	Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Pabrik Buatan I Jl. Lintas Timur KM.60, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Pengkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan – Riau
27.	PT Inti Indo Sawit Subur	Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Pabrik Buatan II Desa Lalang Kabung, Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan – Riau

No.	Perusahaan	Jenis Industri	Lokasi (Kabupaten/Kota – Provinsi)
28.	PT Ivo Mas Tunggal	Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Jl. Kelapa RT.17 Nerbit Besar, Kelurahan Lubuk Gaung, Nerbit Besar, Kecamatan Sungai Sembilan  Kota Dumai – Riau
29.	PT Nubika Jaya	Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Jl. Lintas Sumatera, Desa Sisumut, Kec. Kota Pinang  Kabupaten Labuhanbatu – Sumatera Utara
30.	PT Pelita Agung Agrindustri	Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Jl. Simpang Bangko Lintas Duri Dumai, Desa Sebangar, Kecamatan Mandau  Kabupaten Bengkalis – Riau
31.	PT Permata Hijau Sawit	Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Jl. Sultan Iskandar Muda No. 107  Kota Medan – Sumatera Utara
32.	PT Salim Ivo Mas Pratama	Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Jl. Industri I No. 3, Tanjung Priok  Kota Jakarta Utara – DKI Jakarta
33.	PT Sinarmas Agro Resources and Technology, Tbk	Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Marunda Center Blok D No. 1, Kawasan Industri Marunda Center, Jl. Akses Marunda, Bekasi  Kabupaten Bekasi – Jawa Barat
34.	PT Sinarmas Agro Resources and Technology, Tbk	Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Jl. Balmerah Baru III, Belawan II, Medan  Kota Medan – Sumatera Utara

No.	Perusahaan	Jenis Industri	Lokasi (Kabupaten/Kota – Provinsi)
35.	PT Sinarmas Agro Resources and Technology, Tbk	Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Jl. Rungkut Industri Raya No. 19, Surabaya Kota Surabaya – Jawa Timur
36.	PT Sinarmas Agro Resources and Technology, Tbk	Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kota Baru – Kalimantan Selatan
37.	PT Sumber Indah Perkasa	Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Jl. Radin Inten II Km. 17, Desa Rangai Tritunggal, Kec. Katibung Kabupaten Lampung Selatan – Lampung
38.	PT Dahana (Persero)	Industri Bahan Peledak	Jl. Raya Subang – Cikamurang KM. 12, Cibogo, Subang Kabupaten Subang – Jawa Barat
39.	PT Inti Cellulose Utama Indonesia	Industri Bahan Peledak	Jl. Desa Cikande, Bakung, Serang Kabupaten Serang – Banten
40.	PT Pupuk Iskandar Muda (Persero)	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	Jl. Medan, Banda Aceh PO. Box 021, Krueng Geukueh Kabupaten Aceh Utara – Nanggroe Aceh Darussalam
41.	PT Pupuk Kujang (Persero)	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	Jl. Ahmad Yani No.39, Kalihurip, Cikampek Kabupaten Karawang – Jawa Barat
42.	PT Chandra Asri Petrochemical, Tbk	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak	Jl. Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon Kota Cilegon – Banten

No.	Perusahaan	Jenis Industri	Lokasi (Kabupaten/Kota – Provinsi)
43.	PT Garam (Persero)	Industri Pengolahan Garam	Jl. Raya Kalianget 9 Kalianget, Sumenep Kabupaten Sumenep – Jawa Timur
44.	PT Petrokimia Gresik (Persero)	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer	Jl. Jenderal Ahmad Yani – Gresik Kabupaten Gresik – Jawa Timur
45.	PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero)	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	Jl. James Simandjuntak No. 1, Bontang Kota Bontang – Kalimantan Timur
46.	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero)	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	Jl. Mayor Zen, Palembang Kota Palembang – Sumatera Selatan
47.	PT Cemindo Gemilang	Industri Semen	Jl. Raya Bayah-Cibareno KM.7 Desa Darmasari, Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak – Banten
48.	PT Holcim Indonesia, Tbk	Industri Semen	Jl. Raya Narogong KM. 7 Klapanunggal, 16820 Bogor Kabupaten Bogor – Jawa Barat
49.	PT Holcim Indonesia, Tbk	Industri Semen	Jl. Ir. Juanda PO Box 272 Cilacap 53234 Karangtalun Kabupaten Cilacap – Jawa Tengah
50.	PT Holcim Indonesia, Tbk	Industri Semen	Jl. Raya Glondonggede – Kerek KM.3 RT 02 / RW 02 Desa Merkawang, Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban – Jawa Timur

No.	Perusahaan	Jenis Industri	Lokasi (Kabupaten/Kota – Provinsi)
51.	PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk	Industri Semen	Kompleks Pabrik Citeureup, Jl. Mayor Oking Jayaatmaja, Citeureup Kabupaten Bogor – Jawa Barat
52.	PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk	Industri Semen	Kompleks Pabrik Palimanan, Jl. Raya Palimanan KM No.20, Pegagan, Jamblang, Cirebon Kabupaten Cirebon – Jawa Barat
53.	PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk	Industri Semen	Kompleks Pabrik Tarjun, Tarjun, Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru – Kalimantan Selatan
54.	PT Lafarge Cement Indonesia	Industri Semen	Jl. Banda Aceh - Meulaboh KM. 17 Kabupaten Aceh Besar - Nanggroe Aceh Darussalam
55.	PT Semen Baturaja (Persero), Tbk	Industri Semen	Jl. Yos Sudarso Km.7 Panjang, Bandar Lampung Kota Bandar Lampung - Lampung
56.	PT Semen Baturaja (Persero), Tbk	Industri Semen	Jl. Raya Tiga Gajah Baturaja, Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu - Sumatera Selatan
57.	PT Semen Baturaja (Persero), Tbk	Industri Semen	Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati Palembang Kota Palembang – Sumatera Selatan
58.	PT Semen Bosowa Indonesia	Industri Semen	Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros – Sulawesi Selatan

No.	Perusahaan	Jenis Industri	Lokasi (Kabupaten/Kota – Provinsi)
59.	PT Semen Bosowa Indonesia	Industri Semen	Jl. Raya Pelabuhan, Kampung Baru, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa Kota Batam – Kepulauan Riau
60.	PT Semen Gresik	Industri Semen	Jl. Veteran 10, Gresik Kabupaten Gresik – Jawa Timur
61.	PT Semen Kupang	Industri Semen	Jln. Yos Sudarso Tenau Kupang NTT, Alak Kota Kupang – Nusa Tenggara Timur
62.	PT Semen Padang	Industri Semen	Indarung, Padang 25237 Kota Padang – Sumatera Barat
63.	PT Semen Tonasa	Industri Semen	Biringere, Pangkep Kabupaten Pangkep – Sulawesi Selatan
64.	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektrik	Jl. Moch Toha No 225 Palasari, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot Kota Bandung – Jawa Barat
65.	PT Krakatau Steel, Tbk	Industri Besi dan Baja (Iron and Steel Making)	Jl. Industri No.5, Ramanuju, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon – Banten
66.	PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero)	Industri Kapal dan Perahu	Jl. Tanjung Perak Barat 433-435 60167, Surabaya Kota Surabaya – Jawa Timur
67.	PT PAL (Persero)	Industri Kapal dan Perahu	Jl. Hangtuah 295-297, RT.000/RW.00, Ujung, Semampir Kota Surabaya – Jawa Timur

No.	Perusahaan	Jenis Industri	Lokasi (Kabupaten/Kota – Provinsi)
68.	PT Indonesia Asahan Aluminium	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara – Sumatera Utara
69.	PT Smelting Co.	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)	Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik – Jawa Timur
70.	PT Len Industri (Persero)	Industri Peralatan Listrik Lainnya	Jl. Soekarno Hatta 442 Bandung Kota Bandung – Jawa Barat
71.	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkапannya	Jl. Pajajaran No.154 Bandung Kota Bandung – Jawa Barat
72.	PT PINDAD (Persero)	Industri Senjata dan Amunisi	Jl. Gatot Subroto, No.517, Bandung Kota Bandung – Jawa Barat
73.	PT PINDAD (Persero)	Industri Senjata dan Amunisi	Jl. Jend. Panglima Sudirman No.1, Turen, Malang 65175 Kabupaten Malang – Jawa Timur
74.	East Jakarta Industrial Park (EJIP) – PT East Jakarta Industrial Park	Kawasan Industri	Jl. Cisokan 1, Sukaresmi, Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi – Jawa Barat
75.	Jababeka Industrial Estate-Cikarang – PT Jababeka, Tbk	Kawasan Industri	Jl. Jababeka IV Blok B No.12 Jababeka Industrial Estate, Cikarang Kabupaten Bekasi – Jawa Barat

No.	Perusahaan	Jenis Industri	Lokasi (Kabupaten/Kota – Provinsi)
76.	Kaltim Industrial Estate - PT Kaltim Industrial Estate	Kawasan Industri	Wisma KIE, Lantai 3, Kawasan Industri Bontang, Jl. Paku Aji Kav. 79, Bontang Kota Bontang – Kalimantan Timur
77.	Karawang International Industrial City - PT Maligi Permata Industrial Estate - PT Harapan Anang Bakrie & Sons - PT Karawang Tata Bina)	Kawasan Industri	Graha KIIC, Jl. Permata Raya Lot C-1B, Kawasan Industri KIIC, Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang – Jawa Barat
78.	Kawasan Berikat Nusantara - PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Kawasan Industri	Jl. Raya Cakung Cilincing No.1, Tg. Priok, Sukapura, Cilincing, RT.2/RW.1, Sukapura, Cilincing Kota Jakarta Utara – DKI Jakarta
79.	Kawasan Industri Batamindo - PT Batamindo Investment Cakrawala	Kawasan Industri	Jl. Rasamala No.01 Muka Kuning Batam Kota Batam – Kepulauan Riau
80.	Kawasan Industri Bintan - PT Bintan Inti Industrial Estate	Kawasan Industri	Wisma BIE, Jl. Tanjung Lobam, Lobam-Pulau Bintan Kabupaten Bintan – Kepulauan Riau
81.	Kawasan Industri Bukit Indah - PT Besland Pertiwi	Kawasan Industri	Dangder, Bungursari. Purwakarta 41181 Kabupaten Purwakarta – Jawa Barat
82.	Kawasan Industri Dumai - PT Kawasan Industri Dumai	Kawasan Industri	Jl. Dumai-Sei Pakning, Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai – Riau

No.	Perusahaan	Jenis Industri	Lokasi (Kabupaten/Kota – Provinsi)
83.	Kawasan Industri Indotaisei - PT Indotaisei Indah Development	Kawasan Industri	Sektor IA Blok B Kota Bukit Indah, Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang – Jawa Barat
84.	Kawasan Industri Medan - PT Kawasan Industri Medan (Persero)	Kawasan Industri	Jl. Pulau Batam No.1 Percut Situan, Sampali, Percut Sei Tuan Kota Medan – Sumatera Utara
85.	Kawasan Industri MM2100 Industrial Town - PT Megalopolis Manunggal Industrial Development - PT Bekasi Fajar Industrial Estate, Tbk. - PT Bekasi Matra Industrial Estate - PT Bekasi Surya Pratama	Kawasan Industri	Jl. Sumatera, MM2100 Industrial Town, Cikarang Barat Kabupaten Bekasi - Jawa Barat
86.	Kawasan Industri Panbil - PT Nusatama Properta Panbil	Kawasan Industri	Panbil Plaza Jl. Ahmad Yani, Muak Kuning, Batam Kota Batam – Kepulauan Riau
87.	Kawasan Industri Pulogadung - PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)(Persero)	Kawasan Industri	Jl. Pulokambing No.1 Kawasan Industri Pulogadung Kota Jakarta Timur - DKI Jakarta
88.	Kawasan Industri Terpadu Kabil - PT Kabil Indonusa Estate - PT Kabil Citranusa	Kawasan Industri	Jl. Hang Kesturi KM.4 Kabil Kota Batam – Kepulauan Riau

No.	Perusahaan	Jenis Industri	Lokasi (Kabupaten/Kota – Provinsi)
89.	Medan Star Industrial Estate - PT Tamoratama Prakarsa	Kawasan Industri	KM. 19,5 Tanjung Morawa, Deli Serdang Kabupaten Deli Serdang – Sumatera Utara
90.	Modern Cikande Industrial Estate - PT Modern Industrial Estat - PT Puncak Ardimulia Realty - PT The New Asia Industrial Estate	Kawasan Industri	Jl. Raya Jakarta-Serang KM.68, Cikande, Serang Kabupaten Serang - Banten
91.	Ngoro Industrial Park - PT Kawasan Industri Intiland - PT Intiland Sejahtera	Kawasan Industri	Jl. Raya Ngoro, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto – Jawa Timur

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Dinas Hukum dan Organisasi,

AIRLANGGA HARTARTO

Eko S. A. Cahyanto

**OBVITNAS PARIWISATA**  
**BIDANG PARIWISATA KEPMEN PAR NO. KM 70 THN 2016**

No.	Nama Objek Vital Nasional	Pengelola	Lokasi
1	Benteng dan Masjid Indrapuri	Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Aceh	Nanggroe Aceh Darussalam
2	Benteng Indra Patra	Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Aceh	Nanggroe Aceh Darussalam
3	Gedung Bank Indonesia	Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Aceh	Nanggroe Aceh Darussalam
4	Gedung Baperis	Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Aceh	Nanggroe Aceh Darussalam
5	Gedung Menara Sentral Telepon Belanda	Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Aceh	Nanggroe Aceh Darussalam
6	Kompleks Makam Kandang Meuh	Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Aceh	Nanggroe Aceh Darussalam
7	Pendopo Gubernur	Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Aceh	Nanggroe Aceh Darussalam
8	Taman Sari Gunongan	Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Aceh	Nanggroe Aceh Darussalam
9	Museum Negeri Sumatera Utara	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara	Sumatera Utara
10	Kawasan Istano Pagaruyung	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Tanah Datar	Sumatera Barat
11	Benteng Fort de Kock	Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi	Sumatera Barat
12	Kawasan Jam Gadang Bukittinggi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi	Sumatera Barat

13	Kawasan Pantai Padang	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang	Sumatera Barat
14	Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin II	Yayasan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin II	Sumatera Selatan
15	Benteng Kuto Besak	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang	Sumatera Selatan
16	Benteng Somba Opu	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan	Sumatera Selatan
17	Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Serpong City	Deutsche Messe	Banten
18	Jakarta International Expo Kemayoran	PT Jakarta International Expo	DKI Jakarta
19	Taman Impian Jaya Ancol	PT Taman Impian Jaya Ancol	DKI Jakarta
20	Taman Mini Indonesia Indah	Yayasan Harapan Kita	DKI Jakarta
21	Kawasan Monumen Nasional	Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional	DKI Jakarta
22	Kawasan Kota Tua	Unit Pengelola Kawasan Kota Tua	DKI Jakarta
23	Pelabuhan Sunda Kelapa	PT Pelindo II	DKI Jakarta
24		1. Balai Konservasi Peninggalan Borobudur	
	Kawasan Candi Borobudur	2. PT Taman Wisata Candi Borobudur , Prambanan dan Ratu Boko	Jawa Tengah
		3. Pemerintah Kabupaten Magelang	
25	Kawasan Candi Prambanan	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko	Jawa Tengah
26	Kawasan Kota Lama	Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L)	Jawa Tengah

27	Lawang Sewu	Unit Pelestarian Benda dan Bangunan Bersejarah PT Kereta Api Indonesia	Jawa Tengah
28	Kampung Batik Laweyan	Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL) penugasan dari BAPPEDA Kota Surakarta	Jawa Tengah
29	Kawasan Museum Purbakala Sangiran	UPT Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Jawa Tengah
30	Keraton Surakarta	Badan Pengelola Keraton Surakarta	Jawa Tengah
31	Kawasan Benteng Vredeburg	Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala	D.I Yogyakarta
32	Kawasan Istana Negara Gedung Agung	Menteri Sekretaris Negara	D.I Yogyakarta
33	Kawasan Kotagede	Yayasan Kantil, Lembaga Pengembangan Seni Budaya Pariwisata Kotagede	D.I Yogyakarta
34	Kawasan Kraton Kasultanan Yogyakarta	Tepas Pariwisata Kraton Yogyakarta	D.I Yogyakarta
35	Kawasan Kraton Puro Pakualaman	Badan Pariwisata Puro Pakualaman	D.I Yogyakarta
36	Kawasan Malioboro	UPT Pengelola Kawasan Malioboro	D.I Yogyakarta
37	Kawasan Makam Ir. Soekarno	Pemerintah Daerah Kota Blitar	Jawa Timur
38	Jatim Park	Jawa Timur Park Group	Jawa Timur
39	Museum Bali	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	Bali
40	Pura Besakih	Desa Pakraman/-Masyarakat Hindu	Bali
41	Pura Taman Ayun	Puri Mengwi	Bali

42	Pura Ulun Danau Batur	Desa Pakraman Batur Kintamani	Bali
43	Pura Uluwatu	Desa Pakraman Pecatu	Bali
44	Kawasan Nusa Dua	Bali Tourism Development Corporation (BTDC)	Bali
45	Kawasan Pemakaman Toraja	Pemerintah Daerah Kota Toraja	Sulawesi Selatan
46	Monumen Mandala	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan
47	Kawasan Fort Rotterdam	Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar	Sulawesi Selatan
48	Benteng Keraton Buton	Pemerintah Daerah Kota Bau-Bau	Sulawesi Tenggara
49	Rumah Budaya Banda Neira	Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah	Maluku
50	Istana Kasultanan Tidore	Pemerintah Daerah Kota Tidore	Maluku Utara
51	Museum Soekarno	Yayasan Ende Flores berkoordinasi dengan Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Nusa Tenggara Timur



OBJEK VITAL NASIONAL

BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPMEN ESDM Nomor 77 K/90/MEM/2019

A. SUBBIDANG MINYAK DAN BUMI

No.	Nama Obvitnas	Pengelola	Lokasi
I. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi			
1	Fasilitas Wilayah Kerja NSO	PHE North Sumatera	Prov. Aceh
		Offshore Block	
2	Fasilitas Wilayah Kerja "B" Block	PHE North Sumatera B	Prov. Aceh
3	Fasilitas Wilayah Kerja Blok A	PT Medco E&P Malaka	Kab. Aceh Timur, Prov . Aceh
4	Asset 1 Rantau Field	PT Pertamina EP	Kab. Aceh Tamiang, Prov. Aceh
5 .	Asset 1 Pangkalan Susu	PT Pertamina EP	Kab. Langkat,
	Field		Prov. Sumatera Utara
6	Fasilitas Wilayah Kerja Gebang	EMP Gebang Ltd.	Prov. Sumatera Utara
7	Fasilitas Wilayah Kerja Tonga	PT EMPTonga	Prov. Sumatera Utara
8	Fasilitas Wilayah Kerja Kisaran	Pacific Oil & Gas	Kab. La bu han Batu, Prov. Su ma tera Utara

9	Fasilitas Wilayah Kerja Rokan	PT Chevron Pacific Indonesia	Kab. Bengkalis, Kab. Siak, Kab. Kampar, Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau
10	Fasilitas Wilayah Kerja Siak	PHE Siak	Kab. Kampar, Rokan Hilir, Prov. Riau
11	Fasilitas Wilayah Kerja Malacca Strait Onshore dan Offshore	Energi Mega Persada Malacca Strait S.A	Perairan Selat Malaka, Prov. Riau
12	Fasilitas Wilayah Kerja Langgak	PT Sarana Pembangunan Riau	Kab. Kampar, Kab. Rokan Hulu, Prov. Riau
13	Fasilitas Wilayah Kerja Korinci Baru	EMP Korinci Baru Ltd.	Kab. Siak, Kab. Pelalawan, Prov. Riau
14	Asset 1 Lirik Field	PT Pertamina EP	Kab. Indragiri Hulu, Prov. Riau
15	Wilayah Kerja Kampar	PHE Kampar	Kab. Kampar, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau
16	Wilayah Kerja Coastal Plain and Pekanbaru (CPP)	BOB PHE - PT Bumi Siak Pusako	Kab. Siak, Kota Pekanbaru, Prov. Riau
17	Fasilitas Wilayah Kerja A Natuna Sea Block "A"	Premier Oil Natuna Sea BV	Perairan Laut Natuna, Kab. Kepulauan Anambas, Prov. Kepulauan Riau
18	Fasilitas Wilayah Kerja Kakap Natuna	Star Energy (Kakap) Ltd.	Perairan Laut Natuna, Kab. Kepulauan Anambas, Prov. Kepulauan Riau
19	Pipa Penyalur Gas Bumi WNTS: a. Natuna- Singapura; dan b. Natuna Platform	WNTS - Medco E&P Natuna	Perairan Laut Natuna, Prov. Kepulauan Riau

	Duyong Mal a ys ia .		
20	Fasilitas Wilayah Kerja South Natuna Sea Block "B"	Medco E&P Natuna Ltd.	Lepas Pantai Natuna
			Kab. Kepulauan An a m ba s , Pro v. Kepulauan Riau
21	Fasilitas Wilayah Kerja Tungkal	MontD'or Oil (Tungkal) Ltd .	Kab. Tebo, Prov. Jambi
22	Fasilitas Wilayah Kerja Jabung	PetroChina International Jabung Ltd .	Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur,
			Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi
23	Fasilitas Wilayah Kerja Bangko	PetroChina International Bangko Ltd.	Kab. Sa rolan gun, Prov. Jambi
24	Asset 1 Jambi Field	PT Pertamina EP	Kota Jambi, Prov. Jambi
25	Fasilitas Lapangan Sarolangun, Meruap	KSO PEP - Samudra Energy BWP Meruap	Kab. Sarolangun, Prov. Jambi
26	Fasilitas Wilayah Kerja Betung dan Meruo Senami	TAC PEP - Prakarsa Betung Meruo Senami Jamhi	Kah. Banyuasin, Ka b . Bata nghan i, Prov. Jambi
27	Fasilitas Wilayah Kerja Corridor	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	Prov. J ambi,
			Prov. Sumatera Selatan
28	Fasilitas Wilayah Kerja Palmerah	Tately N.V.	Prov. Jambi,
			Prov. Sumatera Selatan
29	Fasilitas Wilayah Kerja Lematang South & Central Sumatera dan Rimau	PT Medco E&P Lematang	Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan

30	Fasilitas Wilayah Kerja Karang Agung	PT Odira Energy Karang Agung	Kah. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan
31	Fasilitas Wilayah Kerja Merangin II	PT Sele Raya Merangin Dua	Kab. Musi Rawas,
			Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Sa rolan gun,
			Kab. Musi Banyuasin,
			Prov. Sumatera Selatan
32	Fasilitas Wilayah Kerja Raja/Pendopo	JOB PHE-Golden Spike Indonesia Ltd.	Ka b. Penukal Abab, Prov. Sumatera Selatan
33	Lapangan Sungai Kenawang, Jambi Merang	PHEJambi Merang	Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan
34	Fasilitas Wilayah Kerja Pandan	PT. Tropik Energi Pandan	Kab. Musi Rawas,
			Prov. Sumatera Selatan
35	Wilayah Kerja Ogan Komering	PHE Ogan Komering	Kab. Muara Enim, Ogan Komering Ulu, Ogan Ilir, Prov. Sumatera Selatan
36	Asset 1 Ramba Field	PT Pertamina EP	Kee. Babat Supat, Kab. Musi Banyuasin,
			Prov. Sumatera Selatan
37	Asset 2 Prabumulih Field	PT Pertamina EP	Kota Prabumulih,
			Prov. Sumatera Selatan
38	Asset 2 Limau Field	PT Pertamina EP	Kota Prabumulih,
			Prov. Sumatera Selatan
39	Asset 2 Adera Field	PT Pertamina EP	Kab. Pali,
			Prov. Sumatera Selatan

40	Asset 2 Pendopo Field	PT Pertamina EP	Kee. Talang Ubi, Kab. Pali, Prov. Sumatera Selatan
41	Fasilitas Lapangan Kaya- Layan	TAC PEP - Indama Putera Kaya Pratama	Kab. Musi Barat,
			Prov. Sumatera Selatan
42	Fasilitas Lapangan Rayu Utara	KSO PEP - Indrilco Hulu Energy	Kab. Musi Rawas, Prov. Sumatera Selatan
43	Fasilitas Lapangan TAP Gumai	KSO PEP - San tika Pendopo Energy	Kota Pendopo,
			Prov. Sumatera Selatan
44	Fasilitas Lapangan Sukananti	KSO PEP - Cooper Energy Sukananti	Ka b. Ogan Ilir,
			Prov. Sumatera Selatan
45	Fasilitas Lapangan Muara Enim	KSO PEP - Petro Enim Betun Selo	Ka b. PanukalAbab Lematang Ilir, Kab. Muara Enim,
			Prov. Sumatera Selatan
46	Fasilitas Lapangan Gunung Kampung Minyak	KSO PEP - Gunung Kampung Minyak	Kab. Muara Enim, Kota Prabumulih,
			Prov. Sumatera Selatan
47	Fasilitas Lapangan Tapus Pandan Petanang	KSO PEP - Energy Tanjung Tiga	Kee. Lembak, Kab. Muara Enim, Kota Prabumulih, Prov. Sumatera Selatan
48	Fasilitas Lapangan Reka Kruh, Pendopo	TAC PEP - Green World Nusantara	Kab. Musi Banyuasin, Kota Pendopo,
			Prov. Sumatera Selatan
49	Fasilitas Lapangan Tanjung Tiga Timur	KSO PEP - Formasi Sumatera Energy	Kee. Muara Kuang, Kab. Ogan Ilir,
			Prov. Sumatera Selatan
			Kab. PanukalAbab Lematang Ilir,

50	Fasilitas Wilayah Kerja Blok Benakat Barat	KSO PEP - Benakat Barat Petroleum	Prov. Sumatera Selatan
51	Fasilitas Wilayah Kerja Blok Benakat Timur	KSO PEP - Techwin Benakat Timur	Kab. PanukalAbab Lematang Ilir, Prov. Sumatera Selatan
52	Wilayah Kerja South East Sumatera serta pipa gas ke PLTGU Cilegon		Kab. Kepulauan Seribu, Prov. DKI Jakarta
53	Wilayah Kerja Offshore North West Java serta Onshore Receiving Facility	PHE ONWJ	Perairan Laut Jawa (Area Utara Indramayu s.d. Kep. Seribu), Prov. DKI Jakarta, Prov. Jawa Barat
54	Fasilitas Lapangan PD Migas Kota Bekasi	KSO PEP - PD Migas Kota Bekasi	Ka b . Bekasi, Prov. Jawa Barat
55	Asset 3 Tambun Field	PT Pertamina EP	Ka b . B e k a s i, Prov. Jawa Barat
56	Asset 3 Subang Field	PT Pertamina EP	Kab. Purwakarta, Prov. Jawa Barat
57	Asset 3 Jatibarang Field	PT Pertamina EP	Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat
58	Asset 4 Cepu Field	PT Pertamina EP	Ka b. Blora, Prov. Jawa Tengah
59	Fasilitas Wilayah Kerja Cepu		Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur
60	Asset 4 Poleng Field	PT Pertamina EP	Kab. Gresik, Perairan Selat Madura, Prov. Jawa Timur
61	Fasilitas Wilayah Kerja West Madura Offshore		Perairan Selat Madura, Prov. Jawa Timur

62	Fasilitas Wilayah Kerja Tuban East Java: Lapangan Mudi	PHE Tuban East Java	Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Gresik
	Pad B, Sumber, Gondang, Resik, South Bungoh, Lengowan		Prov. Jawa Timur
63	Fasilitas Offshore	Camar Resources Canada Ltd.	Perairan Laut Jawa, Prov. Jawa Timur
	Wilayah Kerja Bawean		
64	Fasilitas Wilayah Kerja Kangean	Kangean Energy Indonesia	Kepulauan Kangean, Prov. Jawa Timur
65	Fasilitas Wilayah Kerja Sampang	Ophir (Sampang) Pty. Ltd.	Perairan Selat Madura, Prov. Jawa Timur
66	Fasilitas Wilayah Kerja Madura Offshore	Ophir (Madura Offshore) Pty. Ltd.	Perairan Selat Madura, Prov. Jawa Timur
67	Fasilitas Wilayah Kerja Brantas	Minarak Brantas Gas	Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
68	Fasilitas Wilayah Kerja Pangkah	Saka Indonesia Pangkah Limited	Perairan Laut Jawa, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
69	Fasilitas Wilayah Kerja Madura Strait	Husky - CNOOC Madura Limited	Kab. Sampang, Prov. Jawa Timur
70	Lapangan Bukit Tua	PC Ketapang 2 Ltd. (PCK2L)	Kab. Sampang, Prov. Jawa Timur
71	Asset 4 Sukowati Field	JYI Pertamina EP	Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur
72	Asset 5 Tanjung Field	PT Pertamina EP	Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan
73	Asset 5 Sanga Sanga	JYI Pertamina EP	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

	Field		
74	Asset 5 Sangatta Field	PT Pertamina EP	Kab.Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur
75	Wilayah Kerja East Kalimantan termasuk fasilitas Offshore dan Onshore		Offshore dan Onshore di Kata Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur
76	Fasilitas Wilayah Kerja Mahakam dan Tengah serta pipa penyalur gas Handil-Bontang	PT Pertamina Hulu Mahakam	Offshore dan Onshore di Kata Balikpapan dan Kota Bontang, Prov. Kalimantan Timur
77	Fasilitas Wilayah Kerja Sanga Sanga		Jalan Cendrawasih No.1, Kee. Muara Badak, Kab. Kutai Kertanegara, Prov. Kalimantan Timur
78	Fasilitas Wilayah Kerja Wailawi	PT Benuo Taka Wailawi	Kab. Penajam Paser Utara, Prov. Kalimantan Timur
79	Lapangan Bangka	Chevron Rapak Ltd.	Kota Bontang, Prov. Kalimantan Timur
80	Fasilitas Wilayah Kerja Sebuku		Perairan Selat Makasar, Prov. Kalimantan Timur
81	Lapangan Jangkrik, Jangkrik NE dan Fasilitas Produksi Terapung Jangkrik	Eni Muara Bakau B.V.	Kab. Kutai Kertanegara, Prov. Kalimantan Timur
82	Asset 5 Tarakan Field	PT Pertamina EP	Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara
83	Asset 5 Bunyu Field		Kab. Bulungan,

			Prov. Kalimantan Utara
84	Fasilitas Wilayah Kerja Simenggaris	JOB Pertamina-Medco EP Simenggaris	Kab. Nunukan,
			Prov. Kalimantan Utara
85	Fasilitas Wilayah Kerja Mamburungan		Kab. Tarakan,
		PT Medco E&P Tarakan	Prov. Kalimantan Utara
86	Asset 4 Donggi Matindok	PT Pertamina EP	Kab. Banggai,
	Field		Prov. Sulawesi Tengah
87	Wilayah Kerja Tomori Sulawesi	JOB Pertamina - Medco EP Tomori Sulawesi	Kab. Morowali Utara, Kab. Banggai,
			Prov. Sulawesi Tengah
88	Fasilitas Wilayah Kerja Makassar Strait	Chevron Makassar Ltd.	Perairan Selat Makassar, Prov. Sulawesi Selatan
89	Fasilitas Wilayah Kerja Sengkang	Energy Equity Epic (Sengkang) Pty Ltd.	Kab. Wajo,
			Prov. Sulawesi Selatan
90	Fasilitas Lapangan Wilayah Kerja Seram Non Bula	Citic Seram Energy Limited	Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku
91	Fasilitas Wilayah Kerja Bula	Kalrez Petroleum Seram Ltd.	Kab. Seram Bagian Timur, Prov. Maluku
92	Asset 4 Papua Field	PT Pertamina EP	Jalan Ahmad Yani, Kel. Klakublik, Distrik Sarong, Kata Sarong
			Prov. Papua Barat
93	Fasilitas Lapangan dan Kilang LNG Tangguh	BP Berau Ltd.	Kab. Teluk Bintuni, Prov. Papua Barat

94	Fasilitas Wilayah Kerja Kepala Burung	Petrogas (Basin) Ltd.	Kab. Sarong, Prov. Papua Barat
95	Fasilitas Wilayah Kerja Salawati Onshore dan Offshore	JOB Pertamina - PetroChina Salawati	<p>1. Onshore Matoa Wilayah Kerja Salawati Tengah, Kab. Sorong, Prov. Papua Barat</p> <p>2. Offshore Misool, Raja Ampat, Prov. Papua Barat</p>

## II. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

1	Arun LNG Receiving and Regasification Terminal	PT Pertamina Gas	Blang Lancang, Kec. Muara Satu, Kota Lhoksuknaw, Prov. Aceh
2	TBBM Kreung Raya	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR I Medan	Jalan Laksamana Malahayati KM. 31, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh
3	TBBM Lhokseumawe	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR I Medan	Jalan Samudera No. 2, Kota Lhokseumawe, Prov. Aceh
4	DPPU Sultan Iskandar Muda	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR I Medan	Jalan Bandara Blang Bintang, Kota Banda Aceh, Prov. Aceh
5	TBBM Meulaboh	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR I Medan	Jalan TMP Pada ng Seurahet, Johan Pahlawan, Meulaboh, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh
6	TBBM Sabang	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR I Medan	Jalan Teuku Panglima Polim No. 2, Kota Sabang, Prov. Aceh

7	TBBM Simu elue	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR I Medan	Jalan Tengku Diujung Desa Suka Jaya, Kota Sinabang, Kab. Simu elue, Prov. Aceh
8	TBBM AKR Belawan	PT AKR Corporindo, Tbk	1. Jalan Anggada I 2. Jalan Gabion III
			Kawasan Pelindo I,
			Pelabuhan Ujung
			Baru, Belawan-Medan,
			Prov. Sumatera Utara
9	Depot LPG Pangkalan Susu	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR I Medan	Jalan Samudera No. 84, Kee. Pangkalan Susu, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara
10	Depot LPG Tandem	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR I Medan	Jalan T. Amir Hamzah KM. 28,5, Kee. Binjai Utara, Kota Binjai, Prov. Sumatera Utara
11	DPPU Kualanamu dan Jalur Pipa BBM Pantai Labu-Kualanamu	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR I Medan	Jalan Komplek Bandara Udara International Kualanamu, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
12	DPPU Polonia	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR I Medan	Jalan Perhubungan Udara Soewondo Ujung, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara

13	TBBM Gunung Sitoli	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR I Medan	Jalan Pelud Binaka KM. 14, Kota Gunung Sitoli, Prov. Sumatera Utara
14	TBBM Kisaran	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR I Medan	Jalan Cokroaminoto No. 337, Kisaran, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara
15	TBBM Medan Group dan Jalur pipa BBM	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR I Medan	1. Jalan Yos Sudarso KM. 19,5 Kee. Labuhan Deli, Ka b. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
	Belawan-Labuan Deli:		2. Jalan Minyak No. 1, Kee. Medan Belawan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara
	a. TBBM Labuhan Deli;		
	b. TBBM Belawan; dan		
	C. Jalur pipa BBM Belawan-Labuan Deli.		
16	TBBM Pematang Siantar	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR I Medan	Jalan Bola Kaki No. 1, Kab. Pematang Siantar, Prov. Sumatera Utara
17	TBBM Sibolga	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR I Medan	Jalan Janggi No. 3, Kota Sibolga, Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara
18	Pipa Transmisi Gas Area NSA (North Sumatera Area)	PT Pertamina Gas	Pangkalan Brandan, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara
19	Instalasi Jaringan Distribusi Gas Bumi Regional 3	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Prov. Sumatera Utara, Prov. Riau, Prov. Kepulauan Riau

20	TBBM dan Depot LPG Teluk Kabung	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR I Medan	Jalan Raya Padang-Painan KM. 24, Kee. Teluk Kabung, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat
21	DPPU Minangkabau	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR I Medan	Komplek Bandara Internasional Minangkabau, Kab. Padang Pariaman, Prov. Sumatera Barat
22	TBBM Men ta wa i	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR I Medan	Kee. Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai, Prov. Sumatera Barat
23	Depot LPG Dumai	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR I Medan	Jalan Datuk Laksamana No. 2, Kota Dumai, Prov. Riau
24	DPPU Sutan Syarif Kasim II	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR I Medan	Jalan Bandara Simpang Tiga, Kota Pekanbaru, Prov. Riau
25	TBBM Dumai	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR I Medan	Jalan Soekarno-Hatta, Bukit Batrem, Kota Dumai, Prov. Riau
26	TBBM Sei Siak	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR I Medan	Jalan Tanjung Datuk Ujung No. 348, Kota Pekanbaru, Prov. Riau
27	TBBM Tembilahan	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR I Medan	Kampung Kesayangan Seberang Tembilahan Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau

28	Kilang Dumai	1. PT Pertamina (Persero) Direktorat Pengolahan (RU II Dumai); dan  2. PT Patra SK (Kilang Pengolahan Hasil Olahan).	Jalan Raya Kilang Putri Tujuh, Kota Dumai, Prov. Riau
29	Kilang Sei Pakning	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pengolahan	Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis, Prov. Riau
30	DPPU Hang Nadim	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR I Medan	Jalan Bandara Hang Nadim, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
31	Pipa Gas Pemping- Tanjung Uneang	PT Pelayanan Energi Batam	Pulau Pemping-Pulau Batam, Prov. Kepulauan Riau
32	TBBM Kijang	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR I Medan	Jalan Sei Walang KM. 25 Kijang Kota, Pulau Bintan, Kab. Bintan, Prov. Kepulauan Riau
33	TBBM Pulau Sambu	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR I Medan	Pulau Sambu, Kec. Belakang Padang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
34	TBBM Selat Lampa	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR I Medan	Pelabuhan Selat Lampa Desa Sabang Mawang Barat, Kec. Pulau Tiga, Kab. Natuna, Prov. Kepulauan Riau
35	TBBM Tanjung Uban		Jalan Nusa Indah No. 1, Pulau Bintan, Kab. Bintan,

		PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR I Medan	Prov. Kepulauan Riau
36	TBBM Jambi	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR II Palembang	Jalan Raden Pamuk No. 2, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Prov. Jambi
37	DPPU Sultan Thaha	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR II Palembang	Jalan Cendrawasih, Kec. Paal Merah, Kota Jambi, Prov. Jambi
38	Pipa Transmisi Minyak Area CSA (Central Sumatera Area)	PT Pertamina Gas	Prov. Jambi, Prov. Sumatera Selatan
39	DPPU Fatmawati Soekarno	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR II Palembang	Jalan Pertamina Bandara Fatmawati Soekarno, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu
40	TBBM Pulau Baai	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR II Palembang	Jalan Ir. Rustandi Sugiarto No. 11 Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu
41	Refinery Unit III Kilang Plaju -Kilang Sei Gerong	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pengolahan	Jalan Beringin No. 1, Komperta, Kec. Plaju, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan
42	Kilang Pengolahan LPG Prabumulih	PT Titis Sampurna	Jalan Kemang Tanduk- Tugu Nanas, Kota Prabumulih, Prov. Sumatera Selatan

43	Kilang Pengolahan LPG Lembak	PT Surya Esa Perkasa	Jalan Raya Palembang- Indralaya KM.17 , Kee. Lembak, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan
44	Kilang Esktraksi, Pipa Natural Gas Liquefaction (NGL), penyaluran gas bumi, dan kilang fraksinasi pengolahan Liquefied Petroleum Gas (LPG)	PT Per ta -Sa mta n Gas	1. Sungai Gerong, Kota Palembang
			2. Kota Prabumulih, Kab. Muara Enim,
			Prov. Sumatera Selatan
45	Depot LPG Pulau Layang	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR II Palembang	Jalan Sel No. 1, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan
46	DPPU Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II)	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR II Palembang	Jalan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan
47	TBBM Baturaja	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR II Pa lem ba n g	Kota Baturaja, Kab. Ogan Komering Ulu, Prov. Sumatera Selatan
48	TBBM Kertapati dan Jalur Pipa Ker ta pa ti-	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR II Palembang	1. Jalan Abi Kusno Cokro Suyoso,
	Plaju		2. Jalan Kimarogan No.1927,
	a. Kertapati Lama;		Kee. Kertapati, Kata Palembang,
	b. Kertapati Baru; dan pipa Kertapati-Plaju.		Prov. Sumatera Selatan

49	TBBM Labat	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR II Palembang	Jalan RE.Martadinata No. K.150, Kab. Lahat, Prov. Sumatera Selatan
50	TBBM Lubuk Linggau	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR II Palembang	Jalan Jend. Sudirman No. 44, Kota Lubuk Linggau, Prov. Sumatera Selatan
51	Pipa Transmisi Gas Area SSA (South Sumatera Area)	PT Pertamina Gas	Prov. Riau dan Prov. Sumatera Selatan
52	Instalasi Jaringan Distribusi Gas Bumi Regional 1	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Prov. Sumatera Selatan, Prov. Lampung, Prov. Banten, Prov. DKI Jakarta, dan Prov. Jawa Barat
53	Instalasi Jaringan Transmisi Gas Bumi Sumatera-Jawa	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Prov. Sumatera Selatan, Prov. Lampung, Prov. Banten, Prov. DKI Jakarta, dan Prov. Jawa Barat
54	Fasilitas dan Instalasi	PT Transportasi Gas Indonesia	Prov. Sumatera Selatan, Prov. Jambi,
	J aringan Transmisi Gas Alam TGI:		Prov. Kepulauan Riau, Prov. Riau
	1. Grissik-Duri; dan		
	2. G riss ik - B a tam - Singapura.		
55	DPPU Depati Amir	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR II Palembang	J alan Bandara Depati Amir, Kata Pangkal Pinang, Prov. Bangka Belitung

56	TBBM Pangkalbalam	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR II Palembang	Jalan Puput No. 59, Kee. Pangkal Balam, Kata Pangkal Pinang, Prov.Bangka Belitung
57	Fasilitas AKR Lampung	PTAKR Corporindo, Tbk	Jalan Sumatera Komplek Pelindo II Cabang Panjang Utara, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung
58	Floating Storage & Regasification Unit "FSRU" Lampung	PT PGN LNG Indonesia	Perairan laut Labuhan Maringgai dan
			Desa Sriminosari,
			Kee. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung
59	TBBM dan Depot LPG Panjang	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR II Palembang	Jalan Sumatra Komplek Pelabuhan Panjang, Kee. Panjang, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung
60	STS Teluk Semangka	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR III DKI	Jalan Merdeka No. 377, Ps. Padang,
		Jakarta	Kee. Kota Agung Pusat, Kab. Tanggamus,
			Prov. Lampung
61	Fasilitas AKR Ciwandan	PT AKR Corporindo, Tbk	Jalan Pelindo II, Kee . Ciwandan, Kota Cilegon, Prov. Banten
62	Fasilitas Penyimpanan Terminal Bahan Bakar Minyak	PT Orbit Terminal Merak	Perairan Selat Sunda dan Merak Terminal
			Jalan Yos Sudarso, Kee. Pulo Merak, Kota Cilegon,
			Prov. Banten
63	Depot LPG Tanjung Sekong	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR III DKI	Jalan Yos Sudarso, Kel. Lebak Gede, Kee. Pulo Merak, Kota Cilegon,

		Jakarta	Prov. Ban ten
64	DPPU SHAFT! (Soekarno Hatta Aviation Flight Terminal Intemationaij	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR III DKI	Bandara Jakarta Internasional Soekarno- Hatta Cengkareng, 
		Jakarta	Kota Tangerang, Prov. Ban ten
65	TBBM Tanjung Gerem	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR III DKI	Jalan Laksamana RE Martadinata No. 50, Kota Cilegon,
		Jakarta	Prov. Banten
66	Pipa Transmisi Gas Area WJA (West Java Area)	PT Pertamina Gas	Prov. Banten, Prov. DKI Jakarta, Prov. Jawa Barat
67	Fasilitas regasifikasi LNG:	PT Nusantara Regas	Lepas Pantai Tanjung Prick, Muara Karang, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta
	a. Floating Storage and Regasification Terminal (FSRT);		
	b. Subsea Pipeline; dan		
	C. Onshore Receiving Facility (ORF).		
68	Fasilitas AKR Tanjung Priok	PT AKR Corporindo, Tbk	Jalan Aceh Pelabuhan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta
69	Depot LPG Tanjung Priok	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR III DKI	Jalan Jampea No. 1, Kee. Koja, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta

70	DPPU Halim Perdanakusuma	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR III DKI  Jakarta	Bandara Halim Perdanakusuma, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
71	TBBM Jakarta Group:  a. TBBM Plumpang;  b. TBBM Tanjung Priok; dan  c. TUKS Tanjung Priok.	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR III DKI  Jakarta	Jalan Yos Sudarso, Jalan Jampea, Kee. Koja,  Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta
72	Kilang Pengolahan LPG Cemara	PT Wahana Insan Nugraha	Kee. Losarang, Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat
73	Kilang Pengolahan LPG Pondok Tengah	JYI' Yudistira Energi	Jalan Pantai Hurip Babelan, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
74	Kilang Pengolahan LPG Tambun	PT Bina Bangun Wibawa Mukti	Kee. Tambun, Kata Bekasi, Prov. Jawa Barat
75	Fasilitas AKR Bandung	PT AKR Corporindo, Tbk	Kawasan Industri Cimareme, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, Prov. Jawa Barat
76	DPPU Husein Sastranegara	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR III DKI  Jakarta	Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat
77	Jalur Pipa BBM Balongan-Jakarta		

		PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR III DKI	Balongan-Cikampek- Jakarta, Prov. Jawa Barat, DKI Jakarta
		Jakarta	
78	TBBM dan Depot LPG Balongan		
		PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR III DKI	Jalan Raya Balongan KM. 8,
		Jakarta	Kota Indramayu, Prov. Jawa Barat
79	Refinery Unit VI Balongan Kilang Mundu Instalasi Salam Darma	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pengolahan	Jalan Raya Balongan KM. 9, Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat
80	TBBM Cikampek	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR III DKI	Jalan Ahmad Yani KM. 6, Cikampek,
		Jakarta	Kota Karawang, Prov. Jawa Barat
81	TBBM Tasikmalaya	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR III DKI	Jalan Garuda No. 1, Kee. Cibereum, Kota Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat
		Jakarta	
82	TBBM Bandung Group:	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR III DKI	1. Jalan Raya Soekarno Hatta No. 728,

	1. TBBM Ujung Berung; dan 2. TBBM Padalarang.	Jakarta	Kota Bandung, Prov. Jawa Barat 2. Jalan Raya Padalarang No. 474 KM 16.5, Kee. Padalarang, Kab. Bandung Barat, Prov. Jawa Barat
83	Pipa Penyalur BBM Cilacap-Bandung	Pf Pertamina {Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR III DKI Jakarta	Cilacap-Tasikmalaya- Bandung, Prov. Jawa Tengah, Jawa Barat
84	Refinery Unit IV dan Depot LPG Cilacap	1. Pf Pertamina {Persero) Direktorat Pengolahan (RU IV) 2. PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Rite 1 MOR IV Semarang (Depot LPG)	Jalan MT Haryono, No. 77, Rawakeong, Lomanis, Cilacap Tengah, Kab. Cilacap, Prov. Jawa Tengah
85	Terminal LPG Semarang	PT Optima Sinergi Comvestama {OPSICO)	Jalan Arteri Yos Sudarso Kawasan Industri Cipta Guna Kav. 11, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
86	Fasilitas AKR Semarang	Pf AKR Corporindo, Tbk	Jalan Coaster No. 16, Pela bu han Tanjung Mas, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
87		PT Kalimantan Jawa Gas	Lepas Pantai Utara Pulau Jawa dan Jalan Ronggowarsito Komplek Pelabuhan Tanjung Emas, Kata Semarang,

	Pipa gas bawah laut dan Onshore Receiving Facilities 0( RF) di area PLN Tambak Lorok		Prov. Jawa Tengah
88	DPPU Ahmad Yani	PT Pertamina {Persero) Direktora t Pemasaran Ritel MOR IV Semarang	Jalan Cinde Barat II Jomblang, Kee. Candisari, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
89	TBBM Boyolali	Pf Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR IV Semarang	Dusun II, Desa Mojolegi, Kee. Teras, Kab. Boyolali, Prov. Jawa Tengah
90	TBBM Cila cap	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR IV Sema ra ng	Jalan Yos Sudarso No. 7, Klega, Kel. Ta mba kreja, Ka b . Cila ca p , Prov. Jawa Tengah
91	TBBM Lomanis	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR IV Semarang	Jalan Banjaran No. 1, Cidapur, Kel. Donan, Kee. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap, Prov. Jawa Tengah
92	TBBM Maos	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR IV Semarang	Jalan Raya Maos No . 1 , Kee. Maos, Kab. Cilacap, Prov. Jawa Tengah
93	TBBM Semarang Group	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR IV Semarang	1. Jalan Pengapon No. 14, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
	a. TBBM Pengapon; dan b. TBBM Cepu.		2. Jalan Gajah Mada No . 4, Mentul, Kel. Karangboyo, Kee. Cepu, Ka b. Blora, Prov. J awa Tengah

94	TBBM Tegal	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR IV Semarang	Jalan Abimanyu No. 2, Kel. Slerok, Kee. Tegal Timur, Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah
95	Instalasi Jaringan Distribusi Gas Bumi Regional 2	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Prov. Jawa Timur, Prov. Jawa Tengah
96	DPPU Adisucipto	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR IV Semarang	Jalan Laksda Adisucipto Kab. Sleman,
			Prov. D.I. Yogyakarta
97	DPPU Adi Soemarmo	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR IV Semarang	Jalan Panasan Baru, Kee. Ngemplak, Kab. Boyolali, Prov. Jawa Tengah
98	Jalur Pipa BBM Cilacap- Jogja-Teras Boyolali	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR IV Semarang	Cilacap-Jogja-Boyolali, Prov. Jawa Tengah, Prov. D.I. Yogyakarta
99	TBBM Rewulu	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR IV Semarang	Jalan Raya Wates KM.10, Desa Argomulyo, Kee.
			Sedayu, Kab. Bantul,
			Prov. D.I. Yogyakarta
100	Kilang Pengolahan Kondensat	PT Trans-Pasific Petrochemical Indotama	Rene, Kee Jenu, Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur
101	Fasilitas AKR Surabaya	PT AKR Corporindo, Tbk	Jalan Nilam Utara, Kee. Pabean Cantikan, Kota Surabaya,
			Prov. Jawa Timur
102	Kilang Pengolahan LPG Gresik	PT Energi Nusantara Perkasa	Jalan Harun Tohir No. 1,
			Kota Gresik, Prov. Jawa Timur

103	Industri Pengelolaan Gas Suar Bakar (Flare Gas)	PT Gasuma Federal Indonesia	Desa Losari, Desa Sokosari, Kee . Soko, Kab. Tuban, Prov. Jawa timur
104	DPPU Juanda	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR V Surabaya	Bandar Udara Juanda, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
105	FSO- Kalbut	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR V Surabaya	Perairan Kalbut, Kab. Situbondo, Prov. Jawa Timur
	TBBM Surabaya Group, Depot LPG Tanjung Perak, clan Pipa ISG	PT Pertamina (Persero) Direktorat	Jalan Perak Timur No. 277, Jalan Nilam Barat No. 37,
106	a. TBBM Tanjung Perak;	Pemasaran Ritel MOR V Surabaya	Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
	b. TBBM Bandaran;		
	C. Depot LPG Tanjung Perak; clan		
	d. Jalur Pipa BBM ISG (In s ta las i Surabaya Grup) Tanjung Perak-Juanda.		
107	Jalur pipa BBM Tanjungwangi-Tuban	PT Per ta min a (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR V Surabaya	Kab. Banyuwangi, Kota Tuban, Prov. Jawa Timur
108	TBBM Camplong	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR V Surabaya	Jalan Raya Camplong KM. 8, Kab. Sampang, Pulau Madura, Prov. Jawa Timur
109	TBBM Madiun		Jalan YosSudarso No. 63, Kata Madiun,

		PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR V Surabaya	Prov. Jawa Timur
110	TBBM Malang	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR V Su ra ba ya	Jalan Halmahera No. 13 , Kota Malang, Prov . Jawa Timur
111	TBBM Tanjung Wangi	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR V Surabaya	Jalan Gatot Subroto No. 72, Ka b. Banyuwangi, Prov. J awa Timur
112	TBBMTuban	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR V Surabaya	Jalan Tanjung Awar - Awar, Desa Remen , Kee. Jenu, Ka b. Tuban, Prov. Jawa Timur
113	Pipa Transmisi Gas Area EJA (East Java Area)	PT Pertamina Gas	Pagerungan-Porong- Gresik-Kota Pasuruan, Prov. Jawa Timur
114	Fasilitas AKR Bali	PT AKR Corporindo, Tbk	Jalan Ikan Tuna I, Pelabuhan Benoa , Kota Denpasar, Prov. Bali
115	TBBM dan Depot LPG Manggis	PT Pertamina (Pers ero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR V Su ra ba ya	Desa Ulakan, Ka b. Karang Asem, Prov . Bali
116	DPPU Ngurah Rai	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR V Su ra baya	Jalan Ir. H.Juanda Kompleks Bandara Ngurah Rai, Kab. Badung, Prov. Bali
117	TBBM Sanggaran	PT Per ta min a (Per se ro) Direktora t Pemasaran Ritel MOR V Su ra baya	J a la n Raya Pela bu han Benoa No. 7, Kel. Ped unga n, Kota Denpasar, Prov. Bali
118	DPPU Lombok		Komp. Bandar a

		PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR V Surabaya	In ternas ion a 1 Lom bok , Ka b . Lombok Tengah, Prov. Nusa Tenggara Barat
119	TBBM Ampenan	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR V Surabaya	J a la n Yos Su da rso No . 110, Kee. Am pen a n , Kota Ma ta ra m , Pro v. Nusa Tenggara Barat
120	TBBM Badas	fYf Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR V Surabaya	J alan Lintas Sumbawa, Kee. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa, Prov. Nusa Tenggara Barat
121	TBBM Bima	fYf Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR V Surabaya	Jalan Pendalaman Wadum, Kota Bima, Prov. Nusa Tenggara Barat
122	DPPU El Tari	fYf Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR V Surabaya	Jalan Adi Sueipto TenFui, Kee. Maulafa, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur
123	TBBM Atapupu	fYf Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR V Surabaya	Jalan Raya Pelabuhan, Kab. Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur
124	TBBM Ende	fYf Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR V Surabaya	Jalan Adisucipto No. 6, Kab. Ende, Prov. Nusa Tenggara Timur
125	TBBM Kalabahi	fYf Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR V Surabaya	Jalan Slarnet Riyadi No. 87, Teluk Mutiara, Kab. Alor, Prov. Nusa Tenggara Timur
126	TBBM Maumere		Desa Tana Duen,

		fYf Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR V Surabaya	Kee. Kangae, Kab. Sikka, Pulau Flores
			Prov. Nusa Tenggara
			Timur
127	TBBM Reo	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR V Su ra baya	Jalan Kedindi Reo, Kab. Manggarai, Prov. Nusa Tenggara Timur
128	TBBM Tenau	fYf Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR V Surabaya	J alan Yos Sudarso No. 1, Kompleks Pelabuhan Tenau, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur
129	TBBM Waingapu	PT Pert amina (Pe rs e ro) Direktorat Pemasaran Ritel MOR V Surabaya	Jalan Nangamesi No. 7, Kota Wain gapu, Ka b. Sumba Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur
130	Fasilitas AKR Pontianak	PT AKR Corporindo, Tbk	Jalan Raya Wajok Hilir KM. 16, Kee. Siantan, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat
131	DPPU Supadio	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VI Balikpapan	Komplek Bandar Udara Supadio Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat
132	TBBM Pontianak	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VI Balikpapan	Jalan Khatulistiwa No. 282, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat
133	TBBM Sintang		Jalan MT. Haryono No. 1, Kee. Kapuas Kanan Hulu, Kab. Sintang,

		PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VI Balikpapan	Prov. Kalimantan Barat
134	Fasilitas AKR Banjarmasin	PT AKR Corporindo, Tbk	Pelabuhan Martapura Baru Trisakti, Kawasan Pelindo III,
			Kota Banjarmasin,
			Prov. Kalimantan Selatan
135	Fasilitas AKR Stagen	PT AKR Corporindo, Tbk	Jalan Raya Stagen, Komplek Pelindo III, Pulau Laut Utara, Kotabaru,
			Prov. Kalimantan Selatan
136	DPPU Syamsuddin Noor	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VI Balikpapan	Jalan Angkasa No. 5, Komplek Bandara Syamsuddin Noor, Kota Banjarbaru,
			Prov. Kalimantan Selatan
137	TBBM Banjarmasin	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VI Balikpapan	Jalan Kuin Selatan No. 1, Kota Banjarmasin,
			Prov. Kalimantan Selatan
138	TBBM Kotabaru Group	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VI Balikpapan	Jalan Sungai Taib, Kee. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru,
			Prov. Kalimantan Selatan
139	Fasilitas AKR Buntok	PT AKR Corporindo, Tbk	Desa Buntok Baru, Kee. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara,
			Prov. Kalimantan Tengah
140	DPPU Tjilik Riwut	PT Pertamina (Persero)	Komplek Bandara Tjilik
			Riwut,

		Direktorat Pemasaran Ritel MOR VI Balikpapan	Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah
141	TBBM Pangkalan Bun	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VI Balikpapan	
			Jalan Sungai Kapitan, Kee. Kumai,
			Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah
142	TBBM Pulang Pisau	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VI Balikpapan	Jalan Trans Kalimantan Palangkaraya-Bahaur, Kee. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau,
			Prov. Kalimantan Tengah
			Jalan Muehran Ali No. 24, Kel. Baamang Hulu,
143	TBBM Sampit	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VI Balikpapan	Kee. Baamang,
			Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah
			Jalan Mulawarman, Komplek Bandar Udara Juwata,
144	DPPU Juwata	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VI Balikpapan	Kota Tarakan,
			Prov. Kalimantan Utara
			Jalan Yos Sudarso No.14, Kee. Tarakan Timur,
		Ritel MOR VI Balikpapan	Kota Tarakan,
			Prov. Kalimantan Utara
146	Refinery Unit V Balikpapan, Lawe Lawe	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pengolahan	1. Jalan Yos Sudarso
			No . 1, Kota Balikpapan,

			Prov. Kalimantan Timur
			2. Jalan Penajam-Kuaro,
			Kab. Penajam Paser Utara,
			Prov. Kalimantan Timur
147	Kilang LNG Badak Bontang	PT Badak NGL	Kota Bontang, Prov. Kalimantan Timur
148	Fasilitas AKR Palaran	PT AKR Corporindo, Tbk	Jalan Trikora, Kee. Palaran, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur.
149	DPPU Sepinggan	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VI Balikpapan	Jalan Marsma Iswahyudi No. 1, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur
150	TBBM clan Depot LPG Balikpapan	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VI Balikpapan	Jalan Yos Sudarso No. 148, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur
151	TBBM Samarinda	PT Pertamina (Persero)	Jalan Cendana No. 1,
		Direktorat Pemasaran	Kel. Teluk Lerong,
		Ritel MOR VI	Kota Samarinda,
		Balikpapan	Prov. Kalimantan Timur
152	Pipa Transmisi Gas Area KAL (Kalimantan)	PT Pertamina Gas	Kota Bontang, Prov. Kalimantan Timur
153	DPPU Hasanuddin		Jalan Asrama Haji Sudiang Pondok Asri III, Dusun Pao Pao,

		PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VII Makassar	Kab. Maros, Prov. Sulawesi Selatan
154	TBBM dan Depot LPG Makassar	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VII Makassar	Komplek Pelabuhan Soekarno Hatta, Kota Makasar, Prov. Sulawesi Selatan
155	TBBM Palopo	PT Pertamina (Persero)	Jalan Pantai,
		Direktorat Pemasaran	Desa Karang-Karangan,
		Ritel MOR VII	Kee. Bua, Kab. Luwuk,
		Makassar	Prov. Sulawesi Selatan
156	TBBM Parepare	PT Pertamina (Persero)	Kel. Watang Soreang,
		Direktorat Pemasaran	Kee. Soreang,
		Ritel MOR VII	Kota Pare Pare,
		Makassar	Prov. Sulawesi Selatan
157	Donggi Senora LNG	PT Donggi Senoro LNG	Desa Uso, Kee. Batui, Ka b . Banggai, Prov. Sulawesi Tengah
158	DPPU Mutiara	Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VII Makassar	Jalan Abdul Rahman Saleh, Komplek Bandar Udara Mutiara, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah
159	TBBM Banggai	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VII	J alan Keramat, Kee. Banggai, Kab. Banggai Laut,
		Makassar	Prov. Sulawesi Tengah

160	TBBM Donggala	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VII Makassar	Jalan Trans Palu, Donggala KM. 15, Kee. Banawa, Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah
161	TBBM Kendari	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VII	Jalan REMartadinata No. 1, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara
		Makassar	
162	TBBM Kolaka	PT Pertamina (Persero)	Jalan Abadi No. 261,
		Direktorat Pemasaran	Kee. Latambaga,
		Ritel MOR VII	Kab. Kolaka,
		Makassar	Prov. Sulawesi Tenggara
163	TBBM Kolonodale	PT Pertamina (Persero)	Jalan Wolter Monginsidi No. 25 Kolonodale,
		Direktorat Pemasaran Ritel MOR VII	Kab. Morowali Utara ,
		Makassar	Prov. Sulawesi Tengah
164	TBBM Luwuk	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VII Makassar	Jalan Imam Bonjol KM. 2, Kee. Bungin, Kota Luwuk, Prov. Sulawesi Tengah
165	TBBM Moutong	PT Pertamina (Persero)	Jalan Trans Sulawesi
		Direktorat Pemasaran Ritel MOR VII Makassar	No. 106, Kab Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah

166	TBBM Poso	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VII Makassar	Jalan Kasiguncu No. 90, Poso Kota, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah
167	TBBM Raha	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VII Makassar	Jalan Merdeka No. 40, Kee . Napabalano, Kab. Muna, Prov. Sulawesi Tenggara
168	TBBM Toli-Toli	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VII Makassar	Jalan Batu Bangga No. 27, Desa Lalos, Kab. Toli Toli, Prov. Sulawesi Tengah
169	TBBM Gorontalo	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VII Makassar	Jalan Yos Sudarso No. 6, Kee. Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo
170	Fasilitas AKR Bitung	PT AKR Corporindo, Tbk	Jalan Wolter Monginsidi KM. 4, Kee. Madidir, Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara
171	DPPU Sam Ratulangi	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VII Makassar	Jalan Bandara Sam Ratulangi, Kee. Mapanget, Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara
172	TBBM Bitung	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VII Makassar	Jalan Yos Sudarso, Bitung Tengah, Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara
173	TBBM Tahuna		Jalan Tidore No. 25 Kee. Tahuna Timur,

		PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VII Makassar	Kab. Kepulauan Sangihe, Prov. Sulawesi Utara
174	TBBM Baubau	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VII Makassar	Jalan Dayanu Ikhsanuddin KM.8 , Kel. Sulaa, Kee. Betoambari, Kota Bau Bau, Prov. Sulawesi Tenggara
175	DPPU Babullah	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VIII Maluku dan Papua	Jalan Batu Angin Bandara Sultan Babullah, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara
176	DPPU Pattimura	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VIII Maluku dan Papua	Jalan Bandara Patimura, Kota Ambon, Prov. Maluku
177	TBBM Bula	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VIII Maluku dan Papua	Jalan Airport Bula, Kab. Seram Bagian Timur, Prov. Maluku
178	TBBM Dobo	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VIII Maluku dan Papua	Jalan Wamar, Desa Durjela, Dobo, Kab. Kepulauan Aru, Prov. Maluku
179	. TBBM Masohi	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VIII Maluku dan Papua	Jalan Kapten Patimura No. 43, Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku

180	TBBM Namlea	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VIII Maluku dan Papua	Jalan Kampung Pohon Durian, Kee. Namlea, Kab. Buru, Prov. Maluku
181	TBBM Saumlaki	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VIII Maluku dan Papua	Jalan Kampung Olilit, Tanibar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Prov. Maluku
182	TBBM Tual	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VIII Maluku dan Papua	Jalan Yos Sudarso, Kel. Masrum, Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Prov. Maluku
183	TBBM Wayame	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VIII Maluku dan Papua	Jalan Wayame, Kota Ambon, Prov. Maluku
184	TBBM Labu ha	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VIII Maluku dan Papua	Jalan Pertamina, Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Prov. Maluku Utara
185	TBBM Sanana	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VIII Maluku dan Papua	Jalan Waikalopa No. 1 , Pulau Sanana, Prov. Maluku Utara
186	TBBM Ternate	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VIII Maluku dan Papua	Jalan Jambulah, Ternate, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara

187	TBBM Tobelo	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VIII Maluku dan Papua	Jalan Pertamina, Gamsugi, Kee . Tobelo, Kab. Halnahera Utara, Prov. Maluku Utara
188	DPPU FKS (Frans Kaisiepo) Biak	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VIII Maluku dan Papua	Jalan Jenderal Sudirman, Burokub, Kota Biak, Kah. Biak Numfor, Prov. Papua
189	DPPU Mopah	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VIII Maluku dan Papua	Jalan Brawijaya, Mopah Baru, Kota Merauke, Prov. Papua
190	. DPPU Sen tani	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VIII Maluku dan Papua	Jalan Yabaso Bandara Sentani, Sentani, Kota Jayapura, Prov. Papua
191	DPPU Moses Kilangin Timika	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VIII Maluku dan Papua	Jalan Bandara Timika Kwamki, Mirnika Baru, Kab. Mirnika, Prov. Papua
192	TBBM Biak	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VIII Maluku dan Papua	Jalan Jend. Sudirman No. 110, Kota Biak, Kab. Biak Numfor, Prov. Papua
193	TBBM Jayapura	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VIII Maluku dan Papua	Jalan Nirnboran 2, Kota Jayapura, Prov. Papua

194	TBBM Merauke	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VIII Maluku dan Papua	Jalan Mayor Wiratno Gudang Arang, Kel. Maro, Kee. Merauke, Kab. Merauke, Prov. Papua
195	TBBM Nabire	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VIII Maluku dan Papua	Jalan Frans Kasiepo, Kel Nabarua, Kec.Nabire, Ka b. Nabire, Prov. Papua
196	TBBM Serui	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VIII Maluku dan Papua	Jalan Pertamina No. 1, Kota Serui, Prov. Papua
197	Refinery Unit VII Kasim Sorong	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pengolahan	Jalan Kilang No. 1, Distrik Seget, Kota Sorong, Prov. Papua Barat
198	DPPU Deo Sorong	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VIII Maluku clan Papua	Jalan Basuki Rahmat KM. 8, Kel. Remu Selatan, Kota Sorong Timur, Prov. Papua Barat
199	TBBM Fak-fak	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VIII Maluku clan Papua	Jalan Jendral A. Yani, Bumi Muroh Indah, Kab. Fakfak, Prov. Papua Barat
200	TBBM Kaimana	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran	Jalan Utarum, Mai Mai, Kee. Kaim a n a ,

		Ritel MOR VIII Maluku	Kab. Kaimana,
		clan Papua	Prov. Papua Barat
201	TBBM Manokwari	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VIII Maluku clan Papua	Jalan Trikora, Kab. Manokwari, Prov. Papua Barat
202	TBBM Sorong	PT Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Ritel MOR VIII Maluku dan Papua	Jalan Ahmad Yani No. 3, Kota Sorong, Prov. Papua Barat
<b>B. SUBBIDANG KETENAGALISTRIKAN</b>			
No.	Nama Obvitnas	Pengelola	Lokasi
1	PLTU clan GI Nagan Raya	1. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumbagut  (PLTU 2x1 10 MW);  dan  2. PT PLN (Persero) Unit Induk P3BS (GI 150 kV).	Jalan Meulaboh- Tapaktuan,  Desa Suak Puntong, Kee. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya, Prov. Aceh
2		1. PT Pembangkitan Jawa Bali UBJOM Arun (PLTNG 184 MW); dan  2. PT PLN (Persero) Unit Induk P3BS (GI 150 kV).	Jalan Banda Aceh Gate 5.3, Desa Meuria  Paloh, Kee. Muara Satu, Kota Lhokse u ma we, Prov. Aceh

3	PLTU dan GITET	1. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumbagut  Pangkalan Susu  2. PT PLN (Persero) Unit Induk P3BS (GITET  275 kV).	Desa Tanjung Pasir, Kee . Pangkalan Susu  Ka b. Langkat,  Prov. Sumatera Utara
4	PLTU clan GI Labuhan Angin	1. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumbagut  (PLTU 2x1 10 MW);  clan  2. PT PLN (Persero) Unit Induk P3BS (GI 150 kV).	J alan PLTU Labuhan Angin  Desa Tapian Nauli I Kee. Tapian Na u li , Kab.Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara
5	SUTET Su mbagu t	PT PLN (Persero) Unit Induk P3BS (S UTET 275  kV)	Prov. Sumatera Utara dan Prov. Sumatera Barat
6	PLTU, PLTGU, PLTG  MVPP Onur Sultan, dan GI Belawan	1. PT PLN (Persero) UIK Sumbagut (PLTU 4x65 MW, PLTGU 2x400 MW);  2. PT PLN (Persero) P3BS (GI 150 kV); clan	J alan Pulau Siscanang No. 1 Belawan,  Kota Meda n , Prov. Sumatera Utara

		3. PT KAR Powership Indonesia (MVPP 470 MW).	
7	Region Control Center	PT PLN (Persero) UIP3BS UP2B Sumbagut	Jalan KL. Yos Sudarso, Glugur, Kee. Medan Baru, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara
	Sumbagut		
8	GITET Binjai	PT PLN (Persero) UIP3BS UPT Medan (GITET 275	Jalan MT Haryono, Kee. Binjai Utara, Kota Binjai,
		kV)	Prov. Sumatera Utara
9	GITET Galang	PT PLN (Persero) UIP3BS UPT Medan (GITET 275	Jalan Tanjung Pasir, Kee. Galang,
		kV)	Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
10	GITET Kuala Tanjung	PT PLN (Persero) UIP3BS UPT Pematang Siantar (GITET 275 kV)	Jalan WR Supratman, Kee. Bilah Barat
			Kab. Labuhan Batu, Prov. Sumatera Utara
11	GITET Simangkok	PT PLN (Persero) UIP3BS UPT Pematang Siantar (GITET 275 kV)	Jalan Bisuk Siahaan, Kee. Parmaksian,
			Kab. Toba Samosir, Prov. Sumatera Utara
12	GITET New Padang Sidempuan	PT PLN (Persero) UIP3BS UPT Pematang Siantar (GITET 275 kV)	Jalan HT Rizal Nurdin, Kee. Padang Sidempuan Tenggara,
			Kota Padang Sidempuan, Prov. Sumatera Utara
13	Region Control Center	PT PLN (Persero) UIP3BS UP2B Sumbagtg	Jalan Ir. H. Sutami Batang Tapakis,
	Sumbagtg		Kab. Padang Pariaman,
			Prov. Sumatera Barat

14	GITET Payakumbuh	PT PLN (Persero) UIP3BS UPT Padang (GITET 275	Jalan Dr.Sutami, Kel. Sieinein Mudiak, Kota Payakumbuh,
		kV)	Prov. Sumatera Barat
15	GITET Kiliranjao	PT PLN (Persero) UIP3BS UPT Padang (GITET 275	Jalan Raya Lintas
		kV)	Su ma te ra- Kilira n Jao KM.164,
			Ka b. Sujunjung,
			Prov. Sumatera Barat
16	PLTU dan GIS Ombilin	1. PT PLN (Persero) UIK Sumbagsel (PLTU 2x100 MW); dan	J alan Prof. M. Yamin Sijantang,
		2. PT PLN (Persero) P3BS (GI 150 kV).	Kota Sawahlunto, Prov. Sumatera Barat
17 .	PLTU dan GI Teluk Sirih	1. PT PLN (Persero) UIK Sumbagsel (PLTU 2x112 MW); dan	Jalan Padang-Painan KM. 25, Desa Teluk Sirih, Teluk Kabung Tengah, Kee. Bungus Kota Padang,
		2. PT PLN (Persero) P3BS (GI 150 kV).	Prov. Sumatera Barat
18	PLTA dan GI Singkarak	1. PT PLN (Persero) UIK Sumbagsel (PLTA 4x43,75 MW); dan	Jorong Asam Pulau Nagari Kayu Tanam, Kee. 2-X 11 Enam Lingkung
		2. PT PLN (Persero) P3BS (GI 150 kV).	Kab. Padang Pariaman, Prov. Sumatera Barat
19	PLTG, PLTMG, dan GI	1. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan	Desa Balai Pungut Kee. Pinggir,

		Sumbagut PLTG (Unit 1,2) dan PLTMG (Unit 1,2,3,4,5,6,7);	
	Duri	2. PLN BATAM (PLTG MPP Unit 1,2,3); dan	Ka b. Bengkalis, Prov. Riau
		3. PT PLN (Persero) Unit Induk P3BS (GI 150 kV).	
20 .	Sumatera Control Center	PT PLN (Persero) UIP3BS	J alan Nangka Ujung, Kee . Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Prov. Riau
21	PLTU dan GI Tenayan	1. PT Pembangkitan Jawa Bali UBJOM Ten aya n (200 MW); dan  2. PT PLN (Persero) Unit Induk P3BS (GI 150 kV).	Jalan Ring Road No. 70, Kee. Tenayan Raya , Kota Pekan Baru,  Prov. Riau
22	PLTG dan GI Tanjung Uncang	PLN Batam ELB Tanjung Uncang (PLTG Un it 1  dan unit 2 (2 x 41 MW)), dan (GI 150 kV)	Jalan Brigjen Katamso Kee . Batu Aji,  Kota Batam,  Prov. Kepulauan Riau
23	SUTET Sumbagsel	PT PLN (Persero) Unit Induk P3BS (SUTET 275 kV)	Prov. Sumatera Barat, Prov. Jambi dan  Prov. Sumatera Selatan
24	GITET Muaro Bungo	PT PLN (Persero) UIP3BS UPT Jambi (GITET 275 kV)	Jalan Lintas Sumatera KM. 7, Desa Sungai Binjai, Kee. Bathin III, Kab. Muaro Bungo, Prov. Jambi

25	GITET Bangko	PT PLN (Persero) UIP3BS UPT Jambi (GITET 275	Jalan Lintas Sumatera KM. 4, Desa Sungai Ulak Kab. Merangin,
		kV)	Prov. Jambi
26	PLTU Banjarsari Unit 1 clan 2	PT Bukit Pembangkit Innovative (PLTU 2x135 MW)	Jalan Lintas Sumatera, Desa Gunung Kembang Kee. Merapi Timur
			Kab. Lahat,
			Prov. Sumatera Selatan
27	Region Control Center  Sumbagsel	PT PLN (Persero) UIP3BS UP2B Sumbagsel	Jalan Abikusno Cokrosuyoso, Kee. Kertapati, Kota Palembang,
			Prov. Sumatera Selatan
28	GITET Lubuk Linggau	PT PLN (Persero) UIP3BS UPT Bengkulu	Jalan Lintas Sumatera KM.10, Kota Lubuk Linggau,
		(GITET 275 kV)	Prov. Sumatera Selatan
29	GITET Lahat	PT PLN (Persero) UIP3BS UPT Bengkulu	Jalan Lintas Sumatera, Kel. Pagar Agung,
		(GITET 275 kV)	Kab. Lahat,
			Prov. Sumatera Selatan
30	GITET Bayung Lincir	PT PLN (Persero) UIP3BS UPT Jambi	Desa Sindang Marga, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan
		(GITET 275 kV)	
31	GITET Sungai Lilin	PT PLN (Persero) UIP3BS UPT Palembang	Jalan Palembang-Jambi KM. 134,

		(GITET 275 kV)	Kee. Sungai Lilin, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan
32	PLTU dan GI Bukit Asam	1. PT PLN (Persero) UIK Sumbagsel (PLTU 4x65 MW); dan	Lingga, Kee. Lawang Kidul, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan
		2. PT PLN (Persero) P3BS (GI 150 kV).	
33	PLTU dan GI Tarahan	1. PT PLN (Persero) UIK Sumbagsel (PLTU 2x100 MW); dan 2. PT PLN (Persero) P3BS (GI 150 kV).	Jalan Lintas Sumatera KM. 15, Sumur Putri Katibung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung
34	PLTU dan GI Sebalang	1. PT PLN (Persero) UIK Sumbagsel (PLTU 100 MW); dan 2. PT PLN (Persero) P3BS (GI 150 kV).	Jalan Lintas Sumatera KM. 22, Desa Tarahan, Kee. Katibung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung
35	PLTG Tarahan	PLN Batam MPP Tarahan Unit 1,2,3 dan 4 (4 x 25 MW)	Jalan Soekarno Hatta KM. 15, Desa Rangai Tritunggal, Tarahan, Ka b. Lampung Selatan, Prov. Lampung
36	GITET dan GI Cilegon Baru	PT PLN (Persero) UITJBB (GITET 500 kV, GI 150 kV)	Jalan Raya Merak KM. 7 Desa Rawa Arum, Kee. Grogol, Kota Cilegon, Prov. Banten
37	GISTET LBE		Komplek PLTU LBE,

		PT PLN (Persero) UITJBB (GITET 500 kV)	J a l a n R a y a Salira Indah, Kee. Pulo Ampel, Kab. Serang, Prov. Banten
38	GITET Balaraja dan GI New Balaraja	PT PLN (Persero) UITJBB (GITET 500 kV, GI 150	Jalan Raya Gembong, Kp. Dangdeur,
		kV)	Kab. Tangerang,
			Prov . Ban ten
39	GI Cengkareng	PT PLN (Persero) UITJBB (GI 150 kV)	Jalan Pembangunan Batu Jaya-Batu Ceper, Kota Tangerang,
			Prov. Banten
40	PLTU, GITET, clan GI Suralaya	1. PT Indonesia Power UP SLA (PLTU Unit 1	J a l a n R a y a PLTU Suralaya, Kota Cilegon,
		s.d. 7: 3.400 MW);	Pro v. Ban ten
		2. PT Indonesia Power UJP BSLA (PLTU Unit	
		8: 625 MW); dan	
		3 . PT PLN (Persero) UIT JBB (GITET 500 kV	
		dan GI 150 kV	
		Su r a l a y a , G I S T E T )	
		500 kV dan GI 150 kV Banten 1).	

41	PLTGU dan GI Cilegon	1. PT Indonesia Power UJP CLG (PLTGU 740 MW); dan	Jalan Raya Bojonegara, Salira, Desa Margasari, Kee. Pulo Ampel,
		2. PT PLN (Persero) UIT JBB (GI 150 kV).	Kab. Serang, Prov. Banten
42	PLTU dan GIS Banten 2 Labuan	1. PT Indonesia Power UJP BLB (PLTU 600 MW); dan	Jalan Laba Terusan Penimbang,
		2. PT PLN (Persero) UIT JBB (GIS 150 kV).	Desa Suka Maju, Ka b. Pandeglang, Prov . Ban ten
43	PLTU dan GIS Banten 3	1. PT Indonesia Power UJP BLT (PLTU 945 MW); dan	Desa Lontar,
	Lontar	2. PT PLN (Persero) UIT JBB (GIS 150 kV).	Kee . Kerniri, Kab. Tangerang, Prov. Banten
44	SUTET 500 kV Suralaya-	1. PT PLN (Persero) UIT JBB;	1. Prov. Banten, Prov. DKI Jakarta
	Paiton	2. PT PLN (Persero) UIT JBT; dan	2. Prov. Jawa Barat, Prov. Jawa Tengah, Prov. D.I. Yogyakarta
		3. PT PLN (Persero) UIT JBTB.	3. Prov. Jawa Timur, Prov. Bali
45	Jawa Control Center,		Desa Kru ku t,

	GITET, dan GI Gandul	1. PT PLN (Persero) UIP2B (Jawa Control Center}; dan	Kee . Limo, Cinere,
		2. PT PLN (Pe rs e ro) UIT JBB (GITET 500 kV dan GI 150 kV).	Kota Jakarta Selatan, Prov . DKI J a ka r ta
46	Region Control Center	1. PT PLN (Persero) UP2B DKI Jakarta dan Banten (RCC, DKI Jakarta, dan Banten); dan	Jalan Mayjen Sutoyo No. 1, Cawang,
	dan Gardu Cawang:	2. PT PLN (Persero) UIT JBB (GISTET 500 kV, GI 150 kV, dan GIS 150 kV).	Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
	1. RCC Cawang;		
	2. GISTET Cawang Baru;		
	3. GI Cawang Lama; dan		
	4. GIS Cawang Baru.		
47	GISTET dan GIS	PT PLN (Persero) UITJBB (GISTET 500 kV dan GIS 150 kV)	Jalan Karang tengah, Kembangan, Ciledug, Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta
	Kembangan		
48	GIS Budi Kemuliaan	PT PLN (Persero) UITJBB (GIS 150 kV)	Jalan Budi Kemuliaan, Kota Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
49	GIS Senayan	PT PLN (Persero) UITJBB (GIS 150 kV)	Jalan Asia Afrika Senayan,
			Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

50	PLTGU dan Gardu Priok:	1. PT Indonesia Power UPJP Priok (PLTGU 2.880 MW)	Jalan Laksamana RE Martadinata,
	1. GISTET Priok;	2. PT PLN (Persero) UIT JBB (GISTET 500 kV, GIS 150 kV)	Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta
	2. GIS Priok Barat;		
	3. GIS Priok Timur; dan		
	4. GIS Priok Timur Baru.		
51	PLTU, PLTGU, dan GI	1. PT Pembangkitan Jawa Bali UP Muara Karang (PLTU, PLTGU	Jalan Raya Pluit Karang Ayu No. 1,
	Muara Karang	1.200 MW); dan	Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta
		2. PT PLN (Persero) UIT JBB (GI 150 kV).	
52	PLTGU Bekasi Power	PT Bekasi Power	Jalan Tekno 8, Kawasan Industri Gerbang Teknologi Cikarang, Kota Jababeka,
			Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
53	GITET dan GI Bekasi	PT PLN (Persero) UITJBB (GITET 500 kV dan GI	Jalan Kaliabang Bungur, Pondok Ungu ,
		150 kV)	Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat
54	PLTGU, PLTU, dan SUTT	PT Cikarang Listrindo	1. Kawasan Industri Jababeka, Kab. Bekasi,
	Cikarang Listrindo:		(PLTGU 821,6 MW)
	1. PLTGU Jababeka;		2. Kawasan Industri MM2100 Blok A8,

	2. PLTGU MM2 100 ; 3. PLTU Babulan ; dan 4. SUTT Jababeka- MM2 100 -Babulan .		Ka b. Bekasi, PLTGU 128,5 MW) 3. Jalan Raya Muara Bakti, Kab. Bekasi, (PLTU 288,8 MW) 4. (SUTT Jababeka - MM2 100 -Babulan) Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
55	GI Poncol Baru	PT PLN (Persero) UIT JBT (GI 150 kV)	Major Mutmuin, Hasibuan, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat
56	PLTGU dan GITET Muara Tawar	1. PT Pemangankitan Jawa Bali UP Muara Tawar (PLTGU 920 MW); dan	Jalan PLTGU Muara Tawar No. 1,
		2. PT PLN (Persero) UIT JBT (GITET 500 kV)	Desa Segarajaya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
57	GITET dan GI Depok	PT PLN (Persero) UIT JBT (GITET 500 kV dan GI 150 kV)	Jalan Raya Keadilan No. 4, Kec. Pancoranmas, Kota Depok, Prov. Jawa Barat
58	GITET Cibinong	PT PLN (Persero) UIT JBT (GITET 500 kV)	Jalan Mercede Benz No. 5, Desa Cicadas, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
59	GI Bogor Baru	PT PLN (Persero) UIT JBT (GI 150 kV)	Jalan Tumenggung Wiradijaya No. 51, Kel. Tanah Baru, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat
60	PLTU Cirebon	PT Cirebon Electric Power	Kec. Astanajapura, Kota Cirebon, Prov. Jawa Barat

61	Region Control Center dan	1. PT PLN (Persero) UIP2B Jawa Barat (RCC); dan	Kompleks PLN GI Cigelereng, Jalan Moch.Toha KM. 4, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat
	GI Cigareleng	2. PT PLN (Persero) UIT JBT (GI 150 kV)	
62	GITET Bandung Selatan	PT PLN (Persero) UIT JBT (GITET 500 kV)	Jalan Raya Pangalengan, Kp. Bugel Neglasari, Kab. Bandung,
			Prov. Jawa Barat
63	GITET Mandirancan	PT PLN (Persero) UIT JBT (GITET 500 kV)	Jalan Raya Pancalang, Kab. Kuningan,
			Prov. Jawa Barat
64	GITET Tasikmalaya	PT PLN (Persero) UIT JBT (GITET 500 kV)	Jalan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat
65	GITET Cibatu	PT PLN (Persero) UIT JBT (GITET 500 kV)	Jalan Tamansari, Kee. Tamansari, Kota Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat
66	GITET New Ujungberung	PT PLN (Persero) UIT JBT (GITET 500 kV)	Jalan Raya Rancaekek Cimanggung,
			Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat
67	PLTU dan GI Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu	1. PT Indonesia Power UJP PRATU (PLTU	Desa Citarik,
		1.050 MW); dan	Kec. Pelabuhan Ratu, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat
		2. PT PLN (Persero) UIT JBT (GI 150 kV).	
68	PLTA clan GITET	1. PT Indonesia Power UP SGL (PLTA 700,72 MW); dan	Komplek PLN Cioray No. 7, Rajamandala, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat

	Saguling	2. PT PLN (Persero) UIT JBT (GITET 500 kV).	
69	PLTA, GITET, dan GI	1. PT Pembangkitan Jawa Bali (PLTA 1.008 MW); dan	Desa Cadas Sari, Kee. Tegal Waru, Kab. Purwakarta, Prov. Jawa Barat
	Cirata	2. PT PLN (Persero) UIT JBT (GITET 500 KV, GI 150 KV).	
70	PLTU dan GI Indramayu	1. PT Pembangkitan Jawa Bali UBJOM Indramayu (PLTU 990 MW); dan	Desa Sumuradem, Kee. Sukra,
		2. PT PLN (Persero) UIT JBT (GI 150 kV).	Ka b . Indramayu , Prov. Jawa Barat
71	Region Control Center,	1. PT PLN (Persero) UIP2B Jawa Tengah dan DIY (RCC); dan	Kom ple ks GI Jalan Jend. Sudirman KM. 23, Babadan, Kee. Ungaran Tim u r, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah
	GITET dan GI Ungaran	2. PT PLN (Persero) UIT JBT (GITET 500 kV, GI 150 kV).	
72	GITET Pedan	PT PLN (Persero) UIT JBT (GITET 500 kV)	Jalan Pedan, Juwiring, Desa Troketon,
			Kee . Pedan, Kab. Klaten,
			Prov. Jawa Tengah
73	GITET Kesugihan	PT PLN (Persero) UIT JBT (GITET 500 kV)	Jalan Kemerdekaan Barat No. 14A,
			Des a Kesugihan Kidul, Kab. Cilacap,

			Prov. Jawa Tengah
74	PLTU dan GISTET Jawa Tengah 2 Adipala	1. PT Indonesia Power UJP ADP (PLTU 660 MW); dan	Desa Bunton, Kee. Adipala, Kab. Cilacap,
		2. PT PLN (Persero) UIT JBT (GISTET 500 kV).	Prov. Jawa Tengah
75	PLTA clan GI PB Sudirman	1. PT Indonesia Power UP MRC (PLTA 180 MW); dan	Jalan Raya Banyumas KM. 8,
		2. PT PLN (Persero) UIT JBT (GI 150 kV).	Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah
76	PLTGU clan GI Tambak Lorok	1. PT Indonesia Power UP SMG (PLTGU 1.469 MW); dan	Jalan Ronggowarsito, Komplek Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
		2. PT PLN (Persero) UIT JBT (GI 150 kV).	
77	PLTU dan GI Tanjung Jati B	1. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B PLTU Unit 1,2 (1.420 MW) clan Unit 3,4 (1.420 MW); dan	Kab. Jepara,
		2. PT PLN (Persero) UIT JBT (GI 150 kV).	Prov. Jawa Tengah

78	Region Control Center	1. PT PLN (Persero) UIP2B Jawa Timur (RCC); dan	Jalan Suningrat No. 45, Taman Ketegan,
	dan GIS Waru	2. PT PLN (Persero) UIT JBTB (GIS 150 kV)	Kota Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
79	GI Babat	PT PLN (Persero) UIT JBTB (GI 150 kV)	Jalan Raya Babat, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur
80	GITET Kediri	PT PLN (Persero) UIT JBTB (GITET 500 kV)	Jalan Kapten Tendean, Kota Kediri,
			Prov. Jawa Timur
81	GITET Ngimba n g	PT PLN (Persero) UIT JBTB (GITET 500 kV)	Jalan Ngimban g- Blu lu k , Kee. Ngimbang
			Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur
82	GI Banaran	PT PLN (Persero) UIT JBTB (GI 150 kV)	Jalan Kapten Tendean, Kel. Banaran
			Kota Kediri,
			Prov. Jawa Timur
83	GITET Krian dan GI Surabaya Barat	PT PLN (Persero) UIT JBTB (GITET 500 kV dan GI 150 kV)	Dusun Sumput Kee. Driyorejo Sepanjang,
			Ka b . Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
84	GI Sekarputih	PT PLN (Pe r s e ro) UIT JBTB (GI 150 kV)	Jalan BayPass No. 1, Kota Mojokerto,
			Prov. Jawa Timur
85	GI Ujung, GI Ba ngka lan, dan SKTT (Ka bel Laut) Ujung – Bangkalan	PT PLN (Persero) UIT JBTB (GI 150 kV dan	1. Uju ng-Kamal, Kota Su ra baya,
		Kabel Laut)	2. Perairan Selat Madura,

			3. Kab. Bangkalan, Prov. Jawa Timur
86	GI Kenjeran, GI Gilitimur dan SKTT (Kabel Laut) Kenjeran – Gilitimur	PT PLN (Persero) UIT JBTB (GI 150 kV dan	1. Kenjeran, Kota Surabaya
		Kabel Laut)	2. Perairan Selat Madura
			3. Kab. Bangkalan, Prov. Jawa Timur
87	GI Banyuwangi, GI Gilimanuk, dan Kabel Laut Jawa-Bali	PT PLN (Persero) UIT JBTB (GI 150 kV dan	1. Jalan Gatot Subroto, Desa Bulusan ,
		Kabel Laut)	Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur
			2. Perairan Selat Bali
			3. Kab. Jembrana, Prov. Bali
88	GIS Bangil	PT PLN (Persero) UIT JBTB (GIS 150 kV)	Jalan Mangga No. 68 Kee. Bangil,
			Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur
89	PLTGU dan GITET Grati	1. PT Indonesia Power UP PGT (PLTGU	Jalan Raya Surabaya - Probolinggo KM. 73 ,
90.	PLTU, PLTGU, GITET, dan GI Gresik	1. 350 MW)	Kec. Grati,
		2. PT PLN (Persero) UIT JBTB (GITET 500 kV)	Kab. Pasuruan,
			Prov. Jawa Timur
90.	PLTU, PLTGU, GITET, dan GI Gresik	1. PT Pembangkitan Jawa Bali (PLTU	Jalan Harun Tahir, Kab. Gresik ,

		2x100 MW, 2x200 MW, PLTG U 3x500 MW); dan	Prov. Jawa Timur
		2. PT PLN (Persero) UIT J BTB (G ITET 500 KV,	
		GI 150 KV)	
91	PLTU dan GITET Paiton	1. PT Pembangkitan Jawa Bali (Unit 1 (400 MW),	Jalan Surabaya- Situbondo KM.142, Kee. Paiton , Kab. Probolinggo, Pr ov. Jawa Timur
		Unit 2 (400 MW), dan	
		Unit 9 (600 MW));	
		2. PT Paiton Energy (Unit 3 (800 MW), Unit 7 (610 MW), dan Unit 8 (610 MW));	
		3. PT Jawa Power (Unit 5 (610 MW) dan Unit 6 (610 MW)); dan	
		4. PT PLN (Persero) UIT J BTB (GITET 500 kV Paiton)	
92	PLTA dan GI Karangkates	1. PT Pem ba ngkitan Jawa Bali (PLTA 105 MW); dan	J alan Basuki Raehmat No. 271 ,

		2. PT PLN (Persero) UIT J BTB (150 kV)	Kee. Sumber Pucung, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur
93	PLTU dan GI Rembang	1. PT Pembangkitan Jawa Bali UBJ OM	Jalan Semarang- Surabaya KM. 130, Kee. Sluke,
		Rembang (PLTU 630 MW); dan	Kab. Rembang, Prov. Jawa Timur
		2. PT PLN (Persero) UIT JBT (GI 150 kV)	
94	PLTU dan GI Tanjung Awar Awar	1. PT Pembangkitan Jawa Bali UBJOM Tanjung Awar-Awar (PLTU 700 MW); dan	Jalan Tanjung Awar- Awar, Desa Wadung, Kee. Jenut,
		2. PT PLN (Persero) UIT JBTB (GI 150 kV)	Kab. Tuban,
			Prov. Jawa Timur
95	PLTU dan GIS Pacitan	1. PT Perribangkitan Jawa Bali UBJOM Pacitan (PLTU 630 MW); dan	Jalan Pacitan-
		2. PT PLN (Persero) UIT JBTB (GIS 150 kV)	Tenggalek KM. 55, Desa Sukorejo,
			Kee. Sudimoro, Kab. Pameitan, Prov. Jawa Timur
96			Jalan Raya Abian Base No. 3, Kapal Mengwi, Kab. Badung,
	Region Control Center		Prov. Bali

	Bali clan GI Kapal	PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Beban Bali (RCC)	
97	GI Bandara I Gusti Ngurah Rai	PT PLN (Persero) UIT JBTB (GI 150 kV)	Du sun Kelan, Kel. Tu ba n, Kee. Kuta Selatan Kab. Badung, Prov. Bali
			Jalan Brigjen I Gusti Ngu ra h Rai, Kab. Badung, Prov. Bali
98	GI Nusa Dua	PT PLN (Persero) UIT JBTB (GI 150 kV)	Jalan Brigjen I Gusti Ngurah Rai, Pesanggaran, Kota Denpasar, Prov. Bali
			1. PT Indonesia Power UP Bali (PLTDG 600 MW); dan 2. PT PLN (Persero) UIT JBTB (G IS 150 kV).
100	PLTG dan GI Gilimanuk	1. PT Indonesia Power UP Bali (PLTG 130 MW); clan	J alan Jalak Putih KM. 1 Kel. Gilimanuk,
		2. PT PLN (Persero) UIT JBTB (GI 150 kV).	Ka b . Jembrana, Prov. Bali
101	Region Control Center Sistem Kalimantan Barat	PT PLN (Persero) UP3B Sistem Kalimantan Barat	J alan Karya Baru No. 60, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat
			Jalan Raya Sanggau Ledo, Desa Magmagan Karya, Kee . Lumar, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat
102	GITET clan GI Bengkayang	PT PLN (Persero) UP3B Sistem Kalimantan Barat (GITET 275 kV dan GI 150 kV)	

103	GI Sei Raya	PT PLN (Persero) UP3B Sistem Kalimantan Barat (GI 150 kV)	Jalan Aclisucipto KM. 7.3, Desa Parit Baru, Kee. Sei Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat
104	PLTU Bengkayang clan GI PLTU 3	1. PT PLN (Persero) UPDK Kapuas (PLTU 2x50 MW); dan 2. PT PLN (Persero) UP3B Sistem Kalbar (GI 150 kV).	Jalan Raya Tanjung Gunung 1, Kee. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat
105	PLTG Pontianak	PLN Batam MPP Pontianak (PLTG Unit 1,2,3 dan 4 (4 x 25 MW))	Jalan Raya Jungkat Komplek PLTU I Kalbar, Kab. Mempawah, Prov. Kalimantan Barat
106	Region Control Center dan GI Cempaka	PT PLN (Persero) UP3B Sistem Kalselteng (RCC dan GI 150 kV)	Jalan Mistar Cokrookusumo KM. 39, Kota Banjar Baru, Prov. Kalimantan Selatan
107	GI Barikin	PT PLN (Persero) UP3B Sistem Kalselteng (GI 150 kV)	Jalan Divisi IV Alri Desa Andang, Kee. Haruan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan
108	PLTU Asam-Asam dan GI Asam-Asam	1. PT PLN (Persero) UPK Asam-Asam (PLTU 4x65 MW); dan 2. PT PLN (Persero) UP3B Kalselteng (GI 150 kV).	Jalan Raya Banjarmasin-Kotabaru KM. 122, Desa Asam-Asam, Kee. Jorong, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan

109	PLTMRG Bangkanai dan GI Bangkanai	1. PT PLN (Persero) UPD Barito (PLTMRG 295 MW); dan	KM. 38, Jalan Desa Karendan,
		2. PT PLN (Persero) UP3B Kalselteng (GI 150 kV).	Kee . Lahei, Muara Teweh,
			Kab. Barito Utara,
			Prov. Kalimantan Tengah
110	PLTU Pulang Pisau dan GIS Mintin	1. PT PLN (Persero) UPK Asa m -As a m (PLTU 2x60 MW); dan	Jalan Raya Banjarmasin-Palangka Raya, Desa Buntoi Kahayan Hilir,
		2. PT PLN (Persero) UP3B Kalselteng (GIS 150 kV).	Ka b. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah
111	PLTU dan GIS Mintin	1. PT.Pembangkitan J a wa Bali UBJOM	Jalan Trans Kalim a n t a n , Desa Buntoi,
		Pulang Pisau (PLTU 120 MW); dan	Kee. Ka haya n Hilir, Kab. Pulang Pisau,
		2. PT PLN (Persero) UP3B Kalselteng (GIS 150 kV).	Prov. Kalimantan Tengah
112	Region Control Center dan GI Karang Joang	PT PLN (Persero) UP3B Sistem Kaltim (RCC dan GI 150 kV)	Jalan Soekarno Hatta KM. 15 No. 1,
			Kel. Karang Joang,
			Kee. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan,

			Prov. Kalimantan Timur
113	PLTU Teluk Balikpapan dan GI Kariangau	1. PT PLN (Persero) UPDK Balikpapan (PLTU 2x100 MW); dan	Jalan PLTU No. 1, Teluk Waru, Kel. Kariangau, Kota Balikpapan,
		2. PT PLN (Persero) UP3B Sistem Kaltim (GI 150 kV).	Prov. Kalimantan Timur
114 .	PLTGU Tanjung Batu dan GI Embalut	1. PT PLN (Persero) UPDK Mahakam (PLTGU 196 MW); dan	Jalan Tanjung Batu, Kee . Tenggarong Sebrang,
		2. PT PLN (Persero) UP3B Kaltim (GI 150 kV).	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur
1 15 .	PLTU dan GI Kariangau	1. PT.Pembangkitan Jawa Bali UBJOM Kaltim Teluk (PLTU 220 MW); dan	Jalan PLTU No. 1, Kawasan Industri Kariangau KM. 13, Kee . Balikpapan Barat, Kota Balikpapan,
		2. PT PLN (Persero) UP3B Kaltim (GI 150 kV).	Prov. Kalimantan Timur
		PT Bosowo Energi (PLTU 2 x 125 MW)	Desa Punagaya, Kee. Bangkala, Kab. Jeneponto, Prov. Sulawesi Selatan
117	PLTA dan GI Bakaru	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan	Desa Ulu Saddang, Kee. Lembang, Kab. Pinrang,
		dan Penyaluran Sulawesi (UIPP)UPDK Bakaru	Prov. Sulawesi Selatan

		(PLTA 2x63 MW, GI 150 kV)	
118	PLTU dan GI Barru	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan	Desa Bawasalo, Kee. Lampoko, Kab. Barru,
		dan Penyaluran Sulawesi UPDK Tello	Prov. Sulawesi Selatan
		(PLTU 100 MW, GI 150	
		kV)	
119	PLTG, PLTD, dan GI	PT PLN (Persero ) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi:	Jalan Urip Sumoharjo KM. 7, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan
	Tello		
		1. UPDK Tello (PLTG 123 MW, PLTD 50 MW); dan	
		2. UPT Sulselrabar (GI 150kV).	
120	PLTU Punagaya dan GI Jeneponto	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi:	1. Desa Punagaya, Kee. Bangkala, Kab. Jeneponto,
			Prov. Sulawesi Selatan
		1. UPK Punagaya (PLTU 200 MW); dan	2. Jalan Poros Jeneponto-Makassar, Kab. Jeneponto, Prov. Sulawesi Selatan
		2. UPT Sulselrabar (GI 150kV).	
121	Region Control Center Makassar	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan	Jalan Hertasning Blok B, Kee. Panakkukang,

		da n Penyaluran Sulawesi UP2B Ma ka s sa r	Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan
122	PLTB Sidrap (IPP) dan GI Sidrap	1. PT. UPC Renewable Ind ones ia (PLTB 75 MW); dan	Jalan Poros Pangkajene- Parepare KM. 7, Sidrap, Kab. Sidenreng
		2. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi UPT	Rappang,
		Sulselraba r (GI 150kV).	Prov. Sulawesi Selatan
123	PLTA Poso (IPP) dan GI Pamona	1. PT. Poso Energy (PLTA 190 MW); dan	Kompleks PLTA Poso, Sulawesi Tengah, Kee. Pamona Utara, Kab. Poso,
		2. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi UP3B	Prov. Sulawesi Tengah
		Minahasa (GI 150 kV).	
124	Region Control Center	PT PLN (Persero) Unit	Jalan Lingkar Timur,
	Minahasa	Induk Pembangkitan	Kaaten,
		dan Penyaluran Sulawesi	Kota Tomohon, Tengah,
		UP2B Minahasa	Kota Tomohon,
			Prov. Sulawesi Utara

125	PLTG Maleo dan GI Marisa	PT PLN (Persero) Unit Incluk Pembangkitan	1. Jalan Trans Sulawesi, Desa Maleo, clan Penyaluran Sulawesi
		1. UPDK Minahasa (PLTG 100 MW); clan	Ka b. Pohuwato, Kab. Gorontalo, Prov. Sulawesi Utara
		2. UP3B Minahasa (GI 150 kV).	2. Jalan Ahmad Mauda, Desa Isimu Utara, Kab. Gorontalo,
			Prov. Sulawesi Utara
126	PLTU, PLTD MVPP dan	1. PT PLN (Persero) Unit Incluk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi UPDK Minahasa (PLTU 2x25 MW, GI 150 kV); dan	1. Jalan Trans Sulawesi, Desa Maleo,
	GI Amurang	2. PT KAR Powership Indonesia (PLTD	Kec. Paguat, Kab. Pahuwato, Prov. Gorontalo
		MVPP Zeynep Sultan (120 MW)	2. Desa Tawaang, Kab. Minahasa Selatan,
			Prov. Sulawesi Utara
127	Region Control Center Kendari	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan	Jalan Ahmad Yani No. 1, Kee. Wua-Wua, Kota Kendari,
		dan Penyaluran Sulawesi UP2B Makassar	Prov. Sulawesi Tenggara
128	PLTU, PLTMG Nii Tanasa dan GI Powatu	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan	Desa Nii Tanasa,

		dan Penyaluran Sulawesi UPDK Kendari	Kel. Lalonggasumeeto, Kab. Konawe,
		(PLTU 30 MW, PLTMG	Prov. Sulawesi Tenggara
		50 MW, dan GI 150 kV)	
129	PLTD MVPP KPS Yasin	PT KAR Powership Indonesia (PLTD MVPP 120 MW)	Negeri/Desa Waai, Kee. Salahutu,
	Bey		Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku
130	PLTMG MPP Labuan Bajo	PT PLN (Persero) UIW Nusa Tenggara Timur (PLTMG MPP 20 MW)	Desa Tanjung Boleng, Kee. Boleng
			Kab. Manggarai Barat, Prov. Nusa Tenggara Timur
131	PLTU NTT 1 Ropa	PT PLN (Persero) UIW Nusa Tenggara Timur (PLTU 2x9 MW)	Dusun Ropa, Desa Keliwunbu, Kee. Boleng, Kab. Manggarai Barat Prov. Nusa Tenggara Timur
132	PLTU NIT 2 Bolok	PT PLN (Persero) UIW Nusa Tenggara Timur (PLTU 2x16,5 MW)	Desa Bolok,
			Kee. Kupang Barat, Kab. Kupang,
			Prov. Nusa Tenggara
			Timur
133	PLTU Holtekamp	PT Indonesia Power UJP HTC (PLTU 2x 10 MW)	Kampung Holtekamp, Muara Tami,
			Kota Jayapura, Prov. Papua
C. SUBBIDANG MINERAL DAN BATUBARA			
No.	Nama Obvitnas	Pengelola	Lokasi
1	Pertambangan Emas Martabe	PT Agincourt Resources	Kab. Tapanuli Selatan, Prov. Sumatera Utara

2	TUKS Batubara Teluk Bayur	PT Bukit Asam Tbk	Kota Padang,
		Unit Pelabuhan Teluk Bayur	Prov. Sumatera Barat
3	Pertambangan Timah Bangka	PTTimah Tbk	Prov. Kepulauan Riau, Bangka Belitung
4	Pertambangan Batubara Tanjung Enim	PT Bukit Asam Tbk	Kee. Tanjung Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan
		Unit Pertambangan Tanjung Enim	
5	TUKS Batubara Kertapati	PT Bukit Asam Tbk Unit Dermaga Kertapati	Kota Palembang,
			Prov. Sumatera Selatan
6	TUKS Batubara Tarahan	PT Bukit Asam Tbk	Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung
		Unit Pelabuhan Tarahan	
7	Pertambangan Emas Cibaliung	PT Cibaliung Sumber Daya	Kab. Pandeglang, Prov. Banten
8	Pertambangan Emas Pongkor	PT Aneka Tambang Tbk-Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBPE) Pongkor	Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
9	Pertarnbangan Emas Bumi Suksesindo	PT Bumi Suksesindo	Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur
10	Pertambangan Emas dan Tembaga Amman Mineral Nusa Tenggara	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	Kab. Sumbawa Barat, Sumbawa,
			Prov. Nusa Tenggara Barat
11	Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Bauksit Tayan	J:-Yf Indonesia Chemical	Kab. Sanggau,
		Alumina	Prov. Ka lim a n t a n Barat

12	Fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian Bauksit Well Harvest Winning Alumina Refinery	PT Well Harvest Winning Alumina Refinery	Kee. Kendawangan, Kab. Ketapang,
			Prov. Kalimantan Barat
13	Pertambangan Batubara Adaro	PT Adaro Indonesia	Kab. Balangan, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan,
			Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah
14	Pertambangan Batubara Arutmin - Asam-Asam	PT Arutmin Indonesia - Asam-Asam	Kab. Tanah Laut,
			Prov. Kalimantan Selatan
15	Pertambangan Batubara Arutmin – Kintap	PT Arutmin Indonesia-Kintap	Kab. Tanah Laut,
			Prov. Kalimantan Selatan
16	Terminal Khusus Batubara Arutmin-NPLCT	PT Arutmin Indonesia-NPLCT	Kab. Kotabaru,
			Prov. Kalimantan Selatan
17	Pertambangan Batubara Arutmin – Satui	PT Arutmin Indonesia-Satui	Kab. Tanah Bumbu, Tanah Laut,
			Prov. Kalimantan Selatan
18	Pertambangan Batubara Arutmin – Senakin	PT Arutmin Indonesia-Senakin	Ka b. Kotabaru,
			Prov. Kalimantan Selatan
19	Pertambangan Batubara Arutmin – Batulicin	PT Arutmin Indonesia-Batulicin	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan
20	Pertambangan Batubara Borneo Indobara	PT Borneo Indobara	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan
21	Pertambangan Batubara Antang Gunung Meratus	PT Antang Gunung Meratus	Kab. Banjar, Kab. Tapin, Kab. Hulu Sungai Selatan,
			Kab. Hulu Sungai

			Tengah, Prov. Kaiimantan Selatan
22	Pertambangan Batubara Asmin Bara Bronang	PT Asmin Bara Bronang	Kab. Murung Raya, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah
23	Pertambangan Batubara Bharinto Ekatama	PT Bharinto Ekatama	Ka b. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur
24	Pertambangan Batubara Berau Coal	PT Berau Coal	Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur
25	Pertambangan Batubara Kaltim Prima Coal	PT Kaltim Prima Coal	Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur
26	Pertambangan Batubara Kideco Jaya Agung	PT Kideco Jaya Agung	Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur
27	Pertambangan Batubara Indomineo Mandiri	PT Indomineo Mandiri	Kab. Kutai Timur, Kata Bontang, Kutai Kertanegara, Prov. Kalimantan Timur
28	Pertambangan Batubara Trubaindo Coal Mining	PT Trubaindo Coal Mining	Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur
29	Pertambangan Batubara Indexim Coalindo	PT Indexim Coalindo	Kee. Kaubun, Kee. Karangan, Kee. Bengalon,

			Ka b . Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur
30	Pertambangan Batubara Mahakam Sumber Jaya	PT Mahakam Sumber Jaya	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur
31	Pertambangan Nikel Antam Maluku Utara	PT Aneka Tambang Tbk - Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara
32	Pertambangan Emas Nusa Halmahera Minerals	PT Nusa Halmahera Minerals	Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara
33	Pertambangan dan Fasilitas Pengolahan dan/ atau Pemurnian Nikel Pulau Obi	1. PT Tri Megah Bangun Persada;	Kee. Obi,
		2. PT Megah Surya Pertiwi; dan	Kab. Halmahera Selatan, Prov. Maluku Utara
		3. PT Gane Permai Sentosa.	
34	Pertambangan Nikel Vale Soroako	PT Vale Indonesia Tbk.	Kee. Nuha,
			Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan
35	Fasilitas Pengolahan dan/ atau Pemurnian Nikel Sulawesi Mining Investment	PT Sulawesi Mining Investment	Kee . Bahodopi, Kab. Morowali,
			Prov. Sulawesi Tengah
36	Pertambangan Nikel Antam Pomalaa	PT Aneka Tambang Tbk - Unit Bisnis Pertambangan	Kee. Pomalaa, Kab. Kolaka,
			Prov . Sulawesi Tenggara

		Nikel (UBPN) Sulawesi Tenggara	
37	Fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian Nikel Virtue Dragon Nickel Industry	PT Virtue Dragon Nickel Industry	Kee. Morosi, Ka b . Konawe,
			Prov. Sulawesi Tenggara
38	Pertambangan Emas dan Tembaga Freeport Indonesia	PT Freeport Indonesia	Kab. Timika, Prov. Papua
<b>D. SUBBIDANG ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI</b>			
No.	Nama Obvitnas	Pengelola	Lokasi
1	Area Panas Bumi Sibayak	PT Pertamina Geothermal Energy (Fasilitas Produksi Uap)	Desa Semangat Gunung, Kee. Merdeka, Ka b. Karo, Prov. Sumatera Utara
2	Area Panas Bumi Sarulla	1. Sarulla Operations Limited (Fasilitas Produksi Uap, PLTP Unit I, II dan III)	Kec. Pahae Jae, Pahae Julu, Kab. Tapanuli Utara,
		2. PT PLN (Persero) UIP3BS (GITET 275 kV Sarulla)	Prov. Sumatera Utara
3	Area Panas Bumi Ulubelu	1. PT Pertamina Geothermal Energy (Fasilitas Produksi Uap, PLTP Unit III dan IV);	Desa Muaradua, Kee. Ulubelu, Kab. Tanggamus, Prov . Lampung
		2. PT PLN (Persero) (PLTP Unit I dan II); dan	

		3. PT PLN (Persero) UIP3BS (GI 150 kV).	
4	Area Panas Bumi Gunung Salak	1. Star Energy Geothermal Salak, Ltd . (Fasilitas Produksi Uap, PLTP Unit IV, V, dan VI); 2. PT Indonesia Power (PLTP Unit I, II, dan III); dan 3. PT PLN (Persero) UIT JBT (GI 150 kV).	Jalan Jayanegara, Desa Kabandungan, Kee. Kabandungan, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat
5	Area Panas Bumi Darajat	1. Star Energy Geothermal Darajat II, Limited (Fasilitas Produksi Uap, PLTP Unit II dan III); 2. PT Indonesia Power (PLTP Unit I); dan 3. PT PLN (Persero) UIT JBT (GI 150 kV).	Jalan Raya Darajat, Desa Padaawas, Kee. Pasirwangi, Kab. Garut, Prov. Jawa Barat
6	Area Panas Bumi Wayang Windu	1. Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd. (Fasilitas Produksi Uap, PLTP Unit I dan II); dan	Perkebunan Kertamanah, Desa Margamukti, Kee . Pangalengan, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat

		2. PT PLN (Persero) UIT JBT (GI 150 kV).	
7	Area Panas Bumi Kamojang	1. PT Pertamina Geothermal Energy (Fasilitas Produksi Uap, PLTP Unit IV dan V);	Kampung Kamojang, Desa Laksana,
		2. PT Indonesia Power (PLTP Unit I, II dan III); dan	Kec. Ibun,
		3. PT PLN (Persero) UIT JBT (GI 150 kV).	Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat
8	Area Panas Bumi Patuha	1. PT Geo Dipa Energi (Persero) (Fasilitas Produksi Uap dan PLTP Unit I); dan  2. PT PLN (Persero) UIT JBT (GI 150 kV).	Desa Sugihmukti, Kee. Pasirjambu, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat
9	Area Panas Bumi Karaha	PT Pertamina Geothermal Energy (Fasilitas Produksi Uap dan PLTP Unit I)	Jalan Karaha, Kampung Ciselang, Desa Kadipaten, Kee. Kadipaten, Kab. Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat
10	Area Panas Bumi Dieng	1. PT Geo Dipa Energi (Persero) (Fasilitas Produksi Uap dan PLTP Unit I); dan	Jalan Raya Dieng Batur, Dusun Pawuhan,

		2. PT PLN (Persero) UIT JBT (GI 150 kV).	Desa Karang Tengah, Kec. Batur, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah
11	Area Panas Bumi Mataloko	PT PLN (Persero) UIW NTT (Fasilitas Produksi Uap, PLTP Unit I, dan GI 70 kV)	Desa Todabelu, Kee . Golewa, Kab. Ngada, Prov. Nusa Tenggara Timur
12 .	Area Panas Bumi Ulumbu	PT PLN (Persero) UIW NTI (Fasilitas Produksi, PLTP Unit I, II, III, IV, dan GI 70 kV)	Desa Wewo, Kee. Satarmese, Kab. Manggarai, Prov. Nusa Tenggara Timur
13	Area Panas Bumi Lahendong	1. PT Pertamina Geothermal Energy (Fasilitas Produksi Uap, PLTP Unit V dan VI);  2. PT PLN (Persero) (PLTP Unit I, II, III da n IV); dan  3. PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo (GI 150 kV Tomohon dan Kawangkoan).	Jalan Raya Tomohon No. 420, Kata Tomohon, Prov. Sulawesi Utara

**OBJEK VITAL NASIONAL**  
**BIDANG PERHUBUNGAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2004**

**DAFTAR NAMA - NAMA BANDAR UDARA DI INDONESIA**

**INTERNASIONAL.**

NO	POLDA	NAMA BANDAR UDARA	JENIS KOMODITI	LOKASI	KET
1	2	3	4	5	6
1	Banten	CGK - Bandar Udara Soekarno Hatta	Jasa	Banten	
2	Jabar	BDO - Bandar Udara Husein	Jasa	Bandung	
3	DKI Jakarta	HLP - Bandar Udara Halim	Jasa	Jakarta	
4	Jateng	SOC - Bandar Udara Adisumarmo	Jasa	Solo	
5	Jateng	SRG - Bandar Udara achmad Yani	Jasa	Semarang	
6	D I Y	JOG - Bandar Udara Adi Sucipto	Jasa	Yogyakarta	
7	Jatim	SUB - Bandar Udara Juanda	Jasa	Surabaya	
8	Bali	DPS - Bandar Udara Ngurah Rai, Denpasar	Jasa	Bali	
9	N T B	AMI - Bandar Udara Selaparang	Jasa	Mataram	
10	Aceh	BTJ - Bandar Udara Sultan Iskandar Muda	Jasa	Banda Aceh	
11	Sumut	MES - Bandar Udara Polonia	Jasa	Medan	
12	Kepri	TNJ - Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang atau Bandar Udara Kijang	Jasa	Kepulauan Riau	
13	Kepri	BTH - Bandar Udara Hang Nadim	Jasa	Batam	

14	Riau	PKU - Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II	Jasa	Pekanbaru	
15	Sumbar	PDG - Bandar Udara minangkabau	Jasa	Padang	
16	Sumsel	PLM - Bandar udara Sultan Mahmud Badaruddin II	Jasa	Palembang	
17	Sulut	MDC - Bandar Udara Syam Ratulangi	Jasa	Manado	
18	Sulteng	PLW - Bandar Udara Mutiara	Jasa	Palu	
19	Sulsel	UPG - Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin	Jasa	Makasar	
20	Kaltim	BPN - Bandar Udara Sepinggan	Jasa	Balikpapan	
21	Kalbar	PNK - Bandar Udara Supadio	Jasa	Pontianak	
22	Kalteng	PKY- Bandar Udara Tjilik Riwut	Jasa	Palangka Raya	
23	Kalsel	BDJ - Bandar Udara Syamsuddin Noor	Jasa	Banjarmasin	

#### DAFTAR NAMA-NAMA PELABUHAN DI INDONESIA

NO	POLDA	NAMA PELABUHAN	JENIS KOMODITI	LOKASI	KET
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	Lhokseumawe, Sabang	Jasa	Banda Aceh	
2	Sumatera Utara	Belawan	Jasa	Medan	
3	Sumatera Barat	Teluk Bayur	Jasa	Padang	
		Perawang, Batu Ampar	Jasa		
4	Riau	Batam, Dumai, Kijang	Jasa	Pekanbaru	
5	Jambi	Talang Duku	Jasa	Jambi	
6	Sumatera Selatan	Boom Baru	Jasa	Palembang	
7	Bengkulu	Pulai	Jasa	Bengkulu	
8	Lampung	Panjang	Jasa	Bandar Lampung	
9	Bangka Belitung	Pangkal Balam	Jasa	Pangkal Pinang	

10	Banten	Ciwadan, Anyer	Jasa	Serang	
		Cigading	Jasa		
11	Jakarta	Tanjung Priok	Jasa	DKI Jakarta	
12	Jawa Barat	Cirebon	Jasa	Cirebon	
		Tanjung Emas, Tanjung	Jasa		
13	Jawa Tengah	Intan ( Cilacap )	Jasa	Semarang	
14	Jawa Timur	Tanjung Perak, Tanjung Wangi	Jasa	Surabaya	
15	Kalimantan Barat	Pontianak	Jasa	Pontianak	
16	Kalimantan Tengah	Sampit	Jasa	Palangkaraya	
17	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Jasa	Banjarmasin	
		Kotabaru	Jasa	Banjarmasin	
18	Kalimantan Timur	Balikpapan, Samarinda, Bontang, Tanjung Bara	Jasa	Samarinda	
19	Kalimantan Timur	Balikpapan, Samarinda, Bontang, Tanjung Bara	Jasa	Samarinda	
20	Sulawesi Utara	Bitung	Jasa	Manado	
21	Gorontalo	Gorontalo	Jasa	Gorontalo	
22	Sulawesi Selatan	Makasar	Jasa	Makasar	
23	Sulawesi Tenggara	Kendari	Jasa	Kendari	
24	Bali	Benoa, Gilimanuk	Jasa	Denpasar	
25	NTB	Lembar	Jasa	Mataram	
26	NTT	Tenau	Jasa	Kupang	
27	Maluku Utara	Ternate	Jasa	Sofifi	
28	Maluku	Ambon	Jasa	Ambon	
29	Papua Barat	Sorong	Jasa	Manokwari	
30	Papua Tengah	Biak	Jasa	Biak	
31	Papua Timur	Merauke	Jasa	Jayapura	

**PERHUBUNGAN LAUT.**

<b>NO</b>	<b>POLDA</b>	<b>NAMA PELABUHAN</b>	<b>JENIS KOMODITI</b>	<b>LOKASI</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Aceh	Sinabang	Jasa	Simeulue	
2	Aceh	Singkil	Jasa	Aceh Singkil	
3	Aceh	Tapaktuan	Jasa	Aceh Selatan	
4	Aceh	Meulaboh	Jasa	Aceh Barat	
5	Aceh	Malahayati	Jasa	Aceh Besar	
6	Aceh	Susoh	Jasa	Aceh Barat Daya	
7	Aceh	Calang	Jasa	Aceh Jaya	
8	Aceh	Dermaga Distrik Navigasi Sabang	Jasa	Sabang	
9	Aceh	Penyeberangan Balohan	Jasa	Sabang	
10	Aceh	Pertamina Sabang	Jasa	Sabang	
11	Aceh	PT. Perikanan Samudra Besar-Sabang	Jasa	Sabang	
12	Aceh	Sabang	Jasa	Sabang	
13	Aceh	TNI AL. Sabang	Jasa	Sabang	
14	Aceh	Kuala Langsa	Jasa	Langsa	
15	Aceh	Lhokseumawe	Jasa	Lhokseumawe	
16	Sumut	Gunung Sitoli	Jasa	Nias	
17	Sumut	Lahewa	Jasa	Nias	
18	Sumut	Pertamina Gunung Sitoli	Jasa	Nias	
19	Sumut	Sikara - kara	Jasa	Mandailing Natal	
20	Sumut	Leidong	Jasa	Labuhan Batu	
21	Sumut	Sei Berombang	Jasa	Labuhan Batu	
22	Sumut	Pangkalan Susu	Jasa	Langkat	
23	Sumut	Pelabuhan Tanjung Pura	Jasa	Langkat	
24	Sumut	Tanjung Tiram	Jasa	Langkat	

25	Sumut	Tello	Jasa	Nias Selatan	
26	Sumut	Pelabuhan Pantai Cermin	Jasa	Serdang Bedagai	
27	Sumut	Tanjung Beringin	Jasa	Serdang Bedagai	
28	Sumut	Kuala Tanjung	Jasa	Batu Bara	
29	Sumut	Pangkalan Dodek	Jasa	Batu Bara	
30	Sumut	Perikanan Sibolga	Jasa	Sibolga	
31	Sumut	Pertamina Sibolga	Jasa	Sibolga	
32	Sumut	Sibolga	Jasa	Sibolga	
33	Sumut	Tanjung Balai Asahan	Jasa	Tanjung Balai	
34	Sumut	Belawan	Jasa	Medan	
35	Sumut	Belawan Container Terminal	Jasa	Medan	
36	Sumut	PT. Tjipta Rimba Djaya	Jasa	Medan	
37	Sumbar	Bake	Jasa	Kepulauan Mentawai	
38	Sumbar	Muara Siberut	Jasa	Kepulauan Mentawai	
39	Sumbar	Muara Sikabaluhan	Jasa	Kepulauan Mentawai	
40	Sumbar	Sikakap	Jasa	Kepulauan Mentawai	
41	Sumbar	Siuban	Jasa	Kepulauan Mentawai	
42	Sumbar	Tua Pejat	Jasa	Kepulauan Mentawai	
43	Sumbar	Air Bangis	Jasa	Pasaman Barat	
44	Sumbar	PT. Tambang Batu Bara Teluk Bayur (Dermaga Teluk Bayur)	Jasa	Padang	
45	Sumbar	Teluk Bayur	Jasa	Padang	
46	Riau	Rengat	Jasa	Indragiri Hulu	
47	Riau	Kuala Enok	Jasa	Indragiri Hilir	
48	Riau	PT. Bhumireksa Nusasejati	Jasa	Indragiri Hilir	
49	Riau	PT. Pulau Sambu Guntung 2	Jasa	Indragiri Hilir	
50	Riau	Sungai Guntung	Jasa	Indragiri Hilir	
51	Riau	Tembilahan	Jasa	Indragiri Hilir	
52	Riau	Perawang	Jasa	S I A K	

53	Riau	Bengkalis	Jasa	Bengkalis	
54	Riau	Sei Pakning	Jasa	Bengkalis	
55	Riau	Selat Panjang	Jasa	Bengkalis	
56	Riau	Bagan Siapi-api	Jasa	Rokan Hilir	
57	Riau	Panipahan	Jasa	Rokan Hilir	
58	Riau	Pekan Baru	Jasa	Pekanbaru	
59	Riau	Dumai	Jasa	D U M A I	
60	Jambi	Kuala Mendaraha	Jasa	Tanjung Jabung Timur	
61	Jambi	Kuala Tungkal	Jasa	Tanjung Jabung Barat	
62	Jambi	Jambi	Jasa	Jambi	
63	Sumsel	Sungai Lumpur	Jasa	Ogan Komering Ilir	
64	Sumsel	Palembang / Boom Baru	Jasa	Palembang	
65	Sumsel	PT. Batu Bara Kerta Pati (Dermaga Kertapati)	Jasa	Palembang	
66	Bengkulu	Melakoni Enggano	Jasa	Bengkulu Utara	
67	Bengkulu	Bintuhan	Jasa	Kaur	
68	Bengkulu	Bengkulu	Jasa	Bengkulu	
69	Lampung	KotaAgung	Jasa	Tanggamus	
70	Lampung	PT. Tambang Batu Bara Tarahan (Pelabuhan Tarahan)	Jasa	Lampung Selatan	
71	Lampung	Widuri Terminal	Jasa	Lampung Timur	
72	Lampung	Mesuji	Jasa	Tulangbawang	
73	Lampung	Panjang	Jasa	Bandar Lampung	
74	Lampung	Teluk Betung	Jasa	Bandar Lampung	
75	Kep. Bangka Belitung	PT. Sawindo Kencana	Jasa	Bangka	
76	Kep. Bangka Belitung	Tanjung Pandan	Jasa	Belitung	
77	Kep. Bangka Belitung	Muntok	Jasa	Bangka Barat	
78	Kep. Bangka Belitung	PT. Pas Maritim (PT. Exspan Marine Terminal)	Jasa	Bangka Barat	

79	Kep. Bangka Belitung	PT. Timah Bangka	Jasa	Bangka Barat	
80	Kep. Bangka Belitung	Sadai	Jasa	Bangka Selatan	
81	Kep. Bangka Belitung	Toboali	Jasa	Bangka Selatan	
82	Kep. Bangka Belitung	Manggar	Jasa	Belitung Timur	
83	Kep. Bangka Belitung	Pangkalbalam	Jasa	Pangkal Pinang	
84	Kep. Bangka Belitung	Moro	Jasa	91	
85	Kep. Riau	PT. Tambang Timah Kundur	Jasa	Karimun	
86	Kep. Riau	Tanjung Balai Karimun	Jasa	Karimun	
87	Kep. Riau	Tanjung Batu Kundur	Jasa	Karimun	
88	Kep. Riau	Kijang	Jasa	Bintan	
89	Kep. Riau	PT. Antam Tbk. Bauksit Kijang	Jasa	Bintan	
90	Kep. Riau	Tanjung Uban	Jasa	Bintan	
91	Kep. Riau	Batu Ampar	Jasa	Batam	
92	Kep. Riau	Kabil	Jasa	Batam	
93	Kep. Riau	Nongsa	Jasa	Batam	
94	Kep. Riau	Pertamina Sambu / PSB	Jasa	Batam	
95	Kep. Riau	Pulau Sambu / Pulau Lumba	Jasa	Batam	
96	Kep. Riau	Sekupang (Internasional Sekupang)	Jasa	Batam	
97	Kep. Riau	Sri Payung Batu Anam	Jasa	Tanjung Pinang	
98	Kep. Riau	Tanjung Pinang (Sri Bintan Pura)	Jasa	Tanjung Pinang	
99	DKI Jakarta	CNOOC 114 Terminal	Jasa	Kepulauan Seribu	
100	DKI Jakarta	Dermaga Pulau Sepa	Jasa	Kepulauan Seribu	
101	DKI Jakarta	Pelabuhan Pulau Bira	Jasa	Kepulauan Seribu	
102	DKI Jakarta	PT. Buana Bintang Samudra	Jasa	Kepulauan Seribu	
103	DKI Jakarta	Pulau Bidadari	Jasa	Kepulauan Seribu	
104	DKI Jakarta	Pulau Kotok Timur	Jasa	Kepulauan Seribu	

105	DKI Jakarta	Pulau Matahari	Jasa	Kepulauan Seribu	
106	DKI Jakarta	Pulau Pantara	Jasa	Kepulauan Seribu	
107	DKI Jakarta	Jakarta International Container	Jasa	Jakarta Utara	
108	DKI Jakarta	Kalibaru	Jasa	Jakarta Utara	
109	DKI Jakarta	Pelabuhan Perikanan Nizamzachman	Jasa	Jakarta Utara	
110	DKI Jakarta	Sunda Kelapa	Jasa	Jakarta Utara	
111	DKI Jakarta	Tanjung Priok	Jasa	Jakarta Utara	
112	Jawa Barat	Pangandaran	Jasa	Ciamis	
113	Jawa Barat	Astanajayapura	Jasa	Cirebon	
114	Jawa Barat	Bondet	Jasa	Cirebon	
115	Jawa Barat	Brondong Indramayu	Jasa	Cirebon	
116	Jawa Barat	Gebang	Jasa	Cirebon	
117	Jawa Barat	Dadap Juntiyuat Indramayus	Jasa	Indramayu	
118	Jawa Barat	Indramayu	Jasa	Indramayu	
119	Jawa Barat	Pertamina Balongan	Jasa	Indramayu	
120	Jawa Barat	Arjuna Terminal	Jasa	Karawang	
121	Jawa Barat	Cirebon	Jasa	Cirebon	
122	Jawa Tengah	PT. Antam Tbk. Up Pasir Basi Cilacap	Jasa	Cilacap	
123	Jawa Tengah	Tanjung Intan	Jasa	Cilacap	
124	Jawa Tengah	Rembang	Jasa	Rembang	
125	Jawa Tengah	Juwana	Jasa	Pati	
126	Jawa Tengah	Jepara	Jasa	Jepara	
127	Jawa Tengah	PT. Kayu Lapis Indonesia	Jasa	Kendal	
128	Jawa Tengah	Batang	Jasa	Batang	
129	Jawa Tengah	Brebes	Jasa	Brebes	
130	Jawa Tengah	Pertamina upms IV ( Tanjung Emas )	Jasa	Semarang	
131	Jawa Tengah	PT. Dwimatama Multikarsa	Jasa	Semarang	
132	Jawa Tengah	PT. Sriboga Ratu Raya	Jasa	Semarang	
133	Jawa Tengah	Tanjung Emas	Jasa	Semarang	

134	Jawa Tengah	Pekalongan	Jasa	Pekalongan	
135	Jawa Tengah	Tegal	Jasa	Tegal	
136	Jawa Tengah	Tegal	Jasa	Tegal	
137	Jawa Timur	PT. Pupuk Sriwijaya	Jasa	Banyuwangi	
138	Jawa Timur	Tanjung Wangi	Jasa	Banyuwangi	
139	Jawa Timur	Besuki	Jasa	Situbondo	
140	Jawa Timur	Kalbut	Jasa	Situbondo	
141	Jawa Timur	Mimbo	Jasa	Situbondo	
142	Jawa Timur	Panarukan	Jasa	Situbondo	
143	Jawa Timur	Pasir Putih	Jasa	Situbondo	
144	Jawa Timur	Kalibuntu	Jasa	Probolinggo	
145	Jawa Timur	PLTU PT.Paiton Energy	Jasa	Probolinggo	
146	Jawa Timur	Lekok	Jasa	Pasuruan	
147	Jawa Timur	Pertamina Job Petrochina	Jasa	Tuban	
148	Jawa Timur	PT. Pacific Petrochemical Indotama	Jasa	Tuban	
149	Jawa Timur	PT. Semen Gresik Tuban	Jasa	Tuban	
150	Jawa Timur	Brondong	Jasa	Lamongan	
151	Jawa Timur	Perikanan Nusantara Borondong	Jasa	Lamongan	
152	Jawa Timur	Bawean	Jasa	Gresik	
153	Jawa Timur	Pelabuhan Gresik	Jasa	Gresik	
154	Jawa Timur	PT. Petrokimia Gresik	Jasa	Gresik	
155	Jawa Timur	Telaga Biru	Jasa	Bangkalan	
156	Jawa Timur	Wilayah kerja pelabuhan sepuluh	Jasa	Bangkalan	
157	Jawa Timur	Wilayah kerja sampang	Jasa	Sampang	
158	Jawa Timur	Branta	Jasa	Pamekasan	
159	Jawa Timur	Pasean	Jasa	Pamekasan	
160	Jawa Timur	Kalianget	Jasa	Sumenep	
161	Jawa Timur	Kangean	Jasa	Sumenep	
162	Jawa Timur	Masalembo	Jasa	Sumenep	

163	Jawa Timur	Pengerungan	Jasa	Sumenep	
164	Jawa Timur	PT. Garam Kalianget	Jasa	Sumenep	
165	Jawa Timur	Sapudi	Jasa	Sumenep	
166	Jawa Timur	Sepekan	Jasa	Sumenep	
167	Jawa Timur	Probolinggo	Jasa	Probolinggo	
168	Jawa Timur	Pasuruan	Jasa	Pasuruan	
169	Jawa Timur	Pelabuhan Tanjung Perak	Jasa	Surabaya	
170	Banten	Labuhan	Jasa	Pandeglang	
171	Banten	Pulau Pabelokan	Jasa	Tangerang	
172	Banten	Bojonegoro	Jasa	Serang	
173	Banten	PT. GT. Petrochem Industri Tbk. Divisi Kimia	Jasa	Serang	
174	Banten	Banten	Jasa	Cilegon	
175	Banten	PT. Bayer Urethangs Ind	Jasa	Cilegon	
176	Banten	PT. Power Indonesia (PLTU Sektor Suralaya)	Jasa	Cilegon	
177	Banten	Karangatu	Jasa	Serang	
178	Bali	Kusamba	Jasa	Klungkung	
179	Bali	Lembongan	Jasa	Klungkung	
180	Bali	Nusa Penida	Jasa	Klungkung	
181	Bali	Buleleng	Jasa	Buleleng	
182	Bali	Celukan Bawang	Jasa	Buleleng	
183	Bali	Benoa	Jasa	Denpasar	
184	Bali	Sanur	Jasa	Denpasar	
185	NTB	Bangsal Pemenang	Jasa	Lombok Barat	
186	NTB	Tanjung	Jasa	Lombok Barat	
187	NTB	Labuhan Haji	Jasa	Lombok Timur	
188	NTB	Lombok	Jasa	Lombok Timur	
189	NTB	Tanjung Luar	Jasa	Lombok Timur	
190	NTB	Badas	Jasa	Sumbawa	
191	NTB	Labuhan Alas	Jasa	Sumbawa	

192	NTB	Calabai	Jasa	Dompu	
193	NTB	Sape	Jasa	Bima	
194	NTB	Benete	Jasa	Sumbawa Barat	
195	NTB	Labuhan Lalar	Jasa	Sumbawa Barat	
196	NTB	Bima	Jasa	Bima	
197	NTB	Waingapu	Jasa	Sumba Timur	
198	NTB	Atapupu	Jasa	Belu	
199	NTB	Baranusa / Kalabahi	Jasa	Alor	
200	NTB	Larantuka	Jasa	Flores Timur	
201	NTB	Maumere	Jasa	Sikka	
202	NTB	Ende	Jasa	Ende	
203	NTB	Reo	Jasa	Manggarai	
204	NTB	Baa - Rote	Jasa	Rote Ndao	
205	NTB	Labuan Bajo	Jasa	Manggarai Barat	
206	NTB	Waikelo	Jasa	Sumba Barat Daya	
207	NTB	Tenau	Jasa	Kupang	
208	Kalbar	Merbau - Paloh	Jasa	Sambas	
209	Kalbar	Sintete	Jasa	Sambas	
210	Kalbar	Kedawangan	Jasa	Ketapang	
211	Kalbar	Ketapang	Jasa	Ketapang	
212	Kalbar	Telok Melano	Jasa	Kayong Utara	
213	Kalbar	Telok Air	Jasa	Kubu Raya	
214	Kalbar	Pontianak	Jasa	Pontianak	
215	Kalbar	Singkawang	Jasa	Singkawang	
216	Kalteng	Kumai	Jasa	Kotawaringin Barat	
217	Kalteng	Pangkalan Bun	Jasa	Kotawaringin Barat	
218	Kalteng	Sampit	Jasa	Kotawaringin Timur	
219	Kalteng	Samuda	Jasa	Kotawaringin Timur	
220	Kalteng	Pulau Pisau	Jasa	Kapuas	

221	Kalteng	Kuala Pembuang	Jasa	Seruyan	
222	Kalteng	Pegatan Mendawai	Jasa	Katingan	
223	Kalteng	Rambang Palangkaraya	Jasa	Palangka Raya	
224	Kalteng	Gunung Batu Besar	Jasa	Kota Baru	
225	Kalteng	Kotabaru	Jasa	Kota Baru	
226	Kalteng	PT. Arutmin Indonesia	Jasa	Kota Baru	
227	Kalteng	Batu Licin	Jasa	Tanah Bumbu	
228	Kalteng	Trisakti - Banjarmasin	Jasa	Banjarmasin	
229	Kaltim	Tanah Grogot	Jasa	Pasir	
230	Kaltim	Kuala Samboja	Jasa	Kutai Kartanegara	
231	Kaltim	Tanjung Santan	Jasa	Kutai Kartanegara	
232	Kaltim	Sangkulirang	Jasa	Kutai Timur	
233	Kaltim	Suaran Jetty	Jasa	Berau	
234	Kaltim	Tanjung Redep	Jasa	Berau	
235	Kaltim	Bunyu	Jasa	Bulungan	
236	Kaltim	Tanjung Selor	Jasa	Bulungan	
237	Kaltim	Nunukan	Jasa	Nunukan	
238	Kaltim	Sungai Nyamuk	Jasa	Nunukan	
239	Kaltim	Balikpapan	Jasa	Balikpapan	
240	Kaltim	Samarinda	Jasa	Samarinda	
241	Kaltim	Pertamina LNG Badak	Jasa	Bontang	
242	Kaltim	PT. Pupuk Kaltim Bontang	Jasa	Bontang	
243	Sulut	Tahuna	Jasa	Kepulauan Sangihe	
244	Sulut	Lirung	Jasa	Kepulauan Talaud	
245	Sulut	Pelanuhan Likupang	Jasa	Minahasa Utara	
246	Sulut	Labuan Uki	Jasa	Bolaang Mongondow Utara	
247	Sulut	Ulu Siau	Jasa	Siau Tagulandang Biaro	
248	Sulut	Manado	Jasa	Manado	

249	Sulut	Bitung	Jasa	Bitung	
250	Sulteng	Banggai	Jasa	Banggai Kepulauan	
251	Sulteng	Bunta	Jasa	Banggai	
252	Sulteng	Luwuk	Jasa	Banggai	
253	Sulteng	Kolonodale	Jasa	Morowali	
254	Sulteng	Poso	Jasa	Poso	
255	Sulteng	Pantoloan	Jasa	Donggala	
256	Sulteng	Parigi	Jasa	Donggala	
257	Sulteng	Toli - toli	Jasa	Donggala	
258	Sulteng	Wani	Jasa	Donggala	
259	Sulteng	Leok	Jasa	Buol	
260	Sulteng	Lokodidi	Jasa	Buol	
261	Sulteng	Paleleh	Jasa	Buol	
262	Sulteng	Moutong	Jasa	Parigi Moutong	
263	Sulteng	Ampana	Jasa	Tojo Una-Una	
264	Sulsel	Selayar (Benteng)	Jasa	Selayar	
265	Sulsel	Jeneponto	Jasa	Jeneponto	
266	Sulsel	Sinjai	Jasa	Sinjai	
267	Sulsel	Semen Tonasa	Jasa	Pangkajene Dan Kepulauan	
268	Sulsel	Awerange	Jasa	Barru	
269	Sulsel	Siwa	Jasa	Sidenreng Rappang	
270	Sulsel	Makassar	Jasa	Makassar	
271	Sulsel	Paotere	Jasa	Makassar	
272	Sulsel	Parepare	Jasa	Pare - Pare	
273	Sulsel	Palopo	Jasa	Palopo	
274	Sulteng	Raha	Jasa	Muna	
275	Sulteng	Kolaka	Jasa	Kolaka	
276	Sulteng	PT. Antam UBPN Operasi Pomala	Jasa	Kolaka	
277	Sulteng	Langgara	Jasa	Konawe Selatan	

278	Sulteng	Pelabuhan Nusantara Kendari	Jasa	Kendari	
279	Sulteng	Bau - Bau	Jasa	Bau - Bau	
280	Gorontalo	Kwandang	Jasa	Gorontalo Utara	
281	Gorontalo	Gorontalo	Jasa	Gorontalo	
282	Sulbar	Belang - Belang	Jasa	Majene	
283	Sulbar	Majene	Jasa	Majene	
284	Sulbar	Mamuju	Jasa	Majene	
285	Sulbar	Polewali	Jasa	Polewali Mandar	
286	Sulbar	PT. Unggul Widya Tehnologi Lestari	Jasa	Mamuju Utara	
287	Sulbar	Tanjung Bakau	Jasa	Mamuju Utara	
288	Maluku	Saumlaki	Jasa	Maluku Tenggara Barat	
289	Maluku	Amahai	Jasa	Maluku Tengah	
290	Maluku	Banda Naira	Jasa	Maluku Tengah	
291	Maluku	Tulehu	Jasa	Maluku Tengah	
292	Maluku	Wahai	Jasa	Maluku Tengah	
293	Maluku	Namilea (Namlea)	Jasa	Buru	
294	Maluku	Dobo	Jasa	Kepulauan Aru	
295	Maluku	Waisarisa	Jasa	Seram Bagian Barat	
296	Maluku	Waisarissa	Jasa	Seram Bagian Barat	
297	Maluku	Ambon	Jasa	Ambon	
298	Maluku	Duks Perikanan Nusantara Tual	Jasa	Tual	
299	Maluku	Penyeberangan Tual	Jasa	Tual	
300	Maluku	PT. Thengshing (Ting Sheen) Banda Sejahtera	Jasa	Tual	
301	Maluku	Tual	Jasa	Tual	
302	Maluku Utara	PT. Antam UBPN Gee & Buli	Jasa	Halmahera Tengah	
303	Maluku Utara	Sanana	Jasa	Kepulauan Sula	
304	Maluku Utara	Labuha	Jasa	Halmahera Selatan	
305	Maluku Utara	Wilayah Kerja Pelabuhan Saketa	Jasa	Halmahera Selatan	
306	Maluku Utara	Bere - bere	Jasa	Halmahera Utara	

307	Maluku Utara	Daruba	Jasa	Halmahera Utara	
308	Maluku Utara	Tobelo	Jasa	Halmahera Utara	
309	Maluku Utara	Gebe	Jasa	Halmahera Timur	
310	Maluku Utara	Maffa	Jasa	Halmahera Timur	
311	Maluku Utara	PT. Antam UBPN Operasi Gebe	Jasa	Halmahera Timur	
312	Maluku Utara	Achmad Yani - Ternate	Jasa	Ternate	
313	Maluku Utara	Gita / Payahe	Jasa	Tidore Kepulauan	
314	Maluku Utara	Soasio	Jasa	Tidore Kepulauan	
315	Papua Barat	Fakfak	Jasa	Fakfak	
316	Papua Barat	Kaimana	Jasa	Kaimana	
317	Papua Barat	Arandai	Jasa	Teluk Bintuni	
318	Papua Barat	Babo	Jasa	Teluk Bintuni	
319	Papua Barat	Bintuni	Jasa	Teluk Bintuni	
320	Papua Barat	Manokwari	Jasa	Manokwari	
321	Papua Barat	Oransbari	Jasa	Manokwari	
322	Papua Barat	Sorong	Jasa	Sorong	
323	Papua	Merauke	Jasa	Merauke	
324	Papua	Nabire	Jasa	Nabire	
325	Papua	Serui	Jasa	Yapen Waropen	
326	Papua	Biak	Jasa	Biak Numfor	
327	Papua	Amamapare	Jasa	Mimika	
328	Papua	Amamapare ( PT. Freeport Indonesia )	Jasa	Mimika	
329	Papua	Sarmi	Jasa	Sarmi	
330	Papua	Teba	Jasa	Mamberamo Raya	
331	Papua	Jayapura	Jasa	Jayapura	

**DAFTAR NAMA - NAMA KANTOR POS DI INDONESIA**

NO	POLDA	NAMA KANTOR POS	JENIS KOMODITI	LOKASI	KET
1	2	3	4	5	6
1	Banten	Tangerang Ciputat Serang Pandeglang Rangkas bitung Cilegon	Jasa	Tangerang Ciputat Serang Pandeglang Lebak Cilegon	6
2	Jabar	Bandung Cimahi Ujung berung Soreang Purwakarta Subang Karawang Sukabumi Cianjur Garut Cirebon Indramayu Sumedang Majalengka Kuningan Tasikmalaya Ciamis Banjar	Jasa	Bandung Cimahi Ujung berung Soreang Purwakarta Subang Karawang Sukabumi Cianjur Garut Cirebon Indramayu Sumedang Majalengka Kuningan Tasikmalaya Ciamis Banjar	24

		Bogor Depok Sawangan Cibinong Bekasi Pondok gede		Bogor Depok Depok Bogor Bekasi Bekasi	
3	DKI Jakarta	Jakarta taman fatahilah Jakarta mampang Jakarta jatinegara Jakarta pusat SGLK Jakarta Barat Jakarta selatan Jakarta timur Jakarta utara	Jasa	akarta taman fatahilah Jakarta mampang Jakarta jatinegara Jakarta pusat Jakarta pusat Jakarta Barat Jakarta selatan Jakarta timur Jakarta utara	9
4	Jateng	Semarang Ungaran Salatiga Pekalongan Kendal Tegal Brebes Pemalang Purwokerto Cilacap Purbalingga Banjarnegara Purworejo Kebumen	Jasa	Semarang Semarang Salatiga Pekalongan Kendal Tegal Brebes Pemalang Purwokerto Cilacap Purbalingga Banjarnegara Purworejo Kebumen	29

		Magelang Temanggung Wonosobo Solo Sragen Boyolali Klaten Sukoharjo Wonogiri Karanganyar Purwodadi grobogan Blora Pati Kudus Jepara		Magelang Temanggung Wonosobo Solo Sragen Boyolali Klaten Sukoharjo Wonogiri Karanganyar Grobogan Blora Pati Kudus Jepara	
5	D I Y	Yogyakarta Wates yogya Bantul Wonosari yogya	Jasa	Yogyakarta Kulon progo Bantul Gunung Kidul	4
6	Jatim	Surabaya Surabaya selatan Gresik Sidoarjo Mojokerto Jombang Bojonegoro Lamongan Tuban Madiun	Jasa	Surabaya Surabaya Gresik Sidoarjo Mojokerto Jombang Bojonegoro Lamongan Tuban Madiun	30

		<p>Ngawi</p> <p>Magetan</p> <p>Ponorogo</p> <p>Kediri</p> <p>Pare</p> <p>Ngajuk</p> <p>Malang</p> <p>Lawang</p> <p>Blitar</p> <p>Tulungagung</p> <p>Pasuruan</p> <p>Probolinggo</p> <p>Lumajang</p> <p>Jember</p> <p>Bondowoso</p> <p>Situbondo</p> <p>Banyuwangi</p> <p>Bangkalan</p> <p>Pamekasan</p> <p>Sumenep</p>		<p>Ngawi</p> <p>Magetan</p> <p>Ponorogo</p> <p>Kediri</p> <p>Pare</p> <p>Ngajuk</p> <p>Kota Malang</p> <p>Lawang</p> <p>Blitar</p> <p>Tulungagung</p> <p>Pasuruan</p> <p>Probolinggo</p> <p>Lumajang</p> <p>Jember</p> <p>Bondowoso</p> <p>Situbondo</p> <p>Banyuwangi</p> <p>Bangkalan</p> <p>Pamekasan</p> <p>Sumenep</p>	
7	Bali	<p>Denpasar</p> <p>Gianyar</p> <p>Singaraja</p> <p>Tabanan</p>	Jasa	<p>Denpasar</p> <p>Gianyar</p> <p>Buleleng</p> <p>Tabanan</p>	4
8	N T B	<p>Mataram</p> <p>Selong</p> <p>Bima</p> <p>Sumbawa besar</p>	Jasa	<p>Mataram</p> <p>Lombok timur</p> <p>Bima</p> <p>Sumbawa</p>	4

9	Aceh	Banda aceh Meulaboh Tapak tuan Sigli Lhouksumawe Langsa Kutacane	Jasa	Banda aceh Aceh barat Aceh selatan Pidie Lhouksumawe Langsa Aceh tenggara	7
10	Sumut	Medan Tebing tinggi deli Binjai Pematang siantar Kisaran Rantau prapat Kabanjahe Balige Tarutu Sibolga Padang sidempuan Gunung sitoli	Jasa	Medan Tebing tinggi deli Binjai Pematang siantar Asahan Rantau prapat Karo Toba samosir Tapanuli Utara Sibolga Padang sidempuan Nias	12
11	Kepri	Tanjung pinang Batam	Jasa	Tanjung pinang Batam	2
12	Riau	Pekan baru Tembilahan Rengat Dumai	Jasa	Pekan baru Indragiri hilir Indragiri hulu Dumai	4
13	Sumbar	Padang Pariaman Painan Bukit tinggi	Jasa	Padang Pariaman Pesisir selatan Bukit tinggi	9

		Paya kumbuh Lubuk sikaping Padang panjang Solok Sawah lunto		Paya kumbuh Pasaman timur Padang panjang Solok Sawah lunto	
14	Sumsel	Palembang Prabumulih Muara enim Lahat Kubuk linggau Baturaja	Jasa	Palembang Prabumulih Muara enim Lahat Kubuk linggau Baturaja	6
15	Sulut	Manado Kota mobagu Tahuna	Jasa	Manado Bolang mongondow Sangihe	3
16	Sulteng	Palu Luwuk	Jasa	Palu Banggai	2
17	Sulsel	Makasar Pare pare Palopo Bulukumba Watampone	Jasa	Makasar Pare pare Palopo Bulukumba Watampone	5
20	Sultra	Kendari Baubau	Jasa	Kendari Baubau	2
21	Kalbar	Pontianak Sanggau Sintang Ketapang Singkawang	Jasa	Pontianak Sanggau Sintang Ketapang Singkawang	5

22	Kalteng	Palangkaraya Kotawaringin Barat Kotawaringin Timur	Jasa	Palangka Raya Pangkalnabuan Sampit	3
23	Kalsel	Banjarmasin Banjarbaru Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Utara Kotabaru	Jasa	Banjarmasin Banjarbaru Kandangan Amuntai Kota Baru Pulau Laut	5
24	Kaltim	Samarinda Bontang Kutai Kartanegara Balikpapan Tarakan Berau	Jasa	Samarinda Bontang Tenggarong Balikpapan Tarakan Tanjungredeb	6
25	Babel	Pangkalpinang Belitung	Jasa	Pangkalpinang Tanjungpandan	2
26	Lampung	Metro Lampung Utara Bandar Lampung	Jasa	Metro Kota Bumi Bandar Lampung	3
27	Jambi	Jambi Kerinci Bungo	Jasa	Jambi Sungai Penuh Muarabungo	3
28	Bengkulu	Bengkulu Rejang Lebong	Jasa	Bengkulu Curup	2
29	Jabar	Bogor Depok Depok	Jasa	Bogor Depok Sawangan	9

		Bogor Bekasi Bekasi Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur		Cibinong Bekasi Pondokgede Jakarta Taman Fatahillah Jakarta Mampang Jakarta Jatinegara	
30	NTT	Kupang Timor Tengah Selatan Bellu Sikka Ende Sumba Timur	Jasa	Kupang Soe Atamba Maumere Ende Waingapu	6
31	Gorontalo	Gorontalo	Jasa	Gorontalo	1
32	Sulbar	Majene	Jasa	Majene	1
33	Maluku	Ambon Maluku Utara	Jasa	Ambon Tual	2
34	Maluku Utara	Ternate	Jasa	Ternate	1
35	Papua	Nabire Jayapura Merauke Mimika Biak Numfor	Jasa	Nabire Jayapura Merauke Timika Biak	5
36	Irian Barat	Manokwari Sorong	Jasa	Manokwari Sorong	2

**DAFTAR TERMINAL DI INDONESIA**

NO	POLDA	NAMA TERMINAL	JENIS KOMODITI	LOKASI	KET
1	2	3	4	5	6
1	<b>A C E H</b>	Tapak Tuan	Jasa	Kab. Aceh Selatan	
2		Kutacane	Jasa	Kab. Aceh Tenggara	
3		Kuala Simpang	Jasa	Kab. Aceh Timur	
4		Langsa	Jasa	Kab. Aceh Timur	
5		Meulaboh	Jasa	Kab. Aceh Barat	
6		Banda Aceh (Baru)	Jasa	Kab. Aceh Besar	
7		Sigli	Jasa	Kab. Pidie	
8		Bireun	Jasa	Kab. Aceh Utara	
9		Lhokseumawe	Jasa	Kab. Aceh Utara	
10		Banda Aceh (Setui)	Jasa	Kota Banda Aceh	
11		Lhokseumawe	Jasa	Kota Lhokseumawe	
12	<b>S U M U T</b>	Padang Sidempuan	Jasa	Kab. Tapanuli Selatan	
13		Penyambungan	Jasa	Kab. Tapanuli Selatan	
14		Pandan	Jasa	Kab. Tapanuli Tengah	
15		Siborong-borong	Jasa	Kab. Tapanuli Utara	
16		Tarutung	Jasa	Kab. Tapanuli Utara	
17		Bakti Kisaran	Jasa	Kab. Asahan	
18		Sukadane	Jasa	Kab. Simalungun	
19		Sidikalang	Jasa	Kab. Dairi	
20		Lubuk Pakam	Jasa	Kab. Deli Serdang	
21		Jl. Tanjung Pura	Jasa	Kab. Langkat	
22		Pangkalan Brandan	Jasa	Kab. Langkat	
23		Aek Kanopan	Jasa	Kab. Labuhanbatu Utara	
24		Sibolga	Jasa	Kota Sibolga	

25		Tanjung Balai	Jasa	Kota Tanjung Balai	
26		Perdagangan	Jasa	Kota Pematang Siantar	
27		Sukadane	Jasa	Kota Pematang Siantar	
28		Rantau Laban	Jasa	Kota Tebing Tinggi	
29		Amplas	Jasa	Kota Medan	
30		Pinang Baris	Jasa	Kota Medan	
31		Sambu	Jasa	Kota Medan	
32		Sei Wampu	Jasa	Kota Medan	
33		Teladan / Terminal Building	Jasa	Kota Medan	
34		Tavip	Jasa	Kota Binjai	
35		Gunung Sitoli	Jasa	Kota Gunung Sitoli	
36	<b>S U M B A R</b>	Simpang Tiga	Jasa	Kab. Pesisir Selatan	
37		Lintas Sumatera	Jasa	Kab. Solok	
38		Sawah Lunto / Sijunjung	Jasa	Kab. Sijunjung	
39		Batu Sangkar	Jasa	Kab. Tanah Datar	
40		Kp. Cina	Jasa	Kab. Padang Pariaman	
41		Pariaman	Jasa	Kab. Padang Pariaman	
42		Pasaman	Jasa	Kab. Pasaman	
43		Andalas	Jasa	Kota Padang	
44		Jl. Pemuda	Jasa	Kota Padang	
45		Pasar Goan Hoat	Jasa	Kota Padang	
46		Regional Bingkuang	Jasa	Kota Padang	
47		Jl. Pandan	Jasa	Kota Solok	
48		Kilinranjau	Jasa	Kota Sawahlunto	
49		Pasar Padang Panjang	Jasa	Kota Padang Panjang	
50		Aur Kuning	Jasa	Kota Bukittinggi	
51		Koto Nan	Jasa	Kota Payakumbuh	
52	<b>R I A U</b>	Jl. Raya Air Molek	Jasa	Kab. Indragiri Hulu	
53		Pasar Rengat	Jasa	Kab. Indragiri Hulu	

54		Pasar Teluk Kuantan	Jasa	Kab. Indragiri Hulu	
55		Bangkinang	Jasa	Kab. Kampar	
56		Pasir Pangairan	Jasa	Kab. Kampar	
57		Jl. Sudirman Dumai	Jasa	Kab. Bengkalis	
58		Bandar Raya Payung Sekaki	Jasa	Kota Pekanbaru	
59		Jl. Nangka	Jasa	Kota Pekanbaru	
60		Jl. Yos Sudarso	Jasa	Kota Pekanbaru	
61		Mayang Terurai	Jasa	Kota Pekanbaru	
62		Pasar Kodim	Jasa	Kota Pekanbaru	
63		Pasar Sail	Jasa	Kota Pekanbaru	
64		Senapelan	Jasa	Kota Pekanbaru	
65	<b>J A M B I</b>	Sungai Penuh / Pasar Koya	Jasa	Kab. Kerinci	
66		Bangko	Jasa	Kab. Sarolangun	
67		Sarolangun	Jasa	Kab. Sarolangun	
68		Km. 5 Muara Tembesi	Jasa	Kab. Batang Hari	
69		Alam Barajo	Jasa	Kab. Muaro Jambi	
70		Terminal Truk	Jasa	Kab. Muaro Jambi	
71		Bungo Baru	Jasa	Kab. Bungo	
72		Muara Bungo	Jasa	Kab. Bungo	
73		Muara Bungo	Jasa	Kab. Bungo	
74		Kebun Jahe	Jasa	Kota Jambi	
75		Kenali Simpang Kawat	Jasa	Kota Jambi	
76		Rawasari	Jasa	Kota Jambi	
77	<b>S U M S E L</b>	Baturaja	Jasa	Kab. Ogan Komering Ulu	
78		Gumawang (Belitang)	Jasa	Kab. Ogan Komering Ulu	
79		Kayu Agung	Jasa	Kab. Ogan Komering Ilir	
80		Lahat	Jasa	Kab. Lahat	
81		Lubuk Linggau	Jasa	Kab. Musi Rawas	
82		Sekayu	Jasa	Kab. Musi Banyuasin	

83		Martapura	Jasa	Kab. Ogan Ilir	
84		Pasar Baru	Jasa	Kab. Ogan Ilir	
85		Alang - alang Lebar	Jasa	Kota Palembang	
86		Ampera / Pasar 16 Ilir	Jasa	Kota Palembang	
87		Jaka Baring	Jasa	Kota Palembang	
88		Karya Jaya	Jasa	Kota Palembang	
89		Km. 5	Jasa	Kota Palembang	
90		Tujuh Ulu	Jasa	Kota Palembang	
91		Muara Enim	Jasa	Kota Prabumulih	
92		Prabumulih	Jasa	Kota Prabumulih	
93	<b>BENGKULU</b>	Manna	Jasa	Kab. Bengkulu Selatan	
94		Kepahyang	Jasa	Kab. Rejang Lebong	
95		Pasar Atas Curup	Jasa	Kab. Rejang Lebong	
96		Arga Makmur	Jasa	Kab. Bengkulu Utara	
97		Betungan	Jasa	Kab. Seluma	
98		Air Sebakul	Jasa	Kota Bengkulu	
99		Lingkar Timur (Terminal Panorama)	Jasa	Kota Bengkulu	
100		Pasar Minggu	Jasa	Kota Bengkulu	
101		Sungai Hitam	Jasa	Kota Bengkulu	
102	<b>LAMPUNG</b>	Bakauheni	Jasa	Kab. Lampung Selatan	
103		Langkapura (Kemiling)	Jasa	Kota Bandar Lampung	
104		Rajabasa	Jasa	Kota Bandar Lampung	
105		Tanjung Karang (Pasar Bawah)	Jasa	Kota Bandar Lampung	
106		Teluk Betung (Sukaraja)	Jasa	Kota Bandar Lampung	
107	<b>BANGKA BELITUNG</b>	Pangkal Pinang / Terminal Koba	Jasa	Kab. Bangka	
108		Sungai Liat	Jasa	Kab. Bangka	
109		Mangar	Jasa	Kab. Belitung	
110		Tanjung Pandan	Jasa	Kab. Belitung	

111		Giri Maya	Jasa	Kota Pangkal Pinang	
112		Kampung Keramat	Jasa	Kota Pangkal Pinang	
113		Selindung Baru	Jasa	Kota Pangkal Pinang	
114	<b>KEPULAUAN RIAU</b>	Tanjung Pinang	Jasa	Kota Tanjung Pinang	
115	<b>DKI JAKARTA</b>	Blok M	Jasa	Kodya Jakarta Selatan	
116		Lebak Bulus	Jasa	Kodya Jakarta Selatan	
117		Pasar Minggu	Jasa	Kodya Jakarta Selatan	
118		Cililitan	Jasa	Kodya Jakarta Timur	
119		Kampung Melayu	Jasa	Kodya Jakarta Timur	
120		Kampung Rambutan	Jasa	Kodya Jakarta Timur	
121		Pulo Gadung	Jasa	Kodya Jakarta Timur	
122		Rawamangun	Jasa	Kodya Jakarta Timur	
123		Senen	Jasa	Kodya Jakarta Pusat	
124		Kalideres	Jasa	Kodya Jakarta Barat	
125		Tanjung Priok	Jasa	Kodya Jakarta Utara	
126	<b>JAWA BARAT</b>	Cibinong	Jasa	Kab. Bogor	
127		Citeureup	Jasa	Kab. Bogor	
128		Jebrod	Jasa	Kab. Cianjur	
129		Rawabango	Jasa	Kab. Cianjur	
130		Cileunyi	Jasa	Kab. Bandung	
131		Jl. Kaur Panggung	Jasa	Kab. Bandung	
132		Cikajang	Jasa	Kab. Garut	
133		Guntur Melati	Jasa	Kab. Garut	
134		Malangbong	Jasa	Kab. Garut	
135		Samarang	Jasa	Kab. Garut	
136		Singaparna	Jasa	Kab. Tasikmalaya	
137		Banjar	Jasa	Kab. Ciamis	
138		Ciamis	Jasa	Kab. Ciamis	

139		Pangandaran	Jasa	Kab. Ciamis	
140		Ciawi Gebang	Jasa	Kab. Kuningan	
141		Cirendang	Jasa	Kab. Kuningan	
142		Kuningan	Jasa	Kab. Kuningan	
143		Cikijing	Jasa	Kab. Majalengka	
144		Kadipaten	Jasa	Kab. Majalengka	
145		Maja	Jasa	Kab. Majalengka	
146		Majalengka	Jasa	Kab. Majalengka	
147		Rajagaluh	Jasa	Kab. Majalengka	
148		Sumedang	Jasa	Kab. Sumedang	
149		Indramayu	Jasa	Kab. Indramayu	
150		Jatibarang	Jasa	Kab. Indramayu	
151		Karangampel	Jasa	Kab. Indramayu	
152		Patrol	Jasa	Kab. Indramayu	
153		Sindang	Jasa	Kab. Indramayu	
154		Pamanukan	Jasa	Kab. Subang	
155		Subang	Jasa	Kab. Subang	
156		Sukamandi	Jasa	Kab. Subang	
157		Sadang	Jasa	Kab. Purwakarta	
158		Cikampek	Jasa	Kab. Karawang	
159		Karawang	Jasa	Kab. Karawang	
160		Cikarang	Jasa	Kab. Bekasi	
161		Pondok Gede	Jasa	Kab. Bekasi	
162		Baranang Siang	Jasa	Kota Bogor	
163		Jl. Pajajaran	Jasa	Kota Bogor	
164		Ahmad Yani	Jasa	Kota Sukabumi	
165		Cicaheum	Jasa	Kota Bandung	
166		Jl. Moh. Toha	Jasa	Kota Bandung	
167		Kebon Kelapa	Jasa	Kota Bandung	

168		Kebon Kelapa	Jasa	Kota Bandung	
169		Ledeng	Jasa	Kota Bandung	
170		Leuwipanjang	Jasa	Kota Bandung	
171		Bekasi	Jasa	Kota Bekasi	
172		Depok	Jasa	Kota Depok	
173		Jl. Juanda	Jasa	Kota Tasikmalaya	
174		Jl. Veteran	Jasa	Kota Tasikmalaya	
175		Pancasila	Jasa	Kota Tasikmalaya	
176	<b>JAWA TENGAH</b>	Cilacap	Jasa	Kab. Cilacap	
177		Ajibarang	Jasa	Kab. Banyumas	
178		Wangon	Jasa	Kab. Banyumas	
179		Babat Sari	Jasa	Kab. Purbalingga	
180		Purbalingga	Jasa	Kab. Purbalingga	
181		Purwokerto	Jasa	Kab. Purbalingga	
182		Banjarnegara	Jasa	Kab. Banjarnegara	
183		Kebumen	Jasa	Kab. Kebumen	
184		Purworejo	Jasa	Kab. Purworejo	
185		Sapen	Jasa	Kab. Wonosobo	
186		Wonosobo	Jasa	Kab. Wonosobo	
187		Borobudur	Jasa	Kab. Magelang	
188		Muntilan	Jasa	Kab. Magelang	
189		Boyolali	Jasa	Kab. Boyolali	
190		Wonogiri	Jasa	Kab. Wonogiri	
191		Blora	Jasa	Kab. Blora	
192		Cepu	Jasa	Kab. Blora	
193		Kudus	Jasa	Kab. Kudus	
194		Ambarawa	Jasa	Kab. Semarang	
195		Bawen	Jasa	Kab. Semarang	
196		Jambu	Jasa	Kab. Semarang	

197		Klepu	Jasa	Kab. Semarang	
198		Ungaran	Jasa	Kab. Semarang	
199		Weleri	Jasa	Kab. Kendal	
200		Banyu Pulih	Jasa	Kab. Batang	
201		Maribaya	Jasa	Kab. Batang	
202		Pasundan	Jasa	Kab. Batang	
203		Pemalang	Jasa	Kab. Pemalang	
204		Slawi	Jasa	Kab. Tegal	
205		Brebes	Jasa	Kab. Brebes	
206		Bumiayu	Jasa	Kab. Brebes	
207		Ketanggungan	Jasa	Kab. Brebes	
208		Tanjung	Jasa	Kab. Brebes	
209		Soekarno - Hatta	Jasa	Kota Magelang	
210		Tirtonadi	Jasa	Kota Surakarta	
211		Salatiga	Jasa	Kota Salatiga	
212		Banyumanik	Jasa	Kota Semarang	
213		Terboyo	Jasa	Kota Semarang	
214		Pekalongan	Jasa	Kota Pekalongan	
215		Tegal	Jasa	Kota Tegal	
216	<b>D I Y</b>	Wates	Jasa	Kab. Kulon Progo	
217		Wonosari	Jasa	Kab. Gunung Kidul	
218		Wonosari	Jasa	Kab. Gunung Kidul	
219		Pasar Klopo	Jasa	Kab. Sleman	
220		Giwangan	Jasa	Kota Yogyakarta	
221	<b>JAWA TIMUR</b>	Pacitan	Jasa	Kab. Pacitan	
222		Ponorogo	Jasa	Kab. Ponorogo	
223		Trenggalek	Jasa	Kab. Trenggalek	
224		Tulung Agung	Jasa	Kab. Tulungagung	
225		Blitar	Jasa	Kab. Blitar	

226		Kediri	Jasa	Kab. Kediri	
227		Arjosari	Jasa	Kab. Malang	
228		Gadang	Jasa	Kab. Malang	
229		Landungsari	Jasa	Kab. Malang	
230		Lumajang	Jasa	Kab. Lumajang	
231		Jember	Jasa	Kab. Jember	
232		Tawang Alun	Jasa	Kab. Jember	
233		Blambangan	Jasa	Kab. Banyuwangi	
234		Brawijaya	Jasa	Kab. Banyuwangi	
235		Ketapang	Jasa	Kab. Banyuwangi	
236		Bondowoso	Jasa	Kab. Bondowoso	
237		Situbondo	Jasa	Kab. Situbondo	
238		Banyuangga	Jasa	Kab. Probolinggo	
239		Jl. Raya Kasri	Jasa	Kab. Pasuruan	
240		Jl. Senopati	Jasa	Kab. Pasuruan	
241		Krian	Jasa	Kab. Sidoarjo	
242		Purabaya	Jasa	Kab. Sidoarjo	
243		Mojokerto	Jasa	Kab. Mojokerto	
244		Jombang	Jasa	Kab. Jombang	
245		Kertosono	Jasa	Kab. Nganjuk	
246		Nganjuk	Jasa	Kab. Nganjuk	
247		Caruban	Jasa	Kab. Madiun	
248		Magetan	Jasa	Kab. Magetan	
249		Maospati	Jasa	Kab. Magetan	
250		Ngawi	Jasa	Kab. Ngawi	
251		Padangan	Jasa	Kab. Bojonegoro	
252		Rajekwesi	Jasa	Kab. Bojonegoro	
253		Tuban	Jasa	Kab. Tuban	
254		Babat	Jasa	Kab. Lamongan	

255		Lamongan	Jasa	Kab. Lamongan	
256		Sidomoro	Jasa	Kab. Gresik	
257		Bangkalan	Jasa	Kab. Bangkalan	
258		Kamal	Jasa	Kab. Bangkalan	
259		Sampang	Jasa	Kab. Sampang	
260		Pamekasan	Jasa	Kab. Pamekasan	
261		Kalianget	Jasa	Kab. Sumenep	
262		Sumenep	Jasa	Kab. Sumenep	
263		Tamanan	Jasa	Kota Kediri	
264		Purbaya	Jasa	Kota Madiun	
265		Bratang	Jasa	Kota Surabaya	
266		Jembatan Merah	Jasa	Kota Surabaya	
267		Joyoboyo	Jasa	Kota Surabaya	
268		Tambak Osowilangun	Jasa	Kota Surabaya	
269	<b>B A N T E N</b>	Labuan	Jasa	Kab. Pandeglang	
270		Saketi	Jasa	Kab. Pandeglang	
271		Tarogong / Terminal Pandeglang Baru	Jasa	Kab. Pandeglang	
272		Megersari	Jasa	Kab. Lebak	
273		Rangkasbitung	Jasa	Kab. Lebak	
274		Balaraja	Jasa	Kab. Tangerang	
275		Cimone	Jasa	Kab. Tangerang	
276		Poris Plawad	Jasa	Kab. Tangerang	
277		Pasarawu	Jasa	Kab. Serang	
278		Cilegon	Jasa	Kota Cilegon	
279		Merak	Jasa	Kota Cilegon	
280		Pakupatan	Jasa	Kota Serang	
281		Ciputat	Jasa	Kota Tangerang Selatan	
282	<b>B A L I</b>	Gilimanuk	Jasa	Kab. Jembrana	
283		Negara	Jasa	Kab. Jembrana	

284		Kediri	Jasa	Kab. Tabanan	
285		Persiapan	Jasa	Kab. Tabanan	
286		Tuakilang	Jasa	Kab. Tabanan	
287		Denpasar	Jasa	Kab. Badung	
288		Gianyar	Jasa	Kab. Gianyar	
289		Klungkung	Jasa	Kab. Klungkung	
290		Bangli	Jasa	Kab. Bangli	
291		Karang Asem	Jasa	Kab. Karangasem	
292		Buleleng	Jasa	Kab. Buleleng	
293		Seririt	Jasa	Kab. Buleleng	
294		K. Tinggi	Jasa	Kota Denpasar	
295		Kreneng	Jasa	Kota Denpasar	
296		Suci	Jasa	Kota Denpasar	
297		Tegal Sari	Jasa	Kota Denpasar	
298		Terminal Barang / Cargo Uma Anyar	Jasa	Kota Denpasar	
299		Ubung	Jasa	Kota Denpasar	
300		Wangaya	Jasa	Kota Denpasar	
301	<b>NUSA TIENGGARA BARAT</b>	Lembar	Jasa	Kab. Lombok Barat	
302		Narmada	Jasa	Kab. Lombok Barat	
303		Sgenter	Jasa	Kab. Lombok Barat	
304		Kopang	Jasa	Kab. Lombok Tengah	
305		Praya	Jasa	Kab. Lombok Tengah	
306		Keruak	Jasa	Kab. Lombok Timur	
307		Labuhan Haji	Jasa	Kab. Lombok Timur	
308		Labuhan Lombok	Jasa	Kab. Lombok Timur	
309		Masbagik	Jasa	Kab. Lombok Timur	
310		Pancor	Jasa	Kab. Lombok Timur	

311		Kempo	Jasa	Kab. Sumbawa	
312		Alas	Jasa	Kab. Sumbawa	
313		Empang	Jasa	Kab. Sumbawa	
314		Sumer Payung	Jasa	Kab. Dompu	
315		Ginte Dompu	Jasa	Kab. Dompu	
316		Sape	Jasa	Kab. Bima	
317		Tente	Jasa	Kab. Bima	
318		Taliwang	Jasa	Kab. Sumbawa Barat	
319		Tanjung	Jasa	Kab. Lombok Utara	
320		Kebon Roek ( Ampenan )	Jasa	Kota Mataram	
321		Dara	Jasa	Kota Mataram	
322		Jatibarу	Jasa	Kota Bima	
323		Kumbe	Jasa	Kota Bima	
324		Mandalika	Jasa	Kota Bima	
325		Sambinae	Jasa	Kota Bima	
326	<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>	Waingapu	Jasa	Kab. Sumba Timur	
327		Oebobo Kupang	Jasa	Kab. Kupang	
328		Soe	Jasa	Kab. Timor Tengah Selatan	
329		Kalabahi	Jasa	Kab. Alor	
330		Maumere	Jasa	Kab. Sikka	
331		Ende / Ndao	Jasa	Kab. Ende	
332		Bajawa	Jasa	Kab. Ngada	
333		Ruteng	Jasa	Kab. Manggarai	
334	<b>KALIMANTAN BARAT</b>	Bengkayang	Jasa	Kab. Sambas	
335		Pemangkat	Jasa	Kab. Sambas	
336		Sambas	Jasa	Kab. Sambas	
337		Sei Duri	Jasa	Kab. Sambas	

338		Singkawang	Jasa	Kab. Sambas	
339		Singkawang	Jasa	Kab. Sambas	
340		Jungkat	Jasa	Kab. Pontianak	
341		Menpawah / Baru	Jasa	Kab. Pontianak	
342		Ngabang	Jasa	Kab. Pontianak	
343		Sei Pinyuh	Jasa	Kab. Pontianak	
344		Entikong	Jasa	Kab. Sanggau	
345		Sanggau	Jasa	Kab. Sanggau	
346		Ketapang	Jasa	Kab. Ketapang	
347		Sintang	Jasa	Kab. Sintang	
348		Batu Layang	Jasa	Kota Pontianak	
349		Pontianak	Jasa	Kota Pontianak	
350	<b>KALIMANTAN TENGAH</b>	Pangkalan Bun	Jasa	Kab. Kotawaringin Barat	
351		Bundaran Burung Tinggang	Jasa	Kota Palangkaraya	
352		Palangka Raya (Datah Manuah)	Jasa	Kota Palangkaraya	
353		Palangkaraya (Mahir Mahar)	Jasa	Kota Palangkaraya	
354		Tjilik Riwut Palangkaraya	Jasa	Kota Palangkaraya	
355	<b>KALIMANTAN SELATAN</b>	Amuntai / Kelua	Jasa	Kab. Tabalong	
356		Banjarmasin / Terminal Induk Km. 6	Jasa	Kota Banjarmasin	
357	<b>KALIMANTAN TIMUR</b>	Tanah Grogot Kuaro	Jasa	Kab. Paser	
358		Timbau	Jasa	Kab. Kutai Barat	
359		Loa Janan	Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	
360		Loa Kulu	Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	
361		Pasar Inpres	Jasa	Kab. Berau	
362		Balikpapan	Jasa	Kota Balikpapan	
363		Kampung Baru	Jasa	Kota Balikpapan	
364		Kelandasan	Jasa	Kota Balikpapan	

365		Pasar Baru	Jasa	Kota Balikpapan	
366		Penajam	Jasa	Kota Balikpapan	
367		Rapak	Jasa	Kota Balikpapan	
368		Handil II	Jasa	Kota Samarinda	
369		Pasar Pagi	Jasa	Kota Samarinda	
370		Pasar Segiri	Jasa	Kota Samarinda	
371		Samarinda Seberang / Terminal Lampake	Jasa	Kota Samarinda	
372		Sei Kunjang	Jasa	Kota Samarinda	
373		Lingkas	Jasa	Kota Tarakan	
374		Loa Tebu	Jasa	Kota Bontang	
375	<b>SULAWESI UTARA</b>	Kotamogagu	Jasa	Kab. Bolaang Mongondow	
376		Amurang	Jasa	Kab. Minahasa	
377		Kawangkoan	Jasa	Kab. Minahasa	
378		Langoan	Jasa	Kab. Minahasa	
379		Tomohon	Jasa	Kab. Minahasa	
380		Tondano	Jasa	Kab. Minahasa	
381		Tahoma	Jasa	Kab. Kepulauan Sangihe	
382		Bahu	Jasa	Kota Manado	
383		Karombasan	Jasa	Kota Manado	
384		Manado / Malalayang	Jasa	Kota Manado	
385		Paal II	Jasa	Kota Manado	
386		Bitung ( Tangkoko )	Jasa	Kota Bitung	
387	<b>SULAWESI TENGAH</b>	Bunta	Jasa	Kab. Banggai	
388		Luwuk	Jasa	Kab. Banggai	
389		Pagimana	Jasa	Kab. Banggai	
390		Ampana	Jasa	Kab. Poso	
391		Bungku	Jasa	Kab. Poso	
392		Kasintuwu	Jasa	Kab. Poso	

393		Kolondale	Jasa	Kab. Poso	
394		Pendolo	Jasa	Kab. Poso	
395		Poso	Jasa	Kab. Poso	
396		Tentena	Jasa	Kab. Poso	
397		Banawa	Jasa	Kab. Donggala	
398		Manonda	Jasa	Kab. Donggala	
399		Masomba	Jasa	Kab. Donggala	
400		Parigi	Jasa	Kab. Donggala	
401		Toili	Jasa	Kab. Donggala	
402		Toli - Toli	Jasa	Kab. Buol	
403		Mamboro	Jasa	Kota Palu	
404		Petobo	Jasa	Kota Palu	
405		Tipo	Jasa	Kota Palu	
406	<b>SULAWESI SELATAN</b>	Paririsi / Terminal Regional Takalar	Jasa	Kab. Takalar	
407		Sunggu / Cappa Bungaya	Jasa	Kab. Gowa	
408		Maros	Jasa	Kab. Maros	
409		Pangkajene	Jasa	Kab. Pangkajene Kepulauan	
410		Baru	Jasa	Kab. Barru	
411		Soppeng	Jasa	Kab. Soppeng	
412		Rappang	Jasa	Kab. Sidenreng Rappang	
413		Pinrang	Jasa	Kab. Pinrang	
414		Makale	Jasa	Kab. Enrekang	
415		Baturakeng	Jasa	Kota Makassar	
416		Daya / Terminal Regional Daya (TRD)	Jasa	Kota Makassar	
417		Parem - Pare	Jasa	Kota Parepare	
418	<b>SULAWESI TENGGARA</b>	Bau - Bau	Jasa	Kab. Buton	
419		Raha	Jasa	Kab. Muna	

420		Larumbalangi Kolaka	Jasa	Kab. Kolaka	
421		Pomalaa	Jasa	Kab. Kolaka	
422		Kendari	Jasa	Kota Kendari	
423		Mandonga	Jasa	Kota Kendari	
424		Kota Kendari	Jasa	Powatu	
425		Kota Kendari	Jasa	Wua - wua	
426	<b>GORONTALO</b>	Gorontalo / Isimu	Jasa	Kab. Gorontalo	
427		Gorontalo / Terminal 1942 Andalas	Jasa	Kab. Gorontalo	
428	<b>MALUKU</b>	Sanana	Jasa	Kab. Maluku Tenggara	
429		Tual	Jasa	Kab. Maluku Tenggara	
430		Masohi	Jasa	Kab. Maluku Tengah	
431		Saparua	Jasa	Kab. Maluku Tengah	
432		Tulehu	Jasa	Kab. Maluku Tengah	
433		Pantai Mardika	Jasa	Kota Ambon	
434		Pelita	Jasa	Kota Ambon	
435	<b>MALUKU UTARA</b>	Jailolo	Jasa	Kab. Halmahera Barat	
436		Galela	Jasa	Kab. Halmahera Utara	
437		Tobelo	Jasa	Kab. Halmahera Utara	
438		Bastiong	Jasa	Kota Ternate	
439		Kota	Jasa	Kota Ternate	
440		Ternate ( Gamalama )	Jasa	Kota Ternate	
441		Tidore	Jasa	Kota Tidore Kepulauan	
442	<b>PAPUA BARAT</b>	Fak - Fak	Jasa	Kab. Fakfak	
443		Manokwari	Jasa	Kab. Manokwari	
444		Sorong	Jasa	Kab. Sorong	
445	<b>PAPUA</b>	Merauke	Jasa	Kab. Merauke	
446		Jibama	Jasa	Kab. Jayawijaya	
447		Kurima ( Woma )	Jasa	Kab. Jayawijaya	

448		Pharaa Sentani	Jasa	Kab. Jayapura	
449		Biak	Jasa	Kab. Biak Numfor	
450		Entrop	Jasa	Kota Jayapura	
451		Jayapura / Mesran	Jasa	Kota Jayapura	
452		Youtefa	Jasa	Kota Jayapura	
453		Ginte	Jasa	Kota Jayapura	

<b>ASSESOR SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN (SMP) OBJEK VITAL NASIONAL DAN OBJEK TERTENTU</b>					
NO	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN	KESTUAN
1	BUDI PURWOTO, S.E.	KOMBES POL	61050215	KABAG KERMADIKLAT ROBINDIKLAT LEMDIKLAT	LEMDIKLAT POLRI
2	LEONARDUS ERIC BHISMO, S.I.K., S.H., M.H.	KOMBES POL	70090406	TUTOR UTAMA LEMDIKPOL	LEMDIKLAT POLRI
3	MAROLOP MANIK, S.H.	KOMBES POL	63120975	KASUBDIT PAMMASTER DITPAMOBVIT KORSABHARA BAHARKAM POLRI	BAHARKAM POLRI
4	Drs. SUTRISNO DEWO GONO MUKTI, M.M.	KOMBES POL	63070908	KASUBDIT VVIP DITPAMOBVIT BAHARKAM POLRI	BAHARKAM POLRI
5	HARRIES BUDIHARTO, S.I.K., M.Si.	KOMBES POL	68100293	KASUBDIT AUDIT SISPAMOBVITNAS DIPAMOBVIT KORSABHARA BAHARKAM POLRI	BAHARKAM POLRI
6	Drs. ZUHDI BAHARUDIN ARRASULI, S.H.	KOMBES POL	65030630	KASUBDITBINTIBSOS DITBINMAS KORBINMAS BAHARKAM POLRI	BAHARKAM POLRI
7	Drs. BARMEN TAMPUBOLON	KOMBES POL	61030767	DIR PAMOBVIT POLD KALTIM	POLDA KALTIM
8	Drs. HUDIT WAHYUDI, M.Hum., M.Si.	KOMBES POL	67070537	DIR PAMOBVIT POLD KALBAR	POLDA KALBAR
9	AGUS KRISDIYANTO, S.H. ,M.B.A.	KOMBES POL	64110646	DIR PAMOBVIT POLD SUMBAR	POLDA SUMBAR
10	SUGENG MUNTAHA, S.I.K., M.H., M.M.	AKBP	70060451	WADIR PAMOBVIT POLD A JATIM	POLDA JATIM
11	MAHMUR, S.H., M.Pd.	AKBP	62010601	KASUBBAG OPSNALAT BAG OPSNALAT KORSABHARA BAHARKAM POLRI	BAHARKAM POLRI
12	Dra. ROONA RATULANGI, S.H.	AKBP	66100602	KASI PAM LEMNEG SUBDIT VVIP/VIP DITPAMOBVIT	BAHARKAM POLRI

				KORSABHARA BAHARKAM POLRI	
13	SRI HARTINI, S.H.	KOMPOL	63070239	PS. KASI PAMWASIN SUBDIT PAMMASTER DITPAMOBVIT KORSABHARA BAHARKAM POLRI	BAHARKAM POLRI
14	AGUNG JULIANTO, S.I.K., M.M	BRIGJEN POL		KA LSP	LEMDIKLAT POLRI

**ASSESOR SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN (SMP) OBJEK VITAL NASIONAL DAN OBJEK TERTENTU**

NO URUT PETIKAN	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN
1	BUDI PURWOTO, S.E.	KOMBES POL	61050215	KABAG KERMADIKLAT ROBINDIKLAT LEMDIKLAT
2	LEONARDUS ERIC BHISMO, S.I.K., S.H., M.H.	KOMBES POL	70090406	TUTOR UTAMA LEMDIKPOL
3	MAROLOP MANIK, S.H.	KOMBES POL	63120975	KASUBDIT PAMMASTER DITPAMOBVIT KORSABHARA BAHARKAM POLRI
4	Drs. SUTRISNO DEWO GONO MUKTI, M.M.	KOMBES POL	63070908	KASUBDIT VVIP DITPAMOBVIT BAHARKAM POLRI
5	HARRIES BUDIHARTO, S.I.K., M.Si.	KOMBES POL	68100293	KASUBDIT AUDIT SISPAMOBVITNAS DIPAMOBVIT KORSABHARA BAHARKAM POLRI
6	Drs. ZUHDI BAHARUDIN ARRASULI, S.H.	KOMBES POL	65030630	KASUBDITBINTIBSOS DITBINMAS KORBINMAS BAHARKAM POLRI
7	Drs. BARMEN TAMPUBOLON	KOMBES POL	61030767	DIR PAMOBVIT POLDA KALTIM
8	Drs. HUDIT WAHYUDI, M.Hum., M.Si.	KOMBES POL	67070537	DIR PAMOBVIT POLDA KALBAR
9	AGUS KRISDIYANTO, S.H. ,M.B.A.	KOMBES POL	64110646	DIR PAMOBVIT POLDA SUMBAR
10	SUGENG MUNTAHA, S.I.K., M.H., M.M.	AKBP	70060451	WADIR PAMOBVIT POLDA JATIM
11	MAHMUR, S.H., M.Pd.	AKBP	62010601	KASUBBAG OPSNALAT BAG OPSNALAT KORSABHARA BAHARKAM POLRI
12	Dra. ROONA RATULANGI, S.H.	AKBP	66100602	KASI PAM LEMNEG SUBDIT VVIP/VIP DITPAMOBVIT KORSABHARA BAHARKAM POLRI
13	SRI HARTINI, S.H.	KOMPOL	63070239	PS. KASI PAMWASIN SUBDIT PAMMASTER DITPAMOBVIT KORSABHARA BAHARKAM POLRI
14	AGUNG JULIANTO, S.I.K., M.M	BRIGJEN POL		KA LSP

**TU**

KESTUAN
LEMDIKLAT POLRI
LEMDIKLAT POLRI
BAHARKAM POLRI
BAHARKAM POLRI
BAHARKAM POLRI
BAHARKAM POLRI
<b>POLDA KALTIM</b>
POLDA KALBAR
POLDA SUMBAR
POLDA JATIM
BAHARKAM POLRI
BAHARKAM POLRI
BAHARKAM POLRI
LEMDIKLAT POLRI

**AUDITOR SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN (SMP) OBJEK VITAL NASIONAL DAN OBJEK TERTENTU 2018**

NO URUT PETIKAN	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN	KESTUAN
1	DANIEL VICTOR TOBING, S.I.K.	AKBP	73040545	WADIR PAMOBVIT POLD A KEP. BABEL	P. BABEL
2	ALEX ADAM, S.Sos.	AKBP	65020023	KABAG BINOPSNAL DITPAMOBVIT POLD A SULUT	POLD A SULUT
3	BUDI SATRIO, S.Pd., M.M.	KOMPOL	61100065	PS KABAG BINOPSNAL DITPAMOBVIT POLD A GORONTALO	ORONTALO
4	HARSONO, S.H.	KOMPOL	64010670	KABAGOPS POLRES KAUR POLD A BENGKULU	POLD A BENGKULU
5	DODIK WIBOWO, S.H., S.Sos.	AKP	78060203	KASAT NARKOBA POLRES PROBOLINGGO KOTA POLD A JATIM	POLD A JATIM
6	SUPRIJADI, S.E., M.Si.	AKP	73100077	PS KANIT PAMMAT GASUM POLD A SULUT	POLD A SULUT
7	PONTJO SOEDIANTOKO	AKBP	71080343	WADIR PAMOBVIT POLD A KALSEL	POLD A KALSEL
8	Drs. I KETUT YASA GIRI	AKBP	65060737	KABAG BINOPSNAL DITPAMOBVIT POLD A NTB	POLD A NTB
9	EKA YEKTI HANNANTO SENO, S.I.K., M.Si.	AKBP	79080771	KASUBDIT WASTER DITPAMOBVIT POLD A JABAR	POLD A JABAR
10	A.V. MONTUNG, S.H.	AKBP	63040278	KASUBDIT WISATA DITPAMOBVIT POLD A SULUT	POLD A SULUT
11	FERDINAND P RITONGA, S.T.	AKBP	70121144	KASUBDIT WISATA DITPAMOBVIT POLD A KEPRI	POLD A KEPRI
12	ARIEF BUDIMAN, S.H., S.I.K.	AKBP	75120903	KABAG BINOPS DITPAMOBVIT POLD A MALUT	POLD A MALUT
13	FERDINAN PASARIBU, S.H., S.I.K.	KOMBES POL	71020176	DIRPAMOBVIT POLD A PAPUA BARAT	PAPUA BARAT
14	KURNIATI, S.Sos.	AKBP	69050533	KABAG BINOPSNAL DITPAMOBVIT POLD A DIY	OLDA DIY
15	Dra. INDRAYATI	AKBP	67100500	KASUBDIT BINTIBLUH DITBINMAS POLD A BALI	LDA BALI
16	ILLAL, S.Sos.	KOMPOL	66100512	KANIT I SUBDIT PAMWASTER DITPAMOBVIT POLD A SUMSEL	POLD A SUMSEL
17	TUMBOR SINAGA, S.H.	AKP	72110420	PS. KAURMIN SUBDIT PAM WISATA DITPAMOBVIT KORSABHARA BAHARKAM POLRI	BAHARKAM POLRI

18	BUDI YUDANTARA, S.I.K.	AKBP	74040414	WADIR PAMOBVIT POLDA SULBAR	POLDA SULBAR
19	SLAMET RAHARJO, S.H.	AKP	74050174	PANIT I SUBDIT PAMMASTER DITPAMOBVIT POLDA LAMPUNG	LAMPUNG
20	SURAYA, S.H.	AKP	79120958	PANIT I SUBDIT LEMNEG DITPAMOBVIT POLDA BENGKULU	POLDA BENGKULU
21	SITI NAIMAH, S.H.	IPTU	75090740	PS. KAUR TU DITPAMOBVIT POLDA JATENG	POLDA JATENG
22	MUH.ARIF	IPDA	66090085	PA. POLRES TABES POLDA SULSEL	POLDA SULSEL
23	WIKAN TRI PANGARSO, S.H.	AKBP	68050674	KASUBDIT KILAS DITPAMOBVIT POLDA DIY	OLDA DIY
24	Dra. MARIA SOETJIATI	AKBP	67030633	GADIK MADYA PUSDIK SABHARA LEMDIKLAT POLRI	LEMDIKLAT POLRI
25	ABDURRAHMAN, S.Sos.	KOMPOL	74120903	KASUBBAG ANEV BAG BINOPSNAL DITPAMOBVIT POLDA NTB	POLDA NTB
26	ARIF YUNI PURWANTO, S.H., M.H.	AKP	75060678	PS. KA URTU DITPAMOBVIT KORSABHARA BAHARKAM POLRI	BAHARKAM POLRI
27	DELVIA DERITA, S.Kom., M.M.	AKBP	69120508	KABAG JARLAT SPN POLDA SUMBAR	POLDA SUMBAR
28	WIDODO, S.E.	IPTU	74080401	PS. KANIT PAMOBVIT SAT SABHARA POLDA JATIM	POLDA JATIM
29	AGUNG ASMORO	IPDA	79030016	PANIT DITPAMOBVIT POLDA METRO JAYA	POLDA MATRO JAYA
30	DEBBIE NOVIA RIZAL, S.E.	IPDA	81110061	PAMIN URKEU DITPAMOBVIT POLDA SUMBAR	POLDA SUMBAR
31	ARIF FAISOL EFENDI, S.H., M.M.	AKP	79020934	PA. DITPAMOBVIT POLDA MALUT	POLDA MALUT

NO URUT PETIKAN	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN
1	Drs. MOECHGIYARTO, S.H, M.Hum.	KOMISARIS JENDERAL POLSI	62050930	KABAHARKAM POLRI
2	Drs. AHMAD LUMUMBA, S.H.	BRIGADIR JENDERAL POLISI	61100474	DIRPAMOBVIT KORSABHARA BAHARKAM POLRI
1	KUKUH SANTOSO, S.H., S.I.K.	KOMBES POL	71050421	KAPUSDIK SABHARA LEMDIKLAT POLRI
2	Drs. BUDI DERMAWAN	KOMBES POL	63040968	DIREKTUR PAM OBVIT POLDA SUMSEL
3	DRS. H. YUDI SUMARTONO, M.M.	KOMBES POL	66120600	DIREKTUR PAMOBVIT POLDA SULUT
4	Drs. YOZAL ZAEN	KOMBES POL	67100293	DIRPAMOBVIT POLDA SULTRA
5	SUPRAYITNO, S.H., S.I.K.	KOMBES POL	70012128	DIR PAMOBVIT POLDA SULTENG
6	Drs. I. MADE ARDANA, M.M.	KOMBES POL	64100684	DIRPAMOBVIT POLDA SULSEL
7	ACHMAD IKSAN, S.I.K., S.H., M.Si.	KOMBES POL	67100521	DIRPAMOBVIT POLDA SULBAR
8	GATUT KURNIADIN, S.H., S.I.K.	KOMBES POL	73040254	DIRPAMOBVIT POLDA NTB
9	DULFI MUIS, S.H., S.I.K., M.H.	KOMBES POL	69120509	DIR PAM OBVIT POLDA MALUT
10	HARRI SINDU NUGROHO, S.H., M.M.	KOMBES POL	71030207	DIRPAMOBVIT POLDA KEPRI
11	YUSMANJAYA, S.I.K.	KOMBES POL	66050543	DIRPAMOBVIT POLDA KEP BABEL
12	I NYOMAN SUASTRA, S.H.	KOMBES POL	64070860	DIRPAMOBVIT POLDA KALTENG
13	IWAN SONJAYA, S.I.K.	KOMBES POL	72040508	DIRPAMOBVIT POLDA JATIM

14	Drs. HERMAN ISMAIL, M.H.	KOMBES POL	62090690	DIREKTUR DITPAMOBVIT POLDA JAMBI
15	ISTIYONO, S.H.	KOMBES POL	64120862	DIRPAMOBVIT POLDA D.I. YOGYAKARTA
16	STEFANUS SATAKE BAYU SETIANTO, S.I.K., M.Si.	KOMBES POL	68110404	DIRPAMOBVIT POLDA GORONTALO
17	Drs. MOCH SENO PUTRO	KOMBES POL	65020511	KASUBDIT Bhabinkamtibmas Ditbintibmas Korbinmas Baharkam Polri
18	BENTUNG MAHARSOYO, S.I.K., M.H.	AKBP	69050526	KASUBDIT WASTER DITPAMOBVIT Korsabhara Baharkam Polri
19	ACHMADI, S.I.K., M.H.	AKBP	70090409	Wadir Pamobvit Polda DIY
20	JOKO SUPRAYITNO, S.S.T. M.K., S.H.	AKBP	66100574	Wadir Pamobvit Polda Bengkulu
21	Drs. SULAIMAN YS	AKBP	64090304	KASUBDIT WASTER DITPAMOBVIT Polda Aceh
22	Drs. GALIH SAYUDO	AKBP	65040087	Wadir Pamobvit Polda Aceh
23	IRFAN SUSANTO, S. I.K.	AKBP	75061069	GadiK Madya PusdiK Sabhara LemdiKlat Polri
24	WIWIEK DWI ERAWATI, S.H., M.H.	AKBP	69060616	Pamen PusdiK Sabhara LemdiKlat Polri
25	IMET CHAERUDIN TAMSIL	AKBP	72040510	Kabag GadiK PusdiK Sabhara LemdiKlat Polri
26	UMI MARIATI, S.I.K.	AKBP	72120178	KASUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT Polda Jateng
27	MUSNI ARIFIN, S.I.K., M.H.	AKBP	70070793	WadirPamobvit Polda Jateng
28	Dra. MINARTI	AKBP	65060024	KASUBDIT KILAS DITPAMOBVIT Polda Jatim
29	AGAR SUPRIYANTO, S.H.	AKBP	62010954	KASUBDIT WASTER DITPAMOBVIT Polda Jatim

30	SUTRISNO.HR, S.H., S.I.K., M.Si.	AKBP	75040842	WADIR PAMOBVIT POLDA SULSEL
31	Ir. MAREM BASUKI	AKBP	65050889	KASUBDIT VIP DIT PAM OBVIT POLDA SUMSEL
32	M. SYOBIRIN, S.H., M.H.	AKBP	66080034	KASUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SUMSEL
33	ICHWAN, S.H.	AKBP	68020018	KASUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SUMBAR
34	YULI KURNIANTO, S.I.K.	AKBP	78071131	KASUBDITWASTER DITPAMOBVIT POLDA SULUT
35	HUSNI M., S.H.	AKBP	69100453	KASUBDIT LEMNEG DIT PAMOBVIT POLDA SULSEL
36	HICCA A SIREGAR, S.I.K.	AKBP	78051183	KASUBDIT AUDIT DIT PAMOBVIT POLDA RIAU
37	EDWARD, S.H.	AKBP	62040464	GADIK MADYA SPN POLDA RIAU
38	Z. CH. HORMU, S.H.	AKBP	62100332	KASAUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA PAPUA
39	FERRY BOEDHANTO, S.H., S.I.K., M.H.	AKBP	73110413	WADIR PAMOBVIT POLDA NTT
40	ANDI DADY, S.I.K.	AKBP	77110841	KASUBDIT WISATA DITPAMOBVIT POLDA NTB
41	AMIN MUHARJO, S.Sos., M.A.P.	AKBP	71050445	KASUBDIT WASTER DITPAMOBVIT POLDA METRO JAYA
42	ERIK FERDINAND, S.I.K., M.Si.	AKBP	74070769	WADIRPAMOBVIT POLDA METRO JAYA
43	JOKO BINTORO, S.H., S.I.K.	AKBP	73030682	WADIR PAMOBVIT POLDA LAMPUNG
44	SUGENG SUHERMANU WIDODO	AKBP	65070216	KSDT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA LAMPUNG
45	MUHAMMAD AMIR, S.H., M.H.P.	AKBP	64120402	KASUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA KALTIM

46	MEIDIANSON, S.Hut.	AKBP	69050545	KASUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA KALTENG
47	MUHAMMAD ERFAN, S.I.K.	AKBP	74100764	KABAG BINOPSNAL DITPAMOBVIT POLDA KALTENG
48	BUDHI ROCHMAT, S.I.K.	AKBP	73060605	WADIRPAMOBVIT POLDA KALTARA
49	BASTIAN, S.Pd.K.	AKBP	63030617	KASUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA KALBAR
50	EKO WIDODO, A.Md, S.Sos., S.H., M.M.	KOMPOL	65040457	KANIT WISATA 2 DIT PAM OBVIT POLDA JATIM
51	NURNAENI, S.H.	KOMPOL	64040092	KANIT 1 WASTER DITPAMOBVIT POLDA JATIM
52	ARFAN SETIABUDI, S.Sos.	KOMPOL	72090610	KANIT 2 SUBDIT WISATA DIT PAMOBVIT POLDA SUMUT
53	SYAFRI, S.H.	KOMPOL	62090352	KASUBBAG RENMIN DIT PAMOBVIT POLDA RIAU
54	ARNOLIS KOROWA, S.H., M.H.	KOMPOL	62040627	DANYON C PELOPOR NABIRE SATBRIMOB POLDA PAPUA
55	I GEDE NGURAH JONI MAHARDIKA, S.H., S.I.K.	KOMPOL	83061355	KASUBDIT WASTER DITPAMOBVIT POLDA KEPRI
56	JIMMY MIDUK PARULIAN SIAHAAN	KOMPOL	78030915	KASUBBAG ANEV BAG BIN OPS DIT PAMOBVIT POLDA KALTIM
57	H. ROKIM, S.Sos.	KOMPOL	68010386	KANIT 1 SUBDIT VIP DIT PAMOBVIT POLDA KALSEL
58	SRI EKA DHERMAWAN, S.Sos.	KOMPOL	75070955	KABAG REN RES SEKADAU POLDA KALBAR
59	TEDJO SASONO	KOMPOL	66090105	KABAG SUMBA POLRES KAPUAS HULU POLDA KALBAR
60	PENINA WAKE LULU, S.E.	KOMPOL	63030426	KASUBBAG MINOPS BAGBINOPSNAL DITPAMOBVIT POLDA JATIM
61	SRI WAHYUNI WIDODO, S.H.	KOMPOL	64070049	KANIT I SUBDIT WASTER DITPAMOBVIT POLDA JATENG

62	SUMINTO HP, S.I.P., M.H.	KOMPOL	68030005	KANIT 1 SUBDIT VIP DIT PAM OBVIT POLDA JABAR
63	BOHARI. S.H., M.H.	KOMPOL	71040695	KA UNIT 1 SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA JABAR
64	Dra. AJRIAH AG.	KOMPOL	67110513	KANIT II SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA JABAR
65	NAAFI 'ARMAN, S.T., M.H.	KOMPOL	75111029	KABAGOPS POLRESTA YOGYAKARTA POLDA DIY
66	HANNY JUNIANTO, S.H.	KOMPOL	65060475	WAKA POLRES KAUR POLDA BENGKULU
67	JULIANUR SIDIK, S.H., M.H.	KOMPOL	70070093	KANIT 2SUBDIT WISATA DIT PAM OBVIT POLDA BANTEN
68	I MADE SUNARSA, S.H.	KOMPOL	66030412	KANIT 2 SUBDIT WISATA DITPAMOBVIT
69	JUFRIADI.R., S.E., M.Si.	KOMPOL	62030533	KASUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA ACEH

<b>KESTUAN</b>
BAHARKAM POLRI
BAHARKAM POLRI
SABHARA LEMDIKLAT POLRI
POLDA SUMSEL
POLDA SULUT
POLDA SULTRA
POLDA SULTENG
POLDA SULSEL
POLDA SULBAR
POLDA NTB
POLDA MALUT
POLDA KEPRI
POLDA BABEL
POLDA KALTENG
POLDA JATIM

POLDA JAMBI
POLDA DIY
T POLDA GORONTALO
BAHARKAM POLRI
BAHARKAM POLRI
POLDA DIY
POLDA BENGKULU
POLDA ACEH
POLDA ACEH
SABHARA LEMDIKLAT POLRI
SABHARA LEMDIKLAT POLRI
LEMDIKLAT POLRI
POLDA JATENG
POLDA JATENG
POLDA JATIM
POLDA JATIM

POLDA SULSEL
POLDA SUMSEL
POLDA SUMSEL
POLDA SUMBAR
POLDA SULUT
POLDA SULSEL
POLDA RIAU
SPN POLDA RIAU
POLDA PAPUA
POLDA NTT
POLDA NTB
POLDA METRO JAYA
POLDA METRO JAYA
POLDA LAMPUNG
POLDA LAMPUNG
POLDA KALTIM

POLDA KALTENG
POLDA KALTENG
POLDA KALTARA
POLDA KALBAR
POLDA JATIM
POLDA JATIM
POLDA SUMUT
POLDA RIAU
POLDA PAPUA
POLDA KEPRI
POLDA KALTIM
POLDA KALSEL
POLDA KALBAR
POLDA KALBAR
POLDA JATIM
POLDA JATENG

POLDA JABAR
POLDA JABAR
POLDA JABAR
POLDA DIY
POLDA BENGKULU
POLDA BANTEN
DITPAMOBVIT
POLDA ACEH

AUDITOR SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN (SMP) OBJEK VITAL NASIONAL DAN OBJEK TERTENTU 2019

NO URUT PETIKAN	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN
1	Drs. CONDRO KIRONO. M.M., M.Hum.	KOMJEN POL		KABAHARKAM POLRI
2	Drs. BAMBANG GHIRI. S.E.	IRJEN POL		KAKORSABHARA
3	Dr, Drs. ABDUL GOFUR.S.H., M.H.	IRJEN POL		ANJAK UTAMA BAHARKAM POLRI
4	Drs. WAHYUDI HIDAYAT	BRIGJEN POL		DIRPAMOBVIT KORSABHARA BAHARKAM POLRI
5	Drs. ERMI	BRIGJEN POL		ANJAK UTAMA BAHARKAM POLRI
6	Drs. ADE RAHMAT SUHENDI	BRIGJEN POL		KARO RENMIN BAHARKAM POLRI
7	Drs. YOYOK SRINURCAHYO, M.Si	BRIGJEN POL		ANJAK UTAMA ITWASUM POLRI
8	JUNI DUARSAH, S.I.K., M.M.	KOMBES POL	71060407	ANJAK MADYA DITPAMOBVIT
9	HILMAN THAYIB	KOMBES POL	63100800	ANJAK MADYA DITPAMOBVIT

10	M. IFTAH FALADIN, S.H	KOMBES POL	67040498	KASUBDIT VIP DITPAMOBVIT
11	RAHMAD PAMUDJI, S.I.K	KOMBES POL		IRWASDA POLDA SULTRA
12	AGUNG JULIANTO, S.I.K., M.M	KOMBES POL		KA LSP
13	AHMAD SUBARKAH, S.I.K., M.H.	KOMBES POL		KABAG RENMIN KORSABHARA
14	Drs. TONY SINAMBELA, S.H.,M.Si	KOMBES POL		ANJAK MADYA DITPAMOBVIT
15	Drs. DWI GUNAWAN	KOMBES POL		ANJAK MADYA BIRO WABPROF
16	Drs. GUNTUR SETYANTO	KOMBES POL		SES PUSLITBANG
17	Drs. PRATIKNO, M.M	KOMBES POL		KABAG LABTEKPOL PUSLITBANG POLRI
18	Drs. ERI SAFARI, S.H., M.M	KOMBES POL		KABAG KERMADIKLAT ROBINDIKLAT LAMDIKLAT POLRI
19	Drs. DOLIFAR MANURUNG, S.I.K	KOMBES POL		DIRPAMOBVIT POLDA RIAU
20	Drs. UMARDANI, M.Si	KOMBES POL		DIRBINMAS POLDA METRO JAYA

21	SUBANDRIYA, S.H.M.H	KOMBES POL		ANJAK MADYA DITPAMOBVIT
22	Drs. RUSLAN, S.H., M.H	KOMBES POL		KASUBDIT BIN DALMAS DIT SAMAPTA
23	Drs. MASHUDI	KOMBES POL		ANJAK MADYA DIT SAMAPTA
24	Drs. ARIDAN JEREMIA ROEROE	KOMBES POL		KABAG OPSNALEV KORSABHARA
25	GUNAWAN PRIJAMBODO, S.I.K	KOMBES POL		ANJAK MADYA KORBINMAS
26	Drs. MARZUKI ALI BASYAH, M.M	KOMBES POL		IRBID ITWIL IV ITWASUM
27	Drs. H. DEDY SETIABUDI	KOMBES POL		KABAG JIANSIS ROJIANSTRA SOPS POLRI
28	Drs. SOEMARNO, M.H	KOMBES POL		ANJAK MADYA DITPAMOBVIT
29	Drs. ARIEF PRAPTO, S, S.H., S.I.K., M.M	KOMBES POL		ANJAK MADYA BID PJR KORLANTAS POLRI
30	Ir. DEDI MURDIANA, S.St., M.K	AKBP		KSB PERS BAG RENMIN KORSABHARA
31	HENDRY SUZIANTO, S.E	AKBP		KABAG BIN OPS RO OPS POLDA BENGKULU

32	SUHARTONO, S.T	AKBP		KSB LOG BAGRENMIN KORSABHARA
33	MOCHAMAD SOENARDI, S.I.K., M.Si	AKBP		KASUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA JATENG
34	UNTUNG MEDIYANTO, S.H			
35	Dr. MIFTAH HADI SAFII, S.I.K., M.I.K	KOMPOL		STAFF STIK
36	DODIK SUSIANTO, S.I.K	KOMPOL		KASI VERIFIKASI SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT
37	EVA SHINTA, S.Sos., M.Si	KOMPOL		PS. KASI PAMSUS SUBDIT HARTIBUM DITSAMAPTA
38	SHANDY MARDIYANSYAH, S.E., S.I.K	AKP		PS.PAUR I SIE VERIFIKASI SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT KORSABHARA
39	WASIS MUKTI WIBOWO, S.H	AKBP		KASUBDIT WASTER DITPAMOBVIT POLDA NTB
40	YUSTIARI, S.H	PEMBINA		KAURMIN SUBDIT PAMMASTER DITPAMOBVIT
41	Ir. DJASMAN SENO			
42	AHMAD IBRAHIM			

43	ISKANDARSYAH, S.Kom			
44	BUDI KARYONO, S.H	AKBP		KS B DATA BAG ANEV ROBINOPS
45	Dra. HARINING TYASWATI	AKBP		KS B LOG BAGRENMEN KORBINMAS

<b>KESATUAN</b>
BAHARKAM POLRI
KORSABHARA
BAHARKAM POLRI
KORSABHARA
BAHARKAM POLRI
BAHARKAM POLRI
ITWASUM POLRI
KORSABHARA
KORSABHARA

KORSABHARA
POLDA SULTRA
LEMDIKLAT POLRI
KORSABHARA
KORSABHARA
DIV PROPAM
PUSLITBANG
PUSLITBANG
LEMDIKLAT POLRI
POLDA RIAU
POLDA METRO JAYA

KORSABHARA
KORSABHARA
KORSABHARA
KORSABHARA
KORBINMAS
ITWASUM POLRI
SOPS POLRI
KORSABHARA
KORLANTAS
KORSABHARA
BENGKULU

KORSABHARA
POLDA JATENG
LEMDIKLAT POLRI
KORSABHARA
KORSABHARA
KORSABHARA
POLDA NTB
KORSABHARA



MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI**  
Nomor: Kep/ 540 /IX/2019

**tentang**

**HASIL UJI KOMPETENSI AUDITOR SISPAMOBVITNAS DAN  
OBJEK TERTENTU T.A. 2019 DI PUSDIK SABHARA LEMDIKLAT POLRI**

**KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI**

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka penjaminan mutu Sistem Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu, maka perlu diselenggarakan uji kompetensi Auditor Sistem Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu di lingkungan Polri oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Lemdiklat Polri;  
2. bahwa untuk menerbitkan sertifikat kompetensi Auditor Sistem Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu maka perlu ditetapkan peserta uji yang dinyatakan kompeten dalam menjalankan tugasnya;  
3. bahwa untuk kepentingan penerbitan sertifikat dimaksud, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;  
3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu;

5. Peraturan .....

5. Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Audit Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu;
6. Keputusan Direktur Pamobvit Korsabhabara Baharkam Polri Nomor: Kep/33/IX/2017 tanggal 15 September 2017 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Auditor Sispam Obvitnas dan Objek Tertentu yang Telah Deregistrasi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Memperhatikan: saran dan pertimbangan dari pembina fungsi, pelaksana serta pengguna hasil uji kompetensi.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI TENTANG HASIL UJI KOMPETENSI AUDITOR SISPAMOBVITNAS DAN OBJEK TERTENTU T.A. 2019 DI PUSDIK SABHARA LEMDIKLAT POLRI.**

1. peserta uji kompetensi sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan **Kompeten (K)** pada uji kompetensi Auditor Sistem Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu T.A. 2019 di Baharkam Polri;
2. peserta uji kompetensi sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan **Belum Kompeten (BK)** pada uji kompetensi Auditor Sistem Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu T.A. 2019 di Baharkam Polri;
3. hal-hal lain yang berkaitan dengan keputusan uji kompetensi yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dalam keputusan tersendiri;
4. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
5. keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal:

5 September

2019

**KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI**



Kepada Yth:

1. Kabaharkam Polri.
2. Para Karo Lemdiklat Polri.
3. Ka LSP Lemdiklat Polri.

Tembusan:

1. Wakapolri.
2. Irwasum Polri.
3. Asrena Kapolri.
4. As SDM Kapolri.

PESERTA YANG DINYATAKAN KOMPETEN  
PADA UJI KOMPETENSI AUDITOR SISPAMOBVITNAS DAN  
OBJEK TERTENTU T.A. 2019 DI PUSDIK SABHARA LEMDIKLAT POLRI

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN
1	2	3	4
1.	KUKUH SANTOSO, S.H., S.I.K.	KOMBES POL/ 71050421	KAPUSDIK SABHARA LEMDIKLAT POLRI
2.	Drs. BUDI DERMAWAN	KOMBES POL/ 63040968	DIREKTUR PAM OBVIT POLDA SUMSEL
3.	DRS. H. YUDI SUMARTONO, M.M.	KOMBES POL/ 66120600	DIREKTUR PAMOBVIT POLDA SULUT
4.	Drs. YOZAL ZAEN	KOMBES POL/ 67100293	DIRPAMOBVIT POLDA SULTRA
5.	SUPRAYITNO, S.H., S.I.K.	KOMBES POL/ 70012128	DIR PAMOBVIT POLDA SULTENG
6.	Drs. I. MADE ARDANA, M.M.	KOMBES POL/ 64100684	DIRPAMOBVIT POLDA SULSEL
7.	ACHMAD IKSAN, S.I.K., S.H., M.Si.	KOMBES POL/ 67100521	DIRPAMOBVIT POLDA SULBAR
8.	GATUT KURNIADIN, S.H., S.I.K.	KOMBES POL/ 73040254	DIRPAMOBVIT POLDA NTB
9.	DULFI MUIS, S.H., S.I.K., M.H.	KOMBES POL/ 69120509	DIR PAM OBVIT POLDA MALUT
10.	HARRI SINDU NUGROHO, S.H., M.M.	KOMBES POL/ 71030207	DIRPAMOBVIT POLDA KEPRI
11.	YUSMANJAYA, S.I.K.	KOMBES POL/ 66050543	DIRPAMOBVIT POLDA KEP BABEL
12.	I NYOMAN SUASTRA, S.H.	KOMBES POL/ 64070860	DIRPAMOBVIT POLDA KALTENG
13.	IWAN SONJAYA, S.I.K	KOMBES POL/ 72040508	DIRPAMOBVIT POLDA JATIM
14.	DRS. HERMAN ISMAIL, M.H.	KOMBES POL/ 62090690	DIREKTUR DITPAMOBVIT POLDA JAMBI
15.	ISTIYONO, S.H.	KOMBES POL/ 64120862	DIRPAMOBVIT POLDA D.I. YOGYAKARTA
16.	STEFANUS SATAKE BAYU SETIANTO, S.I.K., M.Si.	KOMBES POL/ 68110404	DIRPAMOBVIT POLDA GORONTALO
17.	Drs. MOCH SENO PUTRO	KOMBES POL/ 65020511	KASUBDIT BHABINKAMTIBMAS DITBINTIBMAS KORBINMAS BAHARKAM POLRI
18.	BENTUNG MAHARSOYO, S.I.K., M.H.	AKBP/ 69050526	KASUBDIT WASTER DITPAMOBVIT

19. ACHMADI. . .

1	2	3	4
19.	ACHMADI, S.I.K., M.H.	AKBP/ 70090409	WADIR PAMOBVIT POLDA DIY
20.	JOKO SUPRAYITNO, S.S.T. M.K., S.H.	AKBP/ 66100574	WADIR PAMOBVIT POLDA BENGKULU
21.	Drs. SULAIMAN YS	AKBP/ 64090304	KASUBDIT WASTER DITPAMOBVIT POLDA ACEH
22.	Drs. GALIH SAYUDO	AKBP/ 65040087	WADIR PAMOBVIT POLDA ACEH
23.	IRFAN SUSANTO, S.I.K.	AKBP/ 75061069	GADIK MADYA PUSDIK SABHARA LEMDIKLAT POLRI
24.	WIWIEK DWI ERAWATI, S.H., M.H.	AKBP/ 69060616	PAMEN PUSDIK SABHARA LEMDIKLAT POLRI
25.	IMET CHAERUDIN TAMSIL	AKBP/ 72040510	KABAG GADIK PUSDIK SABHARA
26.	UMI MARIATI, S.I.K.	AKBP/ 72120178	KASUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA JATENG
27.	MUSNI ARIFIN, S.I.K., M.H.	AKBP/ 70070793	WADIR PAMOBVIT POLDA JATENG
28.	Dra. MINARTI	AKBP/ 65060024	KASUBDIT KILAS DITPAMOBVIT POLDA JATIM
29.	AGAR SUPRIYANTO, S.H.	AKBP/ 62010954	KASUBDIT WASTER DITPAMOBVIT POLDA JATIM
30.	SUTRISNO.HR, S.H., S.I.K., M.Si.	AKBP/ 75040842	WADIR PAMOBVIT POLDA SULSEL
31.	Ir. MAREM BASUKI	AKBP/ 65050889	KASUBDIT VIP DIT PAMOBVIT POLDA SUMSEL
32.	M SYOBIRIN, S.H., M.H.	AKBP/ 66080034	KASUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SUMSEL
33.	ICHWAN, S.H.	AKBP/ 68020018	KASUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SUMBAR
34.	YULI KURNIANTO, S.I.K.	AKBP/ 78071131	KASUBDIT WASTER DITPAMOBVIT POLDA SULUT
35.	HUSNI M., S.H.	AKBP/ 69100453	KASUBDIT LEMNEG DIT PAMOBVIT POLDA SULSEL
36.	HICCA A SIREGAR, S.I.K.	AKBP/ 78051183	KASUBDIT AUDIT DIT PAMOBVIT POLDA RIAU
37.	EDWARD, S.H.	AKBP/ 62040464	GADIK MADYA SPN POLDA RIAU
38.	Z. CH. HORMU, S.H.	AKBP/ 62100332	KASAUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA PAPUA
39.	FERRY BOEDHIANTO, S.H., S.I.K., M.H.	AKBP/ 73110413	WADIR PAMOBVIT POLDA NTT
40.	ANDI DADY, S.I.K.	AKBP/ 77110841	KASUBDIT WISATA DITPAMOBVIT POLDA NTB

1	2	3	4
41.	AMIN MUHARJO, S.Sos., M.A.P.	AKBP/ 71050445	KASUBDIT WASTER DITPAMOBVIT POLDA METRO JAYA
42.	ERIK FERDINAND, S.I.K., M.Si.	AKBP/ 74070769	WADIRPAMOBVIT POLDA METRO JAYA
43.	JOKO BINTORO, S.H., S.I.K.	AKBP/ 73030682	WADIR PAMOBVIT POLDA LAMPUNG
44.	SUGENG SUHERMANU WIDODO	AKBP/ 65070216	KSDT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA LAMPUNG
45.	MUHAMMAD AMIR, S.H., M.H.P.	AKBP/ 64120402	KASUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA KALTIM
46.	MEIDIANSON, S.Hut.	AKBP/ 69050545	KASUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA KALTENG
47.	MUHAMMAD ERFAN, S.I.K.	AKBP/ 74100764	KABAGBINOPSNAL DITPAMOBVIT POLDA KALTENG
48.	BUDHI ROCHMAT, S.I.K.	AKBP/ 73060605	WADIRPAMOBVIT POLDA KALTARA
49.	BASTIAN, S.Pd.K.	AKBP/ 63030617	KASUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA KALBAR
50.	EKO WIDODO, A.Md, S.Sos., S.H., M.M.	KOMPOL/65040457	KANIT WISATA 2 DIT PAM OBVIT POLDA JATIM
51.	NURNAENI, S.H.	KOMPOL/64040092	KANIT 1 WASTER DITPAMOBVIT POLDA JATIM
52.	ARFAN SETIABUDI, S.Sos.	KOMPOL/72090610	KANIT 2 SUBDIT WISATA DIT PAMOBVIT POLDA SUMUT
53.	SYAFRI, S.H.	KOMPOL/62090352	KASUBBAG RENMIN DIT PAMOBVIT POLDA RIAU
54.	ARNOLIS KOROWA, S.H., M.H.	KOMPOL/62040627	DANYON C PELOPOR NABIRE SATBRIMOB POLDA PAPUA
55.	I GEDE NGURAH JONI MAHARDIKA, S.H., S.I.K.	KOMPOL/83061355	KASUBDIT WASTER DITPAMOBVIT POLDA KEPRI
56.	JIMMY MIDUK PARULIAN SIAHAAN	KOMPOL/78030915	KASUBBAG ANEV BAG BIN OPS DIT PAMOBVIT POLDA KALTIM
57.	H. ROKIM, S.Sos.	KOMPOL/68010386	KANIT 1 SUBDIT VIP DIT PAMOBVIT POLDA KALSEL
58.	SRI EKA DHERMAWAN, S.Sos	KOMPOL/75070955	KABAG REN RES SEKADAU POLDA KALBAR
59.	TEDJO SASONO	KOMPOL/66090105	KABAG SUMBA POLRES KAPUAS HULU POLDA KALBAR
60.	PENINA WAKE LULU, S.E.	KOMPOL/63030426	KASUBBAG MINOPS BAGBINOPSNAL DITPAMOBVIT POLDA JATIM

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KALEMDIKLAT POLRI  
NOMOR : KEP / 540 /IX/ 2019  
TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2019

1	2	3	4
61.	SRI WAHYUNI WIDODO, S.H.	KOMPOL/64070049	KANIT I SUBDIT WASTER DITPAMOBVIT POLDA JATENG
62.	SUMINTO HP., S.I.P., M.H.	KOMPOL/68030005	KANIT 1 SUBDIT VIP DIT PAM OBVIT POLDA JABAR
63.	BOHARI. S.H., M.H.	KOMPOL/71040695	KA UNIT 1 SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA JABAR
64.	Dra. AJRIAH AG.	KOMPOL/67110513	KANIT II SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA JABAR
65.	NAAFI 'ARMAN, S.T., M.H.	KOMPOL/75111029	KABAGOPS POLRESTA YOGYAKARTA POLDA DIY
66.	HANNY JUNIANTO, S.H.	KOMPOL/65060475	WAKA POLRES KAUR POLDA BENGKULU
67.	JULIANUR SIDIK, S.H., M.H.	KOMPOL/70070093	KANIT 2SUBDIT WISATA DIT PAM OBVIT POLDA BANTEN
68.	I MADE SUNARSA, S.H.	KOMPOL/66030412	KANIT 2 SUBDIT WISATA DITPAMOBVIT
69.	JUFRIADI.R., S.E., M.Si.	KOMPOL/62030533	KASUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA ACEH

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal:

5 September

2019

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI



Drs. ARIEF SULISTYANTO, M.Si.  
KOMISARIS JENDERAL POLISI

MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

---



KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI  
Nomor: Kep/ 228 /VI/2020

tentang

HASIL UJI KOMPETENSI AUDITOR SISPAMOBVITNAS DAN  
OBJEK TERTENTU T.A. 2020 DI HOTEL DHARMEIN JAKARTA  
TANGGAL 4 S.D. 7 MARET 2020

---

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka penjaminan mutu Sistem Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu, maka perlu diselenggarakan uji kompetensi Auditor Sistem Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu di lingkungan Polri oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Lemdiklat Polri;

2. bahwa untuk menerbitkan sertifikat kompetensi Auditor Sistem Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu maka perlu ditetapkan peserta uji yang dinyatakan kompeten dalam menjalankan tugasnya;
3. bahwa untuk kepentingan penerbitan sertifikat dimaksud, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu;

5. Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Audit Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu;

6. Keputusan .....

6. Keputusan Direktur Pamobvit Korsabhabara Baharkam Polri Nomor: Kep/33/IX/2017 tanggal 15 September 2017 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Auditor Sispam Obvitnas dan Objek Tertentu yang telah diregistrasi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Memperhatikan: saran dan pertimbangan dari pembina fungsi, pelaksana serta pengguna hasil uji kompetensi.

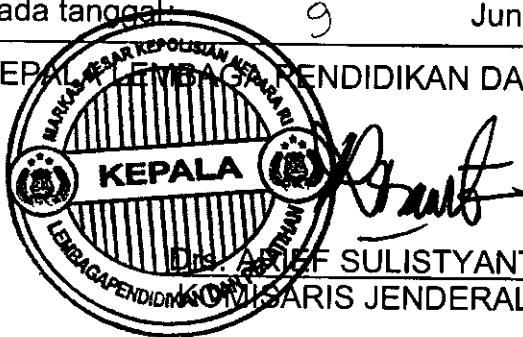
**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI TENTANG HASIL UJI KOMPETENSI AUDITOR SISPAMOBVITNAS DAN OBJEK TERTENTU T.A. 2020 DI HOTEL DHARMEIN JAKARTA TANGGAL 4 S.D. 7 MARET 2020.**

1. peserta uji kompetensi sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan Kompeten (K) pada uji kompetensi Auditor Sistem Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu T.A. 2019 di Hotel Dharmein Jakarta;
2. hal-hal lain yang berkaitan dengan keputusan uji kompetensi yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dalam keputusan tersendiri;
3. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
4. keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta  
 pada tanggal: 9 Juni 2020

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI



Kepada Yth:

1. Kabaharkam Polri.
2. Para Karo Lemdiklat Polri.
3. Ka LSP Lemdiklat Polri.

Tembusan:

1. Wakapolri.
2. Irwasum Polri.
3. Asrena Kapolri.
4. As SDM Kapolri.

PESERTA YANG DINYATAKAN KOMPETEN  
PADA UJI KOMPETENSI AUDITOR SISPAMOBVITNAS DAN OBJEK TERTENTU T.A. 2020  
DI HOTEL DHARMEIN JAKARTA TANGGAL 4 S.D. 7 MARET 2020

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN
1	2	3	4
1.	Drs. AGUS ANDRIANTO, S.H., M.H.	KOMJEN POL	KABAHARKAM POLRI
2.	Drs. SUTRISNO YUDI HERMAWAN	IRJEN POL	AS SDM KAPOLRI
3.	Drs. ILHAM SALAHUDIN, S.H., M.Hum.	IRJEN POL	KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH
4.	Drs. BASUKI, M.M.	IRJEN POL	PATI LEMDIKLAT POLRI PENUGASAN LEMHANNAS RI SEBAGAI TENAGA AHLI PENGAJAR
5.	Drs. IMMANUEL LAROSA	IRJEN POL	TENAGA AHLI PENGAJAR BIDANG KEPENDUDUKAN LEMHANNAS RI
6.	Drs. RUDOLF A. RODJA	IRJEN POL	ANALIS KEBIJAKAN UTAMA BIDANG SABHARA BAHARKAM POLRI
7.	Drs. I MADE WIRAWIBAWA, S.H.	BRIGJEN POL	PATI ANJAK KORBRIMOB POLRI
8.	Dr. Drs. MUH ELIA WASONO MASTOKO, S.H., M.M.	BRIGJEN POL	SESDEP V BIDANG KAMTIBMAS KEMENKO POLHUKAM R.I.
9.	Drs. ANDI LOEDIANTO, M.H.	BRIGJEN POL	INSPEKTUR 1 ITTAMA BNN R.I.
10.	Dr. ERIADI, S.H., M.Si.	BRIGJEN POL	KABAG PROGRAM DAN EVALUASI DEPUTY 5 KAMTIBMAS KEMENKO POLHUKAM
11.	Drs. ANEKA PRISTAFUDDIN, M.H.	BRIGJEN POL	WAKAPOLDA KALSEL
12.	Drs. MULYATNO, S.H., M.M.	BRIGJEN POL	DIRPROGRAM SARJANA STIK-PTIK LEMDIKLAT POLRI
13.	Drs. SUTEKAD MUJIRAHARJO, S.H., M.H.	KOMBES POL	DIRPAMOBVIT POLDА DIY
14.	H. OSMAN PUTRA NEGARA, S.E., M.Ap.	LETKOL (PURN)	PURNAWIRAWAN TNI-AD
15.	AGUS TRIATMAJA, S.H., S.I.K.	KOMBES POL/ 73080521	DIRPAMOBVIT POLDА KEPRI
16.	ANDY ERVYN, S.I.K., M.H.	KOMBES POL/ 73020675	DIRBINMAS POLDА MALUKU
17.	ASEP TEDDY NURRASYAH, S.I.K., M.M.	KOMBES POL/ 69110334	DIRPAMOBVIT POLDА JATIM

1	2	3	4
18.	DEDI RAHMAN DAYAN S.I.K., M.Si.	KOMBES POL/ 71050414	AUDITOR SISPAMOBVITNAS TK.III BHAYANGKARA BAHARKAM POLRI
19.	Drs. SUPARYONO	KOMBES POL/ 62060937	DIRPAMOBVIT POLDA JATENG
20.	IDIL TABRANSYAH, S.H., M.M.	KOMBES POL/ 68010544	DOSUT STIK-PTIK LEMDIKLAT POLRI
21.	MOHAMMAD HIDAYAT B., S.H., S.I.K., M.H.	KOMBES POL/ 73020262	DIRPAMOBVIT POLDA KALTIM
22.	MUHAMMAD ALDIAN, S.I.K., M.H.	KOMBES POL/ 74050714	DIREKTUR PAM OBVIT POLDA KALTARA
23.	WIRDENIS HERMAN, S.I.K., M.Si., M.H.	KOMBES POL/ 68050400	DIRPAMOBVIT POLDA MALUKU
24.	ACHMAD FAUZI, S.I.K.	KOMBES POL/ 71030324	ANALIS KEBIJAKAN KORSHABARA BAHARKAM POLRI
25.	Drs. PRIO SOEKOTJO	KOMBES POL/ 64040913	KABAG SUMDA RORENMIN BAHARKAM POLRI
26.	RATNA SETIAWATI, S.H.	KOMBES POL/ 68040524	TUTOR UTAMA LEMDIKLAT POLRI
27.	Drs. SYAHRI GUNAWAN, M.H.	KOMBES POL/ 63110659	IRWASDA POLDA JABAR
28.	BAYU, S.I.K.	KOMBES POL/ 67050522	AUDITOR ITWIL I ITWASUM POLRI
29.	NANANG PURNOMO, S.H., M.H.	KOMBES POL/ 66110477	ANJAK BINMAS BAHARKAM POLRI
30.	MOSYAN NIMITCH, S.I.K., M.H.	KOMBES POL/ 68020484	DIREKTUR PAM OBVIT POLDA GORONTALO
31.	ANE KRISTINA, S.A.P.	KOMBES POL/ 67010338	ANJAK PADA BIROJEMENGAR SRENA POLRI
32.	ABI DARRIN, S.H., M.H.	KOMBES POL/ 68030326	DIRPAMOBVIT POLDA NTB
33.	PULUNG ROHMADIANTO, S.H.	KOMBES POL/ 65070694	AUDITOR OBVITNAS DITPAM OBVIT KORSABHARA BAHARKAM POLRI
34.	Drs. SOEMARNO, M.H.	KOMBES POL/ 67040238	ANJAK MADYA DITPAMOBVIT KORSABHARA BAHARKAM POLRI
35.	Drs. H MAMAN HERMAWAN, M.H.	KOMBES POL/ 64120859	KASUBDIT HARTIBUM DIT SAMAPTA KORSABHARA BAHARKAM POLRI
36.	Drs. R. DJAROD PADA KOVA HAPSORO, M.H.	KOMBES POL/ 65050771	ANJAK MADYA KORSABHARA BAHARKAM POLRI
37.	Drs. ARIEF YULIMAN S.	KOMBES POL/ 63060896	KASUBDIT DITPAMOBVIT PAMWASTER KORSABHARA BAHARKAM POLRI
38.	Drs. YOYOK SUBAGIONO, S.H., M.Si.	KOMBES POL/ 62020906	ANJAK STIK-PTIK LEMDIKLAT POLRI

1	2	3	4
39.	Drs. HENDI HANDOKO, M.M.	KOMBES POL/ 63060963	KABAG OPSNALEV KORBINMAS BAHARKAM POLRI
40.	Drs. MARTINUS SITOMPUL	KOMBES POL/ 65030455	KABAG ANEV BAHARKAM POLRI
41.	Drs. SUGENG, S.H., S.I.K., M.H.	KOMBES POL/ 68203169	DIR PAMOBVIT POLD A PAPUA
42.	Drs. TJAHYONO SAPUTRO	KOMBES POL/ 69100249	KABAG YAN INFIDOK ROPID DIVHUMAS POLRI
43.	AAP SINWAN YASIN, S.I.K., M.H.	AKBP/76040542	WADIR SAMAPTA POLD A KALTARA
44.	ARNIS SYAFNI YANTI, S.E.,M.M.	AKBP/73090635	KASUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLD A SUMUT
45.	Drs. DARMONO, S.Pd., M.Si.	AKBP/68120589	WADIR PAMOBVIT POLD A SULTRA
46.	DR BAYU SUSENO, S.H., S.I.K., M.M., M.H.	AKBP/80051250	KASUBBAG ADMINPOL PRODI S3 STIK PTIK LEMDIKLAT POLRI
47.	Dr. BERIDIANSYAH, S.H., M.H.	AKBP/74030673	DANDEN GEGANA SATBRIMOB POLD A JAMBI
48.	Dra. NI WAYAN SRI YIDAYATNI WIRAWARI, S.I.K.	AKBP/65050115	WADIR BINMAS DITBINMAS POLD A BALI
49.	H.HERMAN, S.H	AKBP/64040221	KASUBDIT VIP DITPAMOBVIT POLD A JAMBI
50.	JULISA KUSUMOWARDONO, S.I.K., M.Si.	AKBP/76070936	WADIRPOLAIRUD POLD A KALTENG
51.	RADIANT, S.I.K., M.Hum.	AKBP/74050747	WADIR PAMOBVIT POLD A SULAWESI SELATAN
52.	RAJA ATHUR LUMONGGA S, S.I.K.	AKBP/77080554	WADIR PAMOBVIT POLD A MALUKU
53.	RAYMUNDUS ANDHI HEDIANTO, S.I.K.	AKBP/75010843	KABAG BINOPS ROOPS POLD A MALUKU
54.	SAMUEL FAJARINTO DWI PAMBUDI, S.I.K	AKBP/76020443	WAKIL DIREKTUR PAMOBVIT POLD A BANTEN
55.	SYAHRIL SAHARDA, S.I.K., M.Si.	AKBP/73120840	WADIRPAMOBVIT POLD A KALBAR
56.	YAYAT RUHIYAT, S.I.K.	AKBP/76010857	WADIR PAMOBVIT POLD A BENGKULU
57.	DRH. TRI RINA NOVIYANTI, S.I.P., M.I.P.	AKBP/68110462	KASUBDIT VIP DITPAMOBVIT POLD A DIY
58.	NUR SANTIKO, S.I.K., M.H.	AKBP/76090774	WADIRBINMAS POLD A KALTARA
59.	SUTAN GINTING, S.I.K., M.H.	AKBP/74010357	KASI FAJASPM SUBDIT BINKAMSA DITBINPOTMAS KORBINMAS BAHARKAM POLRI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KALEMDIKLAT POLRI  
NOMOR : KEP/ 228 /VI/2020  
TANGGAL: 9 JUNI 2020

1	2	3	4
60.	ANDY MULYADI, S.E.	PENATA TK I/ 19770707200801 1001	PAUR I SIE AUDIT SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT KORSABHARA BAHARKAM POLRI
61.	Drs. ZAINAL ABIDIN	PENATA TK I/ 19650309198503 1002	KASI AUDIT SUBDIT AUDIT SISPAMOBVITNAS DITPAMOBVIT KORSABHARA BAHARKAM POLRI
62.	DELFITA, S.Kom.	AKBP/63050397	DOSEN MADYA STIK-PTIK LEMDIKLAT POLRI
63.	HENGKY PRAMUDYA, S.I.K.	AKBP/74030662	WADIR PAMOBVIT POLDA BALI
64.	EKO BUDHI PURWONO, S.I.K.	AKBP/72040503	WADIR SAMAPTA DITSAMAPTA POLDA KEPRI
65.	DR. HANJAYA FATAH, M.MPd.	AKBP/70110336	GADIK MADYA PUSDIKMIN LEMDIKLAT POLRI
66.	Dra. YUDHIA DEWI, M.Si.	AKBP/62060980	KASUBBAG LAPGARSUS ROJEMENGAR SRENA POLRI
67.	IRWAN ANDY PURNAMAWAN, S.I.K.	AKBP/80041234	KASUBDIT GAKKUM DITPOLAIR POLDA JAMBI
68.	JANED DONAL HESTON LUMBANTOBING, S.T.	AKBP/71030366	KABAGBINOPSNAL DITPAMOBVIT POLDA KALTENG
69.	HARIYATMOKO, S.I.K., M.H.	AKBP/73020682	KASUBDIT WISATA DITPAMOBVIT POLDA SUMUT
70.	HADI SUTJIPTO, S.Kom.	AKBP/68090399	KASUBBAG MANAJEMEN MUTU LSP LEMDIKLAT POLRI
71.	ILPA SISWANTO, S.H.	AKBP/75010879	KASUBDIT WISATA DIT PAMOBVIT POLDA SUMBAR
72.	BUDI UTOMO, S.I.K.	AKBP/75120904	WADIR PAMOBVIT POLDA SUMSEL
73.	Drs. DWI SANTOSO	AKBP/63121118	PAMEN BIRO SDM POLDA SUMSEL
74.	AWAN NARMAWANI, S.H., M.M.	KOMPOL/ 64080801	KASSUBAGMINOSPNAL BAGBINOPS DITPAMOBVIT POLDA JATENG
75.	GUNADI, S.A.P., M.M.	KOMPOL/ 71010438	KASUBDIT PENGAMANAN ASET DAN OBYEK VITAL DITPAMOBVIT KORSABHARA BAHARKAM POLRI
76.	JUYANTO, S.H., M.H.	KOMPOL/ 68070520	PS. KASUBDIT VIP DITPAMOBVIT POLDA KALTENG
77.	MOCHAMAD FADIL, S.T.	KOMPOL/ 68030093	KANIT I SUBDIT WISATA DITPAMOBVIT POLDA JATIM
78.	RAHMAWATI GENDA, S.Sos., M.Si.	KOMPOL/ 71060487	KANIT 1 SUBDIT WISATA DITPAMOBVIT POLDA SULSEL
79.	SRI YULIATI, S.H., M.H.	KOMPOL/ 68070007	KASUBAGRENMIN DITPAMOBVIT POLDA JATIM

1	2	3	4
80.	WAHYU BASUKI, S.I.K.	KOMPOL/ 82121239	KAPOLSEK UJUNG PANDANG POLRESTABES MAKASSAR POLDAM SULSEL
81.	HERYANTO, S.E.	AKBP/75111021	KASUBDIT DALMAS DITSAMAPTA POLDAM KEPRI
82.	SULEMAN, S.Ag.	KOMPOL/ 68050686	KANIT 3 SUBDIT VIP DITPAMOBVIT POLDAM JAMBI
83.	I WAYAN SUTEJA, S.H.	KOMPOL/ 66030211	KANIT 2 WASTER DIT PAMOBVIT POLDAM NTB
84.	RICA REPLIKA SIREGAR, S.H., S.I.K.	AKP/86031888	PAUR MINPERS SUBBAGPERS BAGRENMIN KORSABHARA BAHARKAM POLRI
85.	YULI ASTITI, S.H.	AKP/71070116	PS. KAURMIN BAGRENMIN KORSABHARA BAHARKAM POLRI
86.	BAMBANG ASKAR SODIQ, S.H., M.H.	AKP/75081123	KOORSPRI KABAHARKAM POLRI
87.	SUSI NOVI ANDRIYANI, S.E.	PENATA TK I/ 19831123200912 2001	KAURMIN SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT KORSABHARA BAHARKAM POLRI
88.	MAHFUD FAHRUR ROZI, S.E.	PENATA TK I/ 19770605200912 1001	PAUR II SIE AUDIT SUBDIT AUDIT SISPAMOBVITNAS DITPAMOBVIT KORSABHARA BAHARKAM POLRI

Ditetapkan di: Jakarta  
pada tanggal

9

2020

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI



DIS. MARIEF SULISTYANTO, M.Si.  
KOMISARIS JENDERAL POLRI

BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI  
DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL

DAFTAR NAMA PESERTA YANG DINYATAKAN KOMPETEN  
DALAM SIDANG KOMITE DI LSP PADA HARI RABU TANGGAL 15 APRIL 2020  
UNTUK PESERTA SERTIFIKASI KOMPETENSI AUDITOR  
SISPAMOBVITNAS DAN OBYEK TERTENTU T.A. 2020  
DI HOTEL BOUTIQUE TANGGAL 4 s.d. 7 MARET 2020

---

NO	NAMA	PERUSAHAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	BUDI WIJANARKO	PT. PEGASUS LINTAS BUANA	MEMENUHI SYARAT
2	APRI RIYANTO	PT. PURA NUSAPERSADA	MEMENUHI SYARAT
3	PETRUS HENDRI NUR TRISNA PUTRA	PT. PURA NUSAPERSADA	MEMENUHI SYARAT
4	ARDIAN PRASETYO	PT. BUMI SUKSESINDO	MEMENUHI SYARAT
5	DHEVI INDRAWATI	PT. BUMI SUKSESINDO	MEMENUHI SYARAT
6	ANDRIYANTO TEGUH WIBOWO	PT. BUMI SUKSESINDO	MEMENUHI SYARAT
7	PANJI BANGUN BASKORO	PT. NAWAKARA PERKASA NUSANTARA	MEMENUHI SYARAT
8	M. NURULI KHALIQ	PT. NAWAKARA PERKASA NUSANTARA	MEMENUHI SYARAT
9	DIANTO NUR CAHYO	PT. NAWAKARA PERKASA NUSANTARA	MEMENUHI SYARAT
10	DIAH PRASETYANINGTYAS	PT. NAWAKARA PERKASA NUSANTARA	MEMENUHI SYARAT
11	TRI WIBOWO	PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)	MEMENUHI SYARAT
12	RIAS NUR WULANDARI	PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)	MEMENUHI SYARAT
13	TAUFIK HIDAYAT	PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)	MEMENUHI SYARAT
14	EDY SANTOSA	PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)	MEMENUHI SYARAT
15	ERWIN EKA SYAHPUTRA	PT. PUPUK SRIWIDJAJA	MEMENUHI SYARAT
16	A. RAHMAN DANI, SE	PT. PUPUK SRIWIDJAJA	MEMENUHI SYARAT
17	BOBI OHOIWUTUN	PT. DONGGI SENORO LNG	MEMENUHI SYARAT
18	ERICK LEE	PT. DONGGI SENORO LNG	MEMENUHI SYARAT
19	BAMBANG JIWANTORO	PT. PAITON OPERATION MAINTENANCE INDONESIA	MEMENUHI SYARAT
20	NASIRUDDIN	PT. PAITON OPERATION MAINTENANCE INDONESIA	MEMENUHI SYARAT
21	M. SAPARUDDIN SYAH	PT. JAYA SAKTI MANDIRI UNGGUL	MEMENUHI SYARAT
22	ISWANTORO SUMEDI	PT. SIGAP PRIMA ASTREA	MEMENUHI SYARAT
23	SUBHAN ROHIMI	PT. SIGAP PRIMA ASTREA	MEMENUHI SYARAT
24	RAHMAT SUJARWADI	PT. PLN UPK SEBALANG	MEMENUHI SYARAT
25	HENRY WEDDIASMARA	PT. PERTAMINA HULU MAHKAM	MEMENUHI SYARAT
26	RIFATUL MUFIANAH ST	PT. PETROKIMIA GRESIK	MEMENUHI SYARAT
27	DWI SUHADI AO	PT. PETROKIMIA GRESIK	MEMENUHI SYARAT
28	FIRMAN HARIANSYAH	PT. PETROKIMIA GRESIK	MEMENUHI SYARAT
29	UJANG SURYANA	PT. PETROKIMIA GRESIK	MEMENUHI SYARAT
30	KHAIRUL ANSORI DAULAY. ST	PLN UIKSBU SUMBAGUT	MEMENUHI SYARAT
31	TRIO SURYONO	PLN DUREN TIGA	MEMENUHI SYARAT

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
32	TYASTI LIDYA NOVITRIANI.S.SOS	PT.PRAGAS GADATAMA	MEMENUHI SYARAT
33	ALI RIDHO.ST.MT	PT.PRAGAS GADATAMA	MEMENUHI SYARAT
34	DRS HARYADI FITRI, MM	PT.KOPSRI PALEMBANG	MEMENUHI SYARAT
35	DRS. H.ARDI RUDANTO.MBA	PT.PANGLIMA SIAGA BANGSA	MEMENUHI SYARAT
36	MURTIADI	PT.CIKARANG LESTARINDO	MEMENUHI SYARAT
37	ATLAS BUDI	PT. BATHARA GLOBAL NUSANTARA	MEMENUHI SYARAT
38	HARIS EKO SUSANTO	PT. WASKITA KARYA	MEMENUHI SYARAT
39	BATARA JADI A PANE	PT. WASKITA KARYA	MEMENUHI SYARAT
40	TEDDY IRJANTO	PT. WASKITA KARYA	MEMENUHI SYARAT
41	IMAM SUPRAJA	PT. WASKITA KARYA	MEMENUHI SYARAT
42	NURLAELA ROSDIYANA	ASTRA HEAD OFFICE	MEMENUHI SYARAT
43	DEWI HUMAIRA	ASTRA HEAD OFFICE	MEMENUHI SYARAT
44	DEVI WAHYUNI MUSTAKIM	PT. YANKA APRILINDO	MEMENUHI SYARAT
45	BARUNO SUBROTO	PT.PERTAMINA HULU KALIMANTAN TIMUR	MEMENUHI SYARAT
46	RIYAN HAikal	PT.PUPUK ISKANDAR MUDA	MEMENUHI SYARAT
47	ACHMAD EFFENDI	PT.PUPUK KUJANG	MEMENUHI SYARAT
48	MUKHLIS	PT.PUPUK KUJANG	MEMENUHI SYARAT
49	BOBBY ADHI GAUTAMA.ST	PT.SAHABAT MANDIRI KESATRIA	MEMENUHI SYARAT
50	ARHIZA RIZKI FITRIANTO	PT.JAYA SAKTI MANDIRI UNGGUL	MEMENUHI SYARAT
51	MUSTHafa HASAN ALBANA	PT.CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK	MEMENUHI SYARAT
52	BANGUN SIREGAR	PT.CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK	MEMENUHI SYARAT
53	MARCEL GLEN LONDONG	PT.GEBEHA KYUBIN ABADI	MEMENUHI SYARAT
54	SEMIYONO	PT.PANGLIMA SIAGA BANGSA	<b>TIDAK MEMENUHI SYARAT</b>
55	NUR SAHID	PT.PUPUK KALIMATAN TIMUR	<b>TIDAK HADIR</b>
56	SUNARDI	PT.PUPUK KALIMATAN TIMUR	<b>TIDAK HADIR</b>